LAPORAN TAHUNAN
BADAN KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2018

KEMENTERIAN PERTANIAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya Badan Ketahanan Pangan telah melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun 2018. Untuk memberi gambaran pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2018, maka disusun Laporan Badan Ketahanan Pangan. Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan merupakan salah satu pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan untuk mendukung peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan.

Secara garis besar Laporan Tahunan ini menyajikan berbagai capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan sepanjang tahun 2018, sekaligus permasalahan, kendala serta upaya perbaikan dalam rangka peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas tersusunnya laporan tahunan ini. Saran perbaikan sangat diharapkan untuk perbaikan kinerja Badan Ketahanan Pangan.

Akhir kata semoga Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2018 ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan.

Kepala Badan Ketahanan Pangan,

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KETAHANAN PANGAN

Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng
Nip.196108021989031011

Scanned by CamScanner

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

BAB

I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud 3

1.3 Tujuan 3

II VISI, MISI DAN TUJUAN BADAN KETAHANAN PANGAN 4

2.1 Visi 4

2.2 Misi 4

2.3 Tujuan Strategis 4

2.4 Tugas dan Fungsi 5

2.5 Sasaran Strategi 5

2.6 Strategi Badan Ketahanan Pangan 6

2.7 Struktur Organisasi 6

III CAPAIAN KINERJA KEGIATAN 11

3.1 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 11

3.1.1 Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 11

a. Bimbingan teknis SKPG..... 11

b. FGD *Prevalence of Undernourishment* (*PoU*) 12

c. Penyusunan Angka Rawan Pangan Sementara (ARP Sementara) Tahun 2018..... 15

d. FGD Penyusunan Indikator Isyarat Dini Bulanan dan Prediksi Bulan Ke Depan..... 16

e. Penyusunan Buku ARP Tahunan..... 17

f. Penyusunan SKPG Nasional 18

3.1.2 Mitigasi Kerawanan Pangan Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan 20

a. Sosialisasi Kawasan Mandiri Pangan..... 21

b. Apresiasi Kawasan Mandri Pangan 22

c. Workshop evaluasi Kawasan Mandri Pangan 23

d. Pelaksanaan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan tahun 2018 26

3.1.3 Neraca Bahan Makanan (NBM) Nasional 28

3.1.4 Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)..... 33

3.1.5 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 37

3.1.6 Monitoring Penggilingan 44

a. Stok gabah dan beras di penggilingan kapasitas besar 53

b. Stok gabah dan beras di penggilingan kapasitas sedang..... 53

c. Stok gabah dan beras di penggilingan kapasitas kecil..... 54

3.1.7 Smallholder Livelihood Development In Eastern Indonesia (SOLID) 56

3.2 Distribusi dan Cadangan Pangan 57

3.2.1 Koefisien harga komoditas pertanian strategis di tingkat produsen 57

a. Koefisien variasi harga gabah kering panen..... 58

b. Koefisien variasi harga jagung pipilan kering..... 59

c. Koefisien variasi harga kedelai biji kering..... 59

d.	Koefisien variasi harga bawang merah.....	59
e.	Koefisien variasi harga cabai merah keriting.....	59
3.2.2	Koefisien harga komoditas pertanian strategis di tingkat konsumen	60
a.	Koefisien variasi harga beras medium	61
b.	Koefisien variasi harga jagung pipilan kering.....	61
c.	Koefisien variasi harga kedelai biji kering.....	61
d.	Koefisien variasi harga gula pasir.....	61
e.	Koefisien variasi harga bawang merah.....	62
f.	Koefisien variasi harga cabai merah keriting.....	62
g.	Koefisien variasi harga daging sapi.....	62
3.2.3	Dukungan instansi penunjang keberhasilan.....	63
3.2.4	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia.....	64
3.2.5	Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah pusat.....	69
3.2.6	Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah daerah	72
3.2.7	Penyusunan permentan tentang pengelolaan cadangan beras pemerintah.....	76
3.2.8	Penyusunan Peraturan Presiden tentang ratifikasi amandemen perjanjian ASEAN *Plus Three Emergency Rice Reserve* (APTERR).....	77
3.2.9	Identifikasi Lumbung Pangan Masyarakat	78

	3.2.10	Penyusunan Konsep Pengambangan LPM yang difasilitasi melalui DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2019	79
	3.2.11	Laporan Hasil Data dan Informasi Pasokan dan Harga Pangan Strategis	81
	3.2.12	Penyusunan prognosa neraca pangan	85
	3.2.13	Kajian distibusi pangan	88
	1)	Saluran Dan Marjin Pemasaran Beras Dari Produsen Ke Konsumen Berdasarkan Musim: Kasus Propinsi Jawa Barat	88
	2)	Kajian Pemasaran Beras di Negara ASEAN dan Perkembangan Alternatif Pemasaran Beras di Indonesia	96
3.3	Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan		111
	3.3.1	Kawasan Rumah Pangan Lestari	111
	3.3.2	Pengembangan Pangan Pokok Lokal (P3L)	117
	3.3.3	Analisa konsumsi pangan	119
	1	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Pengembangan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dan Analisis Konsumsi Pangan Tahun 2018.....	119
	2.	Penyusunan Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan Tahun 2018	121
	3.3.4	Keamanan pangan segar.....	122

IV DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA 127

4.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia 127

4.2 Realisasi anggaran Badan Ketahanan Pangan 136

4.3 Regulasi 138

4.4 Dewan Ketahanan Pangan..... 142

V DUKUNGAN KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL..... 144

5.1 Serapan Gabah Petani (SERGAP)..... 144

5.1.1 Latar belakang 144

5.1.2 Gugus tugas sergap..... 145

5.1.3 Rapat dan koordinasi di lapangan 146

5.1.4 Kendala 155

5.1.5 Kebijakan 156

5.1.6 Pelaksanaan kegiatan sergap 157

5.1.7 Cadangan beras pemerintah 163

5.1.8 Pembelian Gabah di Luar Kualitas dan Pembelian Gabah/Beras dengan Fleksibilitas Oleh Perum BULOG ... 163

5.2 Upaya Khusus peningkatan produksi Padi, Jagung, Kedelai (UPSUS PAJALE) 167

A. Perkembangan LTT padi, jagung dan kedelai 167

B. Pengembangan padi, benih jagung dan alsintan 171

C. Pengadaan alsintan 175

5.3 Program Bedah Kemiskinan Sejahtera (BEKERJA) 176

5.4 Stabilisasi harga dan pasokan menjelang HBKN 185

5.4.1 Propinsi Kalimantan Barat 185

5.4.2 Propinsi Nusa Tenggara Timur 187

5.4.3 Propinsi Sulawesi Utara 187

5.4.2 Propinsi Jawa Tengah 188

5.5 Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) XXXVIII TAHUN 2018.. 189

5.6 Gelar Pangan Nusantara 192

VI SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2018..... 201

A. Struktur organisasi SPI 201

B. Pelaksanaan SPI di lingkup Badan Ketahanan Pangan 202

VII PERMASALAHAN, KENDALA, UPAYA DAN TINDAK LANJUT..... 218

1 Permasalahan.....

1.1 Aspek ketersediaan pangan 218

1.2 Aspek keterjangkauan pangan 219

1.3 Aspek konsumsi pangan 219

1.4 Dukungan kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan 220

2 Hambatan dan kendala 220

3 Upaya dan tindak lanjut 221

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1	Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.....	7
Gambar 2	Struktur Organisasi Eselon II BKP Sekretariat Badan.....	7
Gambar 3	Struktur Organisasi Eselon II BKP Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.....	8
Gambar 4	Struktur Organisasi Eselon II BKP Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan.....	8
Gambar 5	Struktur Organisasi Eselon II BKP Pusat Penganekaragaman Konsumsi Pangan.....	9
Gambar 6	Pejabat Eselon I dan Eselon II Badan Ketahanan Pangan s.d Desember 2017- November 2018.....	9
Gambar 7	Pejabat Eselon I dan Eselon II Badan Ketahanan Pangan November- Desember 2018.....	10
Gambar 8	Stok setara beras di penggilingan pada bulan Maret-Desember 2018.....	52
Gambar 9	Stok setara beras di penggilingan kapasitas besar pada bulan Maret – Desember 2018.....	53
Gambar 10	Stok setara beras di penggilingan kapasitas sedang pada bulan Maret – Desember 2018.....	54
Gambar 11	Stok gabah dan beras di penggilingan kapasitas kecil bulan Maret – Desember 2018.....	55
Gambar 12	Presentase stok setara beras di penggilingan terhadap produksi beras bulan Maret – Desember 2018.....	56
Gambar 13	Pengadaan Beras, Bawang Merah Per Bulan 2018.....	68
Gambar 14	Persentase Jumlah Gapoktan Yang Menyalurkan Komoditas Pangan Melalui TTIC.....	69
Gambar 15	Peta asal beras PT. Food Station.....	91
Gambar 16	Peta penjualan beras PT. Food Station.....	92
Gambar 17	Pemasukan dan Pengeluaran Pasokan Beras di PBIC periode 1 Januari 2015- 6 Juli 2018.....	93
Gambar 18	Saluran pemasaran beras di lokasi sampe.....	93
Gambar 19	Kontribusi Masing-Masing Penggilingan Berdasarkan Skala terhadap Total Stok Beras.....	95

Gambar 20	Alur pemasaran beras di Thailand.....	98
Gambar 21	Peran BERNAS dalam industry beras Malaysia.....	99
Gambar 22	Alur pemasaran beras di Vietnam.....	100
Gambar 23	Salur pemasaran beras di Filipina.....	101
Gambar 24	Sistem pemasaran beras di Jepang.....	102
Gambar 25	Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Pengembangan Konsumsi Pangan B2SA dan Analisis Konsumsi Pangan Tahun 2018.....	121
Gambar 26	Alur koordinasi serapan gabah.....	147
Gambar 27	Realisasi Pengadaan beras bulog vs harga beras medium ditingkat penggilingan tahun 2017.....	166

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1	Perkembangan jumlah penduduk rawan pangan tahun 2014 – 2018 per provinsi.....	18
Tabel 2	Hasil evaluasi kawasan mandiri pangan.....	25
Tabel 3	Pelaksanaan kawasan mandiri pangan 2018.....	26
Tabel 4	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Tahun 2015-2018.....	33
Tabel 5	Peringkat dan skor Indeks Ketahanan Pangan kabupaten tahun 2018.....	39
Tabel 6	Peringkat dan skor Indeks Ketahanan Pangan kota tahun 2018.....	43
Tabel 7	Jumlah sampel per propinsi berdasarkan kapasitas penggilingan.....	50
Tabel 8	Persentase jumlah laporan masuk per provinsi bulan Maret–Desember 2018.....	51
Tabel 9	Perkembangan Harga dan Nilai Koefisien Variasi Harga Pangan Tingkat Produsen Tahun 2018.....	60
Tabel 10	Perkembangan Harga dan Nilai Koefisien Variasi Harga Pangan Tingkat Konsumen Tahun 2018.....	63
Tabel 11	Target dan Realisasi Banper Kegiatan PUPM/TTI tahun 2018.....	66
Tabel 12	Pemanfaatan Dana Modal Gapoktan yang bersumber dari Banper.....	66
Tabel 13	Jumlah pengadaan komoditas pangan dari LUPM yang diterima TTIC.....	68
Tabel 14	Jumlah Gapoktan LUPM yang melakukan pasokan komoditas pangan ke TTIC.....	69
Tabel 15	Perkembangan Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2015 – 2018.....	70
Tabel 16	Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Provinsi Tahun 2016 – 2018.....	73
Tabel 17	Simulasi Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Provinsi Tahun 2018.....	74
Tabel 18	Perkembangan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tahun 2018.....	75

Tabel 19	Pelaksanaan Kegiatan Laporan Data/Informasi Pasokan dan Harga Pangan Provinsi Tahun 2015-2018.....	82
Tabel 20	Lokasi dan Jumlah Petugas Enumerator Pelaksana Kegiatan Panel Harga Pangan Tahun 2015 – 2018.....	82
Tabel 21	Perkembangan Kegiatan Panel Harga Pangan Tahun 2015–2018 Tahun 2013.....	84
Tabel 22	Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Tahun 2018.....	86
Tabel 23	Pemasaran Beras Secara Online di Indonesia.....	104
.		
Tabel 24	Harga beras di pemasaran online.....	106
Tabel 25	E-Commerce di Jepang.....	109
Tabel 26	Rekapitulasi pencairan anggaran banper tahun 2018.....	112
Tabel 27	Realisasi fisik kegiatan KRPL tahun 2018.....	115
Tabel 28	Realiasasi anggaran banper kegiatan P3L tahun 2018.....	118
Tabel 29	Komoditas yang dikembangkan dalam P3L tahun 2018.....	119
Tabel 30	Capaian sertifikasi prima	123
Tabel 31	Capaian registrasi PSAT maupun rumah kemas.....	124
Tabel 32	Hasil monitoring PSAT tahun 2018.....	125
Tabel 33	Jumlah Pegawai Badan Ketahanan Pangan, Menurut Golongan Ruang (Kondisi Desember 2018).....	128
Tabel 34	Jumlah Pegawai Badan Ketahanan Pangan, Menurut Golongan Pendidikan Akhir (Kondisi Desember 2018).....	128
Tabel 35	Jumlah pegawai yang telah memiliki jabatan fungsional.....	131
Tabel 36	Usulan kebutuhan PNS Badan Ketahanan Pangan tahun 2018.....	133
Tabel 37	Target serapan gabah harian per kabupaten.....	148
Tabel 38	Perkembangan harga GKP petani dan laju penurunan.....	164
Tabel 39	Pengadaan setara beras 2015-2017.....	167
Tabel 40	Target dan Realisasi LTT padi bulan januari - Juni 2018.....	168
Tabel 41	Target dan Realisasi LTT Padi bulan januari – juni 2017.....	168

Tabel 42	Target dan Realisasi LTT Jagung bulan januari – juni 2018	169
Tabel 43	Target dan Realisasi LTT Jagung bulan januari – juni 2017.....	170
Tabel 44	Target dan Realisasi LTT Kedelai bulan januari – juni 2018.....	170
Tabel 45	Target dan Realisasi LTT Kedelai bulan januari – juni 2017.....	171
Tabel 46	Sasaran dan Penyaluran benih padi hidrida tahun 2018.....	172
Tabel 47	Sasaran dan Penyaluran benih padi ladang tahun 2018.....	173
Tabel 48	Sasaran dan Penyaluran benih mina padi dan padi khusus tahun 2018.....	175
Tabel 49	Sasaran dan Penyaluran benih Jagung tahun 2018.....	175
Tabel 50	Pengadaaan dan Penyaluran Alsintan.....	176
Tabel 51	Penerimaan Manfaat bantuan program bekerja prov banten.....	178
Tabel 52	Jenis dan Jumlah Bantuan Program Bekerja Prov Banten.....	180
Tabel 53	Jumlah Bantuan Program Bekerja Per RTM di Prov Banten	181
Tabel 54	Realisasi Penyaluran Bantuan program bekerja prov banten.....	182
Tabel 55	Perkembangan kegiatan berkerja berdasarkan pelaporan sampai dengan tanggal 27 desember 2018.....	183
Tabel 56	Hasil Produksi Bantuan Kegiatan Bekerja Berdasarkan Pelaporan sampai dengan tanggal 27 Desember 2018.....	185

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kedaulatan Pangan merupakan salah satu agenda penting pembangunan nasional. Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 bahwa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik adalah melalui peningkatan kedaulatan pangan. Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-2019 adalah pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Pada masa pemerintahan saat ini, Presiden Joko Widodo sedang menggalakkan program swasembada pangan. 3 (tiga) tahun kedepan diharapkan Indonesia mampu berswasembada pangan dan tidak tergantung dengan impor dari negara lain. Kedaulatan pangan harus terlebih dahulu dicapai sebelum mewujudkan ketahanan pangan. Diharapkan 3 (tiga) tahun kedepan, Indonesia akan mencapai swasembada pangan atau memiliki ketahanan pangan yang kuat.

Upaya mewujudkan kedaulatan pangan adalah agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan berkesinambungan, berdasarkan Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, maka implementasi pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan 3 (tiga) komponen utama yang harus dipenuhi, yaitu: (1) Ketersediaan pangan yang cukup dan merata; (2) Keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien; serta (3) Konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang. Ketiga komponen tersebut dapat diwujudkan sampai tingkat rumah tangga, apabila: (1) Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang beragam untuk peningkatan ketersediaan pangan; (2) Melaksanakan diversifikasi pangan untuk mendorong

konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman; (3) Menjamin pasokan pangan ke seluruh wilayah dan terjangkau oleh masyarakat; (4) Memanfaatkan pasar pangan internasional secara bijaksana bagi pemenuhan konsumen yang beragam; serta (5) Memberikan jaminan bagi masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan dalam mengakses pangan yang bersifat pokok.

Badan Ketahanan Pangan (BKP) berupaya mewujudkan ketahanan pangan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, BKP sebagai salah satu unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian memiliki tugas: ***"Melaksanakan pengkajian, pengembangan, dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan***.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, BKP melaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, mencakup 4 (empat) kegiatan utama yaitu: (1) Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan; (2) Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan; (3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar; (4) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada BKP. Keempat kegiatan utama tersebut pada dasarnya untuk melanjutkan kegiatan sebelumnya, dengan penyempurnaan dan pemantapan secara terpadu dan terkoordinasi, yaitu: (1) Pengembangan desa mandiri pangan di daerah miskin dan rawan pangan; (2) Penanganan kerawanan pangan transien dan kronis; (3) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI); (4) Pemberdayaan cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah; (5) Diversifikasi Pangan; (6) Stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen melalui Toko Tani Indonesia.

BKP sebagai institusi yang menangani ketahanan pangan, terus mendorong upaya pemantapan ketahanan pangan melalui pengembangan berbagai model pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat diantaranya: Desa Mandiri Pangan/Kawasan Mandiri Pangan, Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia (PUPM-TTI), Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM), Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), dan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Program dan kegiatan strategis BKP tahun 2015 - 2019 akan dilaksanakan di 34 Provinsi dan sekitar 513 kabupaten/kota, antara lain: (1) Percepatan Penganekaragaman konsumsi

pangan; (2) Peningkatan Pengawasan Pangan Segar; (3) Toko Tani Indonesia (TTI); (4) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM); (5) Penguatan Kapasitas Cadangan Pangan Masyarakat dan Pemerintah; (6) Penguatan Kapasitas Cadangan Pangan Masyarakat dan Pemerintah; (7) Penanganan Kerawanan Pangan.

Dalam rangka menjaga stabilisasi harga, sejak tahun 2016 BKP mengembangkan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia. Selain itu, BKP juga melaksanakan berbagai kegiatan pengkajian dan analisis ketahanan pangan diantaranya: Analisis Ketersediaan Pangan, Analisis Situasi Akses Pangan, Analisis Ketersediaan dan kebutuhan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), serta melakukan pengembangan instrumen sistem deteksi dini rawan pangan melalui penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Peta FSVA) dan Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).

Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2018, maka diperlukan Laporan Tahunan BKP sebagai bahan informasi kepada publik.

Laporan Tahunan ini secara garis besar memberikan informasi secara umum gambaran tentang capaian program dan kegiatan ketahanan pangan selama tahun anggaran 2017 yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan di tahun tahun berikutnya.

1.2. Maksud

Laporan Tahunan BKP tahun 2018 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran BKP Kementerian Pertanian kepada Menteri Pertanian selaku pimpinan tertinggi Kementerian Pertanian.

1.3. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan tahun 2018 adalah untuk :

a. Memberikan informasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Ketahanan Pangan.

b. Memberikan informasi tentang capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan tahun 2018.

c. Mengetahui permasalahan dan alternatif penyelesaian sebagai upaya perbaikan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran ketahanan pangan.

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN BADAN KETAHANAN PANGAN

2.1 Visi

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi adalah suatu harapan dan tujuan yang akan dicapai, dalam mencapai visi tersebut memerlukan waktu yang panjang dan kerja keras, karena akan berkembang sesuai dengan kondisi pembangunan ketahanan pangan. Untuk itu, Badan Ketahanan Pangan mempunyai visi tahun 2015 - 2019, yaitu:

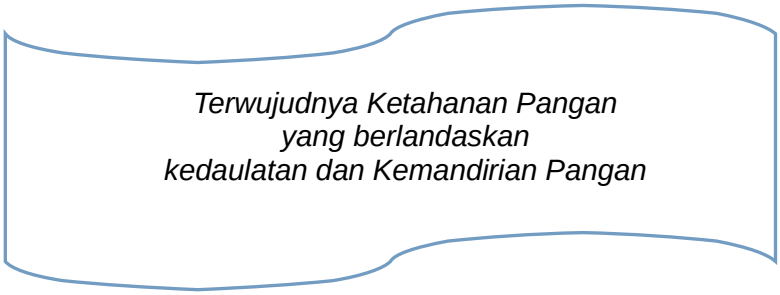

2.2 Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, BKP menetapkan misi, tahun 2015 - 2019 sebagai berikut :

a. Memantapkan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
b. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan;
c. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
d. Mewujudkan pangan segar yang aman dan bermutu.

2.3 Tujuan Strategis

Tujuan program BKP dalah:

a. Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal.
b. Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan;
c. Memperkuat sistem distribusi pangan;
d. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal;
e. Meningkatkan penanganan keamanan dan mutu pangan segar.

2.4 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. BKP mempunyai tugas ***"menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan"***. Pelaksanaan tugas diselenggarakan secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam melaksanakan tugas, BKP menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi,pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantauan dan pemantapan di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar;

b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar;

c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganekaragaman konsumsi pangan. dan peningkatan keamanan pangan segar;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar;

e. Pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2.5 Sasaran Strategis

Sasaran strategis pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan tahun 2015 - 2019 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam;
b. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan;
c. Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen;
d. Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat;
e. Meningkatnya pangan segar yang aman dan bermutu.

2.6 Strategi Badan Ketahanan Pangan

Arah kebijakan pemantapan ketahanan pangan dilakukan dengan 5 (lima) strategi utama, meliputi:

1. Memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk (a) meningkatkan kapasitas produksi pangan domestik; (b) menyediakan lapangan kerja; (c) meningkatkan pendapatan masyarakat;
2. Pemenuhan pangan bagi kelompok masyarakat terutama masyarakat miskin kronis dan transien (akibat bencana alam, sosial dan ekonomi) melalui pendistribusian bantuan pangan;
3. Pemberdayaan masyarakat supaya mampu memanfaatkan pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumberdaya lokal;
4. Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumberdaya lokal;
5. Penanganan keamanan dan mutu pangan segar.

2.7 Struktur organisasi

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari BKP didukung oleh 4 (empat) Eselon II dengan struktur organisasi, sebagai berikut:

a. **Sekretariat Badan**, bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

b. **Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan**, bertugas melaksanakan koordinasi pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan dan penurunan kerawanan pangan.

c. **Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan**, bertugas melaksanakan koordinasi pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang distribusi dan cadangan pangan.

d. **Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**, bertugas melaksanakan koordinasi pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan segar.

Gambar 1. Struktur Organisasi BKP Kementerian Pertanian

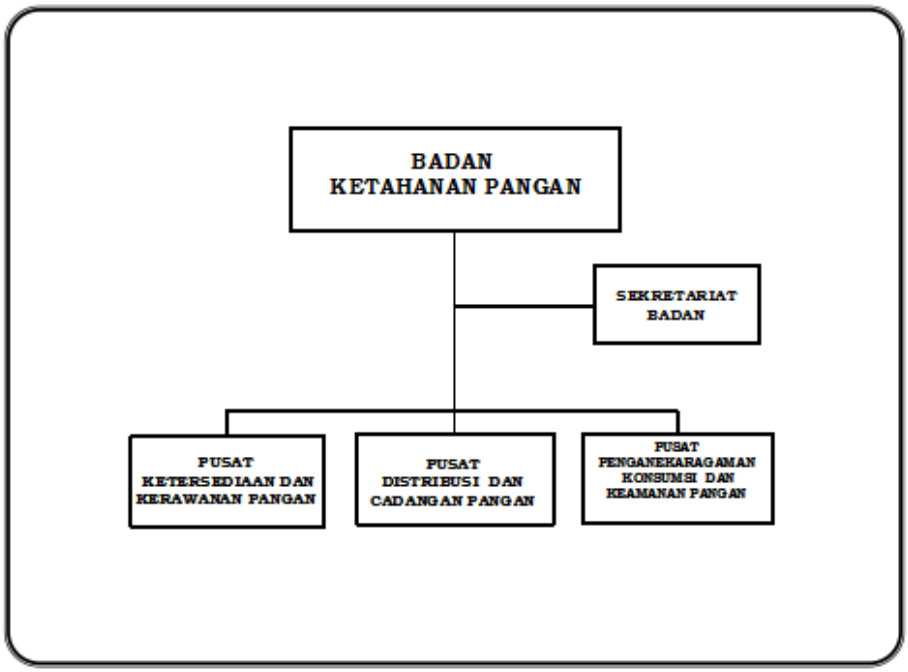

Gambar 2. Struktur Organisasi Eselon II BKP Sekretariat Badan

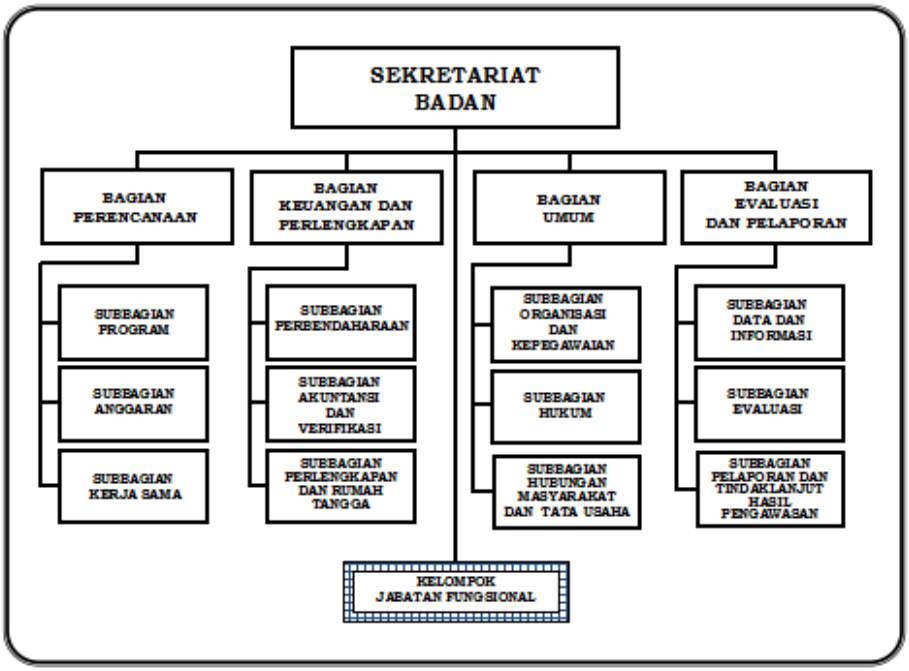

Gambar 3. Struktur Organisasi Eselon II BKP Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

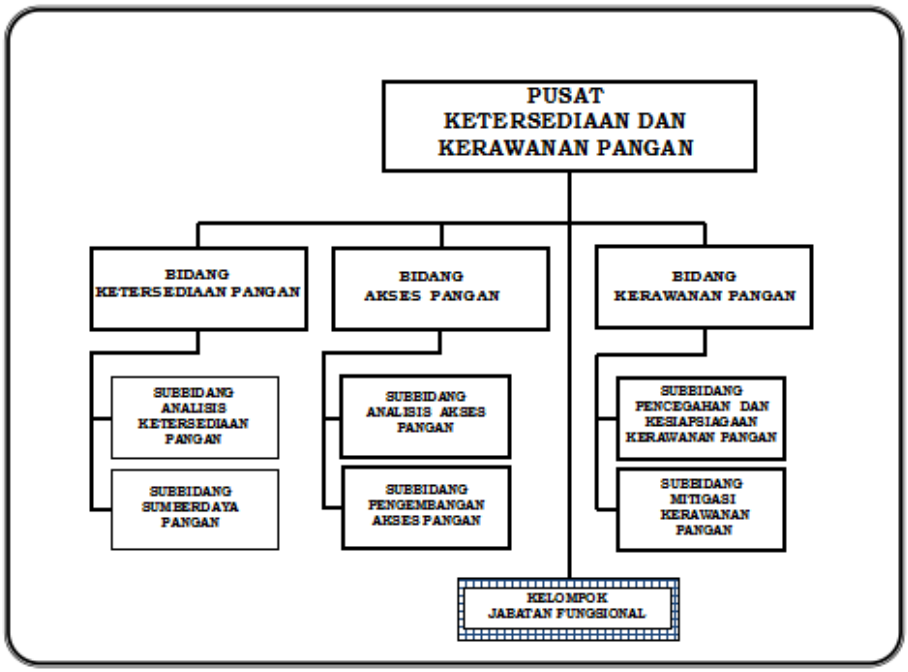

Gambar 4. Struktur Organisasi Eselon II BKP Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan

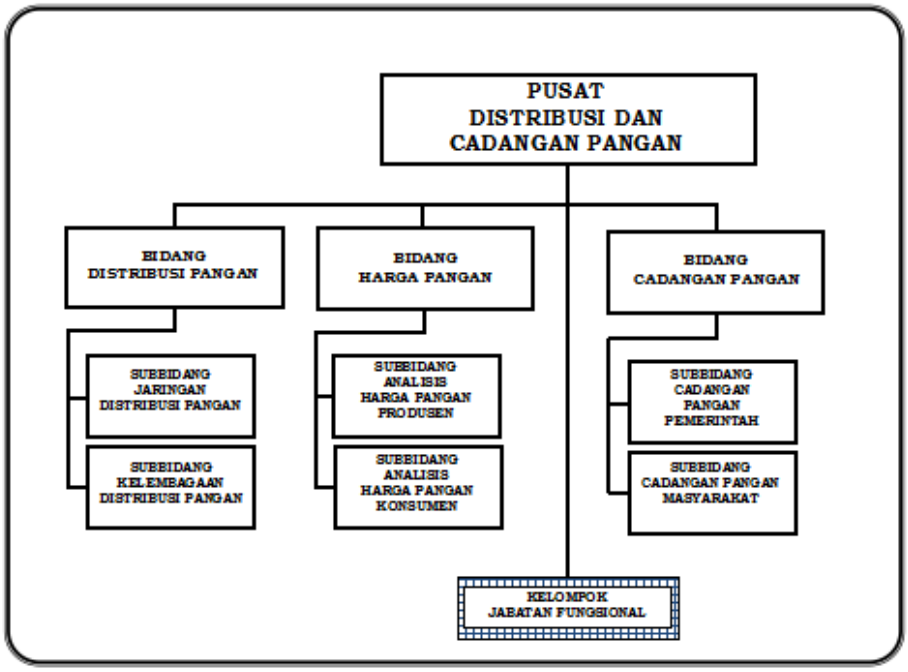

Gambar 5. Struktur Organisasi Eselon II BKP
Pusat Penganekaragaman Konsumsi Pangan

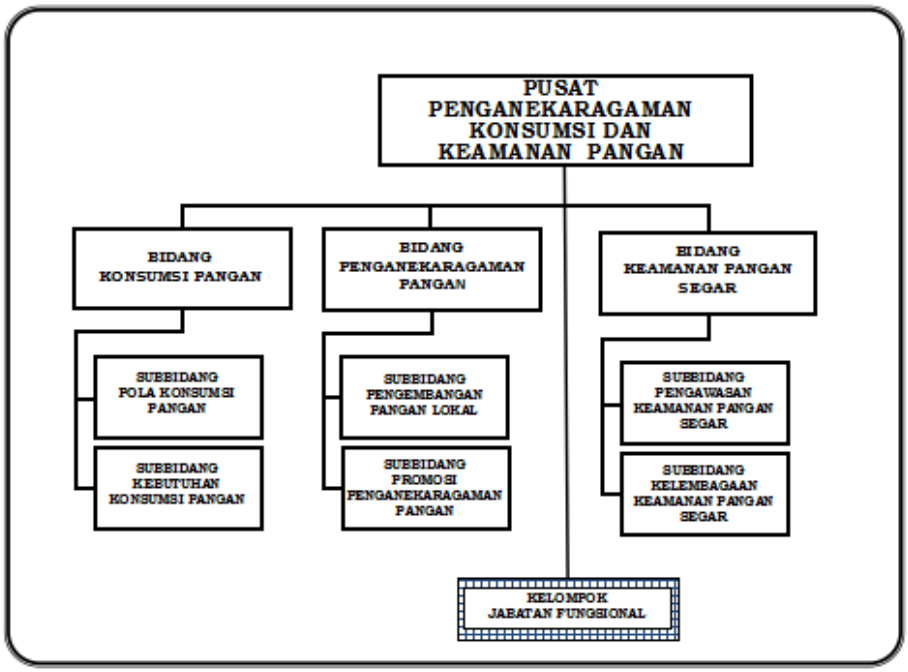

Gambar 6. Pejabat Eselon I dan Eselon II BKP
Desember 2017 – November 2018

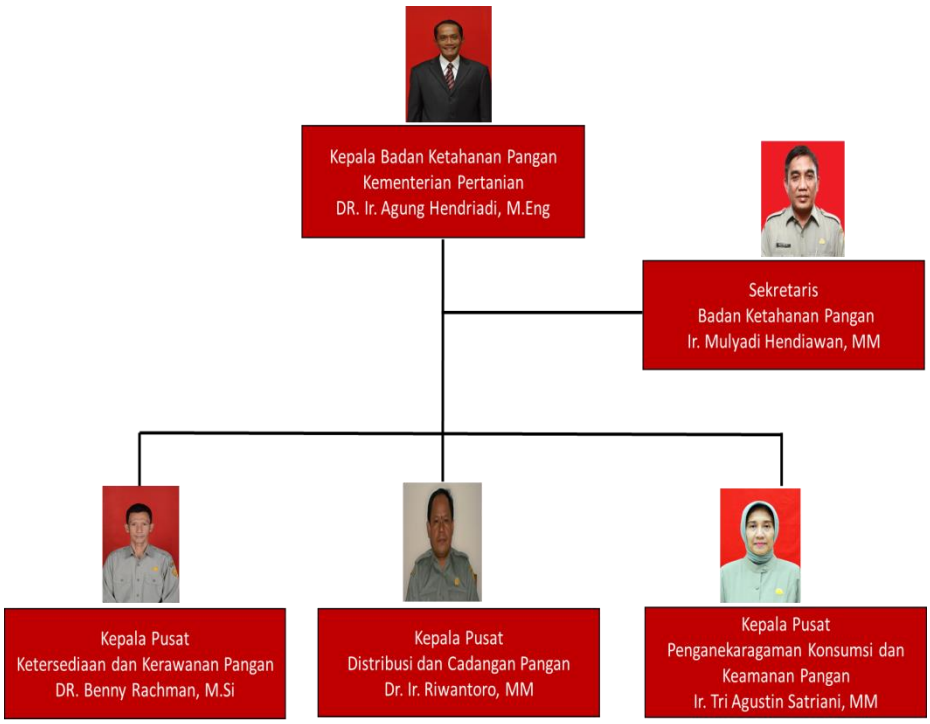

Pada bulan November 2018 terjadi perubahan struktur organisasi BKP yaitu : mutasi Ir. Mulyadi Hendiawan, MM digantikan oleh Dr. Ir. Riwantoro, MM sebagai Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan posisi Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan diisi oleh Prof. Dr. Ir. Risfaheri, MSc berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 780/Kpts/KP.230/11/2018 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Dr. Drs. Benny Rachman, M.Si berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 725/Kpts/KP.240/10/2018 tentang Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Peneliti diberhentikan dengan hormat dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan menjadi Fungsional Peneliti Ahli Utama pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Sekretariat Jenderal.

Gambar 7. Pejabat Eselon I dan Eselon II BKP
November – Desember 2018

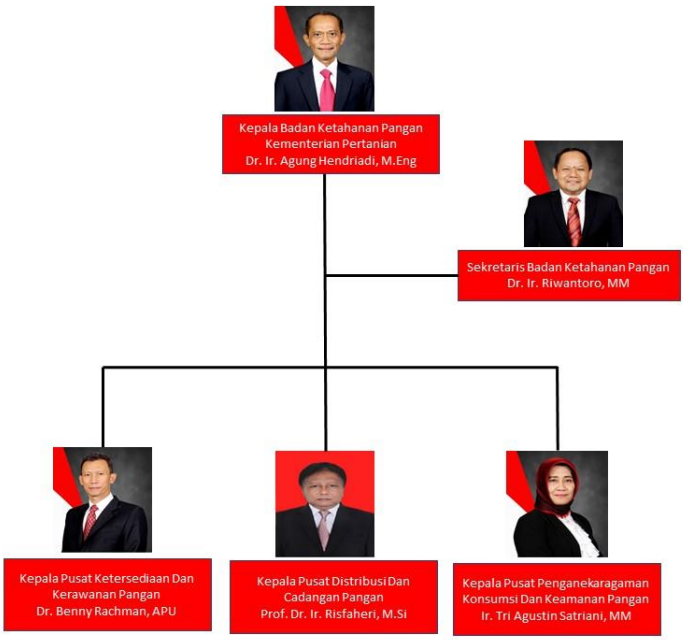

BAB III
CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

3.1 KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

3.1.1. SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI

Dalam rangka mendeteksi secara dini situasi pangan dan gizi suatu wilayah diperlukan monitoring secara rutin.Salah satu alat yang digunakan adalah melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). SKPG merupakan instrument/alat deteksi dini terhadap situasi pangan dan gizi suatu wilayah secara teratur dan terus menerus yang bertujuan untuk menyediakan informasi dan rekomendasi ketahanan pangan dan gizi.

SKPG diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman SKPG. Kegiatan SKPG terdiri dari analisis data situasi pangan dan gizi bulanan dan tahunan serta penyebaran informasi. Analisis bulanan untuk aspek ketersediaan pangan menggunakan data luas tanam dan puso komoditas pangan utama sumber karbohidrat pada tahun berjalan dibandingkan dengan rata-rata data tersebut dalam lima tahun terakhir. Untuk aspek akses pangan, data yang dikumpulkan yaitu data komoditas harga pangan utama dan strategis pada bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata data tersebut selama tiga bulan terakhir. Untuk aspek pemanfaatan pangan digunakan pendekatan melalui data status gizi balita pada bulan berjalan. Sedangkan untuk analisis tahunan merupakan akumulasi analisis bulanan yang menguraikan aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan.

Kegiatan SKPG di tingkat Pusat meliputi : Bimbingan Teknis SKPG, FGD *Prevalence of Undernourishment* (PoU), Penyusunan Angka Rawan Pangan (ARP) Tahun 2018 (Sementara), Laporan Penyusunan Buku ARP Tahunan dan Penyusunan SKPG Nasional.

a. Bimbingan Teknis SKPG

Tujuan Bimtek SKPG adalah: 1) Membangun kesamaan persepsi dan sinergi aparat daerah sehingga mampu meningkatkan pemahaman dan kemampuan pejabat/aparat dalam menganalisis situasi pangan dan gizi.

Materi yang disampaikan pada Bimtek Analisis SKPG ini adalah: 1) Pengertian dan Tahapan dalam pelaksanaan SKPG; 2) Aplikasi SKPG berbasis web; 3) Pratek Penyusunan SKPG berbasis web dan manual; 4) Penyusunan Peta SKPG; 5)

Penyusunan Laporan SKPG.

Rencana tindak lanjut Bimtek disepakati sebagai berikut:

1) Membentuk Tim SKPG dengan melibatkan instansi lintas sektor dalam rangka mempermudah koordinasi dan validasi data dari berbagai instansi lintas sektor terkait yang terdiri dari Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan dan BPS.
2) Menyediakan dan mengoptimalkan koneksi internet dalam mengeoprasionalkan penyusunan dan analisis SKPG berbasis web.
3) Memanfaatkan hasil analisis SKPG sebagai bahan perumusan kebijakan dan diharapkan distribusikan kepada seluruh OPD terkait sehingga dapat menjadi alat informasi untuk menjadi salah satu dasar penanganan kerawanan pangan.
4) Dinas Ketahanan Pangan Propinsi diharapkan melaksanakan bimbingan teknis kepada aparat Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pemahaman aparat dalam melaksanakan analisis SKPG.
5) Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan dapat memfasilitasi kegiatan analisis SKPG daerah dalam bentuk dukungan alokasi anggaran APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
6) Menyampaikan hasil analisis SKPG secara bulanan dan berjenjang kepada Badan Ketahanan Pangan Pusat cq. Bidang Kerawanan Pangan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang dapat dilakukan melalui upload laporan pada web skpg.bkp.pertanian.go.id atau melalui email pelaporanskpg@gmail.com.
7) Melakukan koordinasi lintas sektor untuk memperbaiki indikator yang digunakan dalam analisis SKPG dan perbaikan terhadap aplikasi berbasis web sehingga memberikan kemudahan bagi aparat pelaksana SKPG dalam melakukan analisis dan pelaporan secara cepat dan tepat.
8) Melakukan evaluasi terhadap hasil analisis SKPG yang disusun oleh Provinsi dan Kabupaten/kota.
9) Memfasilitasi pertemuan tingkat nasional untuk menyamakan persepsi antara pusat, provinsi dan kabupaten, meningkatkan pemahaman serta kemampuan aparat dalam melaksanakan analisis SKPG.

b. FGD *Prevalence of Undernourishment* (*PoU*)

Masalah rawan pangan di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh rendahnya produksi pangan tetapi juga disebabkan bagaimana akses dan pemanfaatan

masyarakat terhadap pangan itu sendiri. Rawan pangan dan gizi pada dasarnya merupakan refleksi dari situasi ketidakcukupan pangan dan gizi individu pada masyarakat di suatu wilayah sebagai dampak ketidakmampuan untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan.

Berbagai permasalahan tersebut harus kita waspadai sebelum terjadinya kerawanan pangan. Kasus rawan pangan dan gizi banyak dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, karena itu kegagalan produksi dan fluktuasi harga pangan perlu diwaspadai agar tidak menjadi penyebab terjadinya kerawanan pangan.

Dalam hal perkembangan penduduk rawan pangan, BKP telah melakukan perhitungan persentase penduduk rawan pangan sejak tahun 2011 bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data dasar yang digunakan adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Perhitungan penduduk rawan pangan dihitung dari kecukupan konsumsi kalori perkapita perhari kurang atau lebih kecil dari 70 persen dari AKG dengan nilai AKG 2000 kkal/kapita/hari.

Pada tahun 2017 telah dilakukan upaya penyempurnaan perhitungan penduduk rawan pangan dengan metode PoU/prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi/*Minimum Dietary Energy Requirement* (MDER) untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif sesuai dengan tinggi badan menurut umur, jenis kelamin serta konsumsi kalori. PoU merupakan metode perhitungan standar yang digunakan FAO.

Dalam rangka menginventarisir berbagai isu dan masalah kebijakan ketahanan pangan, yang terkait dengan ARP atau Angka Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) dan untuk mendapatkan pemahaman bersama terutama dari instansi yang menangani PoU antara lain BPS, Kementerian Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, dilaksanakan FGD hasil Perhitungan Angka PoU/Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tahun 2018, dengan rumusan sebagai berikut:

1) Ketidakcukupan konsumsi pangan/PoU merupakan salah satu indikator dari agenda pembangunan global pada kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs). Pada *Goals* 2, yaitu mengakhiri kelaparan pangan, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Target 2.1 pada *Goals* 2, diharapkan tahun 2030, mampu menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi

rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.

2) Metode PoU merupakan metode perhitungan standar yang digunakan FAO dan sudah secara luas digunakan oleh negara-negara lain untuk menghitung penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan (rawan pangan) sesuai dengan komitmen negara-negara di dunia dalam pencapaian SDGs.
3) Metode PoU pertama kali digunakan di Indonesia pada tahun 2017 yang merupakan penyempurnaan metode perhitungan Angka Rawan Pangan (ARP), dimana perhitungan ARP dihitung menggunakan data kecukupan konsumsi kalori perkapita perhari kurang dari 1.400 kkal/kapita/hari, sedangkan metode PoU dihitung berdasarkan kebutuhan riil konsumsi dalam rumah tangga kalori menurut tinggi badan, kelompok umur dan jenis kelamin.
4) Data pendukung yang digunakan untuk menghitung PoU antara lain:
   - Data populasi penduduk menurut umur dan jenis kelamin.
   - Data konsumsi kalori, didekati dengan menggunakan data konsumsi kalori perkapita hasil Susenas.
   - Data Pendapatan, didekati dengan menggunakan data Pengeluaran yang diperoleh dari hasil Susenas.
   - Data tinggi dan berat badan, didekati dengan menggunakan data median tinggi dan berat badan menurut umur dan jenis kelamin dari Balitbangkes.
5) Prosedur penghitungan PoU dengan menggunakan data Susenas yaitu:
   - Membuat piramida penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin.
   - Menghitung konsumsi kalori perkapita sehari.
   - Menghitung koefisien variasi dari data konsumsi kalori perkapita sehari.
   - Menghitung *Minimum Dietary Energy Requirement* (MDER) dan koefisien variasinya (CV). MDER dihitung dengan cara menghitung kebutuhan minimum kalori yang diperlukan seseorang sesuai dengan umur dan jenis kelaminnya.
   - Menghitung total koefisien variasi (CV). Total koefisien variasi dihitung dengan menjumlahkan koefisien variasi dan variabel pembentuknya.
   - Menghitung PoU, yaitu dengan membandingkan antara konsumsi kalori perkapita dengan MDER. Nilai PoU adalah banyaknya penduduk yang konsumsi kalorinya dibawah MDER.
6) Angka PoU tahun 2017 sebesar 7,91 persen, hal ini menunjukkan bahwa terdapat 7,91 persen penduduk Indonesia mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan berdasarkan minimum kalori yang dibutuhkan per orang. Angka PoU tahun 2017

tersebut lebih rendah dari Angka Rawan Pangan tahun 2016 sebesar 12,69 persen.

7) Perhitungan Angka Rawan Pangan (ARP) menggunakan metode PoU tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan perhitungan ARP tahun sebelumnya karena terdapat penyempurnaan metode perhitungan.
8) Berdasarkan hasil pertemuan, telah disusun Nota Dinas Kepala Badan Ketahanan Pangan kepada Menteri Pertanian seperti terlampir.

c. Penyusunan Angka Rawan Pangan Sementara (ARP Sementara) Tahun 2018

Tujuan kegiatan Penyusunan ARP Tahun 2018 (Sementara) adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan petugas/staf dalam melakukan analisis angka PoU serta melakukan *exercise* perhitungan angka PoU 2018 sementara.

Berdasarkan pemaparan, diskusi, dan praktik perhitungan yang dilaksanakan pada saat Penyusunan Angka PoU Tahun 2018 Sementara, dapat diperoleh sebagai berikut:

1) Perhitungan angka PoU Tahun 2018 Sementara menggunakan data pendukung yaitu: Rasio populasi/proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, *Crude Birth Ratio* (CBR), *Dietary Energy Consumption* (DEC), Standar Deviasi (STDEV) dan Koefisien Varian (CV).
2) Prosedur perhitungan PoU dengan menggunakan data Susenas sebagai berikut:(a) Membuat piramida penduduk/struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin dari data Susenas KOR individu – BPS, (b) Menghitung konsumsi kalori individu didekati dengan konsumsi kalori perkapita hasil Susenas - BPS, yang selanjutnya menghitung pendapatan, didekati dengan menggunakan data Pengeluaran yang diperoleh dari hasil Susenas – BPS, (d) Data tinggi dan berat badan per individu, didekati dengan data median tinggi dan berat badan menurut umur dan jenis kelamin dari Balitbangkes – Kemenkes.
3) Perhitungan PoU dilakukan dengan bantuan template PoU dalam bentuk lembar kerja *excell*. Pada template PoU ini dilakukan input pada kolom rasio proporsi penduduk, rata-rata konsumsi kalori, standar deviasi dan CBR (*Crude Birth Rate*) berdasarkan data pendukung yang sudah diperoleh. Setelah menginput data tersebut, selanjutnya nilai PoU secara otomatis akan terhitung.
4) Hasil perhitungan angka PoU Tahun 2018 sementara berdasarkan data Susenas bulan Maret 2018 adalah 7,95 persen atau menurun 0,31 persen jika dibandingkan angka PoU tahun 2017 sebesar 8,26 persen.

d. FGD Penyusunan Indikator Isyarat Dini Bulanan dan Prediksi Bulan ke Depan

FGD bertujuan untuk menyusun indikator, metodologi serta bentuk pelaporan pemantauan situasi pangan bulanan untuk memberikan informasi situasi pangan bulanan terkini dan dapat memprediksi masalah situasi pangan. Masalah rawan pangan di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh rendahnya produksi pangan, tetapi juga disebabkan bagaimana akses dan pemanfaatan masyarakat terhadap pangan. Rawan pangan dan gizi pada dasarnya merupakan refleksi dari situasi ketidakcukupan pangan dan gizi individu pada masyarakat di suatu wilayah sebagai dampak ketidakmampuan untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan. Berbagai permasalahan tersebut harus kita waspadai sebelum terjadinya kerawanan pangan.

Instrumen kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya masalah pangan dan gizi, di dunia internasional dikenal sebagai *Early Warning System for Food and Nutrition Security* (EWS-FNS), di Indonesia diimplementasikan dalam bentuk instrumen SKPG. Namun selama ini analisis SKPG belum dapat dilaksanakan pada bulan berjalan, hal ini disebabkan adanya kendala terutama terkait dengan ketersediaan data yaitu data tidak tersedia lengkap dan data bulan berjalan baru tersedia beberapa bulan berikutnya, sehingga informasi yang dihasilkan belum dapat menjawab situasi yang diharapkan. Oleh karena itu perlu adanya alternatif indikator yang dapat digunakan untuk memberikan informasi situasi pangan bulanan terkini dapat memprediksi masalah situasi pangan.

Berdasarkan arahan, pemaparan dan diskusi yang dilaksanakan pada saat FGD dapat dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

1) Materi yang disampaikan dalam FGD adalah: (a) Metodologi penyusunan isyarat dini/*early warning system* (penentuan indikator, pengolahan data, dan cara memprediksi ke depan); (b) Aspek dan Indikator isyarat dini/*early warning system* untuk pemantauan situasi pangan bulanan dan prediksi situasi pangan ke depan; (c) Sistematika pelaporan penyusunan situasi pangan bulanan.
2) Data bulanan yang dapat dimanfaatkan untuk analisis pemantauan situasi pangan bulanan antara lain: luas tanam, harga, dan curah hujan.
3) Data bulanan yang tidak ada datanya akan diolah dengan metode statistik *smoothing* dan permodelan hingga level kabupaten/kota, sehingga diperoleh data prediksi yang dibutuhkan.
4) Perlu dilakukan *excersice* untuk mendapatkan metode statistik yang sesuai dan paling mendekati data aktual.

5) Data iklim dan curah hujan erat kaitannya dengan data produksi terutama untuk daerah yang mengusahakan kegiatan budidaya atau bercocok tanam. Apabila terjadi gangguan produksi maka akan berpengaruh terhadap harga di wilayah tersebut.
6) Penyusunan kalender SKPG bulanan dapat dilakukan dengan menggunakan data series 3 tahun untuk memprediksi status SKPG bulan berjalan selama satu tahun.

e. Penyusunan Buku ARP Tahunan

Kegiatan Penyusunan Buku ARP bertujuan untuk: 1) Membahas hasil perhitungan ARP Tahun 2017 dan 2018 sementara oleh BPS; 2) Membahas konsep penulisan buku Angka Rawan Pangan (ARP).

Beberapa hal yang didiskusikan pada kegiatan tersebut yaitu:

1) Salah satu hal yang mendasar dalam penyusunan ARP adalah mengenai konversi kalori dari makanan yang dikonsumsi. Hal ini karena beragamnya jenis makanan yang ada di Indonesia dan mempunyai takaran atau porsi yang berbeda antar daerah pada setiap jenis menu yang sama. BPS menggunakan saat ini menggunakan data DKBM, TKBM, sehingga diperlukan *ajusted* menghitung kalori dari data yang dihasilkan susenas menggunakan konversi berdasarkan acuan harga per unit kalori pada makanan jadi.
2) Penyusunan buku Angka Rawan Pangan (ARP) merupakan kegiatan yang sangat baik untuk melihat perkembangan penduduk rawan pangan di Indonesia.
3) Buku yang disusun diharapkan dapat dipahami oleh semua kalangan (pembuat kebijakan dan masyarakat umum).
4) Data ARP dapat disandingkan dengan data lain misalnya data PoU dan kemiskinan sehingga dapat dilihat keterkaitannya
5) Tujuan penyusunan Buku ARP Tahunan ini adalah untuk :
   - Menjelaskan metode penghitungan
   - Menyajikan hasil perhitungan Jumlah Penduduk Rawan Pangan tahun 2014 - 2018 secara nasional;
   - Menyajikan informasi perkembangan Penduduk Rawan Pangan dalam kaitannya dengan pencapaian indikator pembangunan lain seperti : tingkat kemiskinan, pendapatan atau PDRB/kapita, dll;
6) Hasil perhitungan ARP Nasional Tahun 2017 adalah 9,84 persen sedangkan pada tahun 2018 menjadi 8,23 persen.

Tabel 1. Perkembangan jumlah penduduk rawan pangan tahun 2014 – 2018 per provinsi

Provinsi	Angka Rawan Pangan (Konsumsi Kalori/Kapita/Hari < 1.400 KKal)				
	2014	2015	2016	2017	2018
ACEH	21,66	12,83	13,42	12,81	9,38
SUMATERA UTARA	17,79	14,32	13,82	9,81	6,87
SUMATERA BARAT	15,02	9,80	7,34	8,22	6,93
RIAU	16,97	12,32	13,22	12,18	10,19
JAMBI	21,56	15,86	14,64	10,76	8,93
SUMATERA SELATAN	14,28	11,47	10,62	5,61	6,81
BENGKULU	16,68	11,69	9,56	10,80	6,31
LAMPUNG	22,33	17,51	14,74	10,46	8,89
KEP. BANGKA BELITUNG	16,25	9,06	9,99	8,22	8,23
KEPULAUAN RIAU	21,22	9,12	10,07	10,69	11,32
DKI JAKARTA	13,34	16,07	14,53	9,66	7,05
JAWA BARAT	16,79	12,58	11,26	8,18	7,04
JAWA TENGAH	16,97	16,73	15,00	11,10	8,51
D I YOGYAKARTA	6,10	14,16	9,43	2,68	2,34
JAWA TIMUR	13,94	13,06	10,14	8,30	6,83
BANTEN	14,05	11,04	8,70	6,58	4,74
BALI	6,56	6,79	5,28	4,91	3,14
NUSA TENGGARA BARAT	10,39	12,10	8,69	6,97	3,60
NUSA TENGGARA TIMUR	28,30	30,41	20,42	11,11	14,84
KALIMANTAN BARAT	20,00	18,88	16,00	16,96	13,84
KALIMANTAN TENGAH	16,67	13,34	11,79	11,93	9,07
KALIMANTAN SELATAN	15,22	10,41	8,86	5,49	6,07
KALIMANTAN TIMUR	32,08	22,20	19,16	18,22	15,94
KALIMANTAN UTARA		33,22	22,74	22,65	15,97
SULAWESI UTARA	15,36	14,50	13,18	7,37	7,56
SULAWESI TENGAH	17,55	16,82	13,76	10,31	10,44
SULAWESI SELATAN	15,87	15,71	14,34	10,10	9,44
SULAWESI TENGGARA	18,43	15,53	12,93	8,95	6,99
GORONTALO	18,27	9,87	12,19	6,57	8,31
SULAWESI BARAT	15,06	16,02	10,92	13,99	13,38
MALUKU	33,69	30,88	25,78	26,13	25,86
MALUKU UTARA	38,15	36,99	31,39	30,64	25,82
PAPUA BARAT	36,31	33,76	28,18	28,97	18,68
PAPUA	33,77	31,68	29,31	30,86	27,48
INDONESIA	**16,94**	**14,71**	**12,69**	**9,84**	**8,23**

f. Penyusunan SKPG Nasional

Penyusunan bertujuan untuk: 1) Mengumpulkan data SKPG tingkat provinsi; 2) Melakukan analisis situasi pangan dan gizi tingkat provinsi; 3) Membuat rekomendasi berdasarkan hasil informasi situasi pangan dan gizi.

Beberapa masukan dalam rangka penyempurnaan penyusunan SKPG nasional Tahun 2018 sebagai berikut:

1) Data pada aspek ketersediaan pangan sudah tersedia datanya di Pusdatin, Kementerian Pertanian yang merupakan kerjasama dengan BPS (per tanggal 25 bulan sebelumnya), namun data tersebut terdapat selisih angka dengan data luas tanam berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) terutama untuk data tahun 2018. Namun dalam rangka analisis SKPG Tahun 2018 dikarenakan diperlukan data untuk luas puso selain data luas tanam maka data tetap menggunakan data yang terdapat di Pusdatin;
2) Data pada aspek akses pangan dilakukan melalui pemantauan harga komoditas pangan di tingkat konsumen sudah tersedia datanya di Bidang Harga Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Kementerian Pertanian. Perhitungan data akses pangan pada analisis SKPG ini cenderung untuk mengetahui peningkatan harga komoditas pangan dibandingkan 3 (tiga) bulan sebelumnya. Selain itu untuk memperkuat analisis pada aspek akses pangan, dapat juga ditambahkan analisis pembanding yaitu dengan menggunakan nilai *Coeficient of Variation* (CV) atau Koefisien Keragaman yang merupakan rasio antara standard deviasi harga dibagi dengan rata-rata harga. Koefisien Keragaman tersebut untuk mengetahui kestabilan harga komoditas tersebut. Koefisien Keragaman untuk komoditas beras di bawah 5 persen dikategorikan stabil. Selanjutnya untuk memperkirakan data harga pada bulan selanjutnya, dapat dilakukan perhitungan dengan metode statistik *moving average*. Metode statistik *moving average* ini dilakukan karena berdasarkan pola data yang tersedia ternyata data panel harga yang dikumpulkan dari kabupaten/kota yang dipantau tenyata memiliki kecenderungan pola data yang konstan sehingga untuk memprediksi data ke depan maka digunakan metode statistik *moving average e* untuk memprediksi data harga pada bulan selanjutnya;
3) Data pada aspek pemanfaatan pangan belum tersedia dengan lengkap (tersedia per triwulan), sehingga perlu mempertimbangkan indikator ke depan yang tepat dan sensitif, terutama mengarah pada pendekatan *stunting*, sehingga untuk tahun ke depan perlu dirumuskan mengenai indikator yang digunakan.
4) Berdasarkan data yang telah dikumpulkan tersebut, selanjutnya Tim melakukan analisis SKPG berdasarkan Panduan SKPG 2018. Data diolah pada setiap aspek (ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan) per bulan sehingga

menghasilkan nilai yang dimasukkan dalam kategori aman, waspada, atau rentan pangan.

3.1.2. MITIGASI KERAWANAN PANGAN PENGEMBANGAN KAWASAN MANDIRI PANGAN (KMP)

Perwujudan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kemandirian pangan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat miskin melalui padat karya dan penurunan stunting di wilayah rentan rawan pangan di perdesaan. Strategi pemberdayaan yang dilakukan melalui jalur ganda/*twin track strategy* yaitu: (1) membangun ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan dan (2) memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin di wilayah rentan rawan pangan melalui pemberdayaan dan pemberian bantuan pemerintah sebagai *trigger*.

Untuk memantapkan dan mempercepat pengentasan kemiskinan melalui padat karya dan penurunan stunting di wilayah rentan rawan pangan, maka pada tahun 2018 dikembangkan Kawasan Mandiri Pangan. Kawasan yang dibentuk terdiri dari satu desa yang meliputi dua kelompok dengan jenis usaha/komoditas yang berbeda. Alokasi kegiatan Kawasan Mandiri Pangan berada di 20 kawasan pada 20 kabupaten. Kawasan Mandiri Pangan merupakan kawasan yang dibangun dengan melibatkan keterwakilan masyarakat yang berasal dari desa-desa terpilih untuk menegakkan masyarakat miskin melalui padat karya dan penurunan stunting di wilayah rentan rawan pangan menjadi masyarakat mandiri. Pelaksanaan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dilakukan dalam tiga tahap selama tiga tahun yang terdiri dari: Tahap Pengembangan (tahun I), Tahap Kemandirian (tahun II) dan Tahap Keberlanjutan (tahun III).

Pendekatan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dilakukan melalui tiga komponen yaitu: i) Pemberdayaan masyarakat, yang dapat dilakukan melalui tiga komponen yaitu: pelatihan, demplot, pendampingan, peningkatan akses untuk pengembangan kerja sama partisipasi inklusif dan peningkatan kapasitas individu dan kelompok, perubahan sosial dan ekonomi yang lebih baik; ii) Proses penguatan kelembagaan masyarakat, yang dapat dilakukan melalui: pelatihan teknis (adminkeu, organisasi dan kelembagaan), pendampingan pengelolaan modal kelompok, peningkatan kerja sama dengan lembaga permodalan dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk memperluas hubungan jejaring modal dan pemasaran; iii) Peningkatan koordinasi

lintas sektor, yang dapat dilakukan melalui: rapat koordinasi kawasan, pembentukan dan optimalisasi tim teknis di kabupaten/kota untuk mendorong percepatan sarana prasarana dan kerja sama program/kegiatan antar lintas sektor untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan di kawasan. Pembiayaan lokasi Kawasan Mandiri Pangan pada tahap pengembangan, Dana Banper disalurkan kepada kelompok di tiap kawasan sebesar Rp.100.000.000,- yang bersumber dari APBN. Pada tahun 2018 kegiatan Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan di tingkat Pusat yaitu: Sosialisasi Kawasan Mandiri Pangan, Apresiasi Kawasan Mandiri Pangan, *Focus Group Discussion* (FGD) Mitigasi Kerawanan Pangan dan Workshop Evaluasi Kawasan Mandiri Pangan 2018.

a. Sosialisasi Kawasan Mandiri Pangan

Tujuan Sosialisasi Kawasan Mandiri Pangan adalah: 1) Menyamakan persepsi tentang Kawasan Mandiri Pangan; 2) Meningkatkan pemahaman aparat daerah dalam melaksanakan kegiatan kawasan; 3) Merencanakan pelaksanaan kegiatan kawasan.

Materi yang disampaikan meliputi kebijakan Penanganan Kerawanan Pangan, Strategi Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengelolaan Anggaran Banper Tahun 2018, Struktur Anggaran Pembinaan KMP 2018 di provinsi dan kabupaten dan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2018. Rumusan hasil sosialisasi KMP sebagai berikut:

1) Kawasan Mandiri Pangan (KMP) tahun 2018 dilaksanakan pada 1 (satu) desa yang terdiri dari dua kelompok afinitas. Setiap kelompok mempunyai jenis usaha yang sama atau berbeda jenis usaha antar kelompok.
2) Penanggungjawab kegiatan KMP, diminta untuk berperan aktif dalam melakukan pembinaan, monitoring, melakukan pencatatan cashflow, melaporkan perkembangan usaha sampai ditingkat kelompok yang dilampirkan dokumentasi kegiatan dengan titik koordinat. Laporan dikirimkan secara berjenjang dari Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
3) Aparat penanggungjawab kegiatan KMP, segera melengkapi berkas administrasi Kawasan Mandiri Pangan tahun 2018 (Surat Keputusan (SK) Penetapan Tim Calon Penerima/Calon Lokasi Kabupaten, SK Lembaga Keuangan Kawasan/LKK, SK Forum Komunikasi Kawasan/FKK, SK Pendamping, SK Penerima Manfaat, SK Tim Verifikasi, Rencana Pengeluaran Dana/RPD dan Rencana Usaha Kelompok/RUK).

4) Dana bantuan pemerintah segera dicairkan paling lambat akhir bulan 30 April 2018 dengan memperhatikan rambu-rambu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis KMP 2018. Apabila tidak segera dimanfaatkan akan direalokasikan dananya ke wilayah lain.
5) Daerah dapat menindaklanjuti operasional pelaksanaan KMP dengan menyusun juklak.
6) Penanggungjawab kegiatan KMP di Provinsi dan Kabupaten perlu melakukan koordinasi dan sinergi dengan lintas sektor terkait (Dinas/Instansi dan swasta) serta dukungan anggaran APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
7) Penanggungjawab secara berjenjang dan secara berkala (setiap 3 bulan) melapor perkembangan kegiatan KMP.
8) Setiap akhir tahun kegiatan, penanggungjawab KMP di Provinsi dan Kabupaten melakukan evaluasi *outcome* kegiatan KMP terhadap penurunan rawan pangan dan kemiskinan (sebelum dan sesudah pemberian bantuan), membuat profil KMP, serta membuat tulisan *success story* masing-masing kawasan.

b. Apresiasi Kawasan Mandiri Pangan

Tujuan apresiasi Kawasan Mandiri Pangan TA 2018: 1) Memberikan pemahaman bagi pendamping kawasan, dalam pengelolaan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan pada tahap pengembangan; 2) Memberikan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan bantuan pemerintah kepada aparat provinsi/aparat kabupaten/pendamping; 3) Memberikan pemahaman kepada peserta tentang pengelolaan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Sasaran kegiatan Apresiasi KMP 2018 adalah pejabat/pengelola teknis KMP di 17 provinsi dan pendamping yang menangani KMP di 20 kabupaten.

Materi yang disampaikan : (1) Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2018 dan Evaluasi Triwulan I KMP; (2) Kebijakan Penanganan Rawan Pangan dan Pemberdayaan masyarakat; (3) Implementasi Model Pengembangan Agribisnis Pedesaan; (4) Budidaya dan Agribisnis Pengembangan Ternak Ruminansia/ Unggas; (5) Pengelolaan Keuangan dan Perkembangan Usaha Kelompok; (6) Diseminasi Teknologi Tepat Guna Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura; (7) Perhitungan Penduduk Rawan Pangan di Lokasi KMP Dengan Menggunakan Metode *Vectorial Project Analysis* (VPA) (8) Format Pelaporan Kegiatan KMP Tahun 2018.

Pengembangan KMP merupakan kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini dibangun dengan melibatkan keterwakilan masyarakat

yang berasal dari desa terpilih untuk menegakkan masyarakat miskin di daerah rentan rawan pangan menjadi kaum mandiri. Komponen yang termasuk didalam KMP antara lain adanya pemberdayaan, penguatan kelembagaan, peningkatan koordinasi lintas sektor.

Rencana Tindak Lanjut apresiasi sebagai berikut:

1) Penanggungjawab kegiatan KMP, diminta untuk berperan aktif dalam melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi serta melaporkan perkembangan usaha sampai ditingkat kelompok yang dilampirkan dokumentasi kegiatan dengan titik koordinat. Laporan dikirimkan secara berjenjang dari Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
2) Penanggungjawab kegiatan KMP di Provinsi dan Kabupaten perlu melakukan koordinasi dan sinergi dengan lintas sektor terkait (Dinas/Instansi dan swasta) serta mendapat dukungan anggaran APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
3) Meneruskan hasil pertemuan dan materi yang diberikan dari narasumber selama apresiasi berlagsung kepada kelompok penerima manfaat KMP.
4) Melaksanakan pertemuan secara rutin terkait pelaksanaan KMP dalam rangka mengetahui perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam kelompok.
5) Penanggungjawab Provinsi/kabupaten agar segera membina dan mempersiapkan lokasi KMP, jika suatu waktu akan dikunjungi oleh Bapak Menteri/Kabadan BKP.
6) Untuk mengingatkan kembali, bahwa dana Banper harus segera di cairkan paling lambat tanggal 30 April 2018, apabila tidak segera dicairkan akan diarealokasi ke wilayah lain.
7) Melakukan analisis perhitungan penduduk rawan pangan (VPA) di lokasi KMP dan menyampaikan hasil analisis VPA secara triwulan kepada Badan Ketahanan Pangan Pusat cq. Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang dapat dilakukan melalui email vpakmp@gmail.com.

c. Workshop Evaluasi Kawasan Mandiri Pangan

Tujuan : 1) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan Tahap Pengembangan tahun 2018; 2) Persiapan pelaksanaan Pengembangan Korporasi Usahatani TA. 2019. Sasaran workshop ini adalah pelaksana kegiatan Kawasan Mandiri Pangan tahun 2018 di 20 kawasan, 20 kabupaten pada 17 provinsi dan Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU) tahun 2019 di 13 PKU, 13 kabupaten pada 12 provinsi.

Materi yang disampaikan pada acara Workshop Evaluasi Kawasan Mandiri Pangan adalah:

1) Arahan Kepala Badan Ketahanan Pangan

   Kegiatan Workshop Evaluasi Kawasan Mandiri Pangan tahun 2018 dilaksanakan untuk mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan KMP pada tahap pengembangan yang memfokuskan pada pengentasan kemiskinan, penanganan daerah rentan rawan pangan dan penanganan permasalahan gizi (stunting) yang berbasis pada data yang dikeluarkan bersama oleh Kemenko PMK, TNP2K, Kementerian PPN/ Bappenas dan Peta FSVA Nasional di perdesaan dengan melibatkan masyarakat/kelompok dalam program padat karya sebagai tindak lanjut atas direktif presiden.

   Untuk tahun 2019 kegiatan KMP mengalami transformasi menjadi PKU di daerah rentan rawan pangan. PKU merupakan kegiatan usaha hulu hilir, dimana kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran berlangsung dalam satu rangkaian usaha. Model ini diharapkan akan berdampak terhadap meningkatnya nilai tambah produk pangan yang dibudidayakan kelompok, dan meningkatnya modal usaha kelompok.

2) Persiapan Pelaksanaan PKU di Daerah Rentan Rawan Pangan, dalam pelaksanaannya kegiatan ini lebih menekankan kepada hilirisasi produk dengan mengadopsi pendekatan Pola Kemitraan Inti-Plasma. Inti-plasma merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha yang lebih besar sebagai inti. Inti berperan dalam membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya dalam penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha sampai pemasaran hasil produksi, sehingga diharapkan keterlibatan antara Inti-Plasma dapat memberikan manfaat yang saling menguntungkan.

   Bantuan pemerintah untuk PKU berupa saprodi untuk kegiatan budidaya, bantuan alat pengolahan dan perbaikan mutu akan dialokasikan di provinsi. Kegiatan PKU dilakukan selama 3 tahun dalam 3 tahapan (Tahap Penumbuhan, Tahap Pengembangan, Tahap Kemandirian) serta Exit Strategi. Kegiatan budidaya yang dikembangkan di PKU, adalah kegiatan yang sifatnya existing dan sudah berjalan serta dikembangkan kelompok sebelumnya. Komoditas yang dikembangkan maksimal 2 jenis komoditas, yaitu: jenis

komoditas kacang-kacangan, hortikultura, ternak (ayam, itik, domba dan kambing). Hubungan antara kelompok dan gapoktan, untuk menjamin ketersediaan dan kestabilan pasokan.

Tabel 2. Hasil evaluasi Kawasan Mandiri Pangan

No	Lokasi	Pencapaian Per Aspek														Nilai Akhir	Kualitas Akhir
		Pendamping		FKK		LKK		Dinamika Kelompok		Peningkatan Kesejahteraan		Sarana Prasarana		Dukungan APBD dan kerjasama Lintas Sektor			
1	Aceh Tengah, Aceh	73.00	KS	100.00	KT	100.00	KT	77.38	KT	58.00	KS	77.50	KT	62.50	KS	**76.60**	**KT**
2	Pasaman,Sumbar	73.00	KS	100.00	KT	92.50	KT	71.29	KS	52.00	KS	40.00	KR	51.25	KS	68.42	KS
3	Kaur, Bengkulu	94.00	KT	60.00	KS	100.00	KT	66.39	KS	70.00	KS	55.00	KS	42.50	KS	67.60	KS
4	OKI, Sumsel	85.00	KT	62.50	KS	70.00	KS	73.11	KS	52.00	KS	58.75	KS	70.00	KS	71.30	KS
5	Lampung Tengah	97.00	KT	100.00	KT	75.00	KS	72.95	KS	64.00	KS	70.00	KS	68.75	KS	**75.50**	**KT**
6	Lampung Selatan	73.00	KS	85.00	KT	75.00	KS	60.81	KS	36.00	KR	70.00	KS	62.50	KS	63.17	KS
7	Pandeglang, Banten	91.00	KT	67.50	KS	100.00	KT	64.92	KS	58.00	KS	62.50	KS	70.00	KS	68.90	KS
8	Cirebon, Jabar	94.00	KT	92.50	KT	92.50	KT	72.95	KS	64.00	KS	66.25	KS	61.25	KS	74.70	KS
9	Garut, Jabar	73.00	KS	67.50	KS	85.00	KT	53.11	KS	20.00	KR	61.25	KS	31.25	KR	54.20	KS
10	Kulon Progo,DIY	78.00	KT	92.50	KT	85.00	KT	71.31	KS	50.00	KS	58.75	KS	51.25	KS	69.70	KS
11	Kebumen, Jateng	73.00	KS	77.50	KT	62.50	KS	64.59	KS	36.00	KR	77.50	KT	40.00	KR	63.50	KS
12	Probolinggo, Jatim	76.00	KT	85.00	KT	77.50	KT	69.51	KS	64.00	KS	73.75	KS	42.50	KS	69.00	KS
13	Ketapang, Kalbar	66.00	KS	77.50	KT	85.00	KT	64.92	KS	52.00	KS	73.75	KS	55.00	KS	65.60	KS
14	HSU, Kalsel	78.00	KT	85.00	KT	70.00	KS	56.07	KS	8.00	KR	42.50	KS	58.75	KS	56.70	KS
15	Banggai, Sulteng	68.00	KS	77.50	KT	77.50	KT	53.61	KS	30.00	KR	73.75	KS	13.75	KR	54.20	KS
16	Enrekang, Sulsel	75.00	KS	60.00	KS	67.50	KS	53.44	KS	28.00	KR	65.00	KS	45.00	KS	55.40	KS
17	Gianyar, Bali	85.00	KT	100.00	KT	92.50	KT	68.85	KS	50.00	KS	47.50	KS	61.25	KS	69.40	KS
18	Sumbawa, NTB	64.00	KS	55.00	KS	77.50	KT	58.85	KS	76.00	KT	81.25	KT	81.25	KT	64.40	KS
19	Lotim, NTB	97.00	KT	92.50	KT	85.00	KT	70.33	KS	58.00	KS	47.50	KS	53.75	KS	70.70	KS
20	Alor, NTT	85.00	KT	70.00	KS	50.00	KS	62.10	KS	70.00	KS	0.00	KR	25.00	KR	56.73	KS
	Rata-Rata	**79.90**	**KT**	**80.38**	**KT**	**81.00**	**KT**	**65.32**	**KS**	**49.80**	**KS**	**60.13**	**KS**	**52.38**	**KS**	**65.79**	**KS**

Hasil kesepakatan evaluasi Kawasan Mandiri Pangan sebagai berikut:

1) KMP 2018
   a) Kegiatan KMP dilanjutkan pembinaanya oleh provinsi dan kabupaten melalui APBD I dan APBD II
   b) Aparat Pembina Provinsi dan Kabupaten meningkatkan pendampingan sehingga kawasan yang masuk dalam kategori rendah dan sedang dapat ditingkatkan kinerjanya.

c) Mengoptimalkan peran kelembagaan kelompok tani, LKK dan FKK.
d) Aparat provinsi dan kabupaten harus melaporkan perkembangan usaha dan perkembangan modal kelompok kepada pusat.
e) Provinsi dan kabupaten perlu bekerjasama dan bersinergi dengan lintas sektor terkait (dinas/instansi, perguruan tinggi, swasta dan lembaga permodalan) dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan kelompok untuk mendapatkan nilai tambah produk dan pemasaran hasil serta dukungan sarana dan prasarana.

d. Pelaksanaan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2018

Kawasan Mandiri Pangan (KMP) tahap pengembangan tahun 2018 dilaksanakan di 17 Provinsi, 20 Kabupaten, 20 Kawasan dengan dana bantuan diberikan sebesar Rp. 100.000.000 untuk 1 desa 2 kelompok. Tujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin melalui padat karya dan penurunan *stunting* di wilayah rentan rawan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat berlandaskan kemandirian, meningkatkan pengelolaan kelembagaan masyarakat untuk ketahanan pangan masyarakat dan meningkatkan dukungan lintas sektor untuk pengembangan prasarana sarana perdesaan dan perekonomian masyarakat. Sedangkan sasarannya Rumah Tangga Miskin (RTM), pravelensi *stunting* berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kementerian PPN /Bappenas, di wilayah rentan rawan pangan yang mempunyai potensi pengembangan komoditas unggulan di 20 kawasan pada 20 kabupaten. Pelaksanaan kegiatan KMP dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Pelaksanaan Kawasan Mandiri Pangan 2018

No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok	Kegiatan Usaha
1	Aceh	Aceh Tengah	Linge	Linge	Kel. Uten Datu	Sereh Wangi
					Kel. Genting Daling	Sereh Wangi
2	Sumatera Barat	Pasaman	Panti	Nagari Panti	Kel. Panti Batuah	Budidaya Jagung
3	Bengkulu	Kaur	Tetap	Babat	Kel. Nabung	Ternak Itik
					Kel. Tebat Jelantang	Ternak Itik
4	Sumatera Selatan	OKI	Teluk Gelam	Benawan	Kel. Bina Keluarga	Ternak Kambing
					Kel. Mufakat	Ternak Kambing
5	Lampung	Lampung Selatan	Ketapang	Kemukus	Kel. Sahabat	Ternak kambing

					Kel. Makmur Jaya	Ternak Kambing
		Lampung Tengah	Bumi Ratu Nuban	Tulung Kakan	Kel. Sri Makmur	Budidaya Nenas
					Kel. Tani Makmur	Budidaya Nenas
6	Banten	Pandeglang	Cipeucang	Kondang	Kel. Cahaya Mekar 2	Budidaya Padi
					Kel. Cahaya Mekar 4	Ternak Kambing
7	Jawa Barat	Cirebon	Babakan	Kudukeras	Kel. Afinitas Tani Mulya I	Budidaya Jagung
					Kel. Tani Mulya III	Budidaya Jagung
		Garut	Malangbong	Sukarasa	Kel. Tani Budidaya	Ternak Domba
					Kel. Tani Surya II	Ternak Domba
8	DIY	Kulon Progo	Pengasih	Karangsari	KWT. Lestari	Ternak Kambing
					KWT Handayani	Ternak Kambing
9	Jawa Tengah	Kebumen	Ambal	Plempukan Kembaran	Kel. Sidomulyo	Ternak Kambing
					Kel. Mekarsari	Budidaya Jagung
10	Jawa Timur	Probolinggo	Paiton	Randutatah	Kel. Tani Rahayu	Budidaya Cabe
					Kel. Randu Asri	Budidaya Cabe
11	Kalimantan Barat	Ketapang	Benua Kayong	Sungai Kinjil	Kel. Sejahtera I	Ternak Ayam buras
					Kel. Sejahtra II	Ternak Ayam buras
12	Kalimantan Selatan	HSU	Haur Gading	Jingah Bujur	Kel. Harapan baru	Budidaya Padi
					Kel. Doa bersama	Budidaya Padi
13	Sulawesi Tengah	Banggai	Luwuk Timur	Lontos	Kel. Tani Makmur	Budidaya Jagung
					Kel. Damak Jaya	Budidaya Jagung
14	Sulawesi Selatan	Enrekang	Baraka	Parinding	Kel. Buntu Kecu	Ternak Kambing
					Kel. Tigaruk	Ternak Kambing
15	Bali	Gianyar	Tegallalang	Taro	Pokdakan Gunung Mekar	Budidaya sayur-sayuran dan bunga gumitir
					KWT Prameswari	Budidaya sayur-sayuran
16	NTB	Lombok Timur	Aikmel	Lenek Duren	Kel. Lintas Rinjani II	Budidaya jagung
					Kel. Pada Maju	Ternak Kambing
		Sumbawa	Moya Hulu	Berang Sea	Kel. Berang Belo	Budidaya sayuran

					Kel. Berang Sea	Budidaya sayuran
17	NTT	Alor	Alor Barat Daya	Pintu Mas	Kel. Tani Edo Kang	Sayuran dan ternak babi
					Kel. Tani He Aminang	Sayuran dan ternak babi

3.1.3. NERACA BAHAN MAKANAN (NBM) NASIONAL

Ketahanan pangan merupakan unsur terpenting dari ketahanan nasional di bidang ekonomi. Pemantapan ketahanan pangan merupakan salah satu fokus dari pembangunan nasional. Tingkat ketersediaan pangan suatu daerah, baik yang berasal dari produksi domestik, cadangan/stok maupun impor adalah suatu ukuran yang mencerminkan cukup tidaknya pangan di suatu daerah. Ketersediaan pangan tersebut harus didasarkan pada standar kecukupan pangan, baik kecukupan energi maupun protein, yang dianjurkan untuk hidup sehat dan produktif. Jumlah pengadaan dan penggunaan pangan di suatu wilyah serta tingkat ketersediaan pangan per kapita dalam bentuk kandungan zat gizi (kalori dan protein) dapat diketahui melalui neraca bahan makanan (NBM).

Penyusunan neraca bahan makanan dilakukan setiap tahun sehingga dapat menggambarkan perkembangan tingkat ketersediaan pangan di suatu wilayah. Dengan demikian neraca bahan makanan dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan ketersediaan pangan khususnya dan pembangunan ketahanan pangan pada umumnya.

Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan analisis ketersediaan pangan per kapita dalam bentuk energi, protein dan lemak. Hasil (outcome) dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan rumusan kebijakan ketersediaan pangan dengan indikator kinerja kegiatan berupa Buku Neraca Bahan Makanan Nasional 2016 Tetap dan 2017 Sementara. Output yang dihasilkan adalah data ketersediaan pangan dalam satuan volume dan satuan gizi dari berbagai komoditas bahan pangan. Ringkasan Buku NBM Tahun 2016 Tetap dan 2017 Sementara sebagai berikut:

a. Hasil perhitungan neraca bahan makanan dalam bentuk zat gizi per kapita padatahun 2016 yaitu energi sebesar 3.016Kalori/hari, protein 75,79 gram/hari yang terdiri dari 56,25 gram/hari protein nabati (74,21%) dan 19,55 gram/hari protein hewani (25,79 %), serta lemak 59,58 gram/hari., Ketersediaan zat gizi per kapita tahun 2017 (angka sementara)untuk energi sebesar3.031 Kalori/hari, protein 79,08 gram/hari yang terdiri dari 57,22 gram/hari protein nabati (72,40 %) dan 21,81 gram/hari protein hewani (27,60%), serta lemak 62,14 gram/hari.

Ketersediaan zat gizi per kapita tahun 2018 (angka sangat sementara) dalam bentuk energi sebesar 3.306 Kalori/hari, protein 83,92 gram/hari yang terdiri dari protein nabati 60,01 gram/hari dan protein hewani 23,91 gram/hari, serta lemak 78,19 gram/hari.

b. Ketersediaan energi per kapita per hari pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 mengalami kenaikan dari 3.016 Kalori menjadi 3.031 Kalori atau naik 15 Kalori (0,50 %), ketersediaan protein naik dari 75,79 gram per kapita per hari menjadi 79,08 gram per kapita per hari atau naik 3,28 gram (4,33%).

c. Ketersediaan energi, protein dan lemak total masih didominasi oleh kontribusi ketersediaan dari bahan pangan nabati. Pada tahun 2016, kontribusi pangan nabati terhadap ketersediaan energi total sebesar 93,65 % (2.825 Kalori), terhadap ketersediaan protein total sebesar 74,21% (56,25 gram), dan terhadap ketersediaan lemak total sebesar 81,42 % (48,51 gram). Pada tahun 2017 kontribusi bahan pangan sumber nabati terhadap ketersediaan energi, protein dan lemak total masing-masing sebesar 93,62 % (2.838 Kalori), 72,41 % (57,26 gram), dan 83,03 % (51,59 gram). Kontribusi bahan pangan nabati terhadap ketersediaan energi, protein dan lemak total pada tahun 2018 masing-masing sebesar 93,73%, 71,51% dan 85,79%.

d. Kelompok padi-padian yang terdiri dari padi, jagung dan gandum masih menjadi penyumbang terbesar ketersediaan energi dan protein yaitu masing-masing sebesar 43 – 49 % dan 41 – 48 %. Sementara sebagai komoditas yang dikenal sebagai sumber protein; buah biji berminyak, daging, telur, ikan dan susu hanya menyumbang kurang dari 25% total ketersediaan protein. Kelompok padi-padian juga mempunyai kontribusi cukup besar terhadap ketersediaan lemak yakni 8 – 11% dari ketersediaan lemak total disamping kontribusi dari kelompok minyak dan lemak sebesar 43 – 54% dan kelompok buah biji berminyak sebesar 22 – 25%.

e. Ketersediaan energi dari kelompok padi-padian selama 3 tahun terakhir sedikit berfluktuasi yaitu Tahun 2016-2018 sebesar masing-masing 1.490 Kal/kap/hari, 1.496 Kal/kap/hari dan 1.406 Kal/kap/hari. Ketersediaan protein per kapita per hari pada tahun 2017 juga meningkat dibanding tahun 2016 yaitu dari 36,79 gram menjadi 36,95 gram tetapi mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 34,48 gram. Ketersediaan lemak per kapita per hari pada tahun 2017 dan 2018 menurun dibanding tahun 2016 yaitu dari 6,54 gram menjadi 6,52 gram dan 6,26 gram. Ketersediaan energi, protein dan lemak kelompok padi-padian pada tahun 2018 lebih rendah dibandingkan tahun 2016 karena sampai dengan Neraca ini

disusun, data impor untuk komoditas gandum masih rendah dibandingkan tahun 2016 dan 2017.

f. Kelompok Makanan berpati memberikan kontribusi yang cukup tinggi pada ketersediaan energi. Komoditas ubi kayu dengan produksi 19,05 juta ton pada tahun 2017 yang mengalami penurunan sebesar 1,21 juta ton (5,97%) dibanding tahun 2016 yang produksinya mencapai 20,26 juta ton dan ditambah impor tapioka sebesar 1,38 juta ton (setara ubi kayu segar) masih memberikan kontribusi energi sebesar 203 Kalori dari singkong segar (87,5% dari total energi dari makanan berpati sebesar 232 Kalori). Selain ubi kayu, komoditas lain yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap ketersediaan energi adalah ubi jalar dan sagu. Komoditas sagu yang merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia bagian timur mengalami peningkatan produksi yang cukup signifikan dari 383.61 ribu ton pada tahun 2016 menjadi 385,76 ribu ton pada tahun 2017. Peningkatan ini diprediksikan terus berlanjut, karena produksi sagu diperkirakan mencapai 390 ribu ton pada tahun 2018 (angka sangat sementara).

g. Ketersediaan energi per kapita per hari dari kelompok gula pada tahun 2017 meningkat dibanding tahun 2016, yaitu dari 265 Kalori menjadi 266 Kalori. Sumbangan energi tersebut didominasi oleh ketersediaan gula pasir yang relatif hampir sama antara tahun 2017 dan tahun 2016, yaitu dari 247 Kal/kapita/hari atau 24,72 kg/kapita/tahun menjadi 247 Kal/kapita/hari atau 24,75 kg/kapita/tahun, sedangkan gula mangkok hanya memberikan kontribusi energi sebesar 19 Kal/kapita/hari atau 1,80 kg/kapita/tahun dan 19 Kal/kapita/hari atau 1,81 kg/kapita/tahun. Pada tahun 2018 perkiraan kontribusi ketersediaan energi dari kelompok gula sebesar 281 Kalori/kapita/hari.

h. Kelompok buah/biji berminyak mencakup komoditas kacang tanah, kedelai, kacang hijau dan kelapa. Ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita per hari dari kelompok buah/biji berminyak pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibanding tahun 2016, masing-masing dari 228 Kalori naik menjadi 238 Kalori, protein dari 14,63 gram menjadi 15,89 gram, dan lemak dari 14,83 gram menjadi 15,12 gram. Trend yang sama juga terlihat pada perkiraan ketersediaan energi, protein dan lemak pada NBM tahun 2018. Peningkatan tersebut secara umum disebabkan oleh meningkatnya ketersediaan, salah satunya dari impor komoditas pada kelompok buah biji berminyak.

i. Buah-buahan selain merupakan pangan sumber vitamin dan mineral juga mempunyai kontribusi terhadap ketersediaan energi, protein dan lemak.

Ketersediaan energy, protein dan lemak per kapita per hari pada tahun 2017 berturut-turut sebesar 70 Kalori, 0,77 gram protein dan 0,46 gram lemak. Ketersediaan tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan ketersediaan pada NBM tahun 2016 yang hanya 67 Kalori, 0,74 gram protein dan 0,43 gram lemak. Dari sekian banyak komoditas buah-buahan, komoditas yang mempunyai kontribusi energi per kapita per hari cukup besar pada tahun 2017 adalah pisang, salak, jeruk dan mangga yaitu masing-masing 34 Kalori (26,05 kg/tahun), 8 Kalori (3,4 kg/tahun), 5 Kalori (8,29 kg/tahun) dan 5 Kalori (7,83 kg/tahun). Selain itu, peningkatan ketersediaan energi, protein dan lemak juga disebabkan adanya komoditas baru yang dimasukan seperti kurma, pir, lengkeng dan buah naga.

j. Kontribusi sayur-sayuran terhadap ketersediaan energy, protein dan lemak pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016, yaitu masing-masing dari 40 Kalori/kapita/hari, 1,79 gram/kapita/hari dan 0,47 gram/kapita/hari menjadi 43 Kalori/kapita/hari, 1,98 gram/kapita/hari dan 0,48 gram/kapita/hari. Komoditas kelompok sayuran yang penyumbang ketersediaan energi terbesar pada tahun 2017 yaitu cabe rawit sebesar 12 Kalori/kapita/hari dan kentang sebesar 6 Kalori/kapita/hari.

k. Ketersediaan energi dan protein dari komoditas daging pada tahun 2017 masing-masing sebesar 70 Kalori/kapita/hari dan 4,72 gram/kapita/hari, relatif sama dibandingkan ketersediaan energi tahun 2016 sebesar 70 Kalori/kapita/hari, kecuali protein yang meningkat dari 4,65 gram/kapita/hari pada tahun 2016.

l. Daging ayam ras menyumbang ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita per hari terbesar pada kelompok daging yaitu masing-masing sebesar 38 Kalori, 2,27 gram protein dan 3,12 gram lemak pada tahun 2017. Kontribusi tersebut meningkat dibandingkan tahun 2016 yang hanya masing-masing sebesar 36 Kalori, 2,14 gram protein dan 2,94 gram lemak.

m. Komoditas daging sapi menjadi komoditas kedua penyumbang energi, protein dan lemak per kapita per hari paling besar pada tahun 2017 di kelompok daging yaitu masing-masing sebesar 10 Kalori, 0,90 gram protein dan 0,67 gram lemak atau relatif sama dibanding tahun 2016 yaitu masing-masing sebesar 10 Kalori, 0,95 gram protein dan 0,71 gram lemak.

n. Komoditas yang termasuk dalam kelompok telur antara lain telur ayam buras, telur ayam ras dan telur itik. Ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita per hari kelompok telur pada tahun 2017 masing-masing sebesar 26 Kalori, 1,96 gram protein dan 1,88 gram lemak, sedikit meningkat jika dibandingkan dengan

ketersediaan per kapita perhari pada tahun 2016 yang sebesar 25 Kalori, 1,94 gram protein, dan 1,85 gram lemak.

o. Komoditas yang mendominasi sumbangan ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita per hari dari kelompok telur adalah telur ayam ras, yang pada tahun 2017 sedikit mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016, yaitu masing-masing dari 19 Kalori, 1,53 gram protein dan 1,34 gram lemak (5,64 kg/tahun) menjadi 19 Kalori, 1,54 gram protein dan 1,34 gram lemak (5,64 kg/tahun).
p. Ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita per hari pada tahun 2017 dari komoditas susu masing-masing sebesar 14 Kalori, 0,73 gram protein dan 0,79 gram lemak. Angka ketersediaan tersebut menurun apabila dibandingkan dengan ketersedian energi, protein dan lemak per kapita per hari tahun 2016 sebesar 27 Kalori, 1,40 gram protein dan 1,53 gram lemak.
q. Diantara kelompok penyumbang energi, protein dan lemak dari sumber hewani, kelompok ikan merupakan penyumbang terbesar ketersediaan energi dan protein per kapita per hari. Pada tahun 2017, kontribusi kelompok ikan terhadap energi, protein dan lemak masing-masing sebesar 76 Kalori, 14,40 gram protein dan 1,49 gram lemak. Ketersediaan tersebut meningkat bila dibandingkan tahun 2016 yang ketersediaan per kapita per hari untuk energi, protein dan lemak masing-masing sebesar 70 Kalori, 11.83 gram dan 1.37 gram.
r. Sumber minyak nabati pada tahun 2017 selain bersumber dari kacang tanah, kopra dan sawit juga ditambah dari minyak zaitun, jagung, kedelai, dan wijen yang semuannya berasal dari impor, serta lemak hewani menyumbang ketersediaan energi dan lemak terbesar kedua setelah kelompok padi-padian.
s. Ketersediaan energi dan lemak per kapita per hari kelompok minyak dan lemak mengalami peningkatan yang cukup besar, dari masing-masing 450 Kalori, 0,05 gram protein dan 25,88 gram lemak pada tahun 2016 menjadi 499 Kalori, 0,06 gram protein dan 28,78 gram lemak pada tahun 2017. Kenaikan tersebut terjadi karena peningkatan produksi minyak goreng sawit dari 4,9 juta ton tahun 2016 menjadi 6,8 juta ton tahun 2017.
t. Ketersediaan pangan tidak hanya dinilai dari kecukupan gizinya dalam bentuk energi dan protein, tetapi juga dinilai dari keberagaman ketersediaan gizi tersebut berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH). PPH tingkat ketersediaan dihitung berdasarkan ketersediaan energi pada Neraca Bahan Makanan (NBM).

u. Berdasarkan data NBM 2016-2018 dan menggunakan angka kecukupan energi (AKE) tingkat ketersediaan 2.400 Kalori per kapita per hari, maka skor PPH ketersediaan masih dibawah PPH standar skor 100. Skor PPH Tahun 2017 sebesar 83,10 lebih rendah atau mengalami penurunan skor dianding tahun 2016 yang skornya 83,27. Masih rendahnya capaian tersebut dikarenakan kelompok pangan hewani dan kelompok sayuran dan buah belum mencapai angka yang direkomendasikan yaitu masing-masing baru mencapai skor 14,85 pada tahun 2016 dan 15,03 pada tahun 2017 dari skor 24 yang direkomendasikan pada kelompok pangan hewani dan capaian skor 22,43 pada tahun 2016 dan 22,07 pada tahun 2017 dari skor 30 yang direkomendasikan pada kelompok sayuran dan buah.

v. Sementara itu penurunan skor PPH Ketersediaan dari tahun 2016 ke tahun 2017 disebabkan oleh terjadinya penurunan skor pada kelompok sayuran dan buah dari 22,43 menjadi 22,07 sebagai akibat turunya ketersediaan energi kelompok ini dari

108 Kalori menjadi 106 Kalori atau turun 1,85%. Turunya ketersediaan energi disebabkan karena turunnya produksi beberapa komoditas sayuran dan buah seperti duku, rambutan, melon, pepaya, markisa, apel, kubis, kentang, labu siam, kangkung dan bawang daun.

Tabel 4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

Tahun 2015 – 2018

No	Kelompok Bahan Makanan	2015		2016		2017*		2018**	
		Energi	Skor PPH	Energi	Skor PPH	Energi	Skor PPH	Energi	Skor PPH
1	Padi-padian	1.652	25,00	1.490	25,00	1.496	25,00	1.406	25,00
2	Umbi-umbian	262	2,50	291	2,50	238	2,50	229	2,50
3	Pangan Hewani	166	13,84	178	14,85	180	15,03	194	16,18
4	Minyak dan Lemak	299	5,00	456	5,00	505	5,00	785	5,00
5	Buah/biji berminyak	76	1,00	75	1,00	71	1,00	70	1,00
6	Kacang-kacangan	163	10,00	154	10,00	169	10,0	215	10,00
7	Gula	256	2,50	265	2,50	266	2,50	281	2,50
8	Sayuran dan buah	104	21,75	108	22,43	106	22,07	125	25,95
9	Lain-lain	-	-	-	0,00	-	0,0	-	0,00
Total		2.978	81,59	3.016	83,27	3.031	83,10	3.306	88,13

Keterangan:*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

3.1.4. FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS (FSVA)

Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi

diamanahkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas* – FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.

FSVA 2018 adalah pemutakhiran dari empat edisi sebelumnya. Pemutakhiran yang dilakukan meliputi metode analisis, indikator, dan data yang digunakan. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah kabupaten/kota. Sembilan indikator digunakan dalam penyusunan FSVA. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Indikator pada akses pangan adalah persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran, dan persentase rumah tangga tanpa akses listrik. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun, persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (*stunting*),dan angka harapan hidup pada saat lahir.

Kabupaten/kota diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Kabupaten/kota di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan priroritas 3 rentan pangan rendah. Kabupaten/kota di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.

Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan FSVA adalah metode

pembobotan dengan menggunakan *expert judgement*. FSVA 2018 mengakomodasi perkembangan wilayah kabupaten/kota hasil pemekaran wilayah. Wilayah yang dianalisis dalam FSVA 2018 sebanyak 514 kabupaten/kota, terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota. Analisis komposit dibedakan antara wilayah kabupaten dan perkotaan.

Hasil analisis FSVA tahun 2018 menunjukkan bahwa kabupaten rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 81 kabupaten dari 416 kabupaten (19%) yang terdiri dari 26 kabupaten (6%) Prioritas 1; 21 kabupaten (5%) Prioritas 2; dan 34 kabupaten (8%) Prioritas 3. Kabupaten prioritas 1 tersebar di 17 kabupaten di Provinsi Papua, 6 Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2 kabupaten di Provinsi Maluku, dan 1 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karakteristik kabupaten rentan pangan ditandai dengan rasio konsumsi terhadap ketersediaan pangan tinggi, persentase balita *stunting* tinggi, serta angka kemiskinan yang tinggi.

Sementara itu, Kota Rentan Pangan Prioritas 1-3 sebanyak 7 Kota dari 98 kota di Indonesia (7,14%). Pada wilayah perkotaan, terdapat 2 kota (2%) Prioritas 1, yaitu Kota Subulussalam di Aceh dan Kota Tual di Maluku; 2 kota (2%) Prioritas 2, yaitu Kota Gunung Sitoli di Sumatera Utara dan Kota Pagar Alam di Sumatera Selatan; serta 3 kota (3%) Prioritas 3, yaitu Kota Tanjung Balai di Sumatera Utara, Lubuk Linggau di Sumatera Selatan, dan Tidore Kepuluan (Maluku Utara). Karakteristik kota rentan pangan ditandai dengan rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan yang tinggi, akses air bersih yang rendah, dan balita *stunting* yang tinggi.

Program pembangunan pertanian selama empat tahun telah berhasil meningkatkan status ketahanan pangan wilayah di 177 kabupaten:

a. Kabupaten rentan pangan yang naik peringkat sebanyak 75 kabupaten (19%) dengan rincian: Prioritas 2 ke Prioritas 3 sebanyak 18 kabupaten, Prioritas 2 ke Prioritas 4 sebanyak 5 kabupaten, Prioritas 2 ke Prioritas 5 sebanyak 2 kabupaten. Kabupaten Prioritas 3 yang meningkat ke Prioritas 4 sebanyak 14 kabupaten, Prioritas 3 ke Prioritas 5 sebanyak 23 kabupaten, dan Prioritas 3 ke Prioritas 6 sebanyak 13 kabupaten.
b. Kabupaten tahan pangan yang naik peringkat sebanyak 102 kabupaten (26%) dengan rincian: Prioritas 4 ke Prioritas 5 sebanyak 49 kabupaten, Prioritas 4 ke Prioritas 6 sebanyak 26 kabupaten, sedangkan Prioritas 5 ke Prioritas 6 sebanyak 27 kabupaten.

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah kabupaten diprioritaskan pada :

a. Kabupaten-kabupaten yang terletak di Kawasan Indonesia Timur yang memiliki daerah Prioritas 1-3 terbesar
b. Kabupaten-kabupaten yang lokasinya jauh dari ibukota provinsi/daerah perbatasan yang rata-rata memiliki tingkat ketahanan pangan lebih rendah dibandingkan kabupaten lain.
c. Kabupaten-kabupaten di Kepulauan dengan tingkat kerentanan pangan tinggi
d. Kabupaten pemekaran dengan tingkat kerentanan pangan tinggi

Penanganan kerentanan pangan di wilayah perkotaan diprioritaskan pada:

a. Kota-kota yang memiliki keterbatasan akses terhadap pangan (infrastruktur, stabilisasi pasokan, dan daya beli).
b. Kota-kota yang memiliki keterbatasan pemanfaatan pangan (kualitas sumberdaya manusia dan sanitasi).

Program-program peningkatan ketahanan pangan dan menangani kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan:

a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal
b. Penanganan stunting diantaranya melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang gizi dan pola asuh anak; penyediaan fasilitas dan layanan air bersih
c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakan ekonomi wilayah
d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan
e. Penurunan pangsa pengeluaran pangan melalui sosialisasi pola konsumsi pangan (B2SA) serta peningkatan kesempatan kerja
f. Peningkatan pendapatan peningkatan pendidikan perempuan
g. Penyediaan tenaga kesehatan

Program-program penanganan kerentanan pangan di daerah perkotaan diarahkan pada kegiatan:

a. Peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat
b. Sosialisasi pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman
c. Peningkatan akses rumah tangga terhadap air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih

d. Peningkatan sanitasi lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat melalui sosialisasi dan penyuluhan
e. Penanganan balita stunting melalui intervensi program gizi baik spesifik maupun sensitif.

3.1.5. INDEKS KETAHANAN PANGAN (IKP)

Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik dapat mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi. Informasi ketahanan pangan sebagaimana tertuang dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi. Informasi ini sangat penting untuk memberikan arah dan rekomendasi bagi para pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah.

Ketahanan pangan bersifat multidimensi, sehingga penilaian terhadap situasi ketahanan pangan membutuhkan ukuran yang komprehensif dengan melibatkan serangkaian indikator. Indikator-indikator tersebut digabungkan untuk menghasilkan nilai komposit ketahanan pangan, yang selanjutnya dijadikan sebagai IKP.

IKP telah dikembangkan pada tataran global untuk menilai dan membandingkan situasi ketahanan pangan antar negara. *Global Food Security Index* (GFSI) yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) membandingkan situasi ketahanan pangan antar negara berdasarkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, serta kualitas dan keamanan pangan. Hasil analisis GFSI ini menunjukkan bahwa posisi ketahanan pangan Indonesia mengalami perbaikan dari peringkat 71 pada tahun 2016 menjadi peringkat 69 dari 113 negara pada tahun 2017 (EIU 2016 dan 2017). Sementara itu, *Global Hunger Index* (GHI) yang disusun oleh *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menggunakan empat aspek untuk menilai ketahanan pangan suatu negara, yaitu: proporsi *undernourishment*, balita wasting, balita stunting, dan angka kematian bayi. Indeks GHI sebesar 22 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-72 dari 119 negara (IFPRI 2017). Indeks ketahanan pangan lainnya adalah *Rice Bowl Index* (RBI) yang dikembangkan untuk menilai sejauh mana kapasitas suatu negara dalam mengatasi tantangan ketahanan pangan dan menempatkan Indonesia pada peringkat 10 dari 15 negara di Asia Pasifik (Syngenta dan FSG 2016).

Pada level nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyusun IKP

berdasarkan tiga aspek ketersediaan, akses, dan konsumi pangan. IKP disusun sampai dengan level provinsi sehingga tidak bisa secara langsung diadopsi untuk intervensi kegiatan ketahanan pangan pada wilayah administrasi yang lebih kecil, yaitu kabupaten/kota. Badan Ketahanan Pangan memandang perlu untuk menyusun IKP Nasional dengan unit analisis yang lebih rendah, yaitu tingkat kabupaten/kota dengan mengadopsi pengukuran indeks global dengan berbagai penyesuaian metodologi sesuai dengan ketersediaan data dan informasi di tingkat kabupaten/kota. IKP ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari FSVA, karena indikator yang digunakan dalam IKP merupakan indikator yang juga digunakan dalam penyusunan FSVA Nasional. Hal ini dilakukan agar hasil IKP sejalan dengan hasil FSVA Nasional. IKP Nasional memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas daerah dan prioritas intervensi program. Secara khusus, penyusunan IKP Nasional dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan memberikan gambaran peringkat (rangking) pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota lain.

IKP yang disusun Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian merupakan penyesuaian dari indeks yang telah ada berdasarkan ketersediaan data tingkat kabupaten/kota. Sembilan Indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu (bulanan/tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota.

Hasil perhitungan IKP 2018 berdasarkan 9 indikator untuk wilayah kabupaten dan 8 indikator untuk wilayah kota yang mencerminkan 3 aspek ketahanan pangan memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan wilayah (kabupaten dan kota) dibandingkan dengan wilayah lainnya. Secara umum wilayah Indonesia bagian barat memiliki nilai IKP lebih baik dibandingkan dengan Indonesia bagian timur. Peringkat IKP kabupaten dan kota secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4 dan 5.

Tabel 5. Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten 2018

Peringkat	Nama Kabupaten	Skor	Peringkat	Nama Kabupaten	Skor
1	Tabanan	88.30	44	Mesuji	80.82
2	Gianyar	87.16	45	Tulang Bawang Barat	80.70
3	Badung	86.45	46	Pesisir Selatan	80.66
4	Sukoharjo	85.21	47	Bekasi	80.65
5	Gresik	84.70	48	Boyolali	80.36
6	Lamongan	84.60	49	Klungkung	80.32
7	Demak	84.11	50	Tanah Datar	80.23
8	Magetan	84.10	51	Penajam Paser Utara	80.18
9	Tanah Bumbu	84.06	52	Takalar	80.15
10	Pati	84.04	53	Jombang	80.13
11	Sleman	83.49	54	Mojokerto	80.09
12	Sidenreng Rappang	83.44	55	Nganjuk	80.07
13	Tapin	83.00	56	Kolaka	79.96
14	Luwu Timur	83.00	57	Hulu Sungai Selatan	79.79
15	Karawang	82.69	58	Indramayu	79.79
16	Semarang	82.66	59	Tanah Laut	79.76
17	Balangan	82.46	60	Aceng Tamiang	79.57
18	Bulungan	82.44	61	Kutai	79.50
19	Karanganyar	82.40	62	Berau	79.47
20	Deli Serdang	82.32	63	Minahasa Utara	79.41
21	Kudus	82.31	64	Malinau	79.40
22	Sragen	82.22	65	Ngawi	79.37
23	Bantaeng	82.10	66	Lamandau	79.27
24	Madiun	81.94	67	Temanggung	79.27
25	Tulungagung	81.88	68	Tebo	79.19
26	Wonogiri	81.83	69	Cilacap	79.19
27	Banjar	81.73	70	Sumedang	79.18
28	Barru	81.59	71	Simalungun	79.10
29	Gowa	81.54	72	Soppeng	79.09
30	Bojonegoro	81.40	73	Banyuwangi	78.93
31	Maros	81.32	74	Subang	78.85
32	Blora	81.30	75	Karo	78.78
33	Wajo	81.24	76	Hulu Sungai Tengah	78.69
34	Grobogan	81.19	77	Klaten	78.69
35	Tabalong	81.11	78	Blitar	78.64
36	Ponorogo	81.10	79	Purworejo	78.63
37	Kolaka Timur	81.09	80	Tuban	78.61
38	Pinrang	81.01	81	Kota Baru	78.57
39	Kerinci	81.00	82	Merauke	78.53
40	Agam	81.00	83	OKU Timur	78.49
41	Jepara	80.95	84	Pringsewu	78.48
42	Pulang Pisau	80.91	85	Hulu Sungai Utara	78.42
43	Kendal	80.84	86	Jembrana	78.39

Peringkat	Nama Kabupaten	Skor	Peringkat	Nama Kabupaten	Skor
87	Bolaang Mongondow	78.36	**133**	Luwu Utara	76.45
88	Serdang Bedagai	78.30	**134**	Katingan	76.45
89	Nunukan	78.26	**135**	Sanggau	76.44
90	Tulang Bawang	78.24	**136**	Trenggalek	76.35
91	Poso	78.12	**137**	Magelang	76.32
92	Buleleng	78.03	**138**	Kediri	76.31
93	Barito Kuala	77.99	**139**	Sumbawa	76.25
94	Limapuluh Koto	77.98	**140**	Bengkayang	76.22
95	Banggai	77.96	**141**	Luwu	76.10
96	Banggai	77.96	**142**	Bombana	76.03
97	Barito Utara	77.78	**143**	Pasuruan	75.97
98	Batu Bara	77.77	**144**	Majalengka	75.92
99	Bolmong Timur	77.77	**145**	Sinjai	75.92
100	Aceh Besar	77.77	**146**	Dairi	75.90
101	Konawe Selatan	77.75	**147**	Wonosobo	75.87
102	Sumbawa Barat	77.73	**148**	Dharmas Raya	75.82
103	Gunung Kidul	77.73	**149**	Sambas	75.77
104	Rembang	77.71	**150**	Konawe Utara	75.76
105	Halmahera Utara	77.61	**151**	Malang	75.69
106	Minahasa	77.55	**152**	Serang	75.58
107	Konawe/Kab Kendari	77.51	**153**	Kubu Raya	75.56
108	Langkat	77.44	**154**	Purwakarta	75.55
109	Dompu	77.43	**155**	Kotawaringin Timur	75.50
110	Lampung Timur	77.37	**156**	Ogan Komering Ilir	75.49
111	Mamuju	77.37	**157**	Aceh Barat	75.45
112	Pacitan	77.35	**158**	Lampung Tengah	75.43
113	Bangli	77.33	**159**	Pontianak/Mempawah	75.43
114	Banyuasin	77.25	**160**	Solok	75.34
115	Pangandaran	77.18	**161**	Mamuju Utara	75.43
116	Bone	77.17	**162**	Toraja Utara	75.21
117	Kapuas	77.14	**163**	Pasaman Barat	75.20
118	Labuhan Batu	77.12	**164**	Kuningan	75.17
119	Batang	77.10	**165**	Bolmongondow Utara	75.16
120	Labuhan Batu Utara	76.98	**166**	Bima	75.15
121	Merangin	76.97	**167**	Musi Banyuasin	75.13
122	Solok Selatan	76.91	**168**	Pemalang	74.96
123	Toba Samosir	76.89	**169**	Jeneponto	74.94
124	Karangasem	76.89	**170**	Tapanuli Utara	74.91
125	Padang Pariaman	76.69	**171**	Minahasa Tenggara	74.89
126	Kulon Progo	76.59	**172**	Ciamis	74.86
127	Musi Rawas	76.58	**173**	Sigi	74.82
128	Sukamara	76.54	**174**	Tegal	74.70
129	Mamuju Tengah	76.52	**175**	Aceh Jaya	74.67
130	Morowali	76.49	**176**	Mukomuko	74.60
131	Bantul	76.48	**177**	Tana Toraja	74.48
132	Lampung Selatan	76.48	**178**	Nabire	74.41

Peringkat	Nama Kabupaten	Skor	Peringkat	Nama Kabupaten	Skor
179	Bandung	74.37	**225**	Pesawaran	72.54
180	Bireuen	74.35	**226**	Banjarnegara	72.35
181	Sukabumi	74.32	**227**	Tasikmalaya	72.28
182	Lumajang	74.28	**228**	Barito Selatan	72.28
183	Humbang Hasundutan	74.27	**229**	Aceh Timur	72.26
184	Buton Utara	74.25	**230**	Buru	72.24
185	Tanjung Jabung Timur	74.18	**231**	Wakatobi	72.23
186	Barito Timur	74.14	**232**	Lampung Utara	72.18
187	Pasaman	74.12	**233**	Muara Enim (Liot)	72.12
188	Ngada	74.11	**234**	Pangkajene Kepulauan	72.11
189	Minahasa Selatan	74.06	**235**	Parigi Moutong	72.07
190	Jember	74.02	**236**	Tanggamus	71.96
191	Purbalingga	74.00	**237**	Simeulue	71.69
192	Banyumas	73.99	**238**	Lebak	71.63
193	Ogan Ilir	73.96	**239**	Pidie Jaya	71.62
194	Morowali Utara	73.96	**240**	Bengkulu Selatan	71.55
195	Bungo	73.89	**241**	Cianjur	71.47
196	Oku Selatan	73.87	**242**	Tapanuli Tengah	71.36
197	Halmahera Utara	73.86	**243**	Rejang Lebong	71.35
198	Ogan Komering Ulu	73.74	**244**	Aceh Barat Daya	71.29
199	Way Kanan	73.63	**245**	Pohuwato	71.29
200	Sidoarjo	73.55	**246**	Kutai Timur	71.27
201	Gorontalo Utara	73.53	**247**	Seruyan	71.23
202	Asahan	73.45	**248**	Empat Lawang	71.18
203	Kepahiang	73.44	**249**	Pekalongan	71.17
204	Cirebon	73.38	**250**	Tangerang	71.10
205	Sawah Lunto/Siunjung	73.36	**251**	Tanjung Jabung Barat	71.04
206	Kebumen	73.32	**252**	Polewali Mamasa	70.87
207	Situbondo	73.32	**253**	Bandung Barat	70.84
208	Padang Lawas Utara	73.26	**254**	Lahat	70.82
209	Kayong Utara	73.16	**255**	Siak	70.78
210	Garut	73.09	**256**	Lampung Barat	70.76
211	Halmahera Selatan	72.93	**257**	Kutai Barat	70.64
212	Bengkulu Utara	72.92	**258**	Pakpak Barat	70.56
213	Nagan Raya	72.80	**259**	Tapanuli Selatan	70.47
214	Pulau Morotai	72.79	**260**	Ketapang	70.42
215	Gorontalo	72.79	**261**	Pandeglang	70.42
216	Pasir	72.76	**262**	Lombok Barat	70.39
217	Toli-Toli	72.76	**263**	Selayar	70.18
218	Sarolangun	72.70	**264**	Gayo Lues	70.09
219	Bengkulu Tengah	72.63	**265**	Kuantan Sengingi	70.08
220	Kapuas Hulu	72.59	**266**	Bondowoso	70.03
221	Samosir	72.58	**267**	Lombok Tengah	69.89
222	Enrekang	72.57	**268**	Tana Tidung	69.82
223	Brebes	72.55	**269**	Aceh Utara	69.77
224	Aceh Tenggara	72.54	**270**	Sekadau	69.76

Peringkat	Nama Kabupaten	Skor	Peringkat	Nama Kabupaten	Skor
271	Probolinggo	69.75	317	Kepulauan Talaud	63.62
272	Seluma	69.74	318	Melawai	63.47
273	Boalemo	69.24	319	Nias	63.43
274	Lebong	69.17	320	Manggarai	63.38
275	Sintang	68.92	321	Lombok Utara	63.34
276	Nageko	68.90	322	Nias Selatan	63.02
277	Mahakam Ulu	68.88	323	Timor Tengah Selatan	53.86
278	Sikka	68.76	324	Indragiri Hulu	53.79
279	Flores Timur	68.75	325	Kep. Seribu	53.41
280	Sampang	68.69	326	Muna Barat	52.95
281	Sumenep	68.64	327	Kampar	52.74
282	Donggala	68.36	328	Seram Bagian Timur	51.89
283	Bone Bolango	68.24	329	Pulau Tallabu	50.90
284	Manggarai Barat	68.07	330	Boven Digul	50.69
285	Pesisir Barat	67.99	331	Labuhan Batu Selatan	50.64
286	Piddie	67.97	333	Waropen	50.18
287	Pali	67.97	334	Kepulauan Mentawai	49.92
288	Kotawaringin Barat	67.91	335	Paniai	49.35
289	Kaur	67.68	336	Buton Tengah	49.11
290	Banggkalan	67.65	337	Kepulauan Meranti	48.94
291	Bogor	67.56	338	Siau Tagulandang Biaro	48.88
292	Halmahera Tengah	67.48	339	Aceh Singkil	48.22
293	Lombok Timur	67.40	340	Buton Selatan	48.07
294	Mandailing Natal	67.37	341	Maluku Barat Daya	45.55
295	Buton	67.35	342	Kaimana	45.54
296	Mamasa	67.32	343	Banggai Laut	45.42
297	Aceh Selatan	67.24	345	Lingga	45.06
298	Pelalawan	66.87	346	Banggai Kepulauan	44.84
299	Buol	66.85	347	Bener Meriah	44.28
300	Maluku Tengah	66.68	348	Sorong Selatan	44.02
301	Belu	66.58	349	Biak Namfor	42.87
302	Batanghari	66.56	350	Sarmi	40.76
303	Murung Raya	66.40	351	Fax-Fax	39.29
304	Pamekasan	66.35	352	Sabu Raijua	38.58
305	Indragiri Hilir	66.21	353	Teluk Bintuni	37.23
306	Bangka Selatan	66.21	354	Maluku Tenggara Barat	36.57
307	Muna	66.00	355	Kepulauan Aru	35.76
308	Padang Lawas	65.77	356	Supiori	35.55
309	Aceh Tengah	65.51	357	Teluk Wondana	33.22
310	Bolmong Selatan	64.90	358	Maybart	32.55
311	Konawe Kepulauan	64.77	359	Yalimo	30.71
312	Lembata	64.65	360	Pegunungan Arfak	30.25
313	Kolaka Utara	64.33	361	Tolikara	29.83
314	Majene	64.02	362	Mappi	28.34
315	Bangka Barat	63.99	363	Yahukimo	28.31
316	Tojo Una-Una	63.73	364	Asmat	27.91

Peringkat	Nama Kabupaten	Skor		Peringkat	Nama Kabupaten	Skor
365	Pegunungan Bintang	27.71		**371**	Membramo Tengah	21.63
366	Tambrauw	26.03		**372**	Dogiyai	20.33
367	Puncak	24.21		**373**	Lanny Jaya	19.08
368	Puncak Jaya	23.81		**374**	Intan Jaya	7.81
369	Deiyai	23.29		**375**	Nduga	7.38
370	Membramo Raya	21.94				

Tabel 6. Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kota 2018

Peringkat	Nama Kota	Skor		Peringkat	Nama Kota	Skor
1	Denpasar	92.81		**42**	Bogor	74.37
2	Jakarta Selatan	87.72		**43**	Jambi	74.26
3	Jakarta Barat	87.03		**44**	Palu	74.12
4	Semarang	85.93		**45**	Payakumbuh	74.05
5	Jakarta Utara	85.71		**46**	Cirebon	73.75
6	Jakarta Pusat	84.66		**47**	Palembang	73.26
7	Surabaya	84.44		**48**	Palangka Raya	72.24
8	Jakarta Timur	84.33		**49**	Pare Pare	71.91
9	Balikpapan	83.62		**50**	Tomohon	71.76
10	Bukit Tinggi	83.45		**51**	Ambon	70.46
11	Depok	83.39		**52**	Pontianak	70.31
12	Tangerang Selatan	83.33		**53**	Banjar Baru	70.21
13	Banda Aceh	82.95		**54**	Palopo	69.51
14	Madiun	82.59		**55**	Mobago	69.36

Peringkat	Nama Kota	Skor		Peringkat	Nama Kota	Skor
15	Samarinda	82.56		**56**	Lhokseumawe	69.29
16	Bekasi	82.50		**57**	Kediri	69.15
17	Makasar	82.38		**58**	Bau-Bau	68.98
18	Bandung	81.86		**59**	Bandar Lampung	68.93
19	Malang	81.59		**60**	Cilegon	68.72
20	Bontang	81.42		**61**	Probolinggo	68.69
21	Medan	81.42		**62**	Tanjung Pinang	68.53
22	Pekan Baru	81.15		**63**	Binjai	68.46
23	Salatiga	81.09		**64**	Sungai Penuh	67.60
24	Ternate	80.87		**65**	Mataram	67.41
25	Batam	79.79		**66**	Sukabumi	67.32
26	Mojokerto	79.45		**67**	Tegal	67.18
27	Padang	79.41		**68**	Blitar	66.84
28	Kendari	79.03		**69**	Bitung	66.75
29	Solok	78.54		**70**	Langsa	66.68
30	Magelang	78.43		**71**	Metro	65.98
31	Pangkal Pinang	78.18		**72**	Pasuruan	64.91
32	Surakarta	77.65		**73**	Pariaman	64.77
33	Gorontalo	77.58		**74**	Bengkulu	64.58
34	Manado	77.25		**75**	Banjar	64.33
35	Tangerang	76.84		**76**	Sawah Lunto	64.17
36	Yogyakarta	76.82		**77**	Dumai	63.67
37	Cimahi	76.48		**78**	Pekalongan	62.42
38	Padang Panjang	76.19		**79**	Kupang	62.01
39	Banjarmasin	75.82		**80**	Sibolga	61.81
40	Pematang Siantar	74.56		**81**	Jayapura	61.47
41	Tarakan	74.44		**82**	Batu	61.21

Peringkat	Nama Kota	Skor		Peringkat	Nama Kota	Skor
83	Tebing Tinggi	60.73		**91**	Prabumulih	51.88
84	Bima	59.96		**92**	Tidore Kepulauan	51.15
85	Serang	59.16		**93**	Tanjung Balai	49.87
86	Sorong	58.40		**94**	Lubuk Linggau	48.90
87	Singkawang	57.97		**95**	Gunung Sitoli	36.77
88	Padang Sidempuan	57.48		**96**	Pagar Alam	36.41
89	Sabang	56.89		**97**	Tual	24.44
90	Tasikmalaya	56.09		**98**	Subulussalam	21.50

3.1.6. MONITORING PENGGILINGAN

Sesuai amanah UU No.18 tahun 2012 tentang pangan, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan,kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan

tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan,dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Sedangkan pangan pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal. Ketersediaan pangan dipengaruhioleh produksi domestik, ekspor, impor, dan stok/cadangan.Hubungan ketersediaan dan kebutuhan pangan akan mempengaruhi neraca ketersediaan pangan, apakah surplus atau defisit.

Sampai saat ini, beras masih merupakan pangan pokok sumber karbohidrat bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Kebijakan pengelolaan cadangan beras secara nasional sudah dilakukan hampir di seluruh negara, termasuk Indonesia. Pengelolaan cadangan beras bertujuan untuk mengantisipasi masalah pangan, terutama untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi masyarakat. Cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan beras masyarakat berada di rumah tangga petani, pedagang, penggilingan, rumah tangga konsumen, hotel, restoran dan industri pengolahan.

Penggilingan padi merupakan bagian dari rantai pasok beras nasional dan memiliki kontribusi penting dalam penyediaan beras dari segi kuantitas dan kualitas untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Penggilingan memiliki peranan penting antara lain: (1) menyediakan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat; (2) menjadi titik sentral pengolahan atau perubahan bentuk padi menjadi beras; (3) menentukan kuantitas dan kualitas beras; (4) menentukan tingkat harga gabah dan beras; dan (5) membuka peluang lapangan pekerjaan.

Berdasarkan hasil Pendataan Industri Penggilingan Padi (PIPA) yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2012, jumlah penggilingan yang ada di Indonesia sebanyak 182.198 unit, terdiri dari 169.043 unit (92,78%) kapasitas kecil, 8.628 unit (4,74%) kapasitas sedang, 2.075 unit (1,14%) kapasitas besar, dan 2.452 unit (1,35%) tidak tercatat golongan kapasitasnya.

Berdasarkan survei Kajian Cadangan Beras tahun 2015 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian pada tiga waktu pengamatan yaitu 31 Maret 2015, 30 Juni 2015, dan 30 September 2015, diperoleh informasi besaran stok beras yang ada di penggilingan, masing-masing sebanyak 0,56 juta ton, 1,27 juta ton dan 0,73 juta ton. Total stok beras tersebut mencakup gabah yang dikonversi ke beras, beras pecah kulit, menir, serta tepung beras/ketan. Informasi stok beras ini hanya dilakukan pada tiga waktu pengamatan saja, padahal diperlukan informasi stok beras setiap saat dan berkelanjutan (minimal satu

minggu sekali).

Sampai saat ini data dan informasi stok gabah dan beras di penggilingan belum tersedia secara periodik, akurat, dan terkini sebagai bahan kebijakan ketersediaan pangan. Untuk itu dilakukan monitoring jumlah stok gabah dan beras di penggilingan setiap minggu secara nasional, yang dilaksanakan di 1.000 unit penggilingan pada 64 kabupaten di 22 provinsi.

a. Pelaksanaan Monitoring Stok gabah/beras di penggilingan

Pelaksanaan monitoring stok gabah dan beras di penggilingan dilakukan melalui kegiatan :

1) Pelatihan Koordinator Enumerator Monitoring Stok Gabah dan Beras di Penggilingan

Pelatihan dilaksanakan untuk membangun kesamaan persepsi dan meningkatkan pemahaman bagi aparat daerah dalam pengumpulan data dan penyampaian laporan kegiatan monitoring stok gabah dan beras di pengilingan. Beberapa hal yang menjadi bahan diskusi dan perlu mendapat perhatian lebih lanjut adalah:

- Desain sampling menggunakan hasil Pendataan Penggilingan Padi (PIPA) tahun 2012 perlu diperbarui karena banyak penggilingan yang sudah tidak beroperasi atau berganti status. Daftar usulan penggilingan sampel yang lokasinya jauh atau sudah tidak beroperasi lagi dapat diganti dengan: (1) penggilingan cadangan yang masih eksis; (2) penggilingan yang menjadi responden tahun lalu yang respon pengiriman datanya baik; atau (3) penggilingan LUPM, yang lokasinya lebih mudah dijangkau dan memiliki kapasitas yang sama.
- Desain sampling monitoring diharapkan tidak hanya dapat digunakan untuk menghitung estimasi stok nasional, tapi juga untuk menghitung estimasi stok gabah dan beras di provinsi dan kabupaten/kota. Karena itu, perlu dibuat desain sampling dan pengolahan data untuk menghitung estimasi stok di provinsi dan kabupaten/kota agar kegiatan ini juga dapat dilaksanakan di provinsi dan kabupaten/kota.
- Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan dan memperbarui kerangka sampel yang saat ini digunakan dari hasil PIPA tahun 2012, perlu disampaikan surat dari Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian ke Bupati/Walikota agar pemerintah kabupaten/kota memberikan

dukungan terhadap kegiatan monitoring stok gabah dan beras di penggilingan serta melakukan inventarisasi kembali perusahaan penggilingan yang masih aktif.

- Untuk meningkatkan kinerja enumerator di kabupaten/kota, diusulkan untuk memberikan penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) bagi dinas ketahanan pangan kabupaten/kota atau enumerator yang memiliki kinerja yang baik dan yang tidak baik. Disamping itu, diusulkan juga untuk membuat pakta integritas agar enumerator memiliki komitmen yang tinggi dalam pengumpulan data, sehingga data yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman enumerator dalam pengumpulan data, perlu dilakukan pelatihan atau bimbingan teknis bagi enumerator.
- Dalam upaya penyampaian laporan data dan informasi penggilingan dari enumerator secara cepat dan terkini, telah dibuat aplikasi SIPIPA (Sistem Informasi Pendataan Penggilingan Padi) bekerja sama dengan Pusat Data dan Informasi Pertanian Kementan. Terkait dengan aplikasi tersebut, untuk mempermudah pengiriman data dari lokasi kabupaten/kota yang akses internetnya sulit, maka diusulkan pengiriman data melalui sms center yang dapat terkoneksi ke aplikasi.
- Perlu dilakukan evaluasi kegiatan dan perencanaan pelaksanaan kegiatan untuk tahun berikutnya di akhir tahun, sehingga kegiatan dapat segera dilaksanakan pada awal tahun.
- Dinas/unit ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota harus segera menyampaikan usulan koordinator enumerator dan enumerator ke Badan Ketahanan Pangan agar dapat segera dibuat SK Penetapan Koordinator Enumerator dan Enumerator oleh Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dan kegiatan pengumpulan dapat segera dilaksanakan bulan Maret tahun 2018.

2) Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan monitoring stok gabah dan beras di penggilingan dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Data identitas penggilingan berdasarkan data PIPA BPS tahun 2012 yang diverifikasi kembali oleh enumerator dan petugas dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten. Apabila saat verifikasi ditemukan perbedaan/perubahan dari data yang ada,

maka diganti dengan penggilingan yang lain dengan ketentuan memiliki kriteria kapasitas yang sama dan melaporkannya ke pusat. Sedangkan untuk data bulanan, pengumpulan data dilakukan mulai dari data bulan Maret sampai dengan Desember setiap minggu.

3) Supervisi Lapangan

Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung kegiatan pengumpulan data, memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah, memverifikasi data penggilingan yang masih aktif, baik data yang ada di Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan enumerator dan petugas dari kabupaten, serta sebagai uji petik untuk mengkroscek data stok gabah/beras yang telah diterima dari enumerator.

4) Pertemuan Evaluasi Monitoring Stok Gabah dan Beras di Penggilingan

Pertemuan diselenggarakan dalam rangka melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring stok gabah dan beras di penggilingan pada tahun 2018, khususnya dalam pengumpulan data dan penyampaian laporan dari kabupaten ke pusat (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian). Melalui pertemuan ini diharapkan dapat diketahui permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan, sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Beberapa hal yang dapat dicatat dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Cadangan beras nasional terdiri dari cadangan beras pemerintah dan cadangan beras masyarakat. Cadangan beras pemerintah dikuasai oleh Perum Bulog, sedangkan cadangan pangan masyarakat tersebar di rumah tangga petani, industri penggilingan padi, pedagang, hotel, restoran dan rumah tangga konsumen. Cadangan beras di masyarakat saat ini belum dapat diketahui secara pasti, sehingga monitoring stok penggilingan perlu dilakukan secara periodik untuk memperkirakan besaran stok beras di masyarakat.
- Beberapa hal yang menjadi bahan diskusi dan perlu mendapat perhatian lebih lanjut adalah:
    a) Penyampaian laporan dari enumerator kabupaten terlambat, sehingga pengolahan data tidak dapat dilakukan tepat waktu setiap minggu dan data yang dihasilkan kurang up to date. Oleh karena itu perlu dilakukan

penyempurnaan metodologi dan petunjuk pelaksanaan pengumpulan data stok dan penyampaian laporan dari kabupaten ke pusat.

b) Koordinator provinsi kurang berperan dalam mengkoordinasikan penyampaian laporan dari enumerator kabupaten yang menyebabkan data tidak dapat disampaikan tepat waktu ke pusat. Koordinator provinsi diharapkan dapat mendorong enumerator kabupaten dalam penyampaian laporan ke pusat.

c) Data stok yang disampaikan masih kurang valid dan akurat, dimana terdapat data yang overestimate dan data yang tetap/tidak berubah setiap minggunya. Oleh karena itu, enumerator kabupaten diharapkan dapat melakukan validasi data yang diperoleh dari penggilingan. Koordinator provinsi diharapkan dapat membantu melakukan validasi dan rekapitulasi data dari kabupaten serta menyampaikan hasilnya ke pusat.

d) Provinsi dan kabupaten diharapkan dapat melakukan monitoring stok gabah dan beras di penggilingan untuk memperkirakan besaran stok gabah dan beras di tingkat provinsi dan kabupaten. Oleh karena itu perlu disusun desain sampling dan pengolahan data serta panduan monitoring stok gabah dan beras di penggilingan pada tingkat provinsi dan kabupaten.

5) Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setiap hari Jum'at untuk dilaporkan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan, sedangkan laporan kepada Menteri Pertanian pada setiap akhir bulan.

6) Hasil dan Pembahasan

- **Jumlah sampel per provinsi**

Proses penentuan sampel dilakukan dengan metode pemilihan sampel stratifikasi bertahap *(multistage stratified sampling).* Jumlah sampel pada kegitan ini adalah 1.000 penggilingan yang tersebar di 64 Kabupaten di 22 Provinsi. Berikut jumlah sampel berdasarkan kapasitas penggilingan per provinsi pada kegiatan monitoring stok gabah dan beras di penggilingan tahun 2018.

Tabel 7. Jumlah sampel per provinsi berdasarkan kapasitas penggilingan

No	Provinsi	Jumlah Sampel			Total
		Besar	Sedang	Kecil	
1	Bali		1	10	11
2	Aceh	1	1	12	14
3	DI Yogyakarta		1	10	11
4	Jambi			7	7
5	Jawa Barat	10	32	217	259
6	Jawa Tengah		4	121	125
7	Jawa Timur		8	100	108
8	Kalimantan Barat		1	39	40
9	Kalimantan Selatan			21	21
10	Kalimantan Tengah			11	11
11	Kalimantan Timur		1	8	9
12	Lampung		1	58	59
13	Nusa Tengara Barat			10	10
14	Riau			4	4
15	Sulawesi Barat			7	7
16	Sulawesi Selatan	5	12	109	126
17	Sulawesi Tengah			9	9
18	Sulawesi Tenggara		1	10	11
19	Sulawesi Utara			11	11
20	Sumatera Barat		1	17	18
21	Sumatera Selatan	2	6	93	101
22	Sumatera Utara		1	27	28
	Total	**17**	**71**	**912**	**1000**

- Presentase Jumlah Laporan yang Masuk Selama Bulan Maret sampai Desember 2018.

  Rata-rata data yang masuk setiap bulan sebesar 81,4% dengan persentase tertinggi pada bulan April 2018 sebesar 88,6%, dan terendah pada bulan Desember 2018 sebesar 65,4%. Dapat dilihat bahwa pengumpulan data pada bulan Desember sangat menurun, hal ini antara lain disebabkan pada akhir tahun sebagian besar enumerator sangat sibuk menyelesaikan kegiatan di masing-masing wilayahnya sehingga tidak sempat mengumpulkan data.

  Berdasarkan wilayah, provinsi yang memberikan laporan data stok di penggilingan secara lengkap (100%) dari bulan Maret – Desember 2018

adalah provinsi Aceh dan Sumatera Barat, sedangkan provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang terendah dalam memberikan laporan (0%). Provinsi Kalimantan Tengah tidak pernah mengirimkan data karena kurangnya pemahaman enumerator dalam proses pengumpulan dan pengiriman data, sehingga data yang dikirim oleh enumerator tidak sesuai dengan format yang diminta.

Tabel 8. Persentase jumlah laporan masuk per provinsi bulan Maret–Desember 2018

No	Provinsi	Persentase Jumlah Laporan Masuk										Rata-rata
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Aceh	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0
2	Sumatera Utara	87,5	87,5	85	93,75	100	100	100	100	100	100	95,4
3	Sumatera Barat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0
4	Riau	75	100	80	100	100	100	100	80	75	75	88,5
5	Jambi	100	100	100	100	100	100	100	100	50	100	95,0
6	Sumatera Selatan	100	100	88,9	100	86,7	100	94,4	77,8	83,3	83,3	91,4
7	Lampung	100	75	86,7	75	86,7	100	100	100	100	100	92,3
8	Jawa Barat	100	100	93,6	80	87,2	100	100	95,2	100	100	95,6
9	Jawa Tengah	88,5	95,8	93,3	87,5	93,3	97,9	91,7	100	100	100	94,8
10	Jawa Timur	100	100	100	93,2	100	100	100	100	100	100	99,3
11	DI Yogyakarta	50	100	60	100	40	100	100	100	100	50	80,0
12	Kalimantan Barat	87,5	100	50	50	50	37,5	50	15	75	12,5	52,8
13	Kalimantan Selatan	100	87,5	100	75	90	100	100	80	87,5	50	87,0
14	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
15	Kalimantan Timur	100	75	80	100	100	100	100	80	75	0	81,0
16	Bali	100	100	80	50	40	100	100	80	100	25	77,5
17	Nusa Tenggara Barat	100	100	100	100	100	50	0	80	100	50	78,0
18	Sulawesi Selatan	91,7	100	100	100	80	100	100	100	95,83	93,75	96,1
19	Sulawesi Barat	50	100	100	100	20	100	100	100	100	100	87,0
20	Sulawesi Tengah	100	75	20	0	20	25	25	0	0	0	26,5
21	Sulawesi Utara	100	75	60	100	60	100	100	100	100	100	89,5
22	Sulawesi Tenggara	100	100	100	50	100	100	100	100	75	0	82,5
Rata-rata		**87,7**	**89,6**	**80,8**	**79,7**	**75,2**	**86,8**	**84,6**	**81,3**	**82,6**	**65,4**	**81,4**

- **Total Stok Setara Beras di Penggilingan Pada Bulan Maret – Desember 2018**.

  Total stok setara beras merupakan penjumlahan dari stok gabah kering panen (GKP) dan stok gabah kering giling (GKG) yang dikonversi menjadi setara beras dan ditambah jumlah stok beras yang ada di penggilingan. Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan dari bulan Maret – Desember 2018, diperoleh data stok setara beras di pengilingan tertinggi pada bulan Juni 2018 sebesar 1.902.669 ton, dan stok terendah pada bulan November 2018 sebesar 1.036.428 ton. Tingginya stok setara beras di penggilingan pada bulan Juni 2018 diduga disebabkan pada bulan Juni merupakan momen idul fitri sehingga penggilingan banyak menyimpan stok untuk keperluan zakat fitrah dan lebaran, sedangkan pada bulan November stok setara beras di penggilingan menurun karena apabila dibandingkan dengan produksi, produksi pada bulan November mengalami penurunan dan juga terjadi musim hujan sehingga penggilingan yang tidak memiliki dryer agak kesulitan dalam mengeringkan gabah yang akan digiling sehingga mereka lebih memilih tidak menyimpan gabah dan beras tidak terlalu banyak untuk meminimalisir kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkan karena musim hujan.

Gambar 8.Stok setara beras di penggilingan pada bulan Maret – Desember 2018

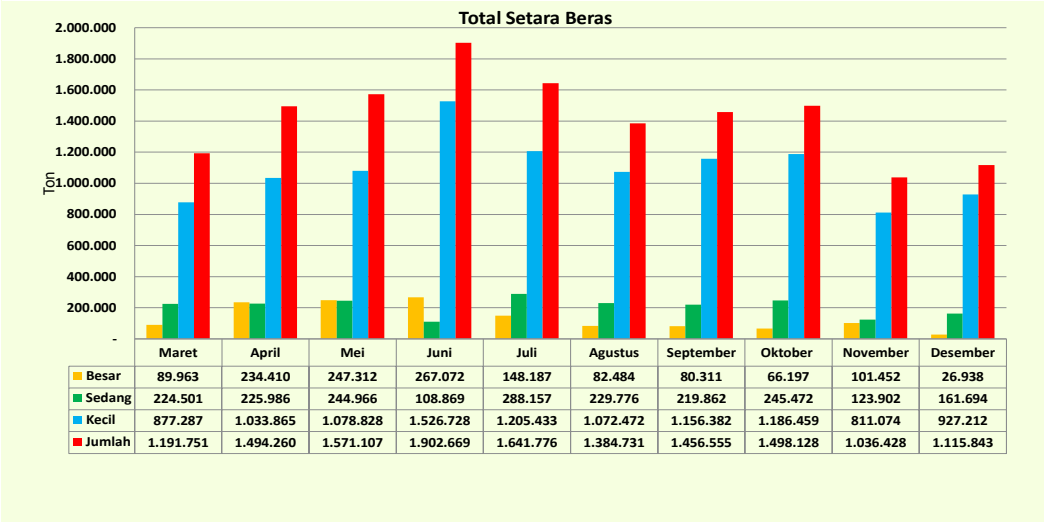

	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Besar	89.963	234.410	247.312	267.072	148.187	82.484	80.311	66.197	101.452	26.938
Sedang	224.501	225.986	244.966	108.869	288.157	229.776	219.862	245.472	123.902	161.694
Kecil	877.287	1.033.865	1.078.828	1.526.728	1.205.433	1.072.472	1.156.382	1.186.459	811.074	927.212
Jumlah	1.191.751	1.494.260	1.571.107	1.902.669	1.641.776	1.384.731	1.456.555	1.498.128	1.036.428	1.115.843

- **Stok Setara Beras di Penggilingan Berdasarkan Kapasitasnya Bulan Maret – Desember 2018**

a. Stok Gabah dan Beras di Penggilingan Kapasitas Besar

Penggilingan padi besar memiliki kapasitas produksi lebih dari 3 ton beras per jam dengan konfigurasi mesin penggiling padi yang terdiri dari *dryer, cleaner, husker*, separator dan *polisher*. Penggilingan padi besar dapat melakukan 3 kali atau lebih proses penyosohan atau disebut dengan penggilingan padi 1 fase. Berdasarkan hasil pengumpulan data bulan Maret – Desember 2018 diperoleh data stok setara beras di penggilingan kapasitas besar tertinggi terjadi pada bulan Juni 2018 sebanyak 267.072 ton, sedangkan stok terendah pada bulan Oktober 2018 sebesar 66.197 ton.

Gambar 9. Stok setara beras di penggilingan kapasitas besar pada bulan Maret – Desember 2018

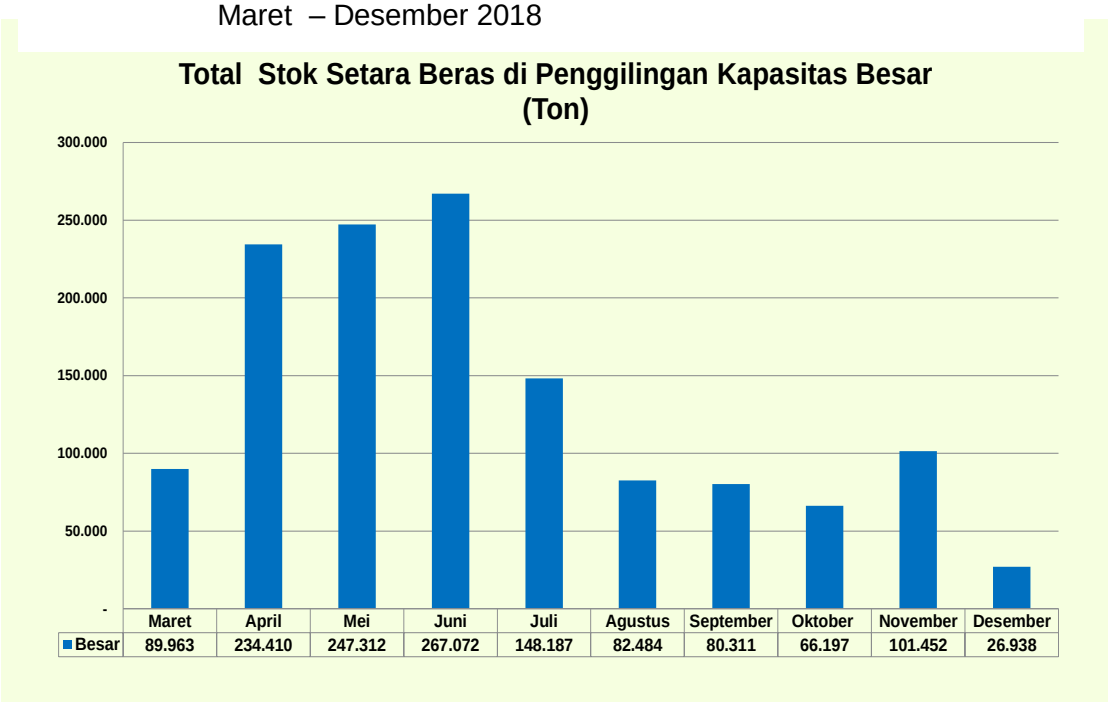

b. Stok Gabah dan Beras di Penggilingan Kapasitas Sedang

Penggilingan padi kapasitas sedang atau Penggilingan Padi Menengah (PPM) memiliki kapasitas produksi 1,5 – 3 ton beras per jam dan umumnya memiliki konfigurasi mesin penggilingan padi yang terdiri dari *cleaner, husker* (mesin pemecah kulit), *separator* dan *polisher* (mesin penyosoh atau

pemutih). Penggilingan padi menengah dapat melakukan 2 kali proses penyosohan atau disebut dengan penggilingan padi 2 fase.

Berdasarkan hasil pengambilan data bulan Maret – Desember 2018 diperoleh data stok setara beras di penggilingan kapasitas sedang tertinggi pada bulan Juli 2018 sebesar 288.157 ton dan stok terendah pada bulan Juni 2018 sebesar 108.869 ton.

Gambar 10.Stok setara beras di penggilingankapasitassedangpada bulan Maret – Desember 2018

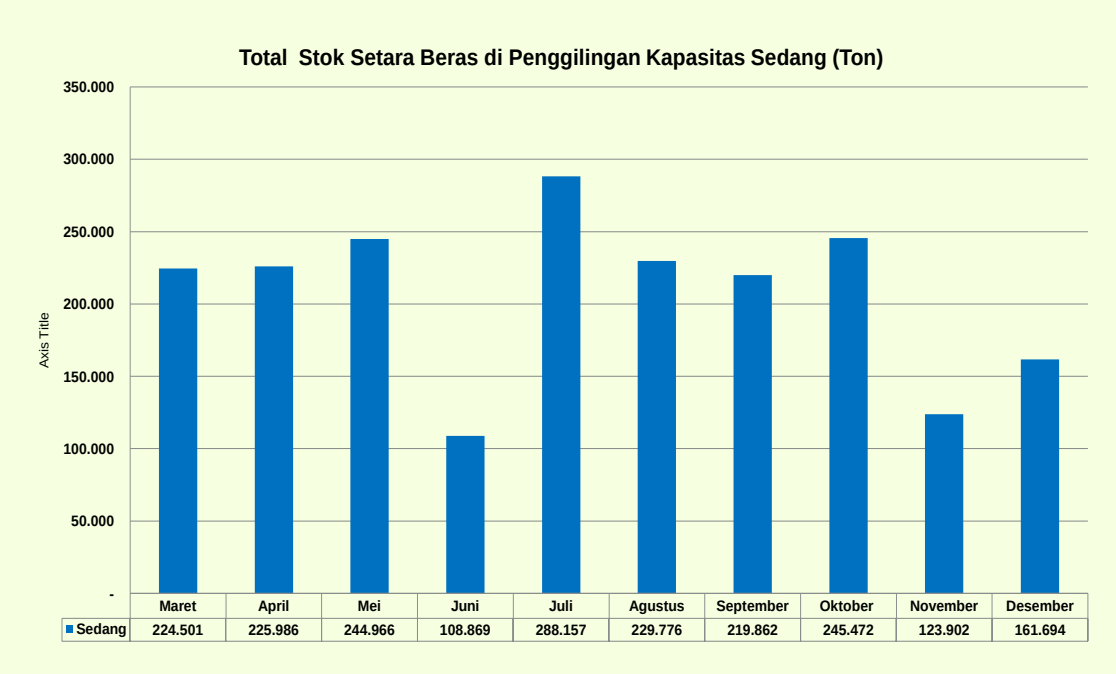

c. Stok Gabah dan Beras di Penggilingan Kapasitas Kecil

Berdasarkan hasil pengumpulan data bulan Maret – Desember 2018 diperoleh data stok setara beras di penggilingan kapasitas kecil tertinggi pada bulan Juni 2018 dimana stok setara beras sebesar 1.526.728 ton dan stok terendah pada bulan November sebesar 811.074 ton. Stok gabah dan beras di penggilingan kapasitas kecil per bulan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 11.Stok gabah dan beras di penggilingan kapasitas kecil bulan Maret – Desember 2018

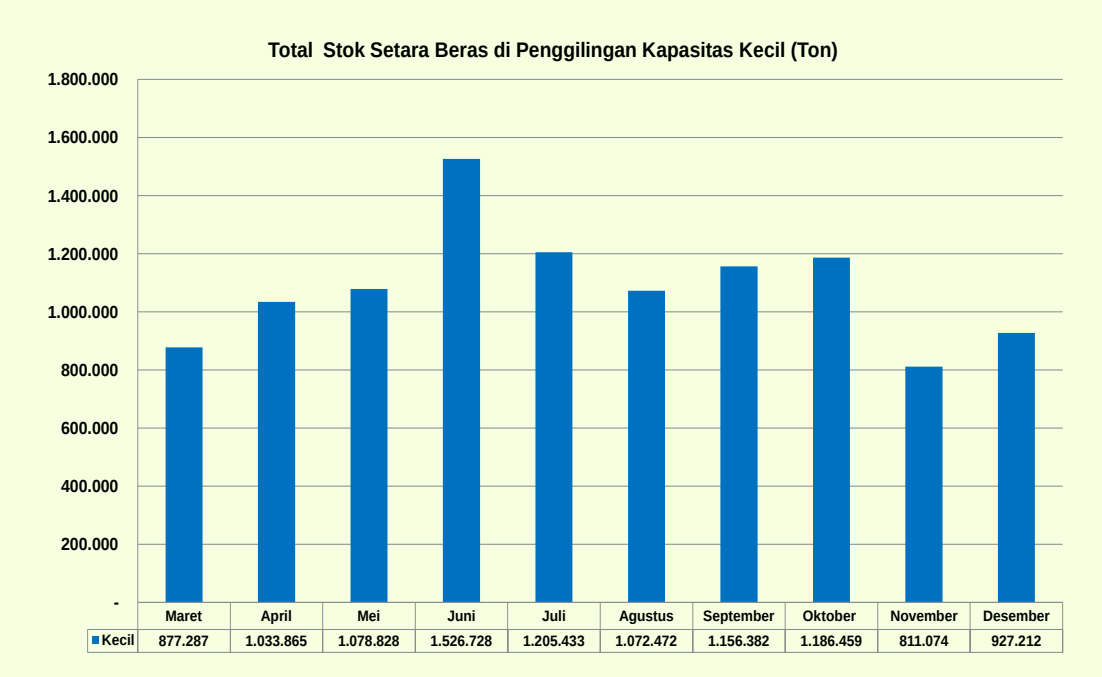

Stok di penggilingan kecil setiap bulan lebih tinggi daripada stok di penggilingan besar maupun sedang. Hal tersebut terjadi karena proporsi jumlah penggilingan kecil di Indonesia lebih banyak dibanding penggilingan besar dan sedang.

- Presentase Stok Setara Beras di Penggilingan Terhadap Produksi Beras di Indonesia Bulan Maret – Desember 2018

  Angka produksi beras tertinggi berdasarkan data dari BPS terjadi pada bulan Maret 2018 yaitu sebesar 7.071.100 ton sedangkan produksi terendah pada bulan November 2018 sebesar 2.54.200 ton. Stok setara beras di penggilingan setiap bulan berkisar antara 1.036.428 ton hingga 1.902.669 ton. Presentase stok setara beras di penggilingan terhadap produksi berkisar antara 16,85% hingga 52,04%. Presentase stok setara beras di penggilingan terhadap produksi beras bulan Maret – Desember 2018 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 12. Presentase stok setara beras di penggilingan terhadap produksi beras bulan Maret – Desember 2018

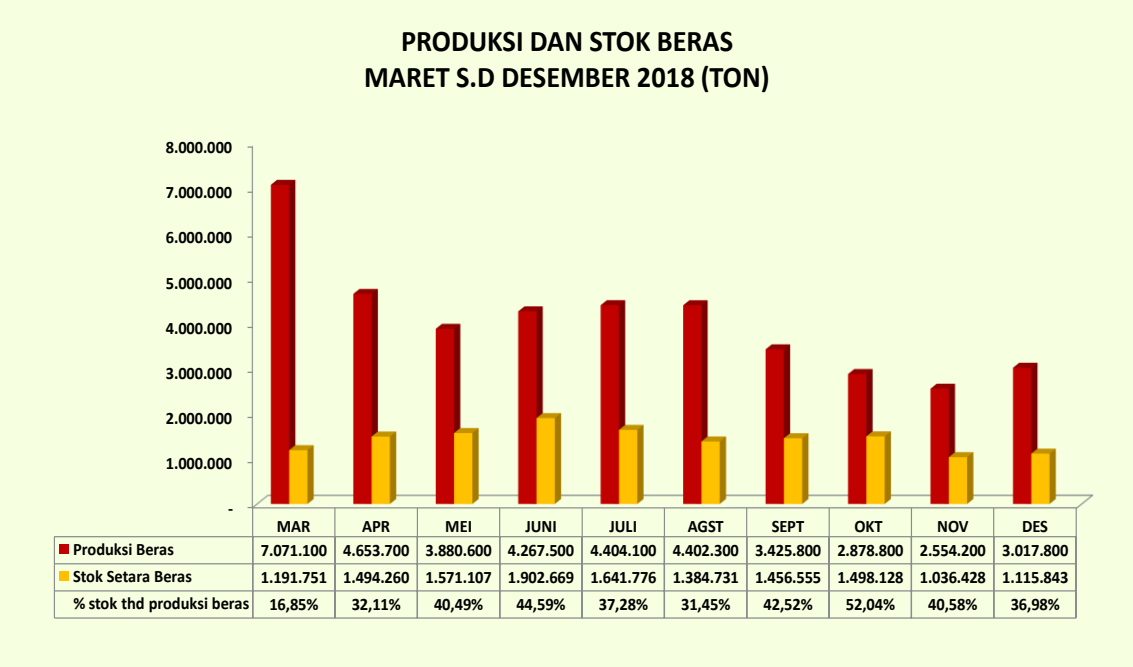

	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
Produksi Beras	7.071.100	4.653.700	3.880.600	4.267.500	4.404.100	4.402.300	3.425.800	2.878.800	2.554.200	3.017.800
Stok Setara Beras	1.191.751	1.494.260	1.571.107	1.902.669	1.641.776	1.384.731	1.456.555	1.498.128	1.036.428	1.115.843
% stok thd produksi beras	16,85%	32,11%	40,49%	44,59%	37,28%	31,45%	42,52%	52,04%	40,58%	36,98%

3.1.7. Smallholder Livelihood Development In Eastern Indonesia (SOLID)

Dukungan manajemen dan administrasi SOLID adalah kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas kinerja pelaksanaan kegiatan di pusat, provinsi dan kabupaten yang diselenggarakan dengan mengikuti berbagai kegiatan pelatihan/workshop, pertemuan konsolidasi periodik di pusat, provinsi dan kabupaten sesuai keahlian bidang yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing serta kinerja bagi staf pelaksana untuk mendorong perbaikan kinerja masing-masing.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan SOLID, sekretariat dibentuk di masing-masing satuan kerja, yaitu di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. Sekretariat di tingkat pusat dibantu oleh konsultan individu manajemen, monitoring dan evaluasi, pengadaan barang dan jasa serta perusahaan konsultan yang menempatkan wakilnya di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. Sekretariat di tingkat provinsi dibantu oleh konsultan pemberdayaan masyarakat dan gender dan konsultan value chain yang ditunjuk oleh perusahaan konsultan di tingkat pusat dan dibantu oleh LSM lokal yang melakukan pendampingan di desa-desa sasaran. Sekretariat di tingkat kabupaten dibantu oleh konsultan pertanian dan perkebunan yang ditunjuk oleh konsultan pusat, supervisor LSM yang ditempatkan di kabupaten, fasilitator desa yang ditempatkan di desa-desa sasaran dan PPL.

Sampai dengan tahun 2017, Program SOLID telah dilaksanakan di 224 desa (100 persen dari target) dan dirasakan manfaatnya oleh 27.115 rumah tangga (81 persen dari target sasaran 33.600 KK). Kurangnya capaian jumlah KK penerima manfaat tersebut disebabkan oleh populasi penduduk yang terbatas, pengundurkan diri, perpindahan dan meninggal dunia. Rumah tangga tersebut tergabung kedalam 2.192 Kelompok Mandiri (KM) (98 persen dari target 2240 KM). Berdasarkan jenis kelompok, Sebagian besar KM berupa Kelompok Mandiri Campuran (926 KMC), kemudian Kelompok Mandiri Wanita (703 KMW) dan Kelompok Mandiri Pria (562 KMP). Jumlah kelompok tiap kabupaten bervariasi karena disesuaikan dengan sasaran Program SOLID yaitu jumlah penduduk miskin di desa di kabupaten sasaran.

Berdasarkan hasil survey tahun 2018, tingkat kesejahteraan penerima manfaat SOLID lebih baik dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan bukan penerima. Hal tersebut sejalan dengan hasil *annual outcome survey* 2018 dimana penerima manfaat program mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik (57 persen) dibandingkan rumah tangga non penerima (25 persen).

Situasi ketahanan pangan rumah tangga penerima manfaat dinilai dari persepsi kecukupan pangannya. 95 persen rumah tangga telah cukup pangan, sedangkan 5 persen rumah tangga lainnya masih mengalami kekurangan pangan dengan durasi rata-rata 1 minggu selama satu tahun terakhir. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan dengan rumah tangga bukan penerima manfaat, yaitu 84 persen rumah tangga cukup pangan, 16 persen rumah tangga yang mengalami kekurangan pangan dengan durasi rata-rata 3,1 minggu selama satu tahun terakhir. Selain itu, rumah tangga penerima manfaat di kedua provinsi juga mengalami peningkatan konsumsi energi dari 1286 kkal/kap per hari menjadi 2090 kg/kap/hari (Maluku) dan dari 1364 kkal/kap/hari menjadi 2185 kkal/kap/hari (Maluku Utara).

Berdasarkan hasil survey akhir kegiatan diketahui bahwa penerima manfaat mengalami peningkatan pendapatan per kapita per bulan dari Rp. 242.101 (2012) menjadi Rp. 285.148 (2014) dan Rp. 438.975 (2018). Selain itu penerima manfaat juga mengalami peningkatan indeks kepemilikan aset dari 0,37 (2012) menjadi 0,54 (2018)

3.2 DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

3.2.1. Koefisien Variasi Harga Komoditas Pertanian Stategis di Tingkat Produsen

Definisi koefisien variansi (CV) adalah perbandingan antara simpangan standar harga (STD) di tingkat produsen dengan nilai rata-rata (average) harga di tingkat produsen yang dinyatakan dengan persentase (%). Rata-rata harga komoditas pertanian strategis di tingkat produsen dihitung dari 22 provinsi.

Koefisien variasi harga komoditas pertanian strategis menggambarkan seberapa jauh fluktuasi harga yang terjadi untuk setiap komoditas yang dipantau. Kondisi yang diharapkan adalah angka koefisien variasi yang kecil karena semakin rendah angka koefisien variasi berarti kondisi harga komoditas pertanian yang semakin stabil.

Stabilitas harga pangan di tingkat produsen merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai kesejahteraan petani. Sebagaimana karakter umum komoditas pertanian, harga di tingkat produsen sangat mudah berfluktuasi antara lain karena faktor pola panen dan sifat komoditas yang mudah rusak. Saat panen raya, petani menghadapi resiko turunnya harga jual komoditas pangan di tingkat petani. Sebaliknya waktu musim paceklik harga jual di tingkat petani dapat mengalami kenaikan yang berpengaruh kepada harga di tingkat eceran. Oleh karena itu pemerintah selalu berusaha agar harga yang diterima petani tetap pada level yang menguntungkan dan memberi insentif bagi petani (diatas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Acuan Pembelian (HAP), namun tetap pada level harga yang tidak menyebabkan kenaikan harga di tingkat eceran yang melebihi Harga Acuan Penjualan (HAP).

Sesuai dengan Target Indikator Kinerja Program (IKP) Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019, target nilai koefisien variasi harga komoditas pangan strategis nasional di tingkat produsen untuk Tahun 2018 ditetapkan dibawah 10-30 persen (Untuk komoditas gabah, jagung, dan kedelai maksimal 10%; bawang merah maksimal 25% dan cabai maksimal 30%). Hasil pemantauan harga komoditas pertanian strategis tingkat produsen Januari-Desember 2018

a. Koefisien Variasi Harga Gabah Kering Panen (GKP)

Gabah dan beras merupakan komoditas pangan pokok utama di Indonesia. Harga gabah di tingkat petani mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan harga beras di tingkat konsumen. Di sisi yang lain, harga gabah juga menentukan tingkat kesejahteraan petani. Kondisi yang diharapkan adalah petani menerima harga jual gabah yang layak dan menguntungkan baik pada masa di luar panen maupun saat puncak panen raya. Dari data Panel Harga BKP 2018, rata-rata harga GKP tingkat petani selama Tahun 2018 adalah Rp4.675/Kg. Tingkat harga ini di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp3.700/kg, sehingga dapat disimpulkan jika petani dalam kondisi diuntungkan.

Dari sisi stabilitas harga, capaian kinerja koefisien variasi harga GKP tingkat petani selama Tahun 2018 sebesar 3,24 persen. Angka ini sesuai dengan target karena dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu $\leq$ 10 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan jika harga GKP di tingkat petani stabil atau capaian kinerja baik. Apabila

dibandingkan terhadap target koefisien variasi harga GKP tingkat petani pada tahun 2019 (akhir RPJMN tahun 2015 – 2019) sebesar ≤ 10 persen, maka capaian tahun 2018 telah mencapai target, artinya harga GKP di tingkat petani stabil.

b. Koefisien Variasi Harga Jagung Pipilan Kering

Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2018, rata-rata harga jagung pipilan kering tingkat petani selama Tahun 2018 adalah Rp 3.451/Kg dan capaian kinerja koefisien variasi harga jagung pipilan kering tingkat petani sebesar 7,66%. Angka inisesuai dengan target karena dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu ≤ 10 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan jika harga beras medium tingkat penggilingan stabil dengan capaian kinerja baik. Apabila dibandingkan terhadap target koefisien variasi harga jagung pipilan kering tingkat petani pada tahun 2019 (akhir RPJMN tahun 2015 – 2019) sebesar ≤ 10 persen, maka capaian tahun 2018 telah mencapai target, artinya harga jagung pipilan kering tingkat petani stabil.

c. Koefisien Variasi Harga Kedelai Biji Kering

Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2018, rata-rata harga kedelai biji kering tingkat petani selama Tahun 2018 adalah Rp kedelai biji kering tingkat petani dan capaian kinerja koefisien variasi harga kedelai biji kering tingkat petani sebesar 1,51%. Angka inisesuai dengan target karena dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu ≤ 10 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan jika harga kedelai biji kering tingkat petani stabil dengan capaian kinerja baik. Apabila dibandingkan terhadap target koefisien variasi kedelai biji kering tingkat petani pada tahun 2019 (akhir RPJMN tahun 2015 – 2019) sebesar ≤ 10 persen, maka capaian tahun 2018 telah mencapai target, artinya harga kedelai biji kering tingkat petani stabil.

d. Koefisien Variasi Harga Bawang Merah

Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2018, rata-rata harga bawang merah tingkat petaniselama Tahun 2018 adalah Rp 18.727/kg dan capaian kinerja koefisien variasi harga bawang merah tingkat petanisebesar 16,99%. Angka inisesuai dengan target karena dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu ≤25 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan jika harga bawang merah tingkat petani stabil dengan capaian kinerja baik. Apabila dibandingkan terhadap target koefisien variasi harga bawang merah tingkat petani pada tahun 2019 (akhir RPJMN tahun 2015 – 2019) sebesar ≤25 persen, maka capaian tahun 2018 telah mencapai target, artinya harga bawang merah tingkat petani stabil.

e. Koefisien Variasi Harga Cabai Merah Keriting

Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2018, rata-rata harga

cabai merah keriting tingkat petani selama Tahun 2018 adalah Rp 23.676/kg dan capaian kinerja koefisien variasi harga cabai merah keriting tingkat petani sebesar 20,93%. Angka ini sesuai dengan target karena dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu ≤30 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan jika harga cabai merah keriting tingkat petani stabil dengan capaian kinerja baik. Apabila dibandingkan terhadap target koefisien variasi cabai merah keriting tingkat petani pada tahun 2019 (akhir RPJMN tahun 2015 – 2019) sebesar ≤30 persen, maka capaian tahun 2018 telah mencapai target, artinya harga cabai merah keriting tingkat petani stabil.

Tabel 9. Perkembangan Harga dan Nilai Koefisien Variasi Harga Pangan Tingkat Produsen Tahun 2018

No	Komoditas	Rata-rata Jan'18	Rata-rata Feb'18	Rata-rata Mar'18	Rata-rata Apr'18	Rata-rata Mei'18	Rata-rata Juni'18	Rata-rata Juli'18	Rata-rata Agust'18	Rata-rata Sept'18	Rata-rata Okt'18	Rata-rata Nov'18	Rata-rata Des'18	Rata-rata	Maks	Min	CV (%)
1	GKP Tk Petani	4,879	4,911	4,663	4,495	4,472	4,504	4,552	4,622	4,687	4,709	4,781	4,822	4,675	4,911	4,472	3.24
2	Beras Medium Tk Penggilingan	9,643	9,822	9,424	9,133	9,060	9,052	9,068	9,144	9,166	9,240	9,304	9,377	9,286	9,822	9,052	2.63
3	Jagung	3,538	3,366	3,227	3,204	3,251	3,256	3,320	3,424	3,543	3,791	3,396	4,098	3,451	4,098	3,204	7.66
4	Kedelai	7,037	6,895	6,877	6,683	6,734	6,800	6,821	6,860	6,914	7,007	6,790	6,798	6,851	7,037	6,683	1.51
5	Bawang Merah	16,742	15,890	18,674	22,551	23,669	23,376	20,699	18,354	15,498	14,467	16,266	18,534	18,727	23,669	14,467	16.99
6	Cabai Merah Keriting	32,692	28,821	28,615	28,767	24,257	21,967	22,972	21,202	17,226	19,589	19,192	18,809	23,676	32,692	17,226	20.93
7	Cabai Rawit Merah	28,659	33,573	36,694	32,172	25,375	21,722	32,924	28,083	21,660	23,482	23,169	22,716	27,519	36,694	21,660	19.11
8	Sapi Hidup	57,777	55,896	47,182	47,970	47,890	49,005	48,631	49,344	49,316	48,951	48,880	48,647	49,957	57,777	47,182	6.60

Sumber: Panel Harga BKP

3.2.2. Koefisien Variasi Harga Pangan di Tingkat Konsumen

Stabilitas harga pangan di tingkat konsumen juga merupakan hal yang penting untuk dijaga karena berpengaruh langsung kepada akses pangan masyarakat. Fluktuasi harga pangan yang terjadi secara luas juga berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah secara konsisten selalu mengupayakan terciptanya stabilitas harga di tingkat konsumen.

Target nilai koefisien variasi harga komoditas pangan strategis nasional di tingkat konsumen untuk Tahun 2018 ditetapkan dibawah 10-30 persen (Untuk komoditas beras, jagung, kedelai, gula pasir dan daging sapi maksimal 10%; bawang merah maksimal 25% dan cabai maksimal 30%). Hasil pemantauan harga komoditas pertanian strategis tingkat produsen Januari-Desember 2018 dapat dilihat pada Tabel 9.

a. Koefisien Variasi Harga Beras Medium

Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2018, rata-rata harga beras medium di tingkat eceran selama Tahun 2018 adalah Rp 11.080/Kg dan capaian kinerja koefisien variasi harga beras medium sebesar 1,95%. Angka ini sesuai

dengan target karena dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu ≤ 10 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan jika harga beras medium stabil dengan capaian kinerja baik. Apabila dibandingkan terhadap target koefisien variasi harga beras medium pada tahun 2019 (akhir RPJMN tahun 2015 – 2019) sebesar ≤ 10 persen, maka capaian tahun 2018 telah mencapai target, artinya harga beras medium stabil.

b. Koefisien Variasi Harga Jagung Pipilan Kering

Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2018, rata-rata harga jagung pipilan kering tingkat eceran selama Tahun 2018 adalah Rp 6.407/Kg dan capaian kinerja koefisien variasi harga jagung pipilan kering tingkat eceran sebesar 2,79%. Angka ini sesuai dengan target karena dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu ≤ 10 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan jika harga jagung pipilan kering tingkat eceran stabil dengan capaian kinerja baik. Apabila dibandingkan terhadap target koefisien variasi harga jagung pipilan kering tingkat eceran pada tahun 2019 (akhir RPJMN tahun 2015 – 2019) sebesar ≤ 10 persen, maka capaian tahun 2018 telah mencapai target, artinya harga jagung pipilan kering tingkat eceran stabil.

c. Koefisien Variasi Harga Kedelai Biji Kering

Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2018, rata-rata harga kedelai biji kering tingkat eceran selama Tahun 2018 adalah Rp 9.981/kg dan capaian kinerja koefisien variasi harga kedelai biji kering tingkat eceran sebesar 1,75%. Angka ini sesuai dengan target karena dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu ≤ 10 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan jika harga kedelai biji kering tingkat eceran stabil dengan capaian kinerja baik. Apabila dibandingkan terhadap target koefisien variasi kedelai biji kering tingkat eceran pada tahun 2019 (akhir RPJMN tahun 2015 – 2019) sebesar ≤ 10 persen, maka capaian tahun 2018 telah mencapai target, artinya harga kedelai biji kering tingkat eceran stabil.

d. Koefisien Variasi Harga Gula Pasir

Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2018, rata-rata harga gula pasir di tingkat konsumen selama Tahun 2018 adalah Rp 12.565/kg dan capaian kinerja koefisien variasi harga bawang merah tingkat eceransebesar 1.17%. Angka inisesuai dengan target karena dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu ≤ 10 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan jika harga gula pasir di tingkat konsumen stabil dengan capaian kinerja baik. Apabila dibandingkan terhadap target

koefisien variasi harga gula pasir di tingkat konsumen pada tahun 2019 (akhir RPJMN tahun 2015 – 2019) sebesar ≤ 10 persen, maka capaian tahun 2018 telah mencapai target, artinya harga gula pasir di tingkat konsumen stabil.

e. Koefisien Variasi Harga Bawang Merah

Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2018, rata-rata harga bawang merah tingkat eceran selama Tahun 2018 adalah Rp 27.727/kg dan capaian kinerja koefisien variasi harga bawang merah tingkat eceran sebesar 16,39%. Angka ini sesuai dengan target karena dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu ≤25 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan jika harga bawang merah tingkat eceran stabil dengan capaian kinerja baik. Apabila dibandingkan terhadap target koefisien variasi harga bawang merah tingkat eceran pada tahun 2019 (akhir RPJMN tahun 2015 – 2019) sebesar ≤25 persen, maka capaian tahun 2018 telah mencapai target, artinya harga bawang merah tingkat eceran stabil.

f. Koefisien Variasi Harga Cabai Merah Keriting

Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2018, rata-rata harga cabai merah keriting tingkat eceran selama Tahun 2018 adalah Rp 35.636/kg dan capaian kinerja koefisien variasi harga cabai merah keriting tingkat eceran sebesar 10,43%. Angka ini sesuai dengan target karena dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu ≤30 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan jika harga cabai merah keriting tingkat eceran stabil dengan capaian kinerja baik. Apabila dibandingkan terhadap target koefisien variasi cabai merah keriting tingkat petani pada tahun 2019 (akhir RPJMN tahun 2015 – 2019) sebesar ≤30 persen, maka capaian tahun 2018 telah mencapai target, artinya harga cabai merah keriting tingkat petani stabil.

g. Koefisien Variasi Harga Daging Sapi

Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2018, rata-rata harga daging sapi selama Tahun 2018 adalah Rp 118.337/kg dan capaian kinerja koefisien variasi harga daging sapi sebesar1,17%. Angka ini sesuai dengan target karena dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu ≤ 10 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan jika harga harga daging sapi stabil dengan capaian kinerja baik. Apabila dibandingkan terhadap target koefisien variasi harga daging sapi tahun 2019 (akhir RPJMN tahun 2015 – 2019) sebesar ≤ 10 persen, maka capaian tahun 2018 telah mencapai target, artinya harga harga daging sapi stabil.

Tabel 10.Perkembangan Harga dan Nilai Koefisien Variasi Harga Pangan Tingkat Konsumen Tahun 2018

No	Komoditas	Rata-rata Jan'18	Rata-rata Feb'18	Rata-rata Mar'18	Rata-rata Apr'18	Rata-rata Mei'18	Rata-rata Juni'18	Rata-rata Juli'18	Rata-rata Agust'18	Rata-rata Sept'18	Rata-rata Okt'18	Rata-rata Nov'18	Rata-rata Des'18	Rata-rata	Maks	Min	CV (%)
1.	Beras Premium	12,890	12,981	12,685	12,516	12,346	12,346	12,291	12,288	12,311	12,346	12,412	12,466	12,454	13,045	12,210	1.88
2.	Beras Medium	11,476	11,565	11,272	11,131	10,982	10,974	10,909	10,919	10,956	10,981	11,063	11,123	11,080	11,621	10,834	1.95
4.	Jagung Pipilan Kering	6,500	6,330	6,299	6,295	6,295	6,226	6,270	6,351	6,404	6,513	6,672	6,815	6,407	6,862	6,210	2.79
5.	Kedelai Biji Kering	9,793	9,630	9,889	9,852	9,978	10,027	9,969	10,117	10,096	10,102	10,044	10,078	9,981	10,242	9,521	1.75
6.	Bawang Merah	22,982	23,076	26,596	33,798	34,451	33,511	29,646	26,650	23,957	22,034	24,312	27,924	27,727	35,345	21,504	16.39
9.	Cabai Merah Keriting	38,948	38,763	42,081	40,764	36,639	36,469	35,793	34,792	30,180	32,808	31,807	31,774	35,636	42,937	29,618	10.43
10.	Cabai Rawit Merah	42,588	45,747	51,061	46,164	38,434	41,224	49,377	43,234	34,101	34,933	35,520	37,903	41,486	53,622	32,789	13.92
11.	Daging Sapi Murni	117,494	116,344	117,213	117,498	118,415	120,824	118,527	118,775	118,474	118,395	118,470	118,823	118,337	124,789	115,386	1.17
14.	Gula Pasir	12,614	12,537	12,651	12,699	12,727	12,719	12,659	12,589	12,549	12,435	12,364	12,262	12,565	12,769	12,208	1.17

Sumber: Panel Harga BKP

3.2.3. Dukungan Instansi Lain Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian pencapaian stabilitas harga pangan pokok dan strategis tidak lepas dari hasil sinergitas dan langkah koordinatif Badan Ketahanan Pangan khususnya Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan dengan seluruh instansi dan Lembaga terkait, yaitu:

1) Badan Pusat Statistik (BPS)

   Menyediakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) secara kontinu setiap tahun sebagai salah satu sumber untuk melakukan analisis prognosa ketersediaan dan konsumsi pangan. Data lain yang dimanfaatkan dari BPS adalah perkembangan harga pangan dan inflasi.

2) Kementerian Perdagangan

   Badan Ketahanan Pangan Bersama Kementerian Perdagangan telah mengembangkan beberapa langkah strategis dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok dan strategis, terutama melalui peningkatan efisiensi rantai pasok dan langkah intervensi ketika terjadi fluktuasi harga pangan.

3) BULOG

   Koordinasi yang dilaksanakan antara BKP dan BULOG adalah terkait data dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah serta langkah strategis dalam rangka serap gabah dari petani serta langkah operasional pengendalian harga saat terjadi fluktuasi harga

4) Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) dan PD. Pasar Jaya

Kerjasama yang telah dikembangkan dengan instansi pengelola pasar di DKI Jakarta terutama adalah terkait data pasokan dan harga. Dalam rangka pengembangan data base harga dan pasokan pangan melalui kegiatan Panel Harga Pangan, enumerator yang ditunjuk di wilayah DKI Jakarta juga mendapatkan pembinaan dari PD Pasar Jaya

5) Direktorat Jenderal Teknis di Lingkup Kementerian Pertanian

Dukungan dari Direktorat Jenderal Teknis di Lingkup Kementerian Pertanian (Ditjen Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan) terutama adalah dalam bentuk penyediaan data produksi, yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk koordinasi untuk penghitungan prognosa ketersediaan dan konsumsi pangan.

3.2.4. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia

Dalam menciptakan stabilitas harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan telah melaksanakan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia (TTI). Untuk kegiatan Toko Tani Indonesia (TTI) mulai dilaksanakan tahun 2015, berupa kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Perum Bulog dengan melakukan terobosan untuk solusi permanen yaitu: (1) menyerap produk pertanian, (2) memperpendek rantai distribusi pemasaran, dan (3) memberikan kemudahan akses konsumen/masyarakat.

Dana Bantuan Pemerintah yang bersumber dari APBN Tahun 2018 Tahap Penumbuhan dialokasikan untuk Kegiatan PUPM kepada 500 (lima ratus) di 16 provinsi yaitu Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, DI.Yogyakarta, Jatim, Kalbar, Kalsel, Bali, NTB, Sulsel, dan Gorontalo. Tahap Pengembangan dialokasikan kepada 406 (empat ratus enam) Gapoktan/LUPM di 7 provinsi yaitu Sumsel, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, dan NTB. Tahap Pembinaan dialokasikan kepada 250 LUPM di 20 provinsi yaitu Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulsel, Sulut, Gorontalo dan Maluku Utara.

Pada Tahun 2018, target rasio jumlah lembaga distribusi pangan yang dibina terhadap provinsi di seluruh Indonesia sebesar 58%. Realisasi jumlah TTIC di provinsi sebanyak 20 TTIC di 20 provinsi atau sebesar 58,82%. Dengan kata lain realisasi rasio sebesar 98,61 %.

Pencairan dana Bantuan Pemerintah kepada Gapoktan/LUPM disalurkan mulai

bulan Februari 2018 setelah semua persyaratan pencairan dana dipenuhi. Dana yang telah disalurkan kepada Gapoktan/LUPM dimanfaatkan sesuai dengan Rencana Usaha Kegiatan (RUK). Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi di lapangan diperoleh informasi bahwa LUPM Tahap Penumbuhan Kegiatan PUPM yang operasional berjumlah 500 LUPM (100 %) dari target 500 LUPM, LUPM Tahap Pengembangan yang mencairkan sebanyak 405 LUPM (99,45 %) dari target 406 LUPM, dan LUPM Tahap Pembinaan telah dicairkan 249 LUPM (99,60%) dari target 250 LUPM.

LUPM Tahap Pengembangan yang tidak mencairkan dana bantuan pemerintah sebesar Rp.60.000.000 yaitu Gapoktan Usaha Bersama Desa Enggal Rejo Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumsel, hal ini dikarenakan pasokan beras ke TTI tidak mencapai target yaitu hanya sebesar 7 ton pada pelaksanaan tahun 2017. Sedangkan LUPM Tahap Pembinaan yang tidak mencairkan dana bantuan pemerintah sebesar Rp.60.000.000 yaitu Gapoktan Bumi Makmur Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jatim, hal ini dikarena tim teknis kabupaten tidak mengusulkan pencairan.

Tabel 11. Target dan Realisasi Banper Kegiatan PUPM/TTI tahun 2018

No	Provinsi	Jumlah LUPM											
		Penumbuhan 2018				Pengembangan 2017				Pembinaan 2016			
		LUPM		pagu Rp.(000)	%	LUPM		pagu Rp.(000)	%	LUPM		pagu Rp.(000)	%
		alokasi	realisasi			alokasi	realisasi			alokasi	realisasi		
1	Sumatera Selatan	51	51	8,160	100	20	19	1,140	95	12	12	720	100
2	Sumatera Utara	26	26	4,160	100	-	-	-	-	20	20	1,200	100
3	DI. Yogyakarta	10	10	1,600	100	-	-	-	-	10	10	600	100
4	Jawa Tengah	76	76	12,160	100	70	70	4,200	100	34	34	2,040	100
5	Aceh	8	8	1,280	100	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bali	8	8	1,280	100	-	-	-	-	4	4	240	100
7	Lampung	43	43	6,880	100	35	35	2,100	100	17	17	1,020	100
8	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	240	100
9	Kalimantan Selatan	10	10	1,600	100	-	-	-	-	4	4	240	100
10	Nusa Tenggara Barat	13	13	2,080	100	10	10	600	100	6	6	360	100
11	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	120	100
12	Sulawesi Selatan	68	68	10,880	100	-	-	-	-	22	22	1,320	100
13	Jawa Barat	80	80	12,800	100	123	123	7,380	100	40	40	2,400	100
14	Sumatera Barat	8	8	1,280	100	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	55	55	8,800	100	50	50	3,000	100	30	29	1,740	96.67
16	Gorontalo	8	8	1,280	100	-	-	-	-	2	2	120	100
17	Banten	26	26	4,160	100	98	98	5,880	100	20	20	1,200	100
18	Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	360	100
19	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	240	100
20	Kalimantan Barat	10	10	1,600	100	-	-	-	-	5	5	300	100
21	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	240	100
22	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	240	100
Total		**500**	**500**	**80,000**	***100***	**406**	**405**	**24,300**	***99.75***	**250**	**249**	**14,940**	**99.60**

Sumber: Bidang Distribusi, BKP

Adapun nilai pembelian gabah dan pasokan beras LUPM Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut

Tabel 12. Pemanfaatan Dana Modal Gapoktan yang bersumber dari Banper

	Pemakaian Modal	putaran modal	Nilai Pembelian (milyar rupiah)	Penjualan (ton)	Nilai Penjualan (milyar rupiah)
Gabah/ Beras	158,6	3,3	492	59 328,62	502,8
Cabai	3,3	5,5	18	926,97	21,1
Bawang Merah	4,6	5,7	26	1 489,40	31,5

Sumber: Bidang Distribusi Pangan

Untuk LUPM beras, jumlah rata2 pemakaian pemakaian modal sebesar 158,6 milyar rupiah sebanyak 3,3 putaran atau dengan nilai pembelian sebesar 492 milyar rupiah. Sedangkan penjualan beras sebesar 59.328,62 ton atau senilai 502,8 milyar rupiah.

Untuk LUPM cabai, jumlah rata2 pemakaian pemakaian modal sebesar 3,3 milyar rupiah sebanyak 5,5 putaran atau dengan nilai pembelian sebesar 18 milyar rupiah. Sedangkan penjualan cabai sebesar 926,97 ton atau senilai 21,1 milyar rupiah.

Untuk LUPM bawang merah, jumlah rata2 pemakaian pemakaian modal sebesar 4,6 milyar rupiah sebanyak 5,7 putaran atau dengan nilai pembelian sebesar 26 milyar rupiah. Sedangkan penjualan cabai sebesar 1.489,40 ton atau senilai 31,5 milyar rupiah.

Selain itu dalam mendukung stabilisasi harga, Badan Ketahanan Pangan mengelola Toko Tani Indenesia Center di Pasar Minggu Provinsi DKI. Pelaksanaan kegiatan di TTIC meliputi pengelolaan penyediaan pangan yang berasal dari gapoktan PUPM, produsen lain diluar kegiatan PUPM, serta distributor pangan untuk disalurkan melalui gelar pangan murah sebagai bentuk solusi permanen untuk menyediakan pangan murah berkualitas bagi masyarakat. Pasokan komoditas pangan disalurkan melalui TTIC sesuai dengan permintaan atau kebutuhan untuk gelar pangan murah dan operasi pasar. Dalam hal ini TTIC melaksanakan fungsinya melalui *supply, stock dan distribution e-commerce*, pelaksanaan kegiatan tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

Jumlah komoditas pangan yang dipasok oleh gapoktan/LUPM ke TTIC untuk komoditas beras sampai dengan November 2018 sebanyak 423,456 ton, bawang merah sebanyak 35,521 ton, dan untuk pemenuhan kebutuhan cabai merah keriting di TTIC dipenuhi dari *vendor* Wargi Panggupay, dan *vendor* Ditjen Hortikultura, rincian pasokan pengadaan per bulan seperti pada tabel 13.

Tabel 13. Jumlah pengadaan komoditas pangan dari LUPM yang diterima TTIC

(Satuan Kg)

No.	Bulan	Pengadaan	
		Beras	Bawang Merah
1	Januari	26.041,00	4.128,00
2	Februari	12.404,00	2.612,50
3	Maret	40.121,00	3.901,00
4	April	44.010,00	5.683,50
5	Mei	53.062,00	5.218,20
6	Juni	21.208,00	3.547,00
7	Juli	29.998,00	2.203,90
8	Agustus	25.241,00	2.960,90
9	September	11.818,00	1.473,00
10	October	86.273,00	1.327,00
11	November	73.280,00	2.466,00
		423.456,00	35.521,00

Pasokan/pengadaankomoditas pangan dari Gapoktan/LUPM tertinggi terjadi pada bulan April, Mei dan Juni bertepatan dengan menjelang dan awal bulan Ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri. Tingginya jumlah pasokan ini disesuaikan dengan jumlah permintaan yang melonjak terhadap komoditas tersebut. Perbandingan jumlah pengadaan komoditas pangan setiap bulan dapat dilihat pada Gambar 13.

Gambar 13. Pengadaan Beras, Bawang Merah Per Bulan 2018

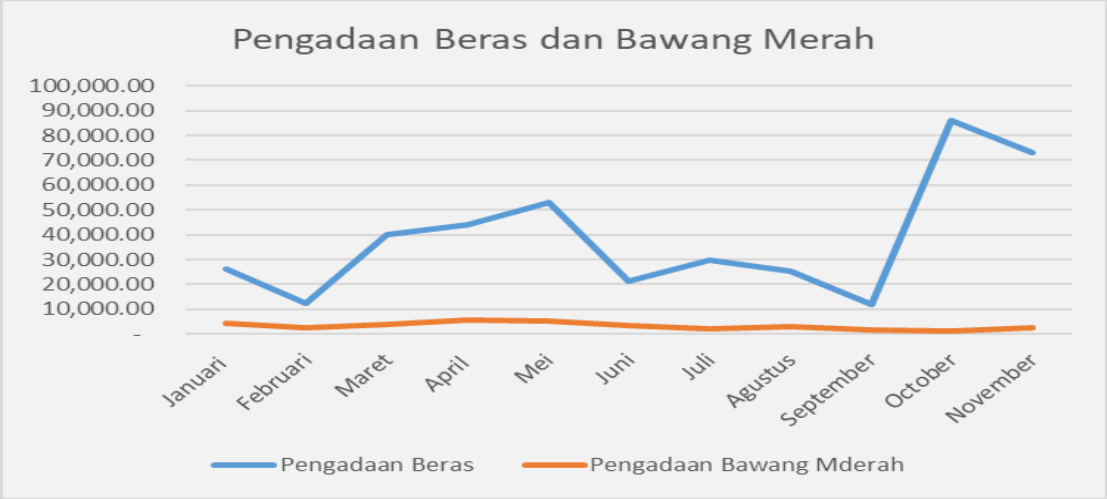

Gapoktan/LUPM penerima bantuan pemerintah tahun 2018 yang memasok ke TTIC dari provinsi Jawa Barat sebanyak 42 gapoktan, Banten sebanyak 13 gapoktan dan beberapa gapoktan LUPM dari provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Total

gapoktan yang memasok ke TTIC sebanyak 84 gapoktan/LUPM, sebagaimana terlihat pada tabel 14.

Tabel 14. Jumlah Gapoktan LUPM yang melakukan pasokan komoditas pangan ke TTIC

NO	LUPM/GAPOKTAN/POKTAN	JUMLAH LUPM AKTIF
1	BANTEN	13
2	JAWA BARAT	42
3	JAWA TENGAH	24
4	JAWA TIMUR	5
TOTAL		**84**

Provinsi Banten dan Jawa Timur melakukan pasokan khusus beras, untuk provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah melakukan pasokan beras, dan bawang merah, Optimalisasi pasokan komoditas pangan lebih difokuskan melalui program *e commerce* dari gapoktan langsung ke TTI-TTI, pasokan gapoktan LUPM melalui TTIC seperti disajikan pada Gambar 14.

Gambar 14. Persentase Jumlah Gapoktan Yang Menyalurkan Komoditas Pangan Melalui TTIC

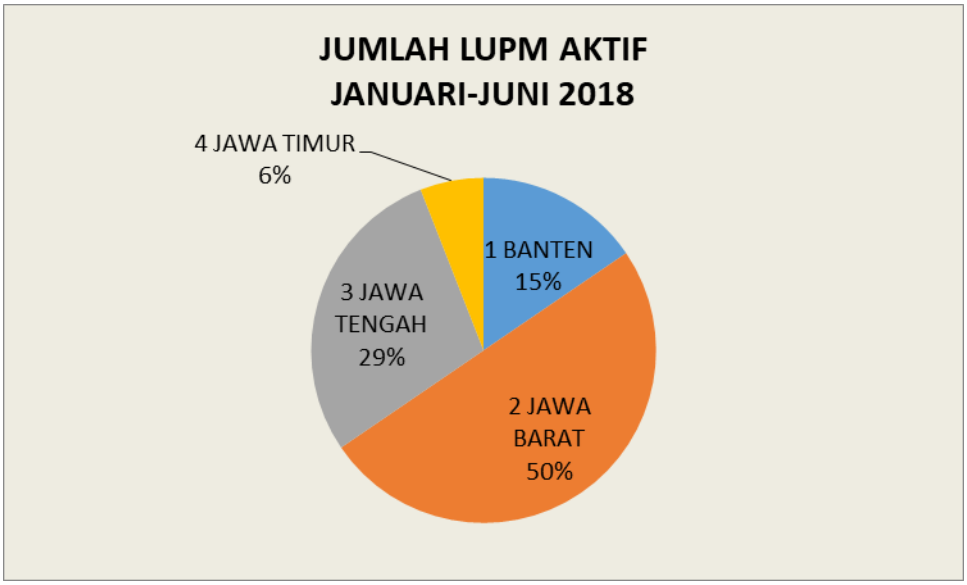

3.2.5. Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Pusat

Cadangan pangan mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga stabilisasi harga pangan, terutama pada komoditi beras yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Saat terjadi lonjakan harga disebabkan kurangnya pasokan maka

cadangan pangan yang tersedia dapat dilepas ke pasar untuk membantu menstabilisasikan harga. Sebaliknya apabila harga gabah anjlok maka dapat dilakukan penyimpanan sebagai cadangan pangan untuk mengurangi pasokan yang berlimpah di pasaran. Oleh karena itu cadangan pangan bersifat sangat strategis dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, pada pasal 23 menyatakan bahwa dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, pemerintah menetapkan cadangan pangan nasional. Cadangan pangan nasional terdiri dari atas cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. Pada pasal 24 disebutkan bahwa pengembangan cadangan pangan nasional dimaksudkan untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan dan atau keadaan darurat.

Cadangan pangan yang dikuasai pemerintah, dalam hal ini oleh Perum BULOG, tentunya memiliki fungsi berbeda dengan cadangan yang dikuasai oleh pedagang atau rumah tanggga. Adapun cadangan pangan yang dikuasai oleh pemerintah berfungsi untuk : (1) melakukan operasi pasar murni (OPM) dalam rangka stabilisasi harga, (2) Memenuhi kebutuhan pangan akibat bencana alam atau kerusuhan sosial dan (3) memenuhi penyaluran pangan secara khusus seperti program rastra.

Cadangan pangan pemerintah pusat dituangkan dalam bentuk Cadangan Beras Pemerintah, yang dananya bersumber dari APBN, serta dijadikan sebagai stok beras nasional. Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Pusat dilakukan oleh Perum BULOG dan dimanfaatkan untuk bantuan darurat akibat bencana serta mengatasi gejolak harga beras (OPM).

Tabel 15. Perkembangan Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2015 - 2018

URAIAN	Tahun (ton)			
	2015	2016	2017	2018
Stok Awal (Ton)	173.206	103.814	17.872	232.826
Tambahan CBP (Ton)	180.309	225.606	286.664	2.356,636
Pemanfaatan CBP				
- Bantuan darurat/bencana	9.271	8.507	13.713	6.953
- Pengendalian Harga Beras (OPM)	138.139	303.042	58.156	544.124
- OPK - CBP Raskin	102.291	-	-	
Total Pemanfaatan	249.701	311.549	71.868	551.077
Stok Akhir	103.814	17.872	232.804	2.038.385

Sumber: Laporanan Perum BULOG, 31 Desember 2018

Berdasarkan data CBP yang diatas maka dapat didapati gambaran bahwa rata-rata stok cadangan beras pemerintah selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan, dengan total yang dikuasai pemerintah pada tahun 2018 sebesar 2.038.385 ton. Besarnya CBP yang saat ini dimiliki BULOG dikarenakan adanya perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap konsepsi dan jumlah yang ideal.

Konsepsi CBP awalnya diasumsikan hanya setara dengan alokasi anggaran yang melekat di Kementerian Keuangan untuk pengadaan beras CBP, dimana dengan alokasi 2,5 Trilyun tiap tahunnya hanya akan mendapatkan alokasi sebesar 250 ribu ton. Saat ini konsepsi tersebut mengarah pada konsepsi dimana CBP yang dikelola BULOG adalah seluruh stok yang dikuasai BULOG selain untuk tujuan komersial. Dengan demikian pencatatan atas stok yang dikelola BULOG terbagi atas stok CBP dan stok komersial.

Selanjutnya, berkenaan dengan penetapan jumlah cadangan beras yang ideal, Badan Ketahanan Pangan telah menghasilkan rumusan kebijakan yang mengarah pada pemenuhan jumlah ideal cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Perum Bulog. Merujuk pada pendekatan FAO, Kementerian Pertanian merekomendasikan untuk cadangan beras pemerintah minimum sebesar 1,5 juta ton sebagaimana Surat Menteri Pertanian Nomor 09/KN.130/M/1/2018 tanggal 15 Januari 2018.

Peningkatan jumlah CBP tersebut, perlu inovasi tata laksana pengadaan dan penggantian pasca penyaluran CBP oleh Perum Bulog, dimana mulai pada tahun 2019 akan menggunakan sistem penggantian sehingga dengan alokasi APBN yang kurang lebih sama dapat mencapai CBP sebesar angka rekomendasi. Keuntungan dari penggunaan sistem pola penggantian diantaranya yaitu:

- Pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana besar secara sekaligus di awal tahun untuk pengadaan stok CBP tahun berkenaan.
- Sirkulasi stok beras yang dikuasai Perum BULOG menjadi lebih lancar sehingga mengurangi risiko kerusakan beras yang disimpan terlalu lama.
- Stok beras CBP dan operasi pasarnya juga dapat divariasi dengan kualitas selain medium sesuai kebutuhan.
- Dengan adanya sistem penggantian, maka alokasi pagu dalam DIPA tetap menjadi batas tertinggi namun belum akan terealisir 100%.

  Melalui Sistem Pola Penggantian melalui alokasi anggaran sebesar Rp 2,5 triliyun, pemerintah dapat memperoleh manfaat penggunaan CBP jauh lebih besar karena hanya perlu mengganti selisih harga antara Harga Pembelian Bulog (HPB) dengan

harga jual operasi pasar.

Terkait pergantian sistem pengelolaan CBP, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah. Permentan ini akan mengatur mengenai pelepasan dan pengisian cadangan beras pemerintah untuk menjaga kecukupan cadangan beras pemerintah baik jumlah maupun mutunya antardaerah dan antar waktu.

3.2.6. Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)

Dalam rangka memperkuat cadangan pangan nasional, sejak tahun 2010 telah dikembangkan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) provinsi dan Kabupaten/kota.Sesuai dengan UU 23/2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, pemerintah daerah baik provinsi, maupun kabupaten/kota bertanggungjawab untuk melaksanakan pengembangan cadangan pangan pemerintah. Pemerintah Provinsi bertugas untuk pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi.

Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota merupakan suatu upaya strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan dari gejolak penurunan harga pada waktu panen. Adapun Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas untuk pengelolaan cadangan pangan kab/kota. Guna menyamakan cara penetapan jumlah cadangan beras pemerintah daerah, maka perlu disusunlah kebijakan yang mengatur tentang kebijakan cadangan pangan pemerintah daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan jumlah cadangan beras pemerintah daerah untuk selanjutnya dicantumkan dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan daerah.

Berdasarkan laporan dari Dinas Ketahanan Pangan provinsi, jumlah cadangan pangan yang dimiliki provinsi di 26 provinsi sebesar 4.123,62 ton. Provinsi yang belum melaksanakan pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah diantaranya adalah DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Bali, dan Maluku Utara.Provinsi Sumatera Utara dalam posisi kosong karena sudah disalurkan kepada masyarakat yang terkena erupsi Gunung Sinabung. Secara rinci jumlah CBP per provinsi seperti Tabel 16.

Tabel 16. Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Provinsi Tahun 2016 – 2018

No	Provinsi	Tahun						
		2016		2017		2018		
		Stok	Penyaluran	Stok	Penyaluran	Stok	Penyaluran	Stok Akhir
1	Aceh	255,50	108,33	247,07	12,51	284,56	31,5	253,06
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	67,00	67	-
3	Sumatera Barat	367,00	35,00	332,00	30,00	402,00	59,842	342,16
4	Riau	457,78	109,93	347,84	42,11	305,74	70	235,74
5	Kepulauan Riau	-	-	51,92	14,73	38,93	18,576	20,35
6	Jambi	90,00	-	97,00	41,74	67,26	5,402	61,86
7	Bengkulu	47,08		36,61	6,10	45,97	0	45,97
8	Sumatera Selatan	262,31	128,71	13,50	2,50	20,73	2,00	18,73
9	Bangka Belitung	-	-	48,00	27,00	20,99	0	20,99
10	Lampung	356,25	63,40	156,57	54,86	250,96	0	250,96
11	Banten	130,49	54,14	108,25	(357,75)	466,00	259	207,00
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	0	-
13	Jawa Barat	1.038,38	555,81	1.110,22	208,01	941,14	148,899	792,24
14	Jawa Tengah			276,12	175,62	286,88	105,44	181,45
15	DI Yogjakarta	283,50	95,39	188,11	4,49	198,11	4,491	193,62
16	Jawa Timur	203,78	-	84,61	26,65	171,23	140,03	31,20
17	Kalimantan Barat	285,85	109,65	269,16	22,29	246,83	0	246,83
18	Kalimantan Tengah	65,30	1,00	79,05	-	79,05	0	79,05
19	Kalimantan Selatan	127,32	-	135,00	12,25	122,75	0	122,75
20	Kalimantan Timur	221,49	-	212,00	49,90	162,10	20,60	141,50
21	Sulawesi Utara	116,80	3,37	125,92	1,00	66,94	0	66,94
22	Gorontalo	-	-	-	-	-	0	-
23	Sulawesi Tengah	124,43	120,71	164,96	99,15	65,80	29,36	36,44
24	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	0	-
25	Sulawesi Selatan	250,08	3,56	140,00	-	140,00	0	140,00
26	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	0	-
27	N T B	156,22	14,01	164,77	27,59	137,18	31,42	105,76
28	N T T	80,44	-	184,44	100,00	330,84	0	330,84
29	Bali	-	-	-	-	-	0	-
30	Maluku Utara	-	-	-	-	-	0	-
31	Maluku	8,93	6,00	39,00	4,00	2,93	0	2,93
32	Papua Barat	-	-	-	-	-	0	-
33	Papua	64,91	-	147,80	19,53	128,27	0	128,27
34	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	4.993,82	1.409,01	4.759,91	624,27	5.050,17	993,56	4.056,62

Sumber: Laporan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi (diolah BKP)

Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Permentan Nomor 11 tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD). Permentan tersebut dapat menjadi acuan bagi Pemerintah daerah dalam menentukan jumlah CBP provinsi sebagaimana diamanatkan dalam PP No 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Mengacu kepada Permentan Nomor 11 Tahun 2018, jumlah CBP yang seharusnya dimiliki oleh masing-masing provinsi pada Tahun 2018 seperti berikut:

Tabel 17 . Simulasi Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Provinsi Tahun 2018

NO.	PROVINSI	JUMLAH PENDUDUK	KONSUMSI PER KAPITA	CBP DAERAH	CBP PROVINSI
1	Jawa Barat	48.413.554	104,20	25.223	5.045
2	Sumatera Barat	5.357.028	118,10	3.163	633
3	Riau	6.759.781	96,10	3.248	650
4	Lampung	8.332.214	81,90	3.412	682
5	Kalimantan Barat	4.976.459	91,90	2.287	457
6	Aceh	5.238.072	102,80	2.692	538
7	DI Yogyakarta	3.788.303	107,90	2.044	409
8	Jawa Timur	39.368.548	96,30	18.956	3.791
9	NTT	5.342.672	126,30	3.374	675
10	Kalimantan Timur	3.689.168	91,30	1.684	337
11	Sulawesi Selatan	8.736.731	117,80	5.146	1.029
12	Papua	3.290.564	71,60	1.178	236
13	NTB	4.990.564	142,10	3.546	709
14	Kalimantan Selatan	4.157.925	97,00	2.017	403
15	Banten	12.600.765	116,70	7.353	1.471
16	Kalimantan Tengah	2.646.420	94,50	1.250	250
17	Sumatera Utara	**14.344.227**	114,70	8.226	1.645
18	Sulawesi Utara	2.473.365	114,30	1.414	283
19	Jambi	3.547.740	102,10	1.811	362
20	Bengkulu	1.952.593	111,40	1.088	218
21	Sulawesi Tengah	2.995.319	117,30	1.757	351
22	Kepulauan Riau	2.113.060	83,00	877	175
23	Babel	1.450.089	87,90	637	127
24	Jawa Tengah	34.408.059	77,10	13.264	2.653
25	Sumatera Selatan	8.322.746	99,20	4.128	826
26	Maluku	1.762.853	101,20	892	178
27	DKI Jakarta	10.419.283	83,10	4.329	866
28	Bali	4.270.189	121,50	2.594	519
29	Sulawesi Tenggara	2.636.665	121,90	1.607	321
30	Gorontalo	1.179.143	124,30	733	147
31	Sulawesi Barat	1.347.593	112,60	759	152
32	Maluku Utara	1.224.530	76,50	468	94
33	Papua Barat	929.937	83,00	386	77
34	Kalimantan Utara	639.113	94,30	301	60
	Indonesia	263.705.272	114,60	131.845	26.369

Pengembangan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/kota pada tahun 2018 telah dilaksanakan di 183 kabupaten/kota sebanyak 5.001 ton. merujuk data Kementerian Dalam Negeri, total kabupaten/kota di Indonesia mencapai 513 kabupaten/kota, sehingga sebanyak prosentase kab/kota yang mengalokasikan cadangan pangan baru sebanyak 35,67 persen. Adapun besaran cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota sangat tergantung dari masing-masing alokasi anggaran APBD yang tersedia.

Tabel 18. Perkembangan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten

Tahun 2018

NO	PROVINSI	JUMLAH KAB/ KOTA	KAB/KOTA MEMPUNYAI CPPD	%	JUMLAH STOK
1	NTB	10	9	90,00	115,61
2	Lampung	15	13	86,67	328,48
3	Kalimantan Selatan	13	11	84,62	170,62
4	DI Yogyakarta	5	4	80,00	77,17
5	Banten	8	6	75,00	396,95
6	Jawa Barat	27	20	74,07	545,09
7	Jambi	11	8	72,73	191,97
8	Kalimantan Barat	14	10	71,43	361,97
9	Jawa Tengah	35	24	68,57	396,95
10	Sumatera Barat	19	12	63,16	411,32
11	Sulawesi Selatan	24	15	62,50	427,59
12	Sumatera Selatan	17	10	58,82	559,68
13	Sulawesi Utara	15	8	53,33	136,97
14	Babel	7	3	42,86	47,2
15	Riau	12	5	41,67	147,56
16	Bengkulu	10	4	40,00	155,86
17	Sulawesi Barat	6	2	33,33	5,57
18	Kepulauan Riau	7	2	28,57	5,42
19	Sulawesi Tengah	13	3	23,08	48,41
20	Gorontalo	6	1	16,67	1
21	Kalimantan Tengah	14	2	14,29	77,42
22	Aceh	23	3	13,04	264,81
23	Bali	9	1	11,11	0,94
24	Jawa Timur	38	4	10,53	44,02
25	Kalimantan Timur	10	1	10,00	0,32
26	Sumatera Utara	33	2	6,06	82,48
27	DKI Jakarta	5	0	0,00	0
28	NTT	22	0	0,00	0
29	Sulawesi Tenggara	17	0	0,00	0
30	Maluku	11	0	0,00	0
31	Maluku Utara	10	0	0,00	0
32	Papua Barat	13	0	0,00	0
33	Papua	29	0	0,00	0
34	Kalimantan Utara	5	0	0,00	0
Jumlah		513	183	35,67	5001,38

3.2.7. Penyusunan Permentan tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah

Perubahan pola pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah tahun 2019 ke sistem pergantian diperlukan beberapa regulasi seperti Peraturan Menteri Perdagangan untuk pemanfaatan CBP untuk stabilisasi harga, Peraturan Menteri Sosial dan Peraturan Menteri Pertanian terkait dengan pengelolan Cadangan Beras Pemerintah. Beberapa regulasi ini menjadi dasar bagi Perum BULOG untuk melakukan pengelolaan cadangan beras pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pangan dan Gizi, Pasal (9), Perum BULOG dapat melakukan penyaluran CBP melalui (a) bantuan sosial, Operasi Pasar Khusus (OPK) untuk rawan pangan, (b) Operasi Pasar Murni (OPM), Operasi Pasar *Reference Price* untuk gejolak harga, (c) Bantuan Bencana dan (d) Bantuan Internasional.

Perum BULOG dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen untuk jenis pangan pokok beras, melakukan: a. pengamanan harga beras ditingkat produsen dan konsumen; b. pengelolaan cadangan beras Pemerintah; c. penyediaan dan pendistribusian beras kepada golongan masyarakat tertentu; d. pelaksanaan impor beras dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. pengembangan industri berbasis beras, termasuk produksi padi/gabah, pengolahan gabah dan beras; dan f. pengembangan pergudangan beras.

Dengan skenario perhitungan stok awal 1,2 juta ton beras, realisasi pengadaan Perum BULOG pada tahun 2018 sebesar 2,1 juta ton beras (asumsi) maka stok CBP 1,2 juta ton diawal dan akhir tahun dapat diwujudkan dengan minimal stok sebesar 600.000 ton beras pada bulan tertentu. Selain itu, pemanfaatan CBP dan rencana pengadaan beras tahun 2018 sebesar 2,1 juta ton akan terdapat tambahan stok sebanyak 500 ribu ton setiap tahun terhadap stok awal tahun (1,2 juta ton) sehingga diperlukan adanya tata pengelolaan CBP terutama untuk pelepasan stok.

Apabila dalam jangka waktu tertentu cadangan beras pemerintah yang tersedia di Perum BULOG tidak dapat tersalurkan sesuai peruntukannya, maka untuk menjaga kualitas cadangan beras pemerintah tersebut perlu dilakukan upaya pelepasan cadangan beras pemerintah. Untuk tetap mempertahankan kualitas mutu beras tersebut diperlukan penentuan batas waktu simpan. Penyimpanan merupakan tahap yang menentukan

dalam menjamin ketersediaan beras berkualitas. Selama penyimpanan, beras mengalami penyusutan kualitas dan kuantitas yang disebabkan oleh perubahan fisik, kimia, dan biologis.

Penyimpanan beras pada umumnya memiliki masa simpan yang dipengaruhi beberapa aspek yaitu mutu fisik awal beras, kemasan, kondisi gudang penyimpanan, dan manajemen penyimpanan. Hasil kajian terhadap waktu penyimpanan beras dan hama gudang menunjukkan bahwa pada umur simpan 2 (dua) bulan, ada gejala munculnya hama gudang tetapi masih dapat dikendalikan.

Mutu beras yang meliputi mutu fisik berdasarkan Permentan No. 31 tahun 2017 dan nutrisi beras (protein, lemak, karbohidrat, kadar serat, mineral) tidak terjadi perubahan mutu yang nyata sampai dengan bulan keempat penyimpanan, sedangkan mutu tanak atau tingkat kepulenan nasi mulai terjadi penurunan mutu setelah bulan keempat penyimpanan. Untuk itu, pelepasan CBP direkomendasikan dilakukan setidaknya pada beras yang telah memasuki umur simpan 4 (empat) bulan.

Pelepasan CBP harus tetap memperhatikan pengisian kembali untuk menjaga kuantitas jumlahnya. Mengingat bahwa pengelolaan CBP tidak hanya menyangkut kewenangan yang ada di Kementerian Pertanian, namun juga mencakup kementerian/lembaga terkait sektor keuangan, perdagangan, dan sosial, serta di bawah payung koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, untuk itu diatur pula mengenai mekanisme pelepasannya. Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah tertuang dalam Permentan Nomor 38/Permentan/KN.130/8/2018 tanggal 28 Agustus 2018.

3.2.8. Penyusunan Peraturan Presiden tentang Ratifikasi Amandemen Perjanjian ASEAN *Plus Three Emergency Rice Reserve* (APTERR)

Penyusunan Peraturan Presiden tentang Ratifikasi ini diperlukan untuk pengganti Perpres Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pengesahan APTERR Agreement. Pengesahan Perpres penganti ini akan menjadi dasar bagi perpanjangan iuran kontribusi APTERR Fase-2 (2018 – 2022). Untuk penyusunan Perpes ini Menteri Pertanian perlu mengajukan ijin prakarsa kepada Presiden RI untuk proses Ratifikasi Amendemen Perjanjian ASEAN *Plus Three Emergency Rice Reserve* (APTERR) melalui Menteri Luar Negeri. Pengajuan ijin prakarsa tersebut perlu dilengkapi dokumen (a) *Certified True Copy* Protokol Amandemen Persetujuan APTERR, (b) Naskah Penjelas dan (c) Naskah Terjemahan Amandemen Persetujuan APTERR.

Kementerian Pertanian akan melakukan beberapa kegiatan setelah ijin prakarsa keluar yaitu:

1) Membentuk Panitia Antar Kementerian (PAK) yang beranggotakan Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukam dan HAM, sekretariat Negara, dan Sekretarian Kabinet. PAK akan melakukan (1) menyusun Konsep Rancangan Peraturan Presiden tentang Ratifikasi Amendemen Perjanjian APTERR, (2) finalisasi naskah penjelas dan (3) finalisasi naskah terjemahan tidak resmi dari perjanjian yang telah disahkan;
2) Mengajukan Rancangan Perpres tentang Ratifikasi Amendemen Perjanjian APTERR kepada Menteri Luar melalui Ditjen HPI untuk disampaikan kepada Presiden RI;
3) Mengajukan permohonan harmonisasi kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden tentang Ratifikasi Amendemen Perjanjian APTERR. Progres penyusunan Perpres ini telah menyelesaikan konsep surat Menteri Pertanian kepada Menteri Luar Negeri untuk proses ijin prakarsa, konsep naskah penjelas dan terjemahan amandemen perjanjian APTERR.

3.2.9. Identifikasi Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)

Pengembangan cadangan pangan masyarakat tahun 2018 difokuskan pada kegiatan Identifikasi Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), karena ada *refocusing* kegiatan Badan Ketahanan Pangan. Identifikasi ini dilakukan untuk mendapatkan data terbaru dari LPM yang menjadi calon penerima Bantuan Pemerintah (Banper) berupa pemberian fasilitasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pengisian cadangan pangan pada lumbung pangan yang sudah masuk maupun yang akan masuk tahap pengembangan.

Identifikasi LPM yang dilaksanakan oleh dinas/badan/kantor yang menyelenggarakan urusan pangan di daerah baik provinsi maupun kabupaten dengan hasil sebagai berikut:

1) Bantuan Pemerintah (Banper) diberikan pada tahun 2015 kepada 1.584 LPM yang memasuki Tahap Pengembangan dan pada tahun 2016 dilaksanakan penyaluran Banper kepada 51 LPM yang memasuki Tahap Pengembangan.
2) Hasil Identifikasi oleh dinas/badan/kantor yang menyelenggarakan urusan pangan, jumlah LPM telah mencapai 1.614 dari 2.078. Laporan identifikasi LPM Tahap Penumbuhan 2016 telah 100% dilaporkan oleh dinas/badan/kantor yang menyelenggarakan urusan pangan di daerah.

   Konsep pengembangan LPM tahun 2019 akan memberikan fasilitasi Banper sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada LPM yang dibangun dari

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2016 atau LPM yang belum pernah mendapatkan pengisian cadangan pangan.

3) Hasil identifikasi kelompok ditemukan kelompok aktif dan kelompok tidak aktif. Kelompok aktif merupakan kelompok yang masih menjalankan kegiatan keorganisasian lumbung serta pengadaan maupun penyaluran gabah/beras.

   Namun, yang perlu menjadi catatan adalah untuk kelompok yang tidak aktif pada Tahap Penumbuhan 2016, kemungkinan karena semenjak dibangun fisik lumbung pada tahun 2016, belum ada Banper untuk pengisian dari APBN.

   Kondisi fisik lumbung dikategorikan menjadi 3 yaitu baik, sedang, dan rusak. Kondisi fisik LPM Tahap Pengembangan 2016 seluruhnya masih baik. Sementara kondisi LPM Tahap Penumbuhan 2016 adalah sebagai berikut: 411 baik dan 11 sedang. Hasil identifikasi LPM ini menjadi dasar pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah tahun 2019.

3.2.10. Penyusunan Konsep Pengambangan LPM yang difasilitasi melalui DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2019

Alokasi pembangunan LPM dan sarana pendukung disalurkan melalui DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2019. Konsep Pembangunan LPM dan Penyediaan Sarana Pendukung dalam Petunjuk Operasional DAK Bidang Pertanian 2019 adalah sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu mekanisme pengelolaan cadangan pangan masyarakat, dengan komponen kegiatannya adalah fasilitasi pembangunan fisik lumbung dan penyediaan sarana pendukungnya.

2) Peranan strategis LPM meliputi keterpaduan antara mekanisme komersial dan sosial, yang secara sinergis dilakukan oleh kelompok tani/gapoktan penerima manfaat untuk menjamin keberlangsungan akivitas LPM.

3) Secara fisik, LPM merupakan tempat penyimpanan hasil produksi petani yang dikombinasikan dengan fasilitasi alat/mesin pengolahan gabah/beras yang dibangun untuk mewujudkan ketahanan pangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan petani.

4) Konsep Pengembangan LPM melalui DAK ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi produksi di kabupaten wilayah sentra produksi padi yang didukung

dengan proses pengolahan dan pemasaran sehingga meningkatkan nilai tambah bagi petani. Dalam aktivitasnya, keberadaan LPM diarahkan untuk mengoptimalkan penyerapan gabah petani anggota. Di sisi lain, peranan sosial LPM berfungsi sebagai cadangan pangan masyarakat untuk mengantisipasi masa paceklik, gejolak harga dan bencana alam.

5) Pembangunan LPM dan penyediaan sarana pendukungnya mencakup komponen sebagai berikut:

a. Pembangunan fisik LPM dengan kapasitas 30-60 ton per unit; dan

b. Sarana Pendukung lainnya, dengan beberapa pilihan sebagai berikut:
   1) Pengadaan RMU dengan kapasitas minimal 0,5 ton per jam disertai dengan rumah RMU; dan/atau
   2) Pembangunan lantai jemur.

Apabila masih terdapat sisa alokasi dari total anggaran poin a) dan b), dapat dipergunakan kembali antara lain untuk pemagaran, instalasi listrik, pengadaan pallet, timbangan, tangga dan/atau penjahit karung beras. Sumber pendanaan lainnya melalui APBD dan/atau swadaya masyarakat dapat digunakan untuk melengkapi sarana pendukung dan pembiayaan lainnya.

Terkait dengan pembangunan fisik lumbung dan rumah RMU dapat dibangun secara terpisah atau menjadi satu kesatuan dalam satu bangunan, sesuai dengan ketersediaan lahan dan anggaran.

6) Spesifikasi teknis dari komponen pembangunan LPM dan sarana pendukungnya tersebut mencakup:

a. LPM berkapasitas 30-60 ton, spesifikasi bangunan permanen (beton), ventilasi dan sirkulasi udara cukup, dilengkapi dengan *pallet*. Ukuran panjang dan lebar bangunan dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.

b. RMU kapasitas minimal 0,5 ton per jam dengan komponen fungsi pecah kulit (PK) dan *polisher*.

c. Lantai jemur dibuat dari beton dengan permukaan cembung dan licin, pada masing-masing sisi dibuat saluran air.

d. Bangunan rumah RMU disesuaikan dengan kebutuhan ukuran RMU.

Pembangunan lumbung pangan masyarakat dan sarana pendukungnya perlu memperhatikan hal hal sebagai berikut:

a. Lokasi pembangunan LPM berada di kabupaten sentra produksi padi;
b. Pembangunan lumbung pangan dan sarana pendukungnya dilaksanakan sesuai kebutuhan daerah dan dibangun di satu lokasi yang sama sehingga bersifat terpadu;
c. Fasilitasi RMU meliputi mesin penggilingan padi lengkap 1 (satu) paket, dengan komponen fungsi pecah kulit (PK) dan *polisher*;
d. Fungsi bangunan LPM sebagai sarana penyimpanan mengacu pada standar yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang (Kementerian Pekerjaan Umum setempat);
e. Kriteria kelompok penerima manfaat yaitu:
    1) Kelompok Tani/Gapoktan yang sudah aktif minimal 2 (dua) tahun;
    2) belum pernah mendapat fasilitas yang sama pada tahun berjalan atau pada tahun-tahun sebelumnya;
    3) mengajukan proposal usulan yang selanjutnya dijadikan dasar e-proposal oleh dinas kabupaten yang menangani ketahanan pangan;
    4) sanggup menyediakan lahan untuk pembangunan fisik lumbung, lantai jemur dan rumah RMU. Lahan tersebut dapat berasal dari salahsatu anggota kelompok/lahan desa/lahan pemda yang sudah dihibahkan kepada kelompok yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesediaan menghibahkan lahan;
    5) membuat pernyataan kesanggupan untuk langsung mengoperasionalkan lumbung pangan beserta fasilitas pendukung secara berkelanjutan setelah dibangun; dan
f. Kepala Daerah pelaksana kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mendukung fasilitasi operasional dan pengisian LPM minimal setara dengan 10% alokasi DAK melalui APBD

3.2.11. Laporan Hasil Data dan Informasi Pasokan dan Harga Pangan Strategis

Dalam rangka analisis harga dan pasokan pangan strategis sejak tahun 2010 dilakukan kegiatan pengumpulan dan pemantauan harga dan pasokan pangan di

tingkat provinsi/kabupaten/kota melalui metode Panel Harga Pangan. Kegiatan Panel Harga Pangan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi harga dan pasokan pangan secara cepat, tepat dan akurat sebagai bahan deteksi dini terjadinya gangguan harga dan pasokan pangan. Selain itu, melalui kegiatan Panel Harga Pangan, data dan informasi yang diperoleh dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan pimpinan dalam merumuskan dan pengambilan kebijakan terkait pangan.

Kegiatan panel harga tahun 2018, dilaksanakan di tingkat produsen dan konsumen (grosir dan eceran) di 34 provinsi dan 500 kabupaten/kota dengan jumlah enumerator sebanyak 866 orang. Selain itu pelaksanaan panel dilakukan juga di konsumen (eceran) di pasar Jabodetabekkarpur dengan jumlah enumerator 50 orang.

Dari target tersebut, terealisasi 100 persen sebagaimana tahun 2017. Rincian pelaksanaan kegiatan Laporan Data/Informasi Pasokan dan Harga Pangan Provinsi Tahun 2015-2018 seperti terlihat pada tabel 18.

Tabel 19. Pelaksanaan Kegiatan Laporan Data/Informasi Pasokan dan Harga Pangan Provinsi Tahun 2015-2018

Tahun	Jumlah Provinsi Pelaksana			Jumlah Kab/Kota Pelaksana		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2015	34	34	100,00	270	514	190,37
2016	34	34	100,00	514	514	100,00
2017	34	34	100,00	514	514	100,00
2018	34	34	100,00	500	500	100,00

Adapun perkembangan lokasi dan jumlah petugas enumerator kegiatan Panel Harga Pangan pada Tahun 2015-2018 dapat dilihat pada **Tabel 20**.Tabel menggambarkan jumlah enumerator Tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan Tahun 2017 karena adanya kebijakan realokasi anggaran.

Tabel 20. Lokasi dan Jumlah Petugas Enumerator Pelaksana Kegiatan Panel Harga Pangan Tahun 2015 – 2018

NO	Provinsi	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		Kab/ Kota	Enum	Kab/ Kota	Enum	Kab/ Kota	Enum	Kab/ Kota	Enum	Kab/ Kota	Enum
1	Banten	6	15	8	19	8	19	8	19	8	17
2	Jawa Barat	20	47	27	61	27	61	27	61	27	51
3	Jawa Tengah	15	35	35	75	35	75	35	75	35	63
4	DI Yogyakarta	5	14	5	14	5	14	5	14	5	12
5	Jawa Timur	17	45	38	87	38	87	38	87	38	72

6	Sumatera Utara	14	31	33	69	33	69	33	69	33	56
7	Sumatera Barat	10	25	19	43	19	43	19	43	19	38
8	Riau	10	11	12	15	12	15	12	15	12	15
9	Lampung	11	25	15	33	15	33	15	33	15	31
10	Kalimantan Barat	6	13	14	29	14	29	14	29	14	26
11	Kalimantan Selatan	11	28	13	32	13	32	13	32	13	29
12	Sulawesi Utara	7	14	15	30	15	30	15	30	15	27
13	Sulawesi Selatan	16	39	24	55	24	55	24	55	24	45
14	Nusa Tenggara Barat	10	24	10	24	10	24	10	24	10	22
15	Nusa Tenggara Timur	10	11	22	23	22	23	22	23	22	23
16	Maluku	9	10	11	12	11	12	11	12	11	12
17	Aceh	9	20	23	48	23	48	23	48	23	43
18	Kepulauan Riau	4	5	7	5	7	5	7	5	7	8
19	Bengkulu	6	11	10	19	10	19	10	19	10	17
20	Jambi	6	13	11	23	11	23	11	23	11	26
21	Sumatera Selatan	7	18	17	38	17	38	17	38	17	33
22	Bangka Belitung	4	5	7	11	7	11	7	11	7	11
23	DKI Jakarta	5	6	6	8	6	8	6	8	6	8
24	Kalimantan Tengah	6	13	14	29	14	29	14	29	14	26
25	Kalimantan Timur	6	7	10	11	10	11	10	11	10	11
26	Sulawesi Tenggara	5	10	17	34	17	34	17	34	17	29
27	Sulawesi Barat	5	6	6	8	6	8	6	8	6	8
28	Sulawesi Tengah	6	11	13	25	13	25	13	25	13	26
29	Gorontalo	5	15	6	17	6	17	6	17	6	12
30	Bali	4	9	9	19	9	19	9	19	9	17
31	Maluku Utara	6	7	10	11	10	11	10	11	10	11
32	Papua Barat	3	4	13	14	13	14	13	14	13	14
33	Papua	3	6	29	32	29	32	29	32	15	21
34	Kalimantan Utara	0	0	5	6	5	6	5	6	5	6
Total		**267**	**553**	**514**	**979**	**514**	**979**	**514**	**979**	**500**	**866**

Sumber: Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, 2018

Tabel 20. Lokasi dan Petugas Enumerator Pelaksana Kegiatan Panel Harga Pangan di Jabodetabekkarpur tahun 2017-2018

No	Provinsi	Tahun 2017		Tahun 2018	
		Kab/Kota	Enum	Kab/Kota	Enum
1	DKI Jakarta	4	24	4	24
2	Jawa Barat	7	20	7	20
3	Banten	2	6	2	6
Total		**13**	**50**	**13**	**50**

Sumber: Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, 2018

Tabel 21.Perkembangan Kegiatan Panel Harga Pangan Tahun 2015– 2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	**Jenis Komoditas**				
	Produsen	**8** Komoditas: -GKP petani, -GKP dan GKG penggilingan -beras medium dan premium di penggilingan -Jagung -cabai merah keriting -bawang merah	**8** Komoditas: - GKP petani, -GKP dan GKG penggilingan -beras medium dan premium di penggilingan -Jagung -cabai merah keriting - bawang merah	**8** Komoditas: - GKP petani, -GKP dan GKG penggilingan -beras medium dan premium di penggilingan -Jagung -cabai merah keriting - bawang merah	**10** komoditas: - GKP petani -GKP dan GKG penggilingan, -beras medium dan premium di penggilingan -Jagung -kedelai -cabai merah keriting -cabai rawit merah -bawang merah -daging sapi
	Konsumen	**13** Komoditas: -beras premium - beras medium -beras termurah -jagung -Kedelai -cabai merah keriting -bawang merah -daging sapi -daging ayam - gula -minyak goreng -telur	**13** Komoditas: -beras premium -beras medium -beras termurah -jagung -Kedelai -cabai merah keriting -bawang merah -daging sapi -daging ayam -gula -minyak goreng	**13** Komoditas: -beras premium -beras medium -beras termurah -jagung -Kedelai -cabai merah keriting -bawang merah -daging sapi -daging ayam -gula -minyak goreng	**13** Komoditas: -beras premium -beras medium -beras termurah -jagung -Kedelai -cabai merah keriting -bawang merah -daging sapi -daging ayam -gula -minyak goreng -telur -cabai rawit merah -bawang putih -terigu -

			-telur	-telur	
2	**Pengiriman data**				
	Mingguan	**1 kali** (setiap hari Senin/produsen dan konsumen)	**1 kali** (setiap hari Senin/produsen dan konsumen)	**1 kali** (setiap hari Senin/produsen dan konsumen)	**2 kali** (setiap hari Senin dan Kamis/ produsen dan konsumen)
	Harian	tidak ada	tidak ada	Jabodetabek (konsumen)	Jabodetabek dan Ibu Kota Provinsi (konsumen)

Output dari pelaksanaan kegiatan Panel Harga Pangan Tahun 2018, yaitu:

1) Laporan Panel Harga Pangan Tahun 2018 di pusat sebanyak 1 laporan.
2) Panduan Teknis Panel Harga Pangan Tahun 2018 sebanyak 1 paket.
3) Modul Panel Harga Pangan Tahun 2018 sebanyak 1 paket.
4) Database harga dan pasokan pangan strategis online yang bisa diakses masyarakat melalui*website*http://panelhargabkp.pertanian.go.id, dan aplikasi android Panel Harga Pangan BKP yang bisa diunduh di *play store* yang menampilkan data dan informasi harga dan pasokan dari 34 provinsi sebanyak 1 paket.

3.2.12. Penyusunan Prognosa Neraca Pangan

Penyusunan prognosa neraca pangan dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan informasi tentang perkiraan jumlah kebutuhan dan ketersediaan pangan pokok selama periode tertentu (bulanan atau tahunan). Sedangkan sasaran adalah tersedianya informasi untuk merumuskan kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan serta pengendalian/antisipasi gangguan pasokan dan harga pangan. Prognosa pangan sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya masalahpangan, untukpenanganan pemenuhan ketersediaan dan pasokan pangan, serta dalam upaya stabilitas harga pangan strategis.

Prognosa kebutuhan dan ketersediaan pangan tahun 2018 mencakup 12 komoditas pangan pokok, yaitu beras, jagung, kedelai, kacang tanah, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging unggas, dan telur unggas. Prognosa disusun sebanyak 3 kali, yaitu prognosa berdasarkan kebutuhan dan angka sasaran produksi Ditjen Teknis Lingkup Kementerian Pertanian, pada bulan Januari-Februari. Selanjutnya, Prognosa di-*update* dan disempurnakan secara berkala setiap tiga atau empat bulan sesuai dengan perubahan data produksi yang berdasarkan angka sasaran atau angka ramalan produksi (BPS) dan angka realisasi produksi (Ditjen teknis), yaitu: (a) Up Date I: Prognosa kebutuhan dan ketersediaan pangan yang didasarkan pada ARAM I BPS danup

dateproduksiDitjenTeknislingkupKementan (Juli-Agustus); dan (b) Up date II: Prognosa kebutuhan dan ketersediaan pangan yang didasarkan pada asumsi dan konversi dari berbagai sumber seperti SUSENAS Triwulan I 2017, Kementerian Perindustrian, BPS, Ditjen Teknis lingkup Kementerian Pertanian, Kajian Sucofindo, Kajian FAO, dan Neraca Bahan Makanan 2017 (sangat sementara).

Berdasarkan hasil perhitungan prognosa produksi dan kebutuhan pangan pada tahun 2018, dari 12 komoditas bahan pangan yang dipantau, terdapat 3 (tiga) komoditas yang defisit, yaitu kedelai 25,37%, kacang tanah 7,87%, serta daging sapi/kerbau 35,19%. Sembilan komoditas lainnya surplus, yaitu beras 66,11%, jagung 90,19%, gula pasir 9,06%, minyak goreng 285,43%, bawang merah 18,07%, cabai besar 21,10%, cabai rawit 57,04%, daging ayam ras 16,99%, dan telur ayam ras 0,14%, seperti terlihat pada **Tabel 22**

Tabel 22. Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Tahun 2018

(Ribu Ton)

No	Komoditi	Perkiraan Ketersediaan*)	Perkiraan Kebutuhan**)	Neraca Domestik	Neraca Kumulatif
1	Beras*)	49.469,6	30.370,8	19.098,9	20.077,4
2	Jagung*)	33.909,4	17.844,3	16.065,1	16.093,2
3	Kedelai	2.200,0	2.948,0	(748,0)	(748,0)
4	Kacang Tanah	634,7	688,9	(54,2)	(54,2)
5	Gula Pasir*)	2.200,0	3.161,6	20.639,9	286,6
6	Minyak Goreng*)	29.224,0	8.584,1	(961,6)	24.501,3
7	Bawang Merah	1.411,9	1.195,8	216,1	216,1
8	Cabai Besar	1.296,5	1.070,7	225,9	225,9
9	Cabai Rawit	1.006,3	640,8	365,5	365,5
10	Daging Sapi	429,4	662,5	(233,1)	(233,1)
11	Daging Ayam Ras	3.565,5	3.047,7	517,8	517,8
12	Telur Ayam Ras	1.733,0	1.730,5	2,4	2,4

Sumber: Ditjen. Teknis Lingkup Kementerian Pertanian diolah BKP
**) Perkiraan ketersediaan berasal dari produksi, untuk berasdan gula pasir sudah memperhitungkan stok awal tahun.*
***) Perkiraan kebutuhan sudah termasuk kehilangan pada saat proses produksi dan distribusi.*

Secara rinci hasil perhitungan prognosa pangan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

(1) Perkiraan ketersediaan beras dari produksi tahun 2018 diperkirakanmencapai 49.469,6 ribu ton, sudah termasuk dikurangi kehilangan untuk penggunaan non pangan.Perkiraan kebutuhan sebesar 30.370,8 ribu ton, sehingga neraca domestik pada akhir tahun 2018 terdapat surplus 20.077,4 ribu ton atau sekitar 66,11 persen. Puncak produksi beras terjadi pada bulan Februari-Maret 2018.

(2) Perkiraan kebutuhan jagung tahun 2018 diperkirakanmencapai 17.844,3 ribu ton, sedangkanperkiraan ketersediaan dari produksi 33.909,4 ribu ton, sehingga neraca

domestik pada tahun 2018 terjadi surplus16.093,2 ribu ton atau sekitar 90,19% persen. Puncak produksi jagung terjadi pada bulan Februari-Maret 2018.

(3) Perkiraan kebutuhan kedelai tahun 2018 sekitar 2.948,0 ribu ton, sudah termasuk kehilangan dalam proses produksi dan distribusi. Perkiraan ketersediaan dari produksi hanya mencapai 2.200,0 ribu ton sehingga neraca domestik tahun 2018 terjadi defisit 748,0 ribu ton atau sekitar 25,37 persen, dimana defisit terjadi hampir pada setiap bulan kecuali bulan Januari-Mei 2019.

(4) Perkiraan kebutuhan kacang tanah pada tahun 2018 diperkirakan sebesar 688,9 ribu ton, sudah termasuk kehilangan dalam proses produksi dan distribusi.Perkiraan ketersediaan dari produksi sebesar 634,7 ribu ton sehingga neraca domestik kacang tanah tahun 2018 terjadi defisit sebesar 54,2 ribu ton atau sekitar 7,87 persen. Defisit terjadi pada bulan Januari, November dan Desember.

(5) Perkiraan ketersediaan gula pasir dari produksi tahun 2018 mencapai 2.200,0 ribu ton, sedang perkiraan kebutuhanmencapai 3.161,6 ribu ton, sehingga neraca domestik tahun 2018 diperkirakan surplus 286,6 ribu ton atau sekitar 9,06 persen.

(6) Ketersediaan dari produksi minyak goreng tahun 2018 diperkirakan mencapai 29.224,0 ribu ton, sedangkan perkiraan kebutuhan hanya 8.584,1 ribu ton dan telah memperhitungkankehilangan dalam proses produksi dan distribusi, sehingga neraca domestik akhir tahun 2018 terdapat surplus sebesar 24.501,3 ribu ton atau sekitar 285,43 persen. Apabila dilihat neraca domestik bulanan, surplus minyak goreng terjadi pada setiap bulan.

(7) Perkiraan ketersediaan dari produksi bawang merah tahun 2018 sebesar 1.411,9 ribu ton. Total perkiraan kebutuhan 1.195,8 ribu ton, sudah termasuk kehilangan pada proses produksi dan distribusi, sehingga pada akhir tahun 2018 akan terdapat surplus sebesar 216,1 ribu ton atau sekitar 18,07 persen. Apabila dilihat neraca domestik bulanan, surplus bawang merah terjadi pada setiap bulan.

(8) Perkiraan kebutuhan cabai besar tahun 2018 sekitar1.070,7 ribu ton, sudah memperhitungkan kehilangan pada proses produksi dan distribusi. Perkiraan ketersediaan dari produksi sebesar 1.296,5 ribu ton, sehingga pada akhir tahun2018 terdapat surplus sebesar 225,9 ribu ton atau sekitar 21,10 persen. Apabila dilihat neraca domestik bulanan, surplus minyak goreng terjadi pada setiap bulan.

(9) Perkiraan kebutuhan cabai rawit tahun 2018 sekitar 640,8 ribu ton, sudah termasuk perkiraan kehilangan pada proses produksi dan distribusi. Perkiraan ketersediaan

produksi mencapai 1.006,3 ribu ton, sehingga pada akhir tahun 2018 terdapat surplus 365,5 ribu ton atau sekitar 57,04 persen. Apabila dilihat neraca domestik bulanan, surplus minyak goreng terjadi pada setiap bulan.

(10) Perkiraan kebutuhan daging sapi tahun 2018 mencapai 662,5 ribu ton, sedangkan perkiraan ketersediaan dari produksi hanya 429,4 ribu ton, sehingga pada akhir tahun 2018 terjadi defisit sebesar 233,1 ribu ton atau sekitar 35,19 persen. Dilihat dari neraca domestik bulanan, defisit terjadi pada setiap bulan.

(11) Perkiraan kebutuhan daging ayam ras tahun 2018 sebesar 3.047,7 ribu ton, sementara perkiraan ketersediaan dari produksi mencapai 3.565,5 ribu ton, sehingga terdapat surplus sebesar 517,8 ribu ton atau sekitar 16,99 persen. Apabila dilihat dari neraca domestik bulanan, surplus terjadi setiap bulan.

(12) Perkiraan kebutuhan telur ayam ras tahun 2018 sekitar 1.730,5 ribu ton, sedangkan perkiraan ketersediaan dari produksi 1.733,0 ribu ton, sehingga terdapat surplus sebesar 2,4 ribu ton atau sekitar 0,14 persen. Begitu juga neraca domestik bulanan menunjukkan terjadi surplus pada setiap bulan.

Penyusunan prognosa tersebut dilakukan secara tepat dan akurat agar perencanaan dan kebijakan yang diambil juga tepat sasaran. Output yang telah dihasilkan dalam kegiatan ini yaitu prognosa kebutuhan dan ketersediaan pangan Tahun 2018 sebanyak 1 buku.

3.2.13. Kajian Distribusi Pangan

1) Saluran Dan Marjin Pemasaran Beras Dari Produsen Ke Konsumen Berdasarkan Musim: Kasus Propinsi Jawa Barat

Sebagai bahan pangan utama yang menjadi kebutuhan dasar bagi mayoritas penduduk Indonesia, beras merupakan komoditas strategis. Terkait dengan hal itu, komoditas beras sangat menentukan dalam ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan menurut UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Untuk memahami penyebab pergerakan harga perlu dilakukan kajian terkait saluran distribusi beras di Indonesia terutama beras medium. Mengingat adanya aspek antar waktu maka kajian saluran distribusi akan bertujuan menganalisis bagaimana pola pemasaran beras tersebut, apakah terdapat perbedaan pola pemasaran pada setiap musim

panen. Kajian ini mencakup bagaimana beras diperdagangkan, bagaimana pegerakannya dan bagaimana prilaku lembaga yang terlibat. Kajian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis saluran pemasaran beras dari produsen hingga konsumen antar wilayah di Indonesia.
2. Menganalisis perbandingan saluran pemasaran beras dari produsen sampai konsumen pada tiga musim panen.

Hasil Identifikasi Lembaga Pemasaran Beras (Studi Kasus di Kabupaten Karawang) terdiri dari petani, pedagang pengumpul desa (PPD), pedagang pengumpul kecamatan (PPK), penggilingan atau pabrik beras, pasar beras kabupaten, pasar induk dan pengecer, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Petani

Sampel petani dilakukan di Desa Cibadak Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. Kondisi lahan padi di wilayah ini rata-rata pada luasan di atas 3 hektar. Mayoritas petani memiliki tingkat pendidikan rata-rata SD dan SMP dengan usia 45-76 tahun. Lama bertani di atas 10 tahun dengan kepemilikan lahan milik sendiri.

b. Pedagang Pengumpul Desa (PPD)

PPD mendapatkan gabah kering panen dari petani di daerah setelah panen biasanya hanya sebagai perantara dalam pemasaran gabah kepada penggilingan langsung maupun kepada pedagang pengumpul kecamatan. PPD tidak melakukan kegiatan dalam distribusi, hanya sebagai informan harga dari petani ke PPK atau penggilingan/pabrik beras.

c. Pedagang Pengumpul Kecamatan (PPK)

PPK sebagian besar merupakan perpanjangan tangan dari penggilingan atau pabrik beras, sama halnya dengan PPD, PPK hanya sebagian besar hanya informan harga.

d. **Penggilingan atau Pabrik Beras**

Berdasarkan data dari Dinas Pangan Kabupaten Karawang tahun 2018, jumlah penggiligan padi di Kabupaten Karawang sejumlah 40 unit, 10 unit (25 persen) merupakan penggilingan dengan kategori kelas sedang. 75 persen lainnya dikategorikan sebagai kelas penggilingan kecil. Skala besar umumnya tidak berada pada Desa atau kecamatan, dan berupa perusahaan. Hal ini karena untuk operasional penggilingan skala besar sudah memerlukan investasi yang tinggi.

Penggilingan dengan skala sedang dapat memangkas dua rantai pemasaran PPD dan PPK, karena posakan gabah bisa langsung berasal dari petani. Penggilingan skala

sedang ini terafiliasi dengan kelompok tani yang anggotanya memasok ke penggilingan tersebut sehingga posisi tawar petani masih dilindungi. Pengambilan gabah hasil panen petani dilakukan dengan petani menyerahkan ke penggilingan atau penggilingan yang akan mengambil gabah ke petani. Pada saat panen raya, terdapat penggilingan yang melakukan stock pasokan beras dalam jangka waktu sekitar dua mingguan untuk menunggu kenaikan harga.

Sampel penggilingan skala besar dalam kajian ini dilakukan pada penggilingan di daerah Bekasi. Penggilingan sudah menggunakan system *Rice Milling Plant* yang komponennya secara umum terdapat mesin pembersih kotoran gabah, mesin pemecah kulit, mesin pemisah gabah dan beras pecah kulit, mesin pemutih (batu dan besi), mesin pengkilap beras, mesin pemisah beras utuh, kepala, patah dan menir, timbangan dan yang terakhir mesin pengemasan. Beras hasil dari mesin RMP menghasilkan mutu beras SNI I atau yang disebut dengan beras kristal/premium. Pasokan gabah diantaranya berasal dari Karawang, Cilacap, Sragen, Demak, Banten, Lampung. Sedangkan hasil beras didistribusikan ke berbagai wilayah, salah satunya terkait kontrak kerjasama untuk memasok PT. Food Station Pasar Induk Cipinang.

e. Pedagang Grosir Daerah (Pasar Beras Kabupaten)

Pasar beras di Kabupaten Karawang yang besar adalah Pasar Johar. Pasokan dari pasar Johar berasal dari Karawang sendiri dan juga dari beberapa daerah lainnya di Jawa. Pasokan sebagian besar berasal dari Karawang (80-90 persen) dan selebihnya berasal dari Subang, Indramayu, Pati, Demak, Bali. Pasokan beras tersebut didistribusikan langsung ke wilayah Jabodetabek, Lampung, Palembang, Riau hingga Aceh. Pembeli langsung berupa toko (10-20 persen) dan berdasarkan order (80 – 90 persen). Pasar Johar memiliki sekitar 30 kios beras dengan rata-rata per kios 20 ton sehingga total diperkirakan terdapat 600 ton beras per hari yang diperdagangkan.

f. Pedagang Grosir (Pasar Beras Induk Cipinang)

Saat ini Food Station memiliki jumlah Toko 738 Unit dengan daya tampung + 25.000 Ton. Unit pertokoan dilengkapi fasilitas telekomunikasi, bank, ekspedisi dan keamanan 24 jam. Terdapat pula pergudangan dan resi gudang sebanyak 104 unit dengan kapasitas 200 ribu ton. Ekspedisi yang ada sebanyak 240 unit dengan kapasitas 2,5 ton per unit.

Apabila melihat musim selama satu tahun di Food Station terlihat adanya perubahan persentase barang yang masuk. Pada Bulan Januari sampai Mei sebanyak 60

persen pasokan, pada Bulan Juni sampai Oktober sebanyak 30 persen dan November sampai Desember sebanyak 10 persen.

Berdasarkan wawancara dengan pengelola Food Station, pasokan FS terjauh berasal dari Sulawesi Selatan seperti dari daerah Sidrap, Marowali, Bone. Pasokan dari Sulawesi masuk karena daerah ini relative terakhir panennya sehingga saat pasokan mulai sedikit dari Jawa akan masuk dari Sulawesi. Daerah Jawa Timur seperti Kediri, Jombang, Sidoarjo dan Jember. Jawa Tengah seperti daerah Solo, Karanganyar, Purworejo, Klaten dan Cilacap. Sedangkan Sumatra dari daerah Lampung (70 persen varietas muncul) dan akan dikembangkan ke Sumatera Selatan. Pasokan dari Propinsi Jawa Barat sekitar 50 persen dari total keseluruhan pasokan 8.000 ton beras per hari. Gambar 5menunjukkan peta asal beras PT. Food Station.

Sumber : http://www.foodstation.co.id, diunduh 4 Oktober 2018
Gambar 15 Peta Asal Beras PT.Food Station

PT Food Station juga mengembangkan Kontrak Farming di Indramayu. Terdapat juga Gabungan Kelompok Tani (sekitar 5 Gapoktan) yang memasok ke PT FS selain dari perusahaan perorangan lainnya. Gapoktan memberikan info panen kepada PT.FS dan pada Bulan Maret-April biasanya merupakan panen raya pertama yang menyumbang paling besar pasaokan. Sementara panen kedua pada kisaran bulan Juli sampai dengan September secara bergantian setiap daerah dengan beberapa varietas seperti menrhik wangi, muncul maupun IR. Pada saat panen raya, PT. Food Station tidak banyak melakukan stock pasokan, Stock dilakukan pada sekitar Bulan September (panen musim tanam kedua) hingga menunggu sampai panen raya. Hal ini juga mengantisipasi agar beras tidak terlalu disimpan karena dikhawatirkan akan mengurangi kualitas.

PT. Food Station sebagai BUMD DKI Jakarta memiliki peran dalam penyaluran beras untuk program di Propinsi DKI Jakarta seperti beras untuk PNS , Kartu Jakarta Pintar (KJP),

Sahabat Rakyat (Sahara) dan lainnya, Persentase untuk program sekitar 50 persen dan 50 persen lainnya adalah retail. Adapun dari 50 persen untuk retail dapat dikelompokkan ke jalur pasar modern sebanyak 69 persen, pasar tradisional sebesar 30 persen dan selebihnya 1 persen merupakan pasar online. Indikator pasokan aman di PT. Food Station adalah ketika pasar tradisional terdapat pasokan 30 ribu per hari, apabila kurang dari jumlah tersebut maka pasar akan tidak stabil. Adapun peta penjualan beras PT. Food Station dapat dilihat pada Gambar 16 terlihat bahwa penjualan beras dari Jakarta sampai pada luar Pulau Jawa.

Sumber : http://www.foodstation.co.id, diunduh 4 Oktober 2018
Gambar 16 Peta Penjualan Beras PT. Food Station

Unit kios-kios pada PBIC yang dikelola PT. Food Station juga melakukan transaksi jual beli yang terpisah dari catatan pengelolaan PT. Food Station. Data terkait pemasukan dan pengeluaran pasokan periode 1 Januari 2015- 6 Juli 2018 dapat dilihat pada Gambar 7 Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa terdapat bulan-bulan yang pasokannya kurang dari normal pemasukan sejumlah 60 ribu ton per bulan (2 ribu ton per hari). Bulan Juli pada tiga tahun terakhir berada di bawah normal pemasukan, sangat drastis penurunannya dibandingkan pada Bulan Juni, terlebih pada Bulan Juni tahun 2016.

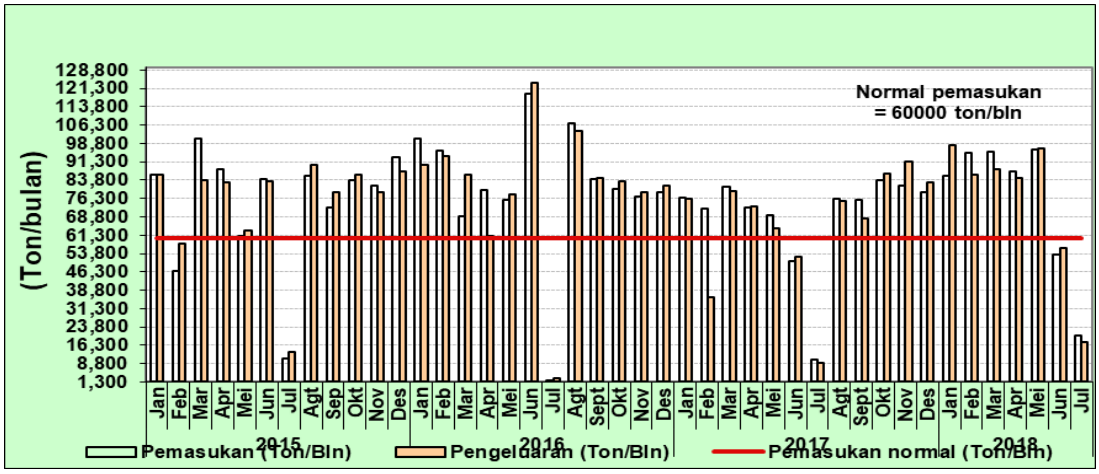

Sumber : Kementan, 2018

Gambar 17 Pemasukan dan Pengeluaran Pasokan Beras di PBIC periode 1 Januari 2015- 6 Juli 2018.

g. Agen

Agen ini merupakan pihak yang mendistribusikan beras dari pedagang grosir (PBIC) ke pengecer.

h. Pengecer

Pengecer sebagai lembaga pemasaran yang akan medistribusikan beras kepada konsumen, berupa pasar tradisional (warung, toko beras yang menjual eceran) maupun pasar modern (swalayan, supermarket, retail).

Hasil pemetaan terhadap Saluran beras di Kabupaten Karawang menunjukkan terdapat delapan saluran pemasaran komoditas beras di Kabupaten Karawang seperti terlihat pada Gambar 8 Delapan saluran pemasaran tersebut akan diuraikan pada paparan di bawah ini.

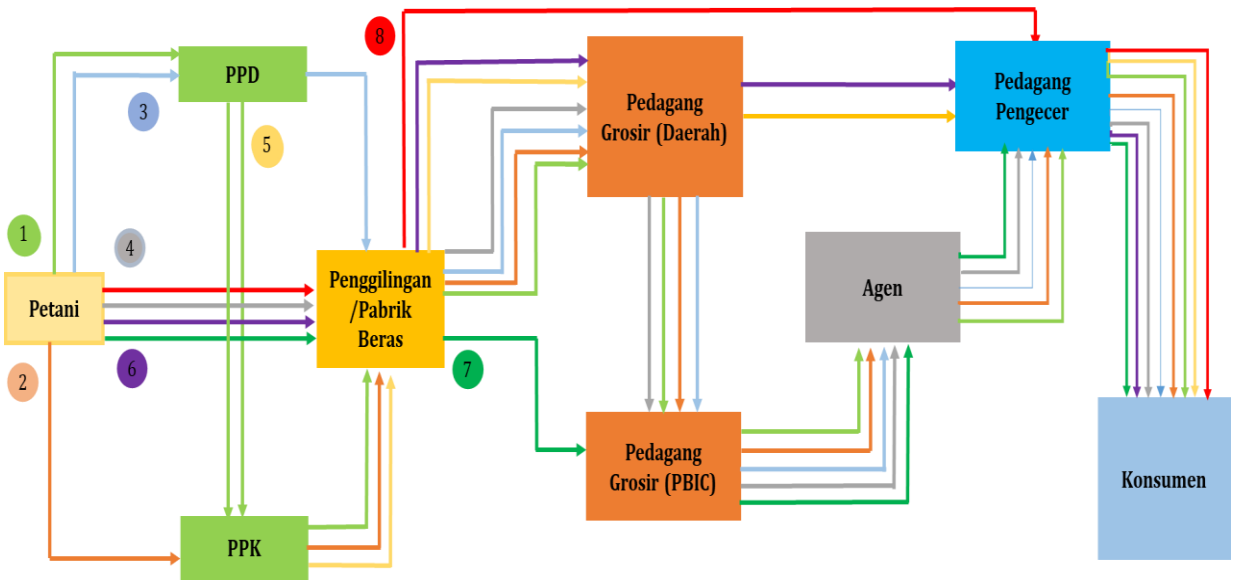

Gambar 18 Saluran Pemasaran Beras di Lokasi Sampe

Dari Gambar diatas dapat disimpulkan terdapat 8 (delapan) saluran alternatif dalam pemasaran beras di lokasi sampel, yaitu:

1. Petani → Pedagang Pengumpul Desa → Pedagang Pengumpul Kecamatan → Penggilingan Padi/Pabrik Beras → Pedagang grosir daerah → Pedagang grosir PBIC → Agen → Pedagang Pengecer → Konsumen.
2. Petani → Pedagang Pengumpul Kecamatan → Penggilingan Padi/Pabrik Beras → Pedagang grosir daerah → Pedagang grosir PBIC → Agen → Pedagang Pengecer → Konsumen.

3. Petani → Pedagang Pengumpul Desa → Penggilingan Padi/Pabrik Beras → Pedagang grosir daerah → Pedagang grosir PBIC → Agen → Pedagang Pengecer → Konsumen.
4. Petani → Penggilingan /Pabrik Beras → Pedagang Grosir Daerah → Pedagang Grosir PBIC → Agen → Pedagang Pengecer → Konsumen.
5. Petani → Pedagang Pengumpul Desa → Pedagang Pengumpul Kecamatan → Penggilingan /Pabrik Beras → Pedagang Grosir Daerah → Pedagang pengecer → konsumen.
6. Petani → Penggilingan /Pabrik Beras → Pedagang Grosir Daerah → Pedagang pengecer → Konsumen.
7. Petani → Penggilingan /Pabrik Beras → Pedagang grosir PBIC → Agen → Pedagang Pengecer → Konsumen.
8. Petani → Penggilingan /Pabrik Beras → Pedagang pengecer → Konsumen.

Berdasarkan delapan saluran pemasaran di atas, dapat dilihat bahwa pedagang pengumpul baik di tingkat desa maupun kecamatan akan bermain peran ketika para petani tidak tergabung dalam kelompok tani dan tidak melakukan kemitraan dengan penggilingan atau pabrik beras. Sebaliknya, apabila penggilingan atau pabrik beras sudah memiliki kontrak kerjasama dengan kelompok tani maupun gabungan kelompok tani maka penggilingan akan memperoleh pasokan langsung dari petani dan relative dapat mengontrol kualitas yang diharapkan.

Penggilingan memiliki peran yang penting dalam distribusi rantai pemasaran. Kapasitas penggilingan yang masih kecil tentunya tidak dapat bersaing ketika harga gabah tinggi dan harga jual beras sesuai yang telah ditetapkan. Pada saat kurang pasokan di suatu wilayah maka pada skala penggilingan ini akan mencari pasokan di lokasi sekitar kabupaten atau memilih untuk tidak beroperasi. Pada kapasitas sedang, penggilingan apabila kekurangan pasokan akan mencari di sekitar sampai di luar propinsi. Sedangkan penggilingan dengan kapasitas tinggi dapat mencari pasokan hingga di luar pulau.

Berdasarkan data laporan penggilingan Oktober M-I tahun 2008 bersumber BB Pasca Panen Kementan, dari 1,6 juta ton beras dihasilkan dari 62,85 persen penggilingan skala kecil, 13,83 persen dari penggilingan skala sedang dan 23,32 persen dari penggilingan skala besar(Gambar 9) Terlihat bahwa penggilingan kecil masih memberikan kontribusi terbesar lebih dari setengan pasokan. Penggilingan skala besar yang disinyalir sudah memiliki jalur distribusi antar pulau memberikan kontribusi terbesar kedua. Dalam hal ini peningkatan kapasitas penggilingan masih diperlukan.

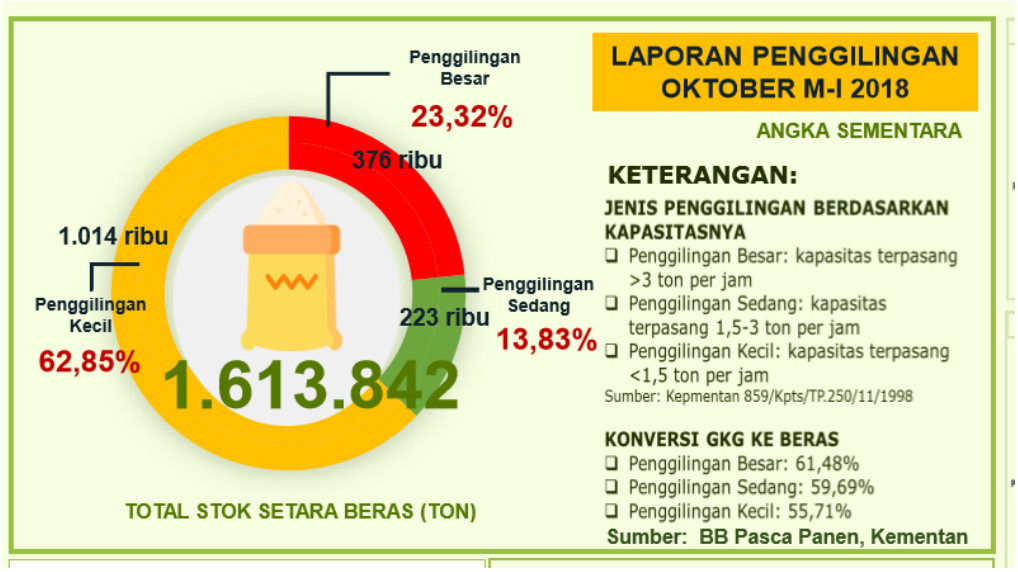

Gambar 19. Kontribusi Masing-Masing Penggilingan Berdasarkan Skala terhadap Total Stok Beras

Analisis terhadap Marjin Pemasaran menunjukkan bahwa terdapat 8 saluran pemasaran beras dari petani hingga ke konsumen. Setiap saluran pemasaran tersebut terdiri lebih dari dua aktor atau lembaga pemasaran. Secara keseluruhan, lembaga pemasaran yang terlibat pada perdagangan beras adalah petani, pedagang pengumpul desa, pedagang pengumpul kecamatan, penggilingan padi, pedagang grosir daerah, pedagang grosir PBIC, agen dan pedagang pengecer. Masing-masing lembaga pemasaran tersebut melakukan fungsi pemasaran yang berbeda satu dengan lainnya.

Aktivitas penyaluran beras dari lembaga pemasaran satu ke lembaga pemasaran lainnya tentu menimbulkan biaya pemasaran yang kemudian berdampak pada keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing lembaga pemasaran. Selain itu, sebagai lembaga melakukan aktivitas pemasaran, tentunya setiap lembaga atau aktor akan mendapatkan marjin pemasaran berupa selisih antara harga jual dengan harga beli beras. Data harga di setiap lembaga pemasaran menunjukkan adanya rentang yang cukup tinggi antara beras di tingkat petani dengan harga beras di konsumen, khususnya di wilayah Jabodetabek pada bulan Agustus-September 2018. Hal ini menunjukkan besarnya perbedaan marjin di setiap level lembaga pemasaran yang terlibat dalam perdagangan beras.

Petani menjual gabah dalam bentuk GKP (gabah kering panen). Oleh sebab itu perhitungan marjin pada penelitian ini, harga jual gabah dari petani dikonversi ke dalam satuan per kilogram beras (60.05%). Dari hasil analisis ditemukan bahwa saluran 3 memiliki total marjin pemasaran terbesar, yakni Rp 2.863,45. Sedangkan saluran yang memiliki total marjin pemasaran terendah adalah saluran 6, yakni sebesar Rp 1.487,45. Jika ditinjau dari total keuntungan maka saluran yang mendapatkan total keuntungan terbesar adalah saluran

3, sedangkan saluran dengan total keuntungan terkecil adalah saluran 6. Berbeda dengan total marjin dan keuntungan, total biaya terbesar ada pada saluran 1, sedangkan total biaya pemasaran terkecil terdapat pada saluran 8. Banyaknya lembaga pemasaran yang terlibat merupakan salah satu faktor yang memengaruhi besaran total marjin, total keuntungan, dan total biaya untuk setiap saluran pemasaran.

Jika dilihat dari masing-masing lembaga pemasaran yang terlibat pada perdagangan beras maka dapat diketahui bahwa biaya pemasaran terbesar terdapat pada penggilingan padi. Lembaga tersebut melakukan ketiga fungsi pemasaran sekaligus, yakni fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Oleh sebab itu, biaya yang dikeluarkan oleh lembaga ini cukup banyak, yaitu terdiri dari biaya pengeringan, biaya penggilingan, biaya susut, biaya pengemasan, biaya transportasi, biaya bongkar muat, dan lain-lain.

Keuntungan terbesar diperoleh oleh pedagang pengecer, yakni rata-rata 35,74 persen dari total keuntungan. Sedangkan keuntungan terkecil diperoleh oleh pedagang grosir daerah (4,68 persen). Akan tetapi jika dilihat dari volume perdagangan, pedagang grosir daerah memiliki volume perdagangan yang lebih besar daripada pedagang pengecer sehingga secara nominal keuntungan yang diperoleh pedagang grosir daerah tentu lebih besar dibandingkan pedagang pengecer.

Marjin pemasaran yang tinggi ada pada level penggilingan padi dengan rata-rata sebesar 42,40 persen, dikuti oleh agen (rata-rata 21,93 persen). Sedangkan marjin pemasaran terendah ada pada pedagang pengumpul kecamatan (2,71 persen). Marjin yang tinggi di penggilingan padi atau agen seiring dengan banyaknya aktivitas atau fungsi pemasaran yang dilakukan oleh kedua lembaga pemasaran tersebut. Berbeda dengan pedagang pengumpul kecamatan, lembaga ini hanya melakukan fungsi pertukaran (pembelian dan penjualan gabah).

2) Kajian Pemasaran Beras di Negara ASEAN dan Perkembangan Alternatif Pemasaran Beras di Indonesia

Indonesia sebagai negara yang berdaulat, berkomitmen untuk mewujudkan ketahanan pangan. Konsep ketahanan pangan mengandung tiga dimensi yang saling terkait yaitu: (1) ketersediaan pangan; (2) aksesibilitas (keterjangkauan) masyarakat terhadap pangan; dan (3) stabilitas harga pangan.

Distribusi beras yang efisien menjadi tantangan di Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar. Distribusi antar daerah surplus ke daerah defisit menjadi isu penting dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia. Komoditas beras harus melalui banyak titik dalam jalur distribusi hingga sampai kepada konsumen yang mengakibatkan tingginya harga

dan menjelaskan mengapa banyak petani ternyata tidak menikmati harga yang tinggi tersebut.

Sejumlah negara di Asia juga memberlakukan berbagai kebijakan guna melindungi petani produsen, konsumen ataupun keduanya secara simultan baik melalui fungsi penetapan HPP, penyediaan stok, ataupun penyaluran/distribusi pangan dalam rangka menjamin stabilisasi harga konsumen. Intervensi tersebut dilaksanakan melalui berbagai lembaga pangan pemerintah, baik yang berbentuk seperti BUMN yaitu PWO di Thailand, semacam LPND seperti NFA di Philipina, ataupun berbentuk perusahan terbuka seperti Bernas di Malaysia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kajian ini untuk :

1. Bagaimana perbandingan pola pemasaran beras pada negara ASEAN lainnya?
2. Bagaimana perkembangan alternatif pemasaran beras (e-marketing)?

Thailand

Terdapat dua tipe beras berdasarkan ekosistem di Thailand, yaitu *up land rice* yang tumbuh secara dominan di daerah Utara dan Timur Laut negara Thailand; dan *wet rice* yang tumbuh di lahan beririgasi yang terletak di Central Plains. Jumlah produksi beras daerah Timur Laut Thailand masih lebih banyak dibandingkan dengan produksi di daerah Utara dan Central Plains; yaitu sekitar 35 hingga 40 persen dengan 25 persen pada masing-masing daerah.

Sekitar 85 persen beras di Thailand tumbuh dengan sistem budidaya sawah tadah hujan pada bulan Juli sampai September dan dipanen menjelang akhir tahun. Beras yang diproduksi selama periode ini adalah:

1. Beras ketan (*sticky rice* atau *glutinous rice*)
2. Beras putih (*non glutinous rice*), seperti beras putih aromatik, beras merah aromatik, dan beras padi aromatik dengan masing-masing karakteristik. Beras ini terbilang paling terkenal dengan harga yang terjangkau. Penjualan beras putih tiap tahunnya mencapai angka 24 hingga 25 juta ton pada pasar dunia.
3. Beras pratanak (*parboiled rice*), yaitu beras yang didapatkan dengan proses melakukan perendaman gabah di dalam air hangat, meniriskan gabah lalu mengukus dalam alat pengukus. Kemudian gabah dikeringkan dalam dua tahap, yaitu: pada suhu 100^{o}C selama 1 hingga 2 jam dan pada suhu 55-650^{o}C selama 25 menit. Selanjutnya gabah pratanak digiling menjadi beras pratanak (Litbang, 2013).

Berikut adalah alur pemasaran beras di Thailand:

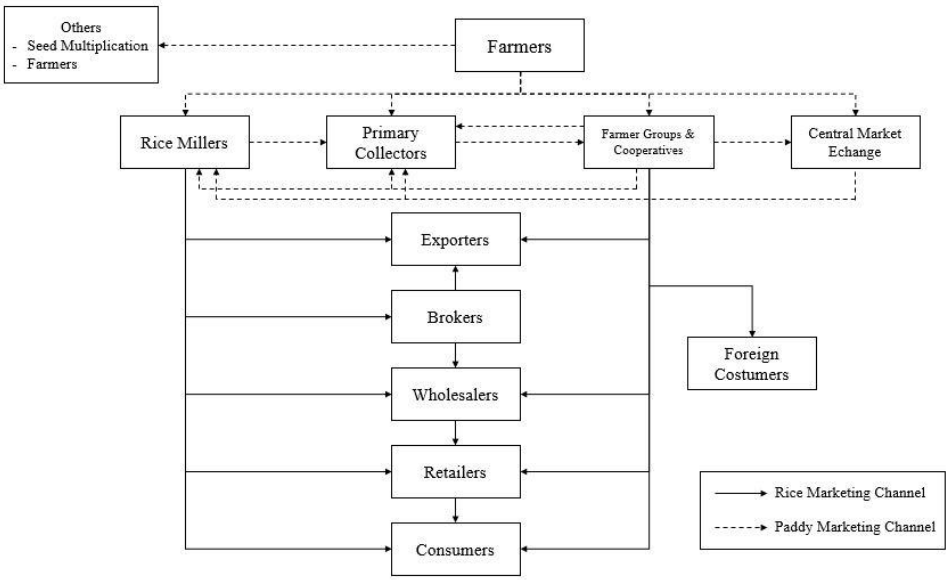

Gambar 20. Alur Pemasaran Beras di Thailand (Dimodifikasi)
Sumber: Agrifood Consulting International, 2005

Hasil padi yang telah dipanen oleh petani akan didistribusikan ke beberapa lembaga, antara lain pabrik penggiling beras, pengepul pertama, kelompok tani dan koperasi, dan pertukaran pasar sentral. Petani juga mendistribusikan padi kepada lembaga perbanyakan benih dan ke petani lainnya. Jika petani memiliki surplus padi maka mereka bisa menjualnya langsung ke pertukaran pasar sentral atau penggilingan beras komersial. Pabrik penggilingan beras komersial juga biasanya menerima padi dari pengepul, kelompok tani dan koperasi, serta pasar sentral.

Kondisi saat ini, sekitar 60 hingga 75 persen beras yang dijual di pasar domestik dikemas dalam bentuk kemasan dengan sistem eceran. Eksistensi lembaga pemasaran beras retail, mampu memperbaiki kondisi ekonomi dan cenderung meningkatkan konsumsi beras di daerah pedesaan. Tetapi, persaingan dari beras dalam kemasan terus mengalami peningkatan, khususnya persaingan harga yang akan berdampak pada kesulitan bagi penjual beras tradisional serta mengancam pada penutupan bisnis.

Malaysia

Malaysia adalah produsen beras yang relatif kecil. Produksi beras Malaysia telah meningkat sejak 1960-an dan hampir dua kali lipat pada 2009. Produksi beras hanya cukup untuk memenuhi sekitar 65 persen dari kebutuhan domestik, sehingga 35 persen sisanya diimpor dari eksportir utama, Thailand dan Vietnam. Di Malaysia terdapat suatu lembaga yang berlaku sebagai importir dan distributor beras, yaitu Padi beras Nasional Berhad (BERNAS) dan pada tahun 1996 lembaga ini diprivatisasi serta sahamnya dijual di bursa saham pada tahun 1997 (Davidson, 2018). BERNAS tidak hanya terlibat dalam pengadaan,

memproses, mengimpor, memperdagangkan dan mendistribusikan beras, tetapi juga menangani dana publik untuk subsidi produksi beras (Nee, 2008). Pemerintah Malaysia membuat pengecualian untuk BERNAS, dengan menetapkan bebas bea impor(Vengedasalam, *et.al*, 2011). Berikut adalah rantai distribusi beras di Malaysia:

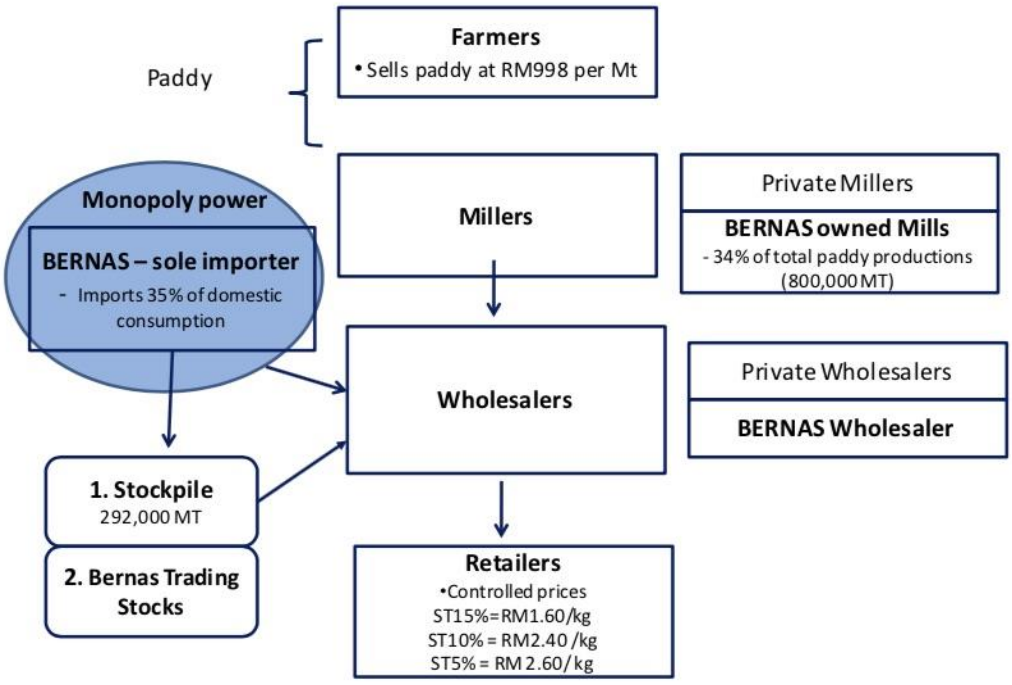

Gambar 21 Peran BERNAS dalam Industri Beras Malaysia (Vengedasalam, *et.al*, 2011)

Dapat dilihat pada Gambar 21 bahwa BERNAS memegang monopoli atas impor beras di Malaysia. Berdasarkan perjanjian konsesi yang ditandatangani antara BERNAS dan pemerintah pada tahun 2011, BERNAS memegang hak tunggal untuk mengimpor dan mendistribusikan beras sampai tahun 2021. Untuk menciptakan rasa persaingan, perusahaan domestik lainnya yang berminat mengimpor beras diminta untuk mengimpor melalui BERNAS dan memasarkannya dengan merek mereka sendiri. Karena BERNAS diizinkan untuk mengimpor berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh GOM untuk suatu tahun tertentu, jumlah yang diimpor oleh perusahaan domestik lokal lainnya tunduk pada kebijakan BERNAS.

Vietnam

Penyediaan stok beras dalam negeri di Vietnam diserahkan pada mekanisme pasar, namun pemerintah memiliki lembaga perdagangan pemerintah (*State Trading Enterprises*) yaitu *Vietnam Northern Food Corporation* (VINAFOOD I) untuk menjamin stok beras nasional. Secara umum beras dipasok ke konsumen domestik melalui saluran distribusi yang melibatkan petani, pengumpul, penggilingan padi, BUMD perberasan, pasar induk dan pasar

retail.

Vina Food 2 merupakan Agensi Perdagangan Pemerintah (Parastatal) yang ditunjuk oleh Pemerintah Vietnam untuk melakukan bisnis pangan di Vietnam.Khusus untuk beras, VinaFood 2 menjalankan fungsi perdagangan beras internasional. Sedangkan penyediaan beras dalam negeri menjadi tanggung jawab VinaFood 1. Perusahaan ini lebih berperan dalam perdagangan lintas propinsi dan ekspor, sedangkan pada perdagangan tingkat propinsi perannya relatif kecil (Baulch et.al, 2008). Alur pemasaran beras di Vietnam ditampilkan pada Gambar 22.

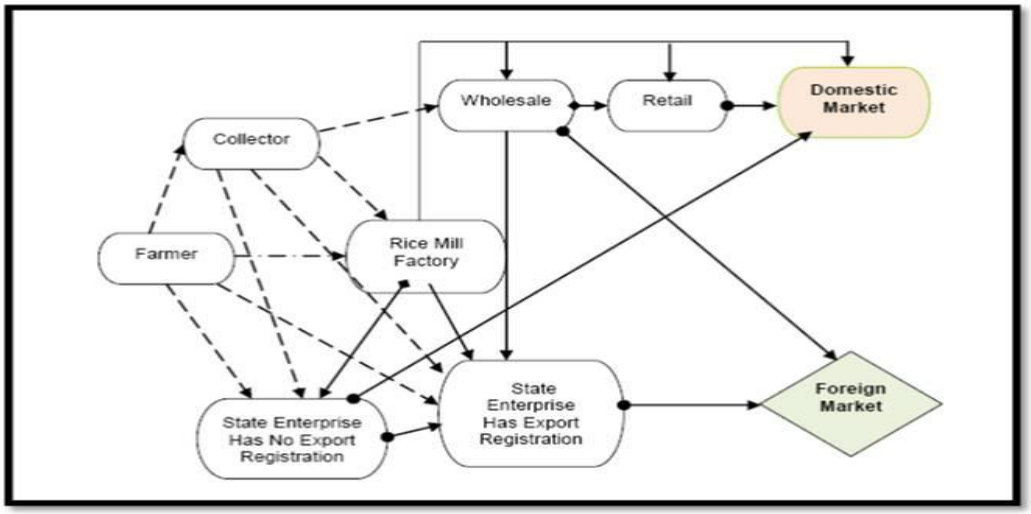

Gambar 22. Alur pemasaran beras di Vietnam

Filipina

Padi yang dijual ke konsumen digiling di pabrik penggilingan modern yang ada di perkotaan. Hal ini dikarenakan selain mempercepat proses penggilingan karena menggunakan mesin yang lebih modern, pabrik penggilingan beras juga memegang peran untuk mendistribusikannya ke distributor, pedagang eceran, bahkan mendistribusikannya langsung ke konsumen. Selain dijual dalam bentuk beras giling, pabrik penggiling beras juga menjual produk yang masih berupa padi ke distributor, lalu distributor akan menjualnya ke pedagang eceran. Setelah itu pedagang eceran akan menjual ke konsumen dalam bentuk beras giling.

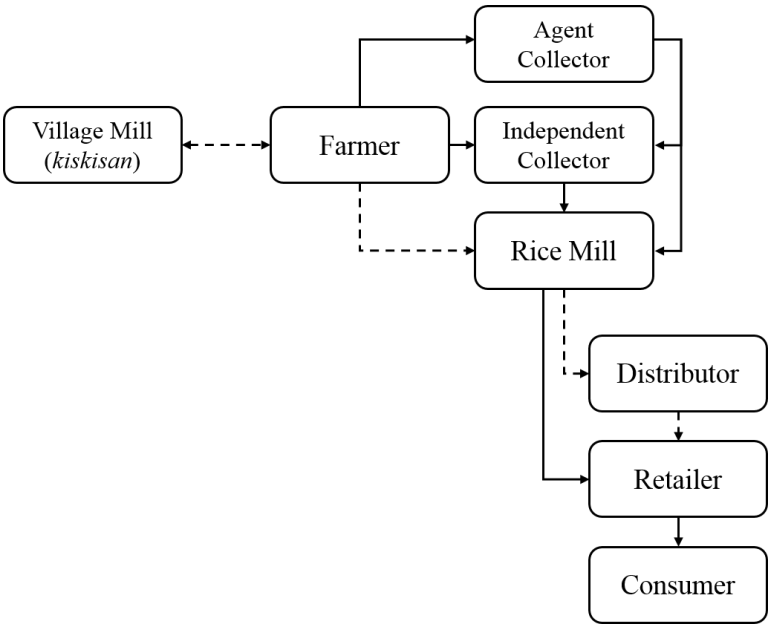

Gambar 23. Saluran Pemasaran Beras di Filipina

Di Filipina terdapat lembaga *National Food Authority* (NFA) yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas beras serta menjamin tingkat pengembalian investasi yang adil untuk produsen (Briones dan Dela Pena, 2015). NFA ini memiliki wewenang antara lain (Briones dan Dela Pena, 2015):

- Mempertahankan stok nasional
- Menyimpan dan menjual gabah
- Memonitor penyimpanan gabah
- Menyita stok ketika terjadi penimbunan
- Menentukan standar dalam grading, sampling dan inspeksi
- Melakukan registrasi, lisensi dan mensupervisi gudang, penggilingan dan kegiatan yang terkait dengan beras
- Mengontrol ekspor dan impor

Jepang

Sejak didirikannya *voluntary rice marketing system* pada tahun 1969, beras yang dipasarkan di Jepang diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, yaitu (1) beras yang dipasarkan pemerintah (beras transgenik), beras ini dibeli pemerintah dari petani padi dan dijual ke pedagang besar. (2) Beras yang dipasarkan secara sukarela (beras VM), beras ini dikumpulkan pada organisasi pengumpul beras, dan langsug dijual ke pedagang grosir. (3) Beras yang dipasarkan secara bebas (beras FM), yag merupakan praktik perdagangan illegal. Tetapi beras yang saat ini banyak diperdagangkan di Jepang adalah beras GM (Beras transgenik) dan Beras VM (Beras yang dipasarkan secara sukarela). Semua beras yang akan

dijual oleh petani harus melalui pemeriksaan sesuai dengan Undang-Undang Pemeriksaan Produk Pertanian. Inspeksi ini dilakukan di Kantor Pangan, sebuah agen dari Badan Pangan, yang merupakan bagian dari Departemen Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Mishima, 1992). Badan Pangan memiliki kontrol monopoli atas pemasaran beras di Jepang. Menurut Undang-Undang Pengendalian Makanan, semua beras harus dikumpulkan ke koperasi desa dan dijual ke Badan Pangan atau ke pedagang besar yang berlisensi (Hayami dan Yoshihisa, 1997).

Berikut ini adalah Saluran distribusi beras di Jepang:

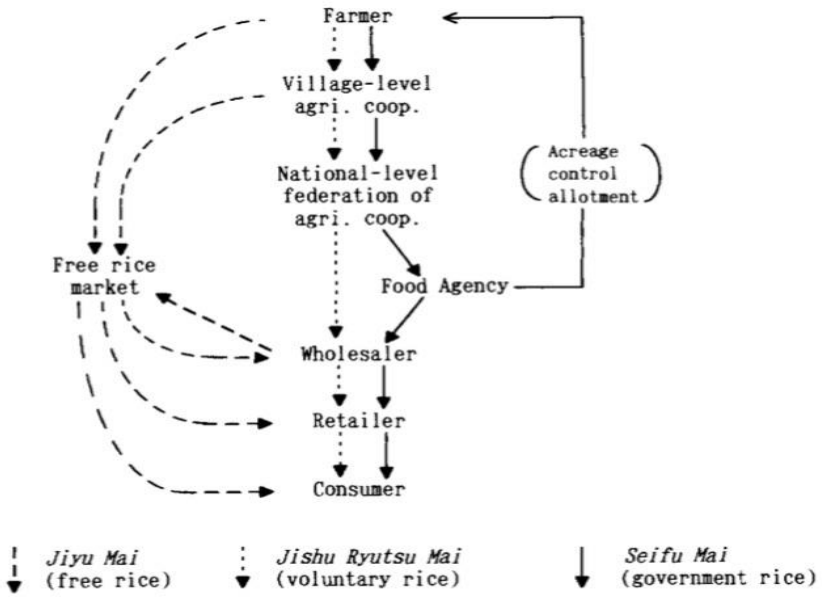

Gambar 24 Sistem Pemasaran Beras di Jepang
*Sumber:*Hayami dan Yoshihisa (1997)

Harga domestik beras di Jepang sangat tinggi jika dibandingkan dengan harga ditingkat ekuilibrium pasar bebas, hal ini terjadi karena pemerintah memberlakukan kebijakan pengendalian luas penanaman beras. Produksi beras di Jepang dikendalikan dengan membayar subsidi kepada petani untuk mengurangi jumlah lahan pertanian yang digunakan untuk menanam beras. Sistem ini membantu mempertahankan harga yang tinggi di pasar domestik. Selain itu, Pemerintah Jepang juga memberlakukan pembatasan kuota impor dan memberlakukan bea impor yang tinggi (Hayami dan Yoshihisa, 1997). Sebagai Negara yang semakin maju saat ini, Jepang mengalami perubahan pola pangan yang menggeser kebutuhan beras dari 1090 kalori menjadi 600 kalori, dan digantikan dengan produk-produk perikanan. Keadaan ini menunjukkan bahwa peran beras sebagai makanan pokok sebenarnya tidak tergantikan, tetapi masyarakat Jepang berusaha untuk mengubah pola konsumsi beras dengan pangan lain.

Koperasi di Jepang atau Japan Agriculture (JA) memegang peranan yang penting dalam pemasaran beras di Jepang. Sistem koperasi di Jepang terdiri dari tiga tingkat (Godo, 2014): (1) Tingkat pertama atau koperasi unit (unit cooperativs) di level desa dan kota, (2) Tingkat kedua di tingkat perfektur yang anggotanya merupakan koperasi di tingkat pertama dan (3) Tingkat ketiga di tingkat nasional yang anggotanya merupakan koperasi di tingkat kedua.

Perbandingan dengan Saluran Pemasaran Beras di Indonesia

Saluran pemasaran beras di beberapa negara ASEAN dna Jepang memiliki karakteristik yang berbeda dengan Indonesia. Salah satu perbedaan adalah adanya lembaga pemasaran yang dikontrol pemerintah atau yang dimiliki petani yang terlibat dalam saluran pemasaran beras di negara-negara tersebut.

Pada kasus Malaysia ada Bernas yang terlibat dalam pemasaran beras domestik maupun sebagai importir, kasus di Vietnam terdapat perusahaan negara yang mengontrol ekspor beras. Sedangkan pada kasus Thailand dan Jepang terdapat koperasi pertanian yang terlibat dalam pembelian gabah/beras dari petani.

Lembaga pemerintah yang terlibat dalam saluran pemasaran pemerintah dapat berperan dalam mengendalikan harga dan ketersediaan beras domestik. Sedangkan keterlibatan koperasi milik petani dapat meningkatkan bagian petani/share dalam saluran pemasaran beras.

Indonesia memiliki Bulog yang berfungsi membeli beras dari petani dan menyimpan sebagai stok namun jumlah masih terbatas dan sebagian besar beras yang diperdagankan dikuasai oleh pedagang. Saat ini terdapat beberapa perusahaan daerah, seperti Food Station, yang terlibat dalam saluran pemasaran beras/gabah yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan beras di daerah tertentu atau propinsi.

Keterlibatan lembaga pemasaran petani masih terbatas di Indonesia walaupun di beberapa daerah terdapat kelompok tani atau bumdes (badan usaha milik desa) yang terlibat namun scopenya masih terbatas. Sebelum krisis 1998, Koperasi Unit Desa (KUD) terlibat aktif dalam pembelian gabah dari petani namun perannya dihilangkan seiring dengan perubahan peran Bulog pada saat itu.

Masa yang akan datang keterlibatan lembaga pemasaran petani, apapun bentuknya, perlu ditingkatkan lagi walaupun scopenya relatif sempit namun jumlahnya dapat bertambah lebih banyak lagi. Lembaga pemasaran petani ini dapat melakukan fungsi-fungsi pemasaran yang selama ini dilakukan oleh pihak lain seperti penggilingan, pengemasan, penyimpanan dan lain-lain sehingga nilai tambah yang didapat dapat

dinikmati oleh petani serta harga yang diterima oleh petani dapat menjadi lebih baik.

PEMASARAN BERAS MELALUI *ONLINE*

Pemasaran *Online* di Indonesia

Perkembangan teknologi seiring berjalannya waktu menjadikan internet sebagai platform atau alternatif yang digunakan dalam bidang pemasaran melalui *online*. Pemasaran online merupakan alat yang efektif untuk mempromosikan suatu produk selain dengan memasarkan secara langsung, yaitu dengan memanfaatkan teknologi internet.

E-commerce adalah sebuah website maupun aplikasi untuk melakukan jual beli yang memungkinkan pembeli dapat memilih barang pada website tersebut. Selain itu, *e-commerce* dapat tetap melakukan diskusi dengan penjual maupun transfer dana yang dibutuhkan untuk membeli barang. Namun, untuk e-*commerce* sendiri menampilkan barang yang berada dari satu penjual saja.

Karena penjualan produk berupa produk pertanian, maka fokus utama yaitu produk harus segar hingga sampai di konsumen. Maka dari itu, pendistribusian produk pertanian yang dipesan disesuaikan dengan daerah yang menghasilkan produk pertanian tersebut. Keberadaan *e-commerce* dapat memberikan beberapa keuntungan, antara lain memperluas domain pasar industri, kemudahan untuk mencari informasi pasokan dan permintaan terkait industri dari berbagai bidang yang lebih luas, kecepatan dan efisiensi waktu yang tercipta terkait pengiriman dan logistik produk pertanian online serta penghubung rantai perdagangan lainnya.

Tabel 23 Pemasaran Beras Secara *Online* di Indonesia

No	Pemasaran Online	Situs Web	Keterangan
1	Lazada	https://www.lazada.co.id	Beras premium (putih, merah, hitam), beras organik (putih, merah, hitam).
2	PT. Global Digital Niaga (Blibli)	https://www.blibli.com	Beras premium (putih, merah, hitam), Beras organic (putih, merah, hitam).

3	Rarali	https://www.ralali.com	Beras premium (putih, merah, hitam), beras organik (putih, merah, hitam).
4	Bukalapak	https://www.bukalapak.com	Beras premium (putih, merah, hitam), beras organik (putih, merah, hitam).
5	Tokopedia	https://www.tokopedia.com	Beras premium (putih, merah, hitam), beras organik (putih, merah, hitam).
6	Elevania	http://www.elevenia.co.id	Beras premium (putih, merah, hitam), beras organik (putih, merah, hitam).
7	Toko Tani Indonesia	http://infopasartani.com/	Beras komersial, sayur, buah dan sembako
8	PT. Food Station Tjipinang Jaya	www.foodstation.co.id	Beras, sembako
9	LofMart (*Local,Organic, and Fresh Mart*)	http://lofmart.com	Beras organik dan sayuran organic
10	Liwet1001	http://www.liwetinstanseribusatu.com/ ; http://www.1001.com/	Beras olahan
11	Limakilo	https://limakilo.id	Beras, sayuran
12	Agromaret	https://www.agromaret.com	Beras dan produk pertanian lainnya
13	Beras Gotong Royong	https://iscglobe.com	Beras premium IR-64

Sumber : Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan

Beberapa merk beras yang ada di pasar online antara lain yaitu beras SAE (Sehat Aman Enak), *House of organic*, Beras Cililin, Kuartet Nabati, *The Organic Stop*, Hotel, Choconola, Alfamidi, Lestari Organic, Organik, Multiwarna, Tropicana slim, Kashmir, Agbasya, Pure Green, Food station. Secara umum perusahaan yang memasarkan merk ini memperoleh supply dari beberapa petani maupun kelompok tani untuk diproses melalui *Rice Milling Unit* dan dilakukan packaging.

Harga beras yang ditawarkan pada masing-masing *online shop, marketplace,* dan *e-commerce* sangat beragam. Seringkali untuk produk sejenis terdapat perbedaan harga antar pemasar *online* dan juga terdapatnya diskon produk serta ongkos kirim. Adapun harga antar merk memiliki range harga yang sangat tinggi terutama untuk beras organik atau beras bebas residu pestisida. Harga di Toko Tani Indonesia memiliki harga yang lebih murah dari harga pasar. Untuk Pengamatan harga untuk beras premium yang dijual dengan pemasaran *online* saat kajian dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 24. Harga Beras di Pemasaran *Online*

No	Beras Premium	Harga (Rp/kg)
1	Beras Premium Putih	12.000 – 16.000
4	Beras Organik Putih	15.000 – 35.000
5	Beras Organik Merah	18.000 - 40.000
6	Beras Organik Hitam	25.000 – 95.000

Pengembangan pemasaran *online* untuk komoditas beras di Indonesia dilakukan oleh pemerintah (BUMD dan kementrian pertanian) maupun swasta. Beberapa pelaku pemasaran *online* beras diantaranya sebagai berikut:

1. Toko Tani Indonesia Center (TTIC)

Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian melaunching *e-commerce* pada Toko Tani Indonesia Center (TTIC) pada tanggal 22 Desember 2017. Sistem aplikasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat dan memotong mata rantai distribusi komoditas pertanian, dimana melibatkan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Toko Tani Indonesia (TTI) yang ada diseluruh, dan Toko Tani Indonesia Center (TTIC) yang yang berperan sentral yaitu sebagai penghubung antara pemasok dan TTI dalam suatu sistem data informasi berbasis online.

TTIC mengetahui kebutuhan TTI (Toko Tani Indonesia) dan sumber pemenuhannya yakni Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Dengan *e-commerce*, TTIC cukup menggerakkan Gapoktan untuk mengirim barang kebutuhan ke TTI, terutama pada komoditas beras, bawang dan cabai. Sementara untuk daging dan telur berada diindustri. Dengan demikian masing-masing pihak bisa memanfaatkan platform tersebut

untuk melakukan transaksi termasuk didalamnya melakukan perencanaan kebutuhan, jumlah stock, volume transaksi, status pengiriman, pembayaran, serta harapan kedepannya untuk mengimplementasikan *cashless* dalam pola transaksi ini.

Laman infopasartani.com merupakan website yang digunakan oleh Toko Tani Indonesia Info harga dapat dilihat pada website ini. Pengembangan Toko Tani Indonesia saat ini sudah berada di luar Pulau Jawa yang mencapai 3000-an. Toko-toko di tingkat kelurahan juga sudah ada yang menjadi anggota Toko Tani Indonesia yang memperoleh pembinanaan dari Badan Ketahanan Pangan.

2. PT Food Station Tjipinang Jaya

PT. Food Station Tjipinang Jaya sebagai Badan Usaha milik Daerah bergerak dalam bidang distribusi, penjualan, jasa pergudangan, pergudangan dalam resi gudang, jasa pertokoan, dan pengangkutan bahan pangan (beras). Menjalankan fungsinya menjaga ketahanan pangan di wilayah DKI Jakarta dan menjadi pusat informasi bahan pangan di Asia Tenggara. Food Station menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik sehingga dapat berdaya saing yang tinggi di dalam era globalisasi (http://www. foodstation.co.id). Bisnis beras kemasan PT Food Station Tjipinang Jaya terus mengalami pertumbuhan. Dibandingkan tahun lalu, penjualan beras kemasan BUMD DKI Jakarta ini mampu mencatat pertumbuhan penjualan sebesar 97 persen. Beras kemasan yang dinamai Food Station ini memiliki beragam variasi. Terdapat beras kemasan jenis pandan wangi, Rojolele, Beras Hitam, Ketan Putih, Japonika, dan berbagai jenis beras kemasan lainnya. Beras kemasan yang dijual mulai dari kemasan 1 kg hingga 50 kg.

Beras FS Pandan Wangi

Beras FS Rojolele

Beras FS Setra Ramos

Beras FS Premium Pandan Wangi

Beras FS Premium Rojolele

Beras FS Melati Pandan Wangi

Beras FS Melati Rojolele

Beras FS Melati Setra Ramos

Beras FS Japonica

Beras FS Premium Setra Ramos

Volume beras yang dijual untuk pasar modern per bulan sekitar 500 ton hingga 800 ton. Selebihnya dijual ke pasar tradisional. Tak hanya itu, Food Station juga dijual lewat *e-*

commerce seperti blibli, tokopedia, lazada, alfacart, bukalapak, serta indoklik. Kontribusi pemasaran via e-commerce sekitar 10 persen dari total transaksi.

3. LOFMart

LOFMart (*Local, Organic, and Fresh Mart*) merupakan *e-commerce* yang menyediakan komoditas pertanian organik. E-commerce ini diluncurkan secara resmi pada 22 April 2014 (bertepatan dengan hari bumi) di bawah bendera PT Jejaring Hijau Indonesia. LOFMart berdiri dalam dua sisi, non profit dan profit. Non profit dalam fokus untuk melakukan pembinaan petani melalui Yayasan Jejaring Lestari Indonesia, dan profit dalam fungsinya sebagai distributor. Untuk melakukan pelatihan kepada petani, LOFMart bekerjasama dengan beberapa organisasi atau perusahaan seperti Medco dan *Price water house Coopers* (PwC).

Untuk sementara ini LOFMart baru bisa melayani konsumen di area Jakarta dan Tangerang.Selain menyediakan sayuran organik, LOFMart juga menyediakan buah-buahan organik seperti alpukat, pisang ambon, pepaya California, dan juga beberapa produk olahan seperti telur ayam negeri, beras, ayam probiotik, tempe organik, dan lainnya. Ada sekitar 80 jenis produk yang tersedia di toko online LOFMart. (http://lofmart.com/)

4. E-commerce CV. 1001 Garut

CV. 1001 Garut merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pangan dengan fokus utama pada penjualan komoditas beras. CV 1001 Garut telah berdiri sejak tahun 1975, lalu pada tahun 2011 membuat inovasi berupa liwet instan. Beberapa produk yang diproduksi CV 1001 Garut antara lain Liwet Instan 1001, Nasi Uduk Warna, dan Cireng Raosna 1001.

Target pasar produk ini adalah kalangan masyarakat menengah ke atas. Mulanya, *Positioning* produk ini awalnya sebagai buah tangan khas garut, namun saat ini CV 1001 Wijaya Pratama sedang melakukan ekspansi penjualan produk ke pasar swalayan sehingga *positioning* produk ini berubah sebagai makanan instan dan siap saji. Produk-produk ini dapat ditemukan di Gerai 1001, di toko oleh-oleh yang berada di wilayah Garut, serta pada pasar-pasar swalayan (Karina, 2015).

Permintaan akan liwet instan semakin meningkat tiap tahunnya, maka dari itu CV. 1001 Garut merambah penjualannya dengan memanfaatkan platform *e-commerce* yang bisa

diakses melalui laman http://www.liwetinstanseribusatu.com/. Pemanfaatan *e-commerce* sebagai sarana pemasaran menjadikan konsumen dan produsen mempermudah komunikasi dalam berbelanja. Konsumen dapat langsung memilih produk yang ingin dibeli dan dapat memeriksa ketersediaan produk tersebut. Selain itu, proses pembayaran menggunakan kartu kredit atau transfer juga mempermudah konsumen serta jasa pengiriman yang langsung dikirim ke rumah konsumen menjadi jasa unggulan dari pemanfaatan platform *e-commerce*.

5. *E-commerce* Limakilo

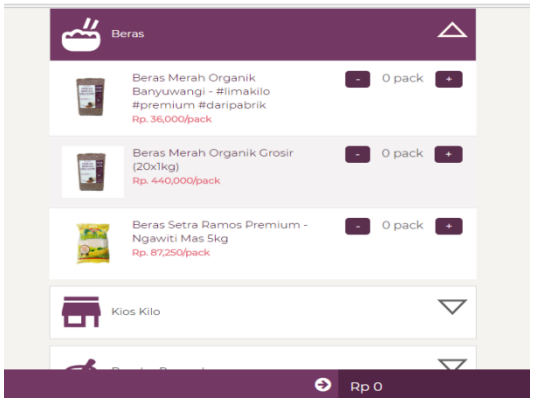

Contoh *e-commerce* berbasis agribisnis yang lain adalah Limakilo. *Platform e-commerce* Limakilo.id dikelola oleh PT. Limakilo Majubersama Petani yang berdiri sejak tahun 2015. Limakilo menjual produk-produk bahan pangan, namun produk utama dari Limakilo yaitu bawang merah yang berasal dari Brebes, Sleman, dan Bantul.

Limakilo dapat diakses melalui (https://sales.limakilo.id/) atau dapat diunduh melalui *smartphone* dengan nama aplikasi Limakilo. Melalui aplikasi ponsel Limakilo, konsumen bisa membeli bawang merah dengan kemasan 5 kg yang didasarkan pada informasi berdasarkan penelitian PT. Limakilo Maju bersama Petani tentang rata-rata jumlah pemakaian bawang merah bagi konsumen dengan usaha katering, yaitu sebanyak 5 kg per-minggunya.

Pemasaran Beras Online di Beberapa Negara

Negara Jepang memiliki lebih dari 100 juta pengguna internet bahkan bisa meningkat tiap tahunnya, dengan begitu internet digunakan sebagai salah satu platform dalam memasarkan suatu produk dalam bentuk e-commerce. Kepopuleran *smarthphone* dan tablet di Jepang juga menjadi salah satu pemicu meningkatnya konsumsi e-commerce serta mempengaruhi penjualan bahan makanan berbasis internet di masa yang akan datang. Meskipun masih dalam masa perkembangan, penjualan bahan makanan berbasis internet semakin populer diantara konsumen Jepang dikarenakan konsumen mencari alternatif lain dengan alasan mencari yang lebih nyaman, yaitu melalui berbelaja melalui e-commerce.

Hal ini menjadikan Jepang sebagai negara kedua terbesar dalam hal pasar e-commerce di wilayah Asia Pasifik dengan tingkat pertumbuhan sekitar 0,14%. Konsumen Jepang lebih cenderung melakukan transaksi belanja *online* untuk barang yang *edible* (dapat dikonsumsi) karena proses yang lebih mudah, seperti kemudahan mencari produk yang

diinginkan dan dapat melihat ketersediaan produk tersebut. Selain itu, mudahnya dalam proses pembayaran juga menjadi faktor konsumen untuk menggunakan jasa e-commerce, yaitu pembayaran dengan menggunakan kartu kredit.

Berikut adalah berapa contoh jenis e-commerce yang ada di Jepang, yaitu tabel 25 e-commerce di Jepang

1. Amazon Japan (https://www.amazon.co.jp/)	amazon.co.jp
2. Rakuten (https://www.rakuten.co.jp/)	Rakuten 楽天
3. Yahoo (https://www.yahoo.co.jp/)	YAHOO! JAPAN

Pengembangan teknologi informasi untuk pemasaran produk pangan dan pertanian di *Malaysia* dilakukan oleh FAMA (*FederalAgricultural Marketing Authority*), suatu badan yang dibentuk tahun 1965 dibawah Departemen Pertanian. Tujuannya adalah untuk supervisi, koordinasi, regulasi dan meningkatkan pemasaran produk pertanian di Malaysia kecuali beras, padi, tembakau, kakao, minyak sawit, karet dan nanas. Inisiatif yang dikembangkan FAMA dalam kaitannya dengan informasi ini adalah membangun portal FAMA (www.famaxchange.org) dan *Supply Demand Virtual Information System*(SDVI). FAMAXCHANGE bertindak sebagai *one stop marketing information center*di sektor pangan dan pertanian; mendiseminasikan informasi yang akurat, *up-to-date*dan *relevant* bagi pihak yang terkait berikut trend dan harga terbaru dari berbagai komoditi pertanian; menjadikan *website* sebagai sarana pelatihan dan pendidikan secara online; dan memperkenalkan *e-commerce*bagi komoditi pertanian (Khairi dan Dawin, 2005).

3.3 PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

3.3.1 KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL)

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangannya secara intensif untuk dimanfaatkan menjadi sumber pangan dan gizi keluarga secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi sumberdaya alam dan kebutuhan gizi warga setempat. Tujuan dari pelaksanaan KRPL adalah meningkatkan partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral.

Untuk meningkatkan keragaman komoditas pangan dilakukan optimalisasi pekarangan. Optimalisasi pekarangan ini dikembangkan secara intensif melalui pengembangan pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture),* antara lain dengan membangun kebun bibit dan mengutamakan sumber daya lokal yang disertai dengan pemanfaatan pengetahuan lokal (*lokal wisdom),* sehingga kelestarian alam pun tetap terjaga. Implementasi konsep inilah dikenal dengan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Melalui konsep KRPL, diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan gizi keluarga dan meningkatkan kesejahteraan menuju kemandirian pangan sekaligus melestarikan sumber daya alam. KRPL dilaksanakan dengan melakukan pemberdayaan intensif kepada ibu rumah tangga yang terwadahi dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan teknologi budidaya tanam pada pekarangan. Adapun manfaat pelaksanaan kegiatan KRPL untuk individu maupun kelompok diantaranya untuk kemudahan akses pangan terutama pangan lokal, pemenuhan pangan dan gizi keluarga, menghemat pengeluaran belanja pangan keluarga yang berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dan masyarakat.

Pada tahun 2018 jumlah KRPL yang diberdayakan sebanyak 2300 kelompok wanita/kelompok masyarakat lainnya Tahap Penumbuhan pada 442 kabupaten di 33 provinsi. KRPL yang ditumbuhkan pada tahun 2017 tidak diberikan alokasi dana untuk pengembangan karena keterbatasan anggaran. Untuk setiap desa baru tahun 2018 mendapatkan bantuan pemerintah (banper) sebesar Rp50.000.000 dengan rincian:

a) Rp15.000.000 pengembangan pekarangan anggota
b) Rp20.000.000 kebun bibit

c) Rp7.000.000 demplot

d) Rp5.000.000 pengembangan kebun sekolah

e) Rp3.000.000 praktek pengembangan menu B2SA di kelompok

Jika dilihat dari pencairan anggaran bantuan pemerintah, jumlah desa KRPL Tahap Penumbuhan tahun 2018 telah terealisasi secara keseluruhan yaitu 2300 kelompok (100%). Pencairan anggaran Bantuan Pemerintah terakhir pada bulan Oktober 2018 yaitu di kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat. Adapun tabel 26 rekapitulasi pencairan anggaran Banper sebagai berikut:

NO	Satker	Pagu Awal	Pagu Realokasi	Realisasi		Sisa
		Kelompok	Kelompok	Kelompok	%	Kelompok
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat	136	139	139	100	0
2	Dinas Ketahanan Pangan provinsi Jawa Tengah	131	131	131	100	0
3	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan propinsi D.I Yogyakarta	25	25	25	100	0
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan provinsi Jawa Timur	160	166	166	100	0
5	Dinas Pangan Aceh	89	89	89	100	0
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan provinsi Sumatera Utara	135	135	135	100	0
7	Dinas Pangan provinsi Sumatera Barat	82	82	82	100	0
8	Dinas Ketahanan Pangan provinsi Riau	62	62	62	100	0
9	Dinas Ketahanan Pangan provinsi Jambi	46	45	45	100	0
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan provinsi Sumatera Selatan	72	75	75	100	0
11	Dinas Ketahanan Pangan provinsi Lampung	75	76	76	100	0
12	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Kalimantan Barat	62	62	62	100	0

NO	Satker	Pagu Awal	Pagu Realokasi	Realisasi		Sisa
		Kelompok	Kelompok	Kelompok	%	Kelompok
13	Dinas Ketahanan Pangan provinsi Kalimantan Tengah	70	70	70	100	0
14	Dinas Ketahanan Pangan provinsi Kalimantan Selatan	53	53	53	100	0
15	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura provinsi Kalimantan Timur	44	48	48	100	0
16	Dinas Pangan daerah provinsi Sulawesi Utara	62	62	62	100	0
17	Dinas Pangan provinsi Sulawesi Tengah	75	75	75	100	0
18	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura provinsi Sulawesi Selatan	103	103	103	100	0
19	Dinas Ketahanan Pangan provinsi Sulawesi Tenggara	49	49	49	100	0
20	Dinas Ketahanan Pangan provinsi Maluku	34	34	34	100	0
	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buru	5	5	5	100	0
	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tengah	6	6	6	100	0
	Dinas ketahanan pangan kabupaten seram bagian barat	8	8	8	100	0
	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Timur	8	8	8	100	0
	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buru Selatan	6	6	6	100	0
21	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali	44	44	44	100	0
22	Dinas Ketahanan Pangan provinsi Nusa Tenggara Barat	56	56	56	100	0
23	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	126	126	126	100	0
24	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua	104	104	104	100	0
25	Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Bengkulu	51	51	51	100	0
26	Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara	20	20	20	100	0
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Selatan	6	6	6	100	0
	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sula	6	2	2	100	0

NO	Satker	Pagu Awal	Pagu Realokasi	Realisasi		Sisa
		Kelompok	Kelompok	Kelompok	%	Kelompok
	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Timur	5	5	5	100	0
	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat	6	6	6	100	0
	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Halmahera utara	6	6	6	100	0
27	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten	40	40	40	100	0
28	Dinas Pangan Provinsi kepulauan bangka belitung	34	34	34	100	0
29	Dinas Pangan Provinsi Gorontalo	33	33	33	100	0
30	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan provinsi Kepulauan Riau	25	25	25	100	0
31	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat	81	81	81	100	0
32	Dinas Ketahahan Pangan Provinsi Sulawesi Barat	33	33	33	100	0
33	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara	26	26	26	100	0
	TOTAL	**2,300**	**2,300**	**2,300**	**100**	**0**

Namun hingga permulaan bulan Januari 2019, secara fisik kegiatan meliputi Kebun Bibit Desa, Demplot, Pekarangan Anggota, Kebun sekolah dan praktek B2SA, belum terealisasi dengan baik sesuai dengan harapan. Hal tersebut disebabkan ada beberapa kelompok di Papua, Papua Barat, dan NTT yang tidak mengirimkan laporan karena faktor infrastruktur yang kurang mendukung. Adapun realisasi fisik kegiatan KRPL tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 27 berikut:

NO	PROVINSI	ALOKASI		RATA-RATA (%)					RATA-RATA (%)
		Target	Realisasi	Kebun Bibit	Demplot	Pekarangan Anggota	Kebun Sekolah	Pengolahan B2SA	
1	Kalimantan Utara	26	26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Kalimantan Timur	48	48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Sulawesi Selatan	103	103	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Kalimantan Barat	62	62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Kalimantan Tengah	70	70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Kalimantan Selatan	53	53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Sulawesi Barat	33	33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Sulawesi Tenggara	49	49	100,00	100,00	100,00	100,00	98,98	99,94
9	Kepulauan Riau	25	25	99,60	99,20	100,00	99,36	95,80	99,41
10	Sulawesi Utara	62	62	98,87	99,35	99,03	97,19	100,00	98,89
11	Gorontalo	33	33	99,70	99,39	98,82	98,82	90,91	98,78
12	Maluku Utara	45	45	100,00	100,00	100,00	90,00	83,78	98,03
13	Banten	40	40	100,00	93,75	92,25	93,50	96,32	95,93
14	Sulawesi Tengah	75	75	95,35	94,88	95,55	91,30	89,51	94,59
15	Maluku	67	67	94,97	94,03	93,70	89,87	93,64	93,87
16	Nusa Tenggara Barat	56	56	96,59	92,34	92,61	84,64	81,09	92,68
17	Papua	104	104	92,35	87,50	80,52	72,76	78,93	85,36
18	Nusa Tenggara Timur	126	126	85,99	89,00	88,10	63,96	51,65	82,78
19	Papua Barat	69	66	87,56	91,15	75,80	62,11	55,00	80,04

Secara umum, seluruh indikator kinerja yang ditetapkan telah tercapai dengan baik dan sudah memenuhi kriteria berhasil (100%). Keberhasilan pemenuhan target ini diupayakan melalui: (1) penyusunan pedoman/panduan; (2) sosialisasi pedoman/panduan dilakukan di awal tahun dengan mengundang instansi pusat dan daerah; (3) penyusunan rencana aksi (jadwal palang); (4) mengadakan supervisi dan pemantauan; serta (5) sinergisme dan koordinasi dengan instansi terkait.

Manfaat yang dirasakan masyarakat dari kegiatan KRPL antara lain:

1) Memberikan dampak terhadap peningkatan ketersediaan pangan keluarga yang berasal dari produksi hasil KRPL. Jenis komoditas yang dihasilkan adalah pangan dari

umbi-umbian, komoditas sayur-sayuran, buah-buahan, telur dan daging ayam serta hasil dari ikan. Namun demikian, peningkatan ketersediaan paling tinggi pada kelompok komoditas sayur dan peningkatan yang tergolong rendah pada kelompok komoditas umbi-umbian/pangan hewani.

2) Memberikan dampak positif, dapat dilihat dari: (a) Kegiatan KRPL di daerah sudah banyak di replikasi melalui anggaran provinsi dan kabupaten/kota; (b) Dengan kegiatan KRPL dapat memanfaatkan barang-barang tidak terpakai/limbah rumah tangga (contoh: botol bekas, kaleng, plastik pouch, dll); (c) memberikan aspek pemberdayaan kepada masyarakat khususnya para wanita atau ibu-ibu melalui penghematan pengeluaran rumah tangga untuk belanja sayuran dan buah, karena komoditas tersebut sudah bisa didapat dari hasil pekarangan. Namun demikian, kegiatan KRPL belum memberikan dampakterhadap keberagaman pangan secara makro yang diukur denganPPH. Hal tersebut dikarenakan pengaruh kegiatan KRPL ini masihterbatas pada kelompok penerima kegiatan KRPL belum mencakupmasyarakat secara umum. Diperlukan replikasi kegiatan agar dapatmemberikan dampak yang lebih luas. Selain itu, untuk meningkatkankeberagaman pangan juga diperlukan dukungan sosialisasi/promositentang peran penting penganekaragaman pangan untukmeningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya haltersebut.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan KRPL ini antara lain adalah (1) keterlambatan pencairan banper dikarenakan proses administrasi di daerah yang terhambat dengan adanya pergantian pejabat, (2) lokasi geografis/medan yang cukup berat sehingga secara operasional kegiatan menjadi lambat, (3) tingkat kemampuan kelompok yang tidak merata dalam memahami dan melaksanakan kegiatan sehingga perlu pendampingan yang lebih intensif oleh penyuluh pendamping, (4) kelompok hanya terpaku pada budidaya sayuran saja, banyak yang belum mengembangkan sumber protein hewani (seperti kolam ikan atau unggas), (5) pemanfaatan lahan belum optimal, masih tersedia lahan yang kososng namun kelompok lebih memilih menanam di polybag/pot, (6) perencanaan dan penggunaan anggaran di tingkat kelompok yang kurang cermat, sehingga pemanfaatannya belum optimal, serta (7) adanya penghematan anggaran di pusat sehingga perlu dilakukan revisi anggaran padahal di daerah sudah dilakukan identifikasi penerima manfaat.

3.3.2 PENGEMBANGAN PANGAN POKOK LOKAL (P3L)

Pola konsumsi masyarakat masih belum menunjukkan pola makan gizi seimbang dan beragam, yang ditunjukan dengan tingginya konsumsi padi-padian yang mendominasi karbohidrat. Sebagian besar penduduk Indonesia (97%) mengkonsumsi sumber karbohidrat dari beras. Daerah-daerah yang dulunya mengkonsumsi pangan sumber karbohidrat non beras, seperti sagu, jagung dan umbi-umbian saat ini berubah mengkonsumsi beras. Konsumsi beras masyarakat Indonesia rata-rata 114,6 kg/tahun/kapita, atau 314 g per kapita per hari. Tingginya konsumsi beras dan jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya menyebabkan penyediaan beras semakin berat pada setiap tahunnya. Selain itu juga pola konsumsi yang tidak proporsional dapat menyebabkan efek yang kurang baik terhadap kesehatan.

Penganekaragaman konsumsi pangan khususnya konsumsi karbohidrat harus didukung oleh penyediaan sumber pangannya. Minat masyarakat untuk mengkonsumsi sumber karbohidrat non beras berkurang manakala ketersdiannya kurang dan harganya relatif mahal. Oleh karena itu untuk meningkatkan konsumsi pangan sumber karbohidarat non beras perlu didukung upaya pengadaannya yaitu melalui pengembangan pengolahan pangan lokal.

Pemanfaatan pangan lokal yang bersumber dari aneka umbi, sagu, pisang, sukun, labu kuning dan yang lainnya sudah banyak dikembangkan dengan dijadikan tepung. Ke depan diharapkan aneka tepung ini dapat diolah sebagai pangan pokok mensubstitusi beras dan terigu sebagai sumber karbohidrat. Melalui teknologi pengolahan pangan dapat dikembangkan berbagai olahan pangan yang dapat disandingkan dengan beras sebagai menu makanan sehari-hari serta mendorong dan mengembangkan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal.

Melalui kegiatan Pengembangan Pangan Pokok Lokal (P3L) ini diharapkan dapat lebih memasifkan gerakan diversifikasi pangan, khususnya pangan sumber karbohidrat, dalam rangka mendukung pemantapan ketahanan pangan nasional. Gerakan diversifikasi pangan semakin efektif apabila didukung oleh ketersediaan aneka ragam bahan pangan melaluipengembangan usaha pangan lokal dan perilaku konsumen dalam mengonsumsi aneka ragam pangan.

Pada Tahun 2018, Kegiatan Pengembangan Pangan Pokok Lokal dilaksanakan di 15 kabupaten di 13 provinsi yang memiliki potensi pangan lokal berupa sagu, jagung, dan umbi-umbian. Alokasi anggaran kegiatan P3L diberikan dana bantuan pemerintah sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) terdiri dari:

1) Pembelian mesin atau peralatan produksi Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh jutarupiah).
2) Pembelian alat pengemasan dan labeling Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
3) Pembelian bahan baku Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
4) Uji produk (uji kandungan gizi, uji kadaluarsa, uji organoleptik) Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Berikut tabel 28 realisasi anggaran banper kegiatan P3L tahun 2018:

NO	SATKER	PAGU		REALISASI		
		Rp	KLPK	Rp	KLPK	%
1	Dinas Ketahanan Pangan provinsi Riau	200,000,000	1	200,000,000	1	100
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan	200,000,000	1	200,000,000	1	100
3	Dinas Pangan provinsi Sulawesi Tengah	400,000,000	2	400,000,000	2	100
4	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara	400,000,000	2	400,000,000	2	100
5	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tengah	200,000,000	1	200,000,000	1	100
6	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali	200,000,000	1	200,000,000	1	100
7	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat	200,000,000	1	200,000,000	1	100
8	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	200,000,000	1	200,000,000	1	100
9	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua	200,000,000	1	200,000,000	1	100
10	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten	200,000,000	1	200,000,000	1	100
11	Dinas Pangan Provinsi Gorontalo	200,000,000	1	200,000,000	1	100
12	Dinas Ketahahan Pangan Provinsi Sulawesi Barat	200,000,000	1	200,000,000	1	100
13	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara	200,000,000	1	200,000,000	1	100
	Total	**3,000,000,000**	**15**	**3,000,000,000**	**15**	**100**

Untuk komoditas yang dikembangkan dalam kegiatan P3L tahun 2018 ada pada tabel 29 adalah:

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Komoditas
1.	Riau	Bengkalis	Sagu
2.	Sumatera Selatan	Musi Rawas	Ubi Kayu
3.	Banten	Pandeglang	Talas Beneng
4.	Bali	Buleleng	Jagung
5.	NTT	Flores Timur	Sorghum
6.	NTB	Lombok Tengah	Ubi Kayu
7.	Kalimantan Utara	Nunukan	Ubi Kayu
8.	Sulawesi Tengah	Banggai, Tojo Una-Una	Ubi Banggai, Jagung
9.	Sulawesi Tenggara	Kolaka, Buton Selatan	Ubi Kayu
10.	Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Sagu
11.	Gorontalo	Bone Bolango	Ubi Kayu
12.	Maluku	Maluku Tengah	Sagu
13.	Papua	Mimika	Sagu

3.3.3 Analisis Konsumsi Pangan

Pemenuhan kebutuhan pangan tidak hanya ditekankan pada aspek kuantitas, tetapi juga memperhatikan kualitasnya, termasuk keragaman pangan dan keseimbangan gizi. Kualitas konsumsi pangan penduduk di tingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH telah menjadi indikator kinerja di bidang ketahanan pangan, yang tercantum dalam RPJMN 2009 – 2014 dan RPJMN 2015 - 2019. Terkait dengan itu, pencapaian Skor PPH merupakan indikator kunci yang perlu diukur dan dianalisis secara periodik, baik ditingkat pusat dan di daerah. Dinamika konsumsi pangan antar wilayah antar waktu tersebut perlu dilakukan analisis agar perkembangan konsumsi pangan penduduk dapat menjadi salah satu informasi dasar dalam menyusun kebijakan pangan. Oleh karena itu, aspek pemanfaatan pangan khususnya aspek konsumsi pangan merupakan salah satu *entry point* untuk memantapkan pembangunan ketahanan pangan dan gizi.

Kegiatan analisis konsumsi pangan tahun 2018 dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yaitu:

1. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Pengembangan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dan Analisis Konsumsi Pangan Tahun 2018

a) Bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparat dalam pengembangan konsumsi pangan B2SA dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 4-5 April 2018 bertempat di Hotel Onih, Jl. Paledang No. 50-52, Bogor, Jawa Barat dan diikuti oleh Pejabat/staf yang menangani Lomba Cipta Menu di Dinas Ketahanan Pangan dari 34 provinsi, Pokja III Tim Penggerak PKK dari 34 Provinsi dan Staf Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Kemanan Pangan, BKP Kementerian Pertanian. Bimbingan teknis bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta dalam penerapan konsumsi beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) sesuai dengan porsi yang tepat bagi anggota keluarga. Materi pada bimtek ini antara lain: (1) Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi dalam rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan, oleh Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; (2) Prinsip Konsumsi Pangan B2SA dan *Lesson Learned* Lomba Cipta Menu Tahun 2017 oleh Dr. Ir Drajat Martianto, MSi; (3) Sosialisasi Panduan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman Tahun 2018 oleh Kepala Bidang Konsumsi Pangan; (4) Konsep Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman oleh Dr. Ir Tiurma Sinaga, M.FSA(IPB) dan (5) Peran Tim Penggerak PKK dalam Mendukung Pencapaian Konsumsi Pangan B2SA oleh TP PKK Pusat.

b) Bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparat dalam analisis konsumsi pangan dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 5-6 April 2018, bertempat di Hotel Onih, Jl. Paledang No. 50-52, Bogor, Jawa Barat dan diikuti oleh pejabat/staf yang menangani analisis konsumsi pangan dari 34 provinsi dan Staf Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Kemanan Pangan, BKP Kementerian Pertanian. Bimbingan teknis bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparat dalam analisis konsumsi pangan berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH), dengan materi antara lain: (a) Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan; (b) Kegiatan Penurunan *Stunting* dan Pesan Isi Piringku Kementerian Pertanian Tahun 2018 oleh Kepala Pusat PKKP; (c) Sosialisasi Analisis Konsumsi Pangan Tahun 2018 (Data Susenas Tahun 2017) oleh Kepala Bidang Konsumsi Pangan; (d) Konsep Dasar Pola Pangan Harapan oleh Ir Yayat Heryatno, MPS; dan (e) Pengenalan Instrumen/Aplikasi Analisis Konsumsi Pangan mendukung PPH oleh Ir Yayat Heryatno, MPS.

Gambar 25. Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Pengembangan Konsumsi Pangan B2SA dan Analisis Konsumsi Pangan Tahun 2018

2. Penyusunan Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan Tahun 2018

Direktori disusun dengan tujuan menyajikan data dan informasi perkembangan konsumsi energi, protein dan skor Pola Pangan Harapan (PPH) penduduk Indonesia tahun 2013-2017; menyajikan data dan informasi perkembangan konsumsi pangan penduduk Indonesia menurut jenis pangan utama tahun 2013-2017; serta menyajikan data perkembangan konsumsi per provinsi tahun 2013-2017. Berdasarkan hasil Susenas

Tahun 2017, data konsumsi pangan penduduk Indonesia bila dibandingkan dengan Angka Kecukupan Energi dan Protein (AKE dan AKP) hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2004 dan 2012, diketahui bebetapa indikator terkait kinerja ketahanan pangan sebagai berikut:

a. Konsumsi energi tahun 2017 sebesar 2.128 kkal/kap/hari, mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2016 sebesar 2.147 kkal/kap/hari;
b. Perkembangan konsumsi protein tahun 2017 sebesar 61,45 gram/kap/hari, mengalami kenaikan dari 60,25 gram/kap/hari pada tahun 2016;
c. Skor Pola Pangan Harapan terjadi peningkatan dari 86,0 pada tahun 2016 menjadi 90,4 tahun 2017.

3.3.4 Keamanan Pangan Segar

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, yang pemenuhannya menjadi salah satu hak azasi manusia. Salah satu permasalahan pangan dewasa ini selain terbatasnya produksi adalah juga masih dijumpainya praktek penanganan pangan mulai dari budidaya hingga konsumsi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan. Kondisi meningkatkan potensi terjadinya residu atau kontaminasi pada pangan, yang kemudian dapat meningkatkan risiko penyakit bawaan makanan. Sedangkan dari aspek mutu, mutu pangan yang rendah menyebabkan daya saing produk pangan menjadi berkurang.

Keamanan pangan tidak hanya terkait dengan upaya perlindungan kesehatan masyarakat, tetapi juga terkait dengan perdagangan pangan, dimana keamanan pangan menjadi salah satu persyaratan dalam perdagangan global. Hal ini menjadi penting mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara eksportir produk pertanian utama di dunia, seperti rempah–rempah dan kelapa sawit.

Dalam rangka mewujudkan pangan yang aman, bermutu serta berdaya saing tersebut, maka Kementerian Pertanian sebagai *leading sector* dalam produksi pangan sejak tahun 2007 telah membentuk unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah untuk menangani penjaminan dan pengawasan keamanan dan mutu pangan produk segar pertanian di Indonesia. Institusi tersebut lebih lanjut disebut Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP). Sejak tahun2016, OKKP Pusat berkedudukan di Badan Ketahanan Pangan (BKP), sedangkan OKKP Daerah berkedudukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan 2015-2019, kinerja penanganan keamanan pangan diinterpretasikan dalam indeks kinerja

khusus“Penanganan Jumlah Kasus Pangan Segar Nasional yang membahayakan Kesehatan Manusia”.

Target penanganan jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia menjadi sasaran strategis terkait dengan upaya penyediaan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang aman dan bermutu dalam rangka perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki, maka sasaran startegis ini difokuskan pada PSAT yang bernilai strategis secara nasional, seperti beras, jagung, dan kedelai. Berdasarkan monitoring terhadap kasus pangan segar komoditas strategis nasional yang membahayakan manusia pada tahun 2018 maka dicapai nilai penanganan 100%, karena sepanjang tahun 2018 tidak terjadi kasus keamanan pangan segar terkait komoditas strategis tersebut.

Capaian tersebut didukung dengan tersedianya produk PSAT yang disertifikasi keamanan pangannya oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan baik Pusat maupun Daerah. Kegiatan sertifikasi PSAT ini merupakan salah satu bentuk pengawasan sebelum peredaran (*pre-market*) yang dilakukan oleh OKKPP maupun OKKPD. Sertifikasi keamanan PSAT atau Sertifikasi Prima merupakan jaminan pemenuhan persyaratan keamanan pangan di tingkat proses produksi (*On Farm*). Sertifikasi Prima dibedakan menjadi sertifikasi Prima 1, Prima 2 dan Prima 3. Sertifikasi Prima 3 diberikan untuk produk pertanian yang memenuhi persyaratan dari aspek keamanan pangan; Prima 2 diberikan untuk produk pertanian yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan; sedangkan Prima 1 diberikan untuk produk pertanian yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan serta sosial dan lingkungan. Sepanjang tahun 2018 diperoleh capaian Sertifikasi Prima tabel 30 sebagai berikut:

No	Jenis Sertifikat	Jumlah
1	Prima 1	38
2	Prima 2	4
3	Prima 3	123

Selain Sertifikasi Prima, OKKP melaksanakan pula sertifikasi kesehatan PSAT tujuan ekspor (health certificate/ HC). HC diberikan bagi PSAT tujuan ekspor yang dinyatakan memenuhi ketentuan keamanan pangan tertentu di negara tujuan ekspor. Penerbitan HC dilakukan melalui mekanisme pengambilan contoh dan pengujian di laboratorium yang diakui. Untuk saat ini penerbitan HC masih terfokus bagi produk pala yang diekspor ke Uni Eropa, meskipun ada beberapa komoditas lain yang mengajukan permohonan penerbitan HC untuk memenuhi ketentuan di negara tujuan ekspor. Sepanjang tahun 2018, OKKP

telah menerbitkan HC sejumlah 577 sertifikat.

Selain sertifikasi keamanan PSAT seperti di atas, pengawasan keamanan PSAT di lakukan juga melalui kegiatan pendaftaran/ registrasi baik pendaftaran PSAT maupun pendaftaran rumah kemas (*packing house*). Pendaftaran PSAT dilakukan melalui mekanisme inspeksi sarana produksi dan distribusi, proses produksi dan distribusi serta pengujian produk terkait parameter keamanan pangan. Nomor pendaftaran PSAT diberikan kepada produk PSAT yang dinyatakan memenuhi persyaratan keamanan PSAT baik dalam proses maupun produk itu sendiri. Sedangkan pendaftaran rumah kemas dilakukan melalui penilaian secara simultan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GMP) pada unit yang melakukan pengemasan PSAT. Secara khusus pendaftaran rumah kemas ini merupakan respon terhadap kecenderungan peningkatan kebutuhan dan permintaan konsumen global terhadap PSAT yang aman dan bermutu. Pemenuhan standar dan kriteria penilaian rumah kemas secara konsisten oleh pelaku usaha/eksportir PSAT diharapkan dapat mengurangi resiko penolakan dan notifikasi produk PSAT dari negara tujuan ekspor. Sepanjang tahun 2018 diperoleh capaian pendaftaran/ registrasi PSAT maupun rumah kemas sebagai berikut dalam tabel 31 :

No	Jenis Pendaftaran	Jumlah
1	Pendaftaran PSAT PL (pangan asal impor)	78
2	Pendaftaran PSAT PD (pangan asal domestik)	1745
3	Pendaftaran Rumah Kemas	33

Sertifikasi PSAT maupun Pendaftaran PSAT/ rumah kemas ini merupakan wujud pengawasan keamanan pangan melalui mekanisme penilaian kesesuaian yang diselenggarakan oleh unit khusus OKKP yang melaksanakan fungsi sertifikasi/ pendaftaran. Untuk menjamin proses sertifikasi maupun pendaftaran dilakukan secara profesional dan kompeten sehingga sertifikat maupun nomor pendaftaran yang dikeluarkan terpercaya (*valid*), maka OKKP harus menerapkan sistem manajemen lembaga penilai kesesuaian sesuai SNI ISO/IEC 17065:2012 pada unit khusus yang melaksanakan fungsi sertifikasi/ pendaftaran tersebut dan bagi OKKP Daerah harus diverifikasi oleh OKKP Pusat. Pada tahun 2018, Badan Ketahanan Pangan selaku OKKP Pusat telah memberikan 34 sertifikat verifikasi OKKP Daerah di 34 provinsi.

Selain melakukan pengawasan keamanan pangan segar melalui mekanisme penilaian kesesuaian tersebut di atas, BKP melakukan kegiatan monitoring keamanan pangan segar melalui pengambilan contoh dan pengujian PSAT di laboratorium. Obyek pengawasan

difokuskan pada PSAT di peredaran. Dalam kegiatan monitoring tersebut, ruang lingkup pengujian PSAT meliputi parameter residu pestisida, logam berat dan mikrobiologi. Pada tahun 2018, diperoleh hasil monitoring keamanan PSAT dalam tabel 32 sebagai berikut:

No	Parameter	Lokasi	Jumlah Contoh	Hasil Uji		Keterangan
				Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
1	Residu Pestisida	19 provinsi	601 contoh	591 (98,33%)	10 (1,66%)	Cabe (asefat), Buncis (asefat), Jeruk (asefat), Cabe Merah (profenofos), Seledri (klorotalonil dan dimetomorf), Daun Prei (klorotalonil dan dimetomorf), Daun Bawang (deltrametrin)
2	Cemaran Logam Berat	11 provinsi	204 contoh	200 (98,03%)	4 (1,96%)	Anggur Merah (cadmium)
3	Cemaran Mikrobiologi	9 provinsi	117 contoh	85 (81,19%)	22 (18,80%)	Anggur Merah (e. Coli, Salmonella), Cabai Rawit (e. Coli), Sawi (e. Coli), Kangkung (e. Coli)

Berdasarkan data monitoring keamanan pangan di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 pangan segar di Indonesia masih berpotensi terpapar cemaran, dengan potensi pencemar terbesar adalah mikrobiologi. Berdasarkan data monitoring ini, diharapkan dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan tindak lanjut oleh semua pihak yang berkepentingan.

Mengingat bahwa hasil pengawasan keamanan pangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, diperlukan petugas/ personel di bidang keamanan pangan yang profesional, memiliki kompetensi cukup serta memenuhi standar kinerja tertentu. Beberapa kompetensi bagi petugas yang menangani keamanan pangan segar merujuk pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai standar kompetensi profesi, antara lain SKKNI Pengawas Keamanan Pangan Segar dan SKKNI Petugas Pengambil Contoh (PPC) pangan segar. Untuk memenuhi kompetensi petugas yang menangani keamanan pangan tersebut pada tahun 2018, BKP telah melatih dan mensertifikasi Pengawas Keamanan Pangan Segar sebanyak 47 personel. Sedangkan untuk pelatihan atau sertifikasi Petugas Pengambil Contoh (PPC) pada tahun 218 diselenggarakan oleh OPD lingkup pangan di 34 provinsi.

Dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan keamanan pangan segar di Indonesia, banyak tantangan yang dihadapi oleh Badan Ketahanan Pangan, antara lain:

1. Cakupan wilayah pengawasan yang sangat luas;

2. Jumlah dan jenis pangan segar cukup beragam;
3. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan produsen untuk memproduksi pangan yang aman dan bermutu;
4. Kesadaran konsumen dan retail yang masih perlu ditingkatkan; dan
5. Keterbatasan jumlah dan kompetensi pengawas keamanan pangan segar.

Berdasarkan pemetaan tantangan tersebut di atas, diperlukan penguatan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai, penguatan profesionalisme dan kompetensi petugas serta penyediaan sarana pendukung untuk penyebaran informasi dan promosi keamanan pangan di daerah.

BAB IV. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA

4.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta berbagai kegiatan program pembangunan ketahanan pangan yang dikelola Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia aparat yang tersedia. Tahun 2018, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian didukung oleh **287** pegawai, dengan komposisi sebagai berikut :

1. Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai dengan pendidikan SLTA ke bawah sebanyak 72 orang atau 25,07 persen, Diploma-3 dan Sarjana Muda 9 orang atau 3.12 persen, Strata Satu 106 orang atau 36,93 persen, Strata dua 87 orang atau 30.31 persen, dan Strata tiga 13 orang atau 4,52 persen.
2. Berdasarkan tingkat Kepangkatan: jumlah pegawai dengan golongan I sebanyak 1 orang atau 0,34 persen, golongan II sebanyak 22 orang atau 7,66 persen, golongan III sebanyak 212 orang atau 73,86 persen, dan golongan IV sebanyak 52 orang atau 18,11 persen.
3. Berdasarkan usia pegawai: usia 21-25 tahun sebanyak 1 orang pegawai atau 0,34 persen, usia 26-35 tahun sebanyak 50 orang pegawai atau 17,42 persen, 36-45 tahun 104 orang pegawai atau 36,23 persen, 46-50 tahun sebanyak 36 orang pegawai atau 12,54 persen, dan lebih dari usia 51 tahun sebanyak 96 orang pegawai atau 33,44 persen.
4. Pegawai Badan Ketahanan Pangan berkurang sejumlah 18 orang pegawai, diantaranya: 17 orang pegawai yang disebabkan karena pensiun dan 1 orang pegawai mutasi pindah tugas. Berikut perincian jumlah pegawai BKP berdasarkan golongan dan ruang.

Tabel 33. Jumlah Pegawai Badan Ketahanan Pangan, Menurut Golongan Ruang (Kondisi Desember 2018)

No	Golongan	Ruang					Jumlah
		A	B	C	D	E	
1	I	0	0	0	1		**1**
2	II	2	3	4	13		**22**
3	III	31	79	42	60		**212**
4	IV	34	12	3	2	1	**52**
	Jumlah	**67**	**94**	**49**	**76**	**1**	**287**

Sumber : Subbagian Organisasi dan Kepegawaian Badan Ketahanan Pangan

Tabel 34. Jumlah Pegawai Badan Ketahanan Pangan, Menurut Golongan dan Pendidikan Akhir (Kondisi Desember 2018)

No	Usia (Th)	S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	21-25	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	**4**
2	26-30	0	0	8	0	2	4	0	0	0	0	0	**14**
3	31-35	3	11	28	0	0	1	0	0	2	0	0	**45**
4	36-40	2	17	21	0	0	4	0	0	8	0	0	**52**
5	41-45	3	24	18	0	0	1	0	0	6	0	0	**52**
6	46-50	2	13	8	0	1	0	0	0	10	1	0	**35**
7	51-55	3	7	14	0	1	0	0	0	18	0	0	**43**
8	56-60	0	15	8	0	0	1	0	0	25	1	1	**51**
	Jmlh	**13**	**87**	**106**	**0**	**4**	**14**	**0**	**0**	**69**	**2**	**1**	**287**

Sumber : Data Subbagian Organisasi dan Kepegawaian Badan Ketahanan Pangan

Adapun perincian pegawai per eselon II lingkup Badan Ketahanan Tahun 2018 berdasarkan tingkat pendidikan, kepangkatan dan usia pegawai sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2018 sebanyak 114 orang dengan komposisi yang beragam yaitu :

   a. Tingkat pendidikan: SLTA ke bawah sebanyak 42 orang atau 36,84 persen, Diploma-3 dan Sarjana Muda 4 orang atau 3,50 persen, Strata Satu 41 orang atau

35,96 persen, strata dua 24 orang atau 21,05 persen, dan strata tiga 3 orang atau 2,63 persen.

b. Kepangkatan: golongan I sebanyak 1 orang pegawai atau 0,87 persen, golongan II sebanyak 14 orang pegawai atau 12,28 persen, golongan III sebanyak 83 orang pegawai atau 72,80 persen, dan golongan IV sebanyak 16 orang pegawai atau 14,03 persen.

c. Usia pegawai: kurang dari 26 tahun sebanyak 1 orang pegawai atau 0,87 persen, usia 26-35 tahun sebanyak 16 orang pegawai atau 14,03 persen, usia 36-45 tahun sebanyak 31 orang pegawai atau 27,19 persen, usia 46-55 tahun sebanyak 41 orang pegawai atau 35,96 persen, dan usia lebih dari 56 tahun sebanyak 25 orang atau 21,92 persen.

2. Jumlah pegawai Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2018, sebanyak 54 orang, dengan komposisi yang beragam, yaitu:
   a. Tingkat pendidikan: SLTA ke bawah sebanyak 11 orang atau 20,37 persen, Diploma-3 sebanyak 2 orang pegawai atau 3,70 persen, Strata Satu sebanyak 20 orang pegawai atau 37,03 persen, Strata Dua sebanyak 16 orang atau 29,62 persen, dan Strata Tiga sebanyak 5 orang atau 9,25 persen.
   b. Kepangkatan: golongan I tidak ada, golongan II sebanyak 2 orang pegawai atau 3,70 persen, golongan III sebanyak 46 orang pegawai atau 85,18 persen, golongan IV sebanyak 6 orang pegawai atau 11,11 persen.
   c. Usia pegawai: kurang dari 31-35 tahun sebanyak 11 orang pegawai atau 20,37 persen, usia 36-40 tahun sebanyak 10 orang pegawai atau 18,51 persen, usia 41-45 tahun sebanyak 11 orang pegawai atau 20,37 persen, usia 46-50 tahun sebanyak 5 orang pegawai atau 9,25 persen, usia 51-55 tahun sebanyak 9 orang pegawai atau 16,66 persen, usia 56-60 tahun sebanyak 8 orang pegawai atau 14,81 persen.

3. Jumlah pegawai Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2018, sebanyak 63 orang pegawai, dengan komposisi yang beragam, yaitu:
   a. Tingkat pendidikan: SLTA ke bawah sebanyak 9 orang pegawai atau 14,28 persen, Diploma-3 sebanyak 2 orang pegawai atau 3,17 persen, Strata Satu sebanyak 22 orang pegawai atau 34,92 persen, Strata Dua sebanyak 27 orang pegawai atau 42,85 persen, Strata Tiga sebanyak 3 orang pegawai atau 4,76 persen.
   b. Kepangkatan: golongan I tidak ada, golongan II sebanyak 4 orang pegawai atau 6,34 persen, golongan III sebanyak 42 orang pegawai atau 66,66 persen, golongan IV sebanyak 16 orang pegawai atau 25,39 persen.

c. Usia pegawai: 26-30 tahun sebanyak 3 orang pegawai atau 4,76 persen, usia 31-35 tahun sebanyak 10 orang pegawai atau 15,87 persen, usia 36-40 tahun sebanyak 15 orang pegawai atau 23,80 persen, usia 41-45 tahun sebanyak 13 orang pegawai atau 20,63 persen, usia 46-50 tahun sebanyak 2 orang pegawai atau 3,17 persen, usia 51-55 tahun sebanyak 10 orang pegawai atau 15,87 persen.

4. Jumlah pegawai Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2018, sebanyak 55 orang pegawai, dengan komposisi yang beragam, yaitu:
   a. Tingkat pendidikan: SLTA ke bawah sebanyak 10 orang pegawai atau 18,18 persen, Diploma-3 sebanyak 1 orang pegawai atau 1,81 persen, Strata Satu sebanyak 23 orang pegawai atau 41,81 persen, Strata Dua sebanyak 20 orang pegawai atau 36,36 persen, Strata Tiga sebanyak 1 orang pegawai atau 1,81 persen.
   b. Kepangkatan: golongan I tidak ada, golongan II sebanyak 2 orang pegawai atau 3,63 persen, golongan III sebanyak 41 orang pegawai atau 74,54 persen, golongan IV sebanyak 12 orang pegawai atau 21,81 perssen.
   c. Usia pegawai: 26-30 tahun sebanyak 2 orang pegawai atau 3,63 persen, usia 31-35 tahun sebanyak 8 orang pegawai atau 14,54 persen, usia 36-40 tahun sebanyak 15 orang pegawai atau 27,27 persen, usia 41-45 tahun sebanyak 9 orang pegawai atau 16,36 persen, usia 46-50 sebanyak 6 orang pegawai atau 10,90 persen, usia 51-55 tahun sebanyak 5 orang pegawai atau 9,09 persen, usia 56-60 tahun sebanyak 10 orang pegawai atau 18,18 persen.

Untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan kualitas aparatur dalam penyelenggaraan berbagai tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan, pada tahun 2018 telah dilakukan:

1. Program tugas belajar kepada 10 pegawai yang terdiri dari 7 (tujuh) orang dalam penyelesaian tugas belajar angkatan 2016 dan 2017, dan 2 (dua) orang peserta tugas belajar Tahun 2018. Dari peserta tugas belajar tersebut terdapat 3 (tiga) orang program S3;
2. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yaitu setiap PNS wajib mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 Jam pelajaran pertahun, Badan Ketahanan Pangan telah melaksanakan Bimbingan teknis pengembangan kompetensi bidang kepegawaian lingkup Badan Ketahanan Pangan yang diikuti 150 (seratus lima puluh) pegawai. Bimtek ini diperuntukkan bagi pegawai yang dalam tahun 2018 belum pernah mengikuti pengembangan kompetensi;

3. Penyelesaian administrasi kepegawaian antara lain : (a) kenaikan pangkat periode April 2018 sebanyak 42 (empat puluh) pegawai dan periode Oktober 2018 sebanyak 10 (sepuluh) pegawai; (b) kenaikan gaji berkala pegawai Badan Ketahanan Pangan selama tahun 2018 sebanyak 102 (seratus dua) pegawai; (c) proses cuti sebanyak 956 (sembilan ratus lima puluh enam); (d) pencatuman gelar sebanyak 21 (dua puluh satu); dan (e) proses batas usia pensiun (BUP) sebanyak 18 (delapan belas) pegawai.
4. penghargaan dan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) diberikan kepada pegawai Badan Ketahanan Pangan sebanyak 18 pegawai yaitu sebanyak 9 (sembilan) orang pegawai menerima penghargaan dengan masa kerja 10 tahun, sebanyak 6 (enam) orang pegawai menerima penghargaan dengan masa kerja 30 tahun dan sebanyak 3 (tiga) orang pegawai menerima penghargaan dengan masa kerja 20 tahun.
5. Pengembangan kapasitas pejabat fungsional Tahun 2018 Badan Ketahanan Pangan telah melaksanakan pengembanan kapasitas pejabat fungsional Pegawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP), Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP) dan Analis Ketahanan pangan (AKP)
6. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengantan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing, Badan Ketahanan Pangan telah melakukan uji kompetensi pejabat fungsional dalam rangka Inpassing untuk jabatan fungsional PMHP, APHP dan AKP.
7. BKP telah memiliki 12 jabatan fungsional dengan, jumlah pegawai yang telah memiliki jabatan fungsional sebanyak 86 orang pegawai pada tabel 35.

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah (OrangPegawai)
1	Pranata Komputer	3
2	Analis Kepegawaian	3
3	Statistisi	3
4	Pranata Humas	4
5	Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP)	7
6	Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)	11
7	Arsiparis	7

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah (OrangPegawai)
8	Pustakawan	1
9	Perencana	1
10	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	1
11	Analis Ketahanan Pangan	44
12	Perancang Peraturan Perudang-undangan	1
Total		86

Sumber : data Subbag Kepegawaian Badan Ketahanan Pangan

8. Hasil Pengukuran Indek Penerapan Nilai-Nilai Budaya Kerja (IPNBK) Aparatur Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2018 adalah 3.59 dengan kualitas budaya kerja 89.78 dan termasuk dalam kriteria sangat baik.
9. Tahun 2018 Badan Ketahanan Pangan juga telah melaksanakan Penilaian Eksternal. Dalam penilaian ini, sebagai responden adalah stakeholder Badan Ketahanan Pangan yang terdiri dari Dinas Urusan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan DPRD provinsi dan Kabupaten/Kota. Nilai survey eksternal Badan Ketahanan Pangan adalah 79,05 dengan klasifikasi kualitas B (baik).
10. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian khususnya program penguatan SDM Aparatur, Badan Ketahanan Pangan melakukan penataan jumlah dan kualitas serta distribusi Pegawai Negeri Sipil, Peta Jabatan ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 342/Kptd/KP.010/5/2017 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Peta jabatan ini dapat digunakan dalam melaksanakan penyusunan formasi, pengangkatan dan penetapan pegawai aparatur sipil negara ke dalam jabatan pimpinan tinggi, administrasi, dan fungsional di lingkungan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

11. Badan Ketahanan Pangan telah menyusun penetapan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pegawai untuk menduduki suatu jabatan struktural di lingkup Badan Ketahanan Pangan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.
12. Badan Ketahanan Pangan melakukan perhitungan kebutuhan SDM dan mengusulkan kebutuhan Pegawai pada tahun 2018 sejumlah 19 orang pegawai untuk akan ditempatkan pada:

    a. Sekretariat Badan Ketahanan Pangan sebanyak 6 (enam) orang pegawai dengan kualifikasi pendidikan Sarjana: Strata Inggris, Administrasi Negara, Hukum dan Sosial Ekonomi Pertanian.

    b. Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebanyak 3 (tiga) orang pegawai dengan kaulifikasi pendidikan Sarjana Sosial Ekonomi Pertanian.

    c. Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebanyak 5 (lima) orang pegawai dengan kualifikasi 4 (empat) orang dengan kualifikasi Sarjana Teknologi Pangan dan 1 (satu) orang Sajana Statistik.

    d. Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan sebanyak 5 (lima) orang pegawai dengan kaulifikasi pendidikan Sarjana Sosial Ekonomi Pertanian.

Tabel 36 usulan Kebutuhan PNS Badan Ketahanan Pangan Tahun 2018

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi	Unit Kerja Penempatan	Ket
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan					
1	Analis Kerja Sama	S1 Sastra Inggris	1	Sub Bagian Kerja Sama, Bagian Perencanaan	Prioritas
2	Analis Kepegawaian Pertama	S1 Administrasi Negara	1	Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Prioritas
3	Perancang perundang-undangan Pertama	S1 Hukum	1	Sub Bagian Hukum	Prioritas
4	Analis Perencana, Evaluasi dan Pelaporan	S1 Sosial Ekonomi Pertanian	1		Prioritas
5	Analis Keuangan	Saerjana Ekonomi Akuntasi	1	Subbagian Perbendaharaan	Prioritas
Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan					
6	Analis Ketahanan Pangan Pertama	S1 Sosial Ekonomi Pertanian	2	Sub Bidang Analisis Ketersediaan Pangan,	Prioritas

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi	Unit Kerja Penempatan	Ket
				Bidang Ketersediaan Pangan	
7	Analis Ketahanan Pangan Pertama	S1 Sosial Ekonomi Pertanian	1	Sub Bidang Pengembangan Akses Pangan, Bidang Akses Pangan	Prioritas
8	Analis Ketahanan Pangan Pertama	S1 Sosial Ekonomi Pertanian	1	Sub Bidang Mitigasi Kerawanan Pangan, Bidang Kerawanan Pangan	Prioritas
Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan					
9	Analis Ketahanan Pangan Pertama	S1 Sosial Ekonomi Pertanian	1	Sub Bidang Jaringan Distribusi Pangan, Bidang Distribusi Pangan	Prioritas
10	Analis Ketahanan Pangan Pertama	S1 Sosial Ekonomi Pertanian	1	Sub Bidang Kelembagaan, Bidang Distribusi Pangan	Prioritas
11	Analis Ketahanan Pangan Pertama	S1 Sosial Ekonomi Pertanian	1	Sub Bidang Analisis Harga Pangan Produsen, Bidang Harga Pangan	Prioritas
12	Analis Ketahanan Pangan Pertama	S1 Sosial Ekonomi Pertanian	1	Sub Bidang Cadangan Pangan Pemerintah, Bidang Cadangan Pangan	Prioritas
13	Analis Ketahanan Pangan Pertama	S1 Sosial Ekonomi Pertanian	1	Sub Bidang Cadangan Pangan Masyarakat, Bidang Cadangan Pangan	Prioritas
Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan					
14	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	S1 Teknologi Pangan	1	Sub Bidang Pengawasan Keamanan Pangan Segar, Bidang Keamanan Pangan Segar	Prioritas
15	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	S1 Teknologi Pangan	1	Sub Bidang Kelembagaan Pangan Segar, Bidang Keamanan Pangan Segar	Prioritas
16	Analis Ketahanan Pangan Pertama	S1 Teknologi Pangan	1	Sub Bidang Pengawasan Keamanan Pangan Segar, Bidang	Prioritas

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi	Unit Kerja Penempatan	Ket
				Keamanan Pangan Segar	
17	Analis Ketahanan Pangan Pertama	S1 Teknologi Pangan	1	Bidang Penganekaragaman Pangan	Prioritas
18	Statistisi Pertama	S1 Statistik	1	Bidang Konsumsi Pangan	Prioritas

13. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Badan Ketahanan Pangan melaksanakan reward dan punishment. Reward diberikan kepada pegawai dalam bentuk tunjangan kinerja yaitu uang. Pemberian *reward* Kementerian Pertanian dalam bentuk tunjangan kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 06/Permentan/KU.060/2/2016 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian. Sedangkann *punishmen* atau hukuman dijatuhi kepada pegawai yang tidak mematuhi aturan disiplin pegawai juga diberlakukan di lingkup Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

    Berdasarkan data dari sub bagian organisasi dan kepegawaian Badan Ketahanan Pangan, bahwa hasil evaluasi terhadap disiplin pegawai di lingkungan BKP yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan/sedang dan berat Badan Ketahanan Pangan Tahun sejak bulan Januari 2017 – April 2018, sebagai berikut:

    a. Periode Januari – September 2017 sebanyak 6 orang pegawai BKP yang dijatuhi hukuman disiplin ringan/sedang/berat. Sebanyak 5 (lima) orang pegawai dijatuhi hukuman ringan dan 1 (satu) orang pegawai dijatuhi hukuman sedang. Hukuman ringan diberikan dalam bentuk teguran tertulis, sedangkan hukuman sedang diberikan dalam bentuk menundaan kenaikan gaji berkala. Hukuman disiplin berat dijatuhi dalam bentuk penurunan pagkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun. Hukuman berat karena setelah dijatuhi hukuman sedang, tidak ada perubahan atau pun perbaikan terhadap disiplin pegawai.
    b. Periode bulan Oktober 2017 – April 2018, sebanyak 13 (tiga belas) orang pegawai BKP yang dijatuhi hukuman ringan/sedang/berat. Sebanyak 12 (duabelas) orang pegawai dijatuhi hukuman ringan dan sisanya 1 (satu) orang pegawai di jatuhi hukuman berat. Hukuman disiplin berat dijatuhi dalam bentuk penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.

4.2 Realisasi Anggaran Badan Ketahanan Pangan

REALISASI ANGGARAN BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2018 PER JENIS BELANJA DAN PER JENIS KEWENANGAN

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	23.695.850.000	19.509.140.476	82,33
2	Belanja Barang	572.832.083.000	563.071.477.006	98,30
3	Belanja Modal	3.758.850.000	3.695.974.349	98,33
TOTAL		**600.286.783.000**	**586.276.591.831**	**97,67**

NO	JENIS KEWENANGAN	PAGU	REALISASI	%
1	Kantor Pusat	181.895.367.000	176.466.533.137	97,02
2	Dekonsentrasi	362.562.750.000	354.263.369.708	97,71
3	Tugas Pembantuan	55.828.666.000	55.546.688.986	99,49
TOTAL		**600.286.783.000**	**586.276.591.831**	**97,67**

REALISASI ANGGARAN BKP TAHUN 2018

PER JENIS KEGIATAN

NO	JENIS KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Pengembangan System Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	251.243.118.000	247.518.291.919	98,52
2	Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	90.341.400.000	88.510.238.766	97,97
3	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar	173.194.500.000	170.803.391.898	98,62
4	Dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Ketahanan Pangan	85.507.765.000	79.444.669.248	92,91
TOTAL		**600.286.783.000**	**586.276.591.831**	**97,67**

4.3 REGULASI

Dalam menjalankan program dan kegiatan ketahanan pangan, perlu ada payung hukum agar setiap pelaksanaan program dan kegiatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan yang telah dilaksanakan dan peraturan perundang-undangan yang diprakarsai oleh Badan Ketahanan Pangan tahun 2018 antara lain:

1. Peraturan perundang-undangan yang disusun untuk memberikan cara menghitung jumlah cadangan beras di masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota, yaitu: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481) dan diundangkan pada tanggal 9 April 2018.
2. Peraturan perundang-undangan yang disusun untuk menindaklanjuti Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Ketentuan mengenai batas waktu simpan Cadangan Pangan Pemerintah yaitu: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/KN.130/8/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1230) dan diundangkan pada tanggal 5 September 2018. Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dilakukan untuk menjaga kecukupan CBP baik jumlah maupun mutunya antardaerah dan antarwaktu.
3. Peraturan perundang-undangan yang disusun untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018, yaitu:
    1) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 62/Kpts/RC.110/J/12/2017 tentang Petunjuk Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2018;
    2) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 63/Kpts/RC.110/J/12/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2018;
    3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 64/Kpts/RC.110/J/12/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tahun 2018;
    4) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 64.1/Kpts/RC.110/J/12/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Pangan Pokok Lokal Tahun 2018;
    5) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 13/Kpts/RC.110/J/02/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 63/Kpts/RC.110/J/12/2017 Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2018;

6) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 18/Kpts/RC.110/J/02/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 64.1/Kpts/RC.110/J/12/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Pangan Pokok Lokal Tahun 2018.

4. Peraturan perundang-undangan yang disusun dengan adanya perubahan susunan keanggotaan dan penanggung jawab wilayah Tim Serap Gabah Petani, maka diubah Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/Kpts /OT.050/5/2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 225/Kpts/OT.050/4/2017, dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 92/Kpts/OT.050/1/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/Kpts/OT.050/5/2016 tentang Tim Serap Gabah Petani (Keputusan in mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2018).

5. Peraturan perundang-undangan yang disusun dengan adanya perubahan susunan keanggotaan dan penanggung jawab wilayah Tim Serap Gabah Petani serta untuk mempercepat dan memperlancar kegiatan penyerapan gabah petani, maka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku : (1) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/Kpts /OT.050/5/2016 tentang Tim Serap Gabah Petani; (2) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/Kpts /OT.050/5/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/Kpts /OT.050/5/2016 tentang Tim Serap Gabah Petani; (3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 92/Kpts/OT.050/1/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/Kpts/OT.050/5/2016 tentang Tim Serap Gabah Petani dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 172/Kpts/OT.050/2/2018 tentang Tim Serap Gabah Petani.

6. Peraturan perundang-undangan yang disusun untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di perdesaan dengan memanfaatkan potensi sumber daya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan serta menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Terbatas tanggal 18 Oktober 2017.

7. Peraturan perundang-undangan yang disusun agar pelaksanaan pengawasan keamanan pangan dan mutu pangan segar dapat berjalan efektif dan efisien yaitu Keputusan Menteri Pertanian 764/Kpts/OT.050/11/2018 tentang Kelompok Kerja Keamanan dan Mutu Pangan Segar.

8. Peraturan perundang-undangan yang disusun untuk mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010, serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 21, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang

Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan yaitu Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan. Proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri ini sudah ditanda tangan oleh Menteri Pertanian dengan Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 pada tanggal 31 Desember 2018, saat ini memasuki tahap permohonan pengundangan Peraturan Menteri Pertanian Dalam Berita Negerike Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

9. Peraturan perundang-undangan yang disusun untuk menindaklanjuti Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/KN.130/8/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah ditetapkan Rancangan Keputusan Menteri Pertanian tentang Kriteroa Penurunan Mutu Cadangan Beras Pemerinta. Saat ini Rancangan Keputusan Menteri Pertanian tentang Kriteria Penurunan Mutu Cadangan Beras Pemerintah masih dalam proses pembahasan.

Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Ketahanan Pangan:

1. Nota Kesepahaman antara Kepala Badan Ketahanan Pangan dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO, Nomor B.219/HK.230/J/05/2018, Nomor 01/INA/MoU/DPP-Asprindo/V/2018 tentang Program Pengentasan Kemiskinan. Nota Kesepahaman ini ditanda tangan pada tanggal 4 Mei 2018 dan berakhir pada tangaal 4 Mei 2019.
2. Nota kesepahaman antara Badan Ketahanan Pangan dengan Forum Komunikasi Kabupaten Penghasil Sagu Seluruh Indonesia (FOKUS KAPASSINDO), Masyarakat Singkong Indonesia (MSI), Asosiasi Petani Organik Bumi Pasundan (ASETNA BUNDA), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Nomor N-329/HK.220/J/7/2018 Nomor 001/FK-MoU/VII/2018, Nomor 003/DPN MSI/VII/2018, Nomor 003/EK/ASETNABUNDA/VII/2018, Nomor 065/DPP/GAPMMI/VII/2018, Nomor 054/IWAPI-bkp/vii/2018 tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Pangan Lokal Nusantara Dalam Mendukung Percepatan Penganekaragaman Pangan. Nota Kesepahaman ini ditanda tangan pada tanggal 27 Juli 2018 dan berakhir pada tangga; 27 Juli 2019.
3. Nota Kesepahaman antara Badan Ketahanan Pangan dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Nomor 1012/FTP-UG</HK/2018, Nomor 05/PDSPKP-KKP/PKS/IX/2018, Nomor B-386/HK.220/J/09/2018 tentang Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal

Dalam Mendukung Penganekaragaman Pangan Bergzizi, Aman dan Sehat. Nota Kesepahaman ini ditangan tangan pada tanggal 18 September 2018 dan berakhir pada tanggal 18 September 2021.

4. Nota Kesepahaman antara Direktur Utama PD. Pasar Jaya dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Pengolah dan Pengguna Daging Skala Menengah, Kecil, dan Rumah Tangga, dan Direktur Eksekutif Asosiasi Distributor Daging Indonesi, Nomor 250/1.824.157, Nomor 1165, Nomor 27/PKS-APPH/III/2018, Nomor 01/IV/ASP/MOU/2018, Nomor 012/MOU/ADDI/III/2018 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Komoditas Daging Sapi/Kerbai Neku menghadapi hari besar keagamaan nasional. Nota kesepahaman ini ditanda tangan pada tanggal 28 Maret 2018 dan berakhir pada tanggal 28 September 2018. Kepala Badan Ketahanan Pangan untuk Nota Kesepahaman ini posisinya mengetahui, karena Badan Ketahanan Pangan antara mengkoordinasikan penyusunan Nota Kesepahaman.

5. Nota Kesepahaman antara Direktur antara Direktur Utama PD. Pasar Jaya dengan Ketua Gapoktan/Champion komoditas bawang merah, dan Ketua Gapoktan/Champion komoditas aneka cabai Nomor 249/1.824.571, Nomor 016/MT/III/2018, Nomor A-078/CCI.28/M03/2018 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Komoditas bawang merah dan aneka cabai menghadapi hari besar keagamaan nasional.

   Nota kesepahaman ini ditanda tangan pada tanggal28 Maret 2018 dan berakhir pada tanggal 28 September 2018. Kepala Badan Ketahanan Pangan untuk Nota Kesepahaman ini posiisnya mengetahui, karena Badan Ketahanan Pangan mengkoordinasikan penyusunan Nota Kesepahaman.

6. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Badan Ketahanan Pangan dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Perusahaan Umum (Perum) Bulog, PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO).Tbk. Nomor 52/HK.220/J/02/2018, Nomor I/HK.07.01/II/2018, Nomor Kerma/2/II.2018, Nomor PK-54/DA 200/02/2018, Nomor B.228-Dir/PPK/02/2018 tentag Serap Gabah/Beras Petani 2018. Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangan pada tanggal 13 Februari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

7. Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan dengan Departemen Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Agribisnis Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) tentangProgram Pengentasan Kemiskinan Melalui Kegiatan Pengembanga Pangan Lokal, Nomor 335/KN.200/J.4.10/2018, Nomor 002/pks.I/DPP-

Asprindo/X/2018, tentang Program Pengentassan Kemiskinan Melalui Kegiatan Pengembangan Pangan Lokal. Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangan pada tanggal 30 Oktober 2018 dan berakhir pada tanggal 4 Mei 2019.

4.4 Dewan Ketahanan Pangan

1. Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP):
   Rapat Koordinasi (Rakor) DKP dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2018 di Hotel Aston Premier Jakarta yang dipimpin oleh Menteri Pertanian selaku Ketua Harian DKP dan didampingi oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretaris DKP.Rakor dihadiri oleh Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Ahli dan Bidang Pemberdayaan sebanyak 24 orang, Pejabat Eselon II dan III lingkup Badan Ketahanan Pangan.

   Dalam rakor ini, Menteri Pertanian memberikan arahan kepada Pokja DKP agar lebih sering melakukan pertemuan untuk membahas isu atau permasalahan dibidang pangan yang membutuhkan respon dan tindakan yang bersifat segera. Selain itu, anggota Pokja agar juga mengikuti setiap kunjungan kerja Menteri Pertanian dan ikut aktif membina kelompok tani atau kelompok masyarakat sesuai dengan bidang kepakarannya. Dengan demikian, dalam merumuskan kebijakan dan rekomendasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan situasi dan permasalahan yang sesungguhnya sehingga dapat diimplementasikan di lapangan.

   Sementara itu, anggota Pokja DKP akan mendukung pembangunan ketahanan pangan dan gizi dari hulu kehilir secara terintegrasi dan tersinkronisasi. Dukungan tersebut dilakukan dengan menyusun kebijakan strategis ketahanan pangan dan gizi, dan membangun model-model pembangunan daerah yang ideal untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pangan khususnya petani.

2. Rapat Koordinasi DKP: **“Memperkuat Program Diversifikasi”**

   Rakor DKP dalam rangka memperkuat program diversifikasi pangan diselenggarakan pada tanggal 28 Juli 2018 di Balai Kartini, Jakarta. Rakor mempertemukan beberapa anggota Pokja Bidang Ahli dan Pemberdayaan DKP dengan para Kepala Dinas Ketahanan Pangan seluruh provinsi. Dengan demikian, diharapkan strategi yang dihasilkan dalam memperkuat program diversifikasi pangan dapat diimplementasikan di daerah.

Arahan Menteri Pertanian yang dibacakan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretaris DKP, menggaris bawahi bahwa pola konsumsi pangan masyarakat kita masih belum beragam untuk dapa tmendukung hidup yang sehat, aktif, dan produktif. Masyarakat Indonesia masih mengonsumsi pangan yang didominasi oleh karbohidrat terutama yang bersumber dari padi-padian. Untuk itu, perlu dirumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Pokja DKP bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi merumuskan strategi dengan meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam di tingkat rumah tangga dan mendekatkan akses masyarakat terhadap pangan,salah satunya melalui pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Dalam hal ini diperlukan internalisasi *multichannel* kepada masyarakat termasuk edukasi sejak dini untuk membentuk pola konsumsi pangan masyarakat.

Strategi selanjutnya dalam memperkuat program diversifikasi pangan adalah hilirisasi dengan memanfaatkan teknologi pengolahan dan pemasaran produk untuk meningkatkan skala usaha pangan local sehingga mendapatkan efek yang lebih besar.

BAB V
DUKUNGAN KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL

5.1. SERAPAN GABAH (SERGAP) PETANI

5.1.1. Latar Belakang

Pangan merupakan urusan wajib yang memerlukan penanganan multisektor baik dalam hal penyediaan, distribusi, hingga pemanfaatannya. Begitu pula dengan peranannya sebagai komoditas pangan pokok strategis dimana beras masih dianggap sangat vital untuk memenuhi kecukupan energi sebagian besar masyarakat Indonesia maupun kebutuhan lainnya seperti bantuan, cadangan pangan, hingga stabilitas nasional.

Dalam rangka pengelolaan tata niaga perberasan, pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan baik di tingkat produsen, pedagang, maupun konsumen. Penetapan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) telah diikuti dengan pemberlakukan fleksibilitas 10%, sementara pada Agustus 2017 ditetapkan peraturan tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras dengan kelas mutu medium dan premium, sedangkan beras khusus tidak diatur harganya. Melalui kebijakan tersebut pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan melindungi konsumen dari spekulan.

Untuk memenuhi kebutuhan nasional, setiap tahun pemerintah melakukan pengadaan gabah/beras melalui Perum BULOG untuk berbagai kebutuhan antara lain yaitu Beras Untuk Masyarakat Pra-Sejahtera (Rastra) 1 juta ton, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 1,5 juta ton, dan beras komersil Perum Bulog 1,2 juta ton sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Pertanian kepada Menteri BUMN tanggal 13 Desember 2017.

Demi mengoptimalkan hal tersebut, sejak tahun 2016 pemerintah telah melaksanakan kegiatan Sergap (Serap Gabah/Beras Petani) dengan melibatkan beberapa pihak antara lain Kementerian Pertanian, Perum Bulog, TNI-AD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten (Dinas Pangan dan Dinas Pertanian), hingga lembaga swadaya masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan hingga tingkat penyuluh pertanian dan Babinsa.

Oleh sebab itu pada tahun 2018, kegiatan Sergap masih dilaksanakan karena dianggap penting dan sangat relevan sehingga perlu diperkuat dan dilakukan secara massive. Begitu pula dengan perubahan skema dari Rastra menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun pengelolaan CBP yang dianggap juga sangat penting bagi keberlangsungan upaya pengelolaan ketahanan pangan nasional.

5.1.2. Gugus Tugas Sergap

Gugus tugas Sergap sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 172/Kpts/OT.050/2/2018 tentang Tim Serap Gabah Petani yaitu:

1. Pengarah
   a. Menteri Pertanian
   b. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
   c. Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
   d. Kepala Staf TNI Angkatan Darat
   e. Direktur Umum Perum Bulog
   f. Direktur Utama PT Bank Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
   g. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
2. Pelaksana
   a. Ketua I : Kepala Badan Ketahanan Pangan
   b. Ketua II : Direktur Jenderal Tanaman Pangan
   c. Wakil Ketua : Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Darat
   d. Sekretaris : Direktur Pengadaan Perum Bulog
3. Anggota
   a. Inspektur Jenderal
   b. Direktur Jenderal Hortikultura
   c. Direktur JenderalPrasarana dan Sarana Pertanian
   d. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
   e. Kepala Badan Karantina Pertanian
   f. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
   g. Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan
   h. Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Bioindustri Pertanian
   i. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
   j. Direktur Komersial Perum Bulog

k. Direktur SDM dan Umum Perum Bulog

l. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog

m. Direktur Pengembangan Bisnis Perum Bulog

n. Direktur Keuangan Perum Bulog

o. Direktur PT. Bank BRI (Persero) Tbk

p. Tim Pamen Denma Mabesad

5.1.3. Rapat dan Koordinasi di lapangan

1. Rapat Koordinasi Sergap

a. Tindak Lanjut Rapim Kementan 22 Februari 2018

1) TNI sudah melakukan sosialisasi ke tingkat Kodim dan Koramil, sehingga Koperasi melalui Babinsa sudah siap melaksanakan Sergap.

2) Bulog sudah melakukan sosialisasi ke tingkat Divre dan Sub Divre, sehingga pelaksanaan Sergap dapat berjalan dengan optimal.

3) BRI perlu melakukan sosialisasi ke tingkat Cabang dan Cabang Pembantu, sehingga pembiayaan Sergap dapat berjalan dengan lancar.

b. Rakor Sergap 5 Juni 2018

1) Sistem pengadaan gabah/beras diutamakan langsung kepada Poktan/Gapoktan. Bulog telah menyederhanakan persyaratan menjadi Mitra. Perubahan mekanisme ini ditujukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas gabah/beras yang dibeli Bulog, menjaga harga gabah di tingkat petani, dan menekan harga di tingkat konsumen.

2) Nota kesepahaman antara Gapoktan Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadi (SP3T) dengan Kepala Divre Bulog menjadi dasar pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan seluruh Alsintan bantuan pemerintah di 50 SP3T, 1.000 mesin pengering (dryer) bantuan pemerintah kepada Gapoktan, dan 132 Unit Pengelolaan Gabah Beras (UPGB) Bulog dalam mengolah gabah/beras untuk mengisi cadangan beras pemerintah.

3) Percepatan Sergap difokuskan pada provinsi yang potensi panennya masih tinggi di bulan Mei, Juni, dan Juli.

4) Bulog segera melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan Mabes TNI-AD, BPTP, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, dan Perpadi dalam mempercepat serapan gabah/beras petani.

c. Rapat Koordinasi Sergap di TNI-AD, 27 Februari 2018

1) Koordinasi dilaksanakan bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, TNI-AD, pemerintah daerah, dan BRI dengan sistematika sebagai berikut:

Gambar 26. Alur koordinasi Serapan Gabah (Sergap)

2. Rakor Sergap Daerah

a. Rakor Sergap Sumsel

Rakor Sergap Sumatera Selatan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2018 di Kota Palembang bersama Perum Bulog Divre Sumsel Babel, Korem 044/Garuda Dempo, Pemprov. Sumatera Selatan, dan DPD Perpadi Sumatera Selatan. Rakor membahas target Sergap dan distribusi Alsintan di Provinsi Sumatera Selatan. Usai melaksanakan Rakor, Tim Sergap turun ke lapangan untuk menyerap gabah/beras petani.

Tabel 37. Target Serapan Gabah Harian perkabupaten

No	Kabupaten/Kota	Target Serapan Harian (Ton)	Biaya (Rp)	Combine Harvester (Unit)	Dryer (Unit)	Penggilingan Padi (Unit)		
				Banper	Banper	Banper	Swasta	Jumlah
1	Ogan Komering Ulu	276	2.321.867	45	1	4	118	122
2	Ogan Komering Ilir	866	7.275.184	141	6	4	979	983
3	Muara Enim	258	2.167.076	42	1	1	622	623
4	Lahat	147	1.238.329	24	3	3	485	488
5	Musi Rawas	921	7.739.558	150	4	9	690	699
6	Musi Banyuasin	780	6.552.826	127	5	3	508	511
7	Banyuasin	1.640	13.776.413	267	5	3	2.198	2.201
8	OKU Selatan	209	1.754.300	34	5	2	1.161	1.163
9	OKU Timur	915	7.687.961	149	7	8	1.362	1.370
10	Ogan Ilir	510	4.282.555	83	4	4	497	501
11	Empat Lawang	362	3.044.226	59	2	1	277	278
12	PALI	246	2.063.882	40	-	-	-	-
13	Musi Rawas Utara	141	1.186.732	23		-	-	-
14	Palembang	104	877.150	17	-	2	71	73
15	Prabumulih	-	-	-	-	1	11	12
16	Pagar Alam	61	515.971	10	-	-	79	79
17	Lubuk Linggau	61	515.971	10	1	2	25	27
	Dinas Provinsi			169		-	-	-
	TOTAL SUMSEL	**7.500**	**63.000.000**	**1.221**	**44**	**47**	**9.083**	**9.130**

KABUPATEN/KOTA	Combine Harvester (Unit)	Dryer (Unit)	Penggilingan Padi (Unit)		
	Banper	Banper	Banper	Swasta	Jumlah
OKU Timur	149	7	8	1.362	1.370
Musi Rawas	150	4	9	690	699
Muara Enim	42	1	1	622	623
Kota Prabumulih			1	11	12
Lahat	24	3	3	485	488
Kota Lubuklinggau	10	1	2	25	27
Musi Banyuasin	127	5	3	508	511
OKI	141	6	4	979	983
OKU	45	1	4	118	122
Kota Palembang	17		2	71	73
Banyuasin	267	5	3	2.198	2.201
Ogan Ilir	83	4	4	497	501
Oku Selatan	34	5	2	1.161	1.163
Empat Lawang	59	2	1	277	278
Pagar Alam	10		0	79	79
Musi Rawas Utara	23		0	-	
PALI	40		0	-	
Dinas Provinsi	169		0	-	
14 Kab/Kota	**1.390**	**44**	**47**	**9.083**	**9.130**

b. Rakor Sergap Lampung

Rakor Sergap Lampung dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2018 di Kota Bandar Lampung bersama Perum Bulog Divre Lampung, Korem 043/Garuda Hitam, Pemprov. Lampung, dan DPD Perpadi Lampung. Rakor membahas perkembangan harga dan permasalahan yang ada di Provinsi Lampung, khususnya tren perdagangan gabah/beras ke luar Lampung. Usai melaksanakan Rakor, Tim Sergap turun ke lapangan untuk menyerap gabah/beras petani.

Rp/Kg

Provinsi	Kabupaten	Maret
		Mg III
Provinsi	Kab/Kota	Tgl 20-21 Mar
Kalimantan Barat	Kab. Melawi	5,000
	Kota Singkawang	4,600
	Kab. Kubu Raya	5,000
	Kab. Mempawah	4,600
Kalimantan Selatan	Kab. Balangan	4,600
	Kab. Barito Kuala	4,600
	Kab. Hulu Sungai Selatan	4,800
	Kab. Hulu Sungai Tengah	4,800
	Kab. Tanah Bumbu	5,000
	Kab. Tapin	4,900
Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas	4,700
	Kab. Pulang Pisau	4,800
Lampung	Kab. Mesuji	4,500
	Kab. Pesawaran	4,500
	Kab. Tanggamus	4,500
	Kab. Lampung Selatan	4,600
	Kab. Lampung Timur	4,900
	Kab. Lampung Tengah	4,900
	Kab. Lampung Utara	4,800
	Kab. Way Kanan	4,800
	kab. Pesisir Barat	4,600
	Kab. Tulangbawang	4,600
	Kota Metro	4,900
	Kab. Lampung Barat	4,600
Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	4,600

c. Rakor Sergap Banten

Rakor Sergap Banten dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2018 di Kota Serang bersama Perum Bulog Divre DKI Banten, Kodam III/Siliwangi, Pemprov. Banten, dan DPD Perpadi Banten. Rakor membahas wilayah target Sergap Banten, perkembangan harga, dan alokasi sebaran kelompok penerima bantuan Alsintan. Usai melaksanakan Rakor, Tim Sergap turun ke lapangan untuk menyerap gabah/beras petani.

Provinsi	Kabupaten/Kota	Harga (Rp)
Banten	Lebak	4.900
	Pandeglang	5.000
	Serang	5.000
	Tangerang	5.500

KABUPATEN/KOTA	Combine Harvester (Unit)	Dryer (Unit)	Penggilingan Padi (Unit)		
	Banper	Banper	Banper	Swasta	Jumlah
Serang	53	5	8	1,850	1858
Lebak	62	4	7	2,070	2077
Tangerang	42		3	1,151	1154
Pandeglang	71	5	12	2,034	2046
Kota Serang	13		1	276	277
Kota Tangerang			0	28	28
Kota Cilegon	9		0	70	70
Kota Tangerang Selatan			0	7	7
Dinas Provinsi	7		0	-	
5 Kab/Kota	**257**	**14**	**31**	**7,486**	**7,517**

d. Rakor Sergap Jabar

Rakor Sergap Jawa Barat dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2018 di Kota Bandung bersama Perum Bulog Divre Jawa Barat, Kodam III/Siliwangi, Pemprov. Jawa Barat, dan DPD Perpadi Jawa Barat. Rakor membahas retargeting Sergap dan realisasi Sergap. Usai Rakor, Tim turun lapangan menyerap gabah/beras petani.

RETARGETING SERAPAN GABAH HARIAN
PROVINSI JAWA BARAT

Ton Beras

KAB/KOTA	TARGET HARIAN
3201000 Bogor	134
3202000 Sukabumi	242
3203000 Cianjur	254
3204000 Bandung	119
3205000 Garut	183
3206000 Tasikmalaya	221
3207000 Ciamis	132
3208000 Kuningan	129
3209000 Cirebon	148
3210000 Majalengka	295
3211000 Sumedang	139
3212000 Indramayu	384
3213000 Subang	198
3214000 Purwakarta	80
3215000 Karawang	190
3216000 Bekasi	133
3217000 Bandung Barat	71
3218000 Pangandaran	95
3271000 Bogor	1
3272000 Sukabumi	6
3273000 Bandung	1
3274000 Cirebon	1
3275000 Bekasi	1
3276000 Depok	0
3277000 Cimahi	1
3278000 Tasikmalaya	26
3279000 Banjar	9
JUMLAH	**3.192**

e. Rakor Sergap Jateng

Rakor Sergap Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2018 di Kota Semarang bersama Perum Bulog Divre Jawa Tengah, Kodam IV/Diponegoro, Pemprov. Jawa Tengah, dan DPD Perpadi Jawa Tengah. Rakor membahas target Sergap di beberapa provinsi. Usai melaksanakan Rakor, Tim turun ke lapangan untuk menyerap gabah/beras petani.

No.	Provinsi	Target (Ton/Hari)
1	Jawa Tengah	5.000
2	Sulawesi Selatan	7.500
3	Jawa Timur	10.000
4	Sumatera Selatan	7.500
5	Jawa Barat	5.000
6	**Banten**	**2.000**
7	Lampung	3.000
8	D.I. Yogyakarta	1.000
	Total	**41.000**

f. Rakor Sergap Jatim

Rakor Sergap Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2018 di Kabupaten Bojonegoro bersama Perum Bulog Divre Jawa Timur, Kodam V/Brawijaya, Pemprov. Jawa Timur, dan DPD Perpadi Jawa Timur. Rakor membahas wilayah selisih kontrak dengan realisasi, serta retargeting Sergap bulan Juli-Agustus 2019. Usai Rakor, Tim turun ke lapangan untuk menyerap gabah/beras petani.

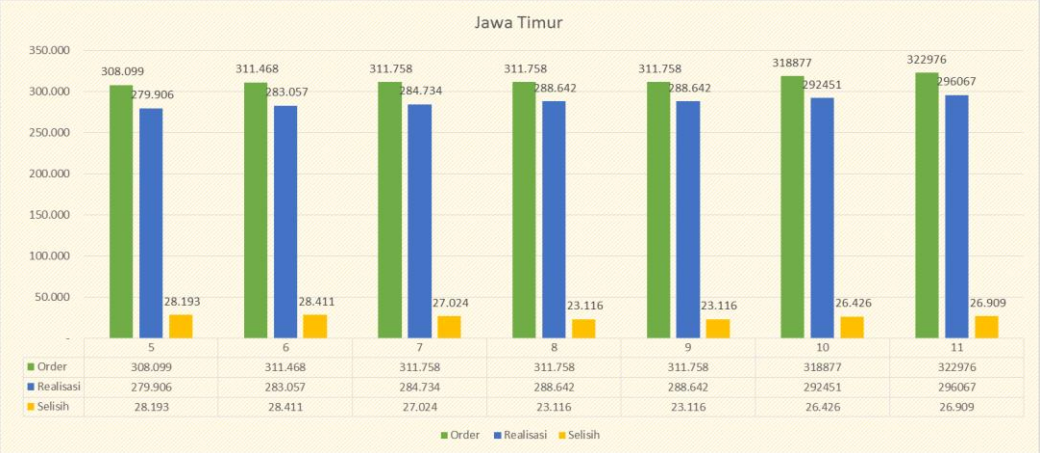

KAB/KOTA	JULI		AGUSTUS		Total Juni - Agustus	TARGET HARIAN
	Potensi Produksi	Target Sergap	Potensi Produksi	Target Sergap		
3501000 Pacitan	13.477	1.153	6.207	472	2.112	30
3502000 Ponorogo	49.661	4.249	9.926	754	7.496	105
3503000 Trenggalek	14.874	1.273	13.029	990	2.515	35
3504000 Tulungagung	11.410	976	26.498	2.014	3.936	55
3505000 Blitar	10.529	901	16.822	1.278	3.349	47
3506000 Kediri	27.163	2.324	6.486	493	4.163	58
3507000 Malang	12.910	1.105	13.849	1.053	4.799	67
3508000 Lumajang	26.917	2.303	18.533	1.409	5.946	83
3509000 Jember	69.417	5.939	45.722	3.475	14.182	199
3510000 Banyuwangi	17.089	1.462	41.756	3.173	8.191	115
3511000 Bondowoso	21.539	1.843	17.154	1.304	6.312	88
3512000 Situbondo	13.523	1.157	9.561	727	3.782	53
3513000 Probolinggo	17.072	1.461	9.466	719	3.925	55
3514000 Pasuruan	30.754	2.631	24.313	1.848	7.652	107
3515000 Sidoarjo	3.169	271	11.898	904	1.480	21
3516000 Mojokerto	27.049	2.314	19.057	1.448	4.896	69
3517000 Jombang	46.513	3.979	35.354	2.687	7.234	101
3518000 Nganjuk	47.130	4.032	10.124	769	9.232	129
3519000 Madiun	60.145	5.146	7.095	539	7.947	111
3520000 Magetan	22.736	1.945	1.121	85	5.648	79
3521000 Ngawi	41.466	3.548	4.647	353	12.144	170
3522000 Bojonegoro	44.407	3.799	12.303	935	13.768	193
3523000 Tuban	29.001	2.481	18.128	1.378	5.795	81
3524000 Lamongan	45.062	3.855	35.474	2.696	14.576	204
3525000 Gresik	23.140	1.980	10.989	835	6.248	87
3526000 Bangkalan	24.338	2.082	13.258	1.008	4.303	60
3527000 Sampang	21.861	1.870	795	60	4.155	58
3528000 Pamekasan	3.720	318	3.573	272	1.024	14
3529000 Sumenep	12.861	1.100	9.439	717	3.333	47
3571000 Kediri	1.187	102	433	33	167	2
3572000 Blitar	560	48	666	51	105	1
3573000 Malang	327	28	521	40	136	2
3574000 Probolinggo	93	8	131	10	32	0
3575000 Pasuruan	690	59	645	49	187	3
3576000 Mojokerto	237	20	377	29	57	1
3577000 Madiun	1.909	163	185	14	214	3
3578000 Surabaya	459	39	569	43	108	2
3579000 Batu	135	12	148	11	36	1
JUMLAH	**794.526**	**67.976**	**456.250**	**34.676**	**181.183**	**2.537**

g. Rakor Sergap NTB

Rakor Sergap NTB dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2018 di Kota Mataram bersama Perum Bulog Divre NTB, Kodam IX/Udayana, Pemprov. NTB, dan DPD Perpadi NTB. Rakor membahas wilayah target Sergap, perkembangan harga, dan alokasi sebaran kelompok penerima bantuan Alsintan. Usai melaksanakan Rakor, Tim Sergap turun ke lapangan untuk menyerap gabah/beras petani.

No	Kabupaten	Harga GKP
1	Lombok Barat	4200
2	Lombok Tengah	4100
3	Sumbawa	4300

KABUPATEN/KOTA	Combine Harvester (Unit)	Dryer (Unit)	Penggilingan Padi (Unit)		
	Banper	Banper	Banper	Swasta	Jumlah
Sumbawa Barat	49	2	3	57	60
Sumbawa	63	9	5	296	301
Lombok Tengah	70	1	4	1.009	1013
Lombon Barat	54	2	7	337	344
Lombok Timur	75	4	5	665	670
Kota Bima	28		3	47	50
Kota Mataram	16	1	1	23	24
Dompu	55	9	3	158	161
Lombok Utara	44		1	111	112
Bima	49	3	7	433	440
Dinas Provinsi	13				

h. Rakor Sergap Kalsel

Rakor Sergap Kalimantan Selatan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2018 di Kota Banjar Baru bersama Perum Bulog Divre Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, Kodam VI/Mulawarman, Pemprov. Kalimantan Selatan, dan DPD Perpadi Kalimantan Selatan. Rakor membahas potensi luas panen dan Sergap bulan Juni 2018. Usai Rakor, Tim turun ke lapangan untuk menyerap gabah/beras petani.

No.	KABUPATEN/KOTA	MEI	JUNI	JULI	JUMLAH	Rata-Rata Sergap (Ton)
1	Tanah Laut	2.816	7.197	17.712	27.725	48
2	Kota Baru	4.346	20.948	9.005	34.299	140
3	Banjar	6.096	5.762	7.927	19.785	38
4	Barito Kuala	630	734	10.896	12.260	5
5	Tapin	11.712	17.190	6.181	35.083	115
6	Hulu Sungai Selatan	8.053	8.854	5.740	22.647	59
7	Hulu Sungai Tengah	2.797	4.349	7.870	15.016	29
8	Hulu Sungai Utara	493	489	202	1.185	3
9	Tabalong	10.355	10.676	1.416	22.447	71
10	Tanah Bumbu	9.773	13.177	2.847	25.797	88
11	Balangan	14.130	25.597	1.734	41.461	171
12	Banjar Masin	-	-	122	122	-
13	Banjar Baru	16	21	194	231	0
KALIMANTAN SELATAN		**36.944**	**65.524**	**65.532**	**168.000**	**438**

i. Rakor Sergap Sulsel

Rakor Sergap Sulawesi Selatan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2018 di Kota Makassar bersama Perum Bulog Divre Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat,

Kodam XIV/Hasanuddin, Pemprov. Sulawesi Selatan, dan DPD Perpadi Sulawesi Selatan. Rakor membahas wilayah target Sergap, perkembangan harga, dan alokasi sebaran kelompok penerima bantuan Alsintan. Usai Rakor, Tim turun ke lapangan untuk menyerap gabah/beras petani.

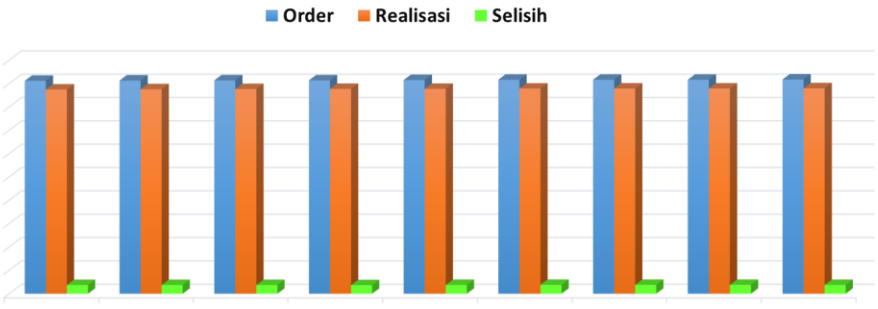

	15-Jul	16-Jul	17-Jul	18-Jul	19-Jul	20-Jul	21-Jul	22-Jul	23-Jul
Order	182.511	182.714	182.854	182.872	183.133	183.433	183.438	183.438	183.631
Realisasi	175.042	175.269	175.411	175.520	175.620	175.808	175.876	175.876	176.096
Selisih	7.469	7.445	7.443	7.352	7.513	7.625	7.562	7.562	7.535

5.1.4. KENDALA

1. Harga Pembelian Gabah/Beras

   Harga pembelian gabah/beras di tingkat petani di atas HPP sehingga mengakibatkan sulitnya pengadaan gabah/beras, khususnya pada bulan Januari hingga April 2018, walaupun terdapat kebijakan fleksibilitas 10% dan pembelian gabah/beras di luar kualitas. Hal ini diperburuk dengan adanya kebijakan fleksibilitas 20% yang membuat harga gabah/beras di tingkat produsen menjadi naik. Begitu pula dengan dekatnya rentang kualitas dan harga antara beras kelas mutu medium dan premium sehingga menyebabkan tren produksi dan sebaran beras mengarah kepada premium.

2. Rastra dan BPNT

   Peralihan kebijakan Rastra menjadi BPNT membuat Perum Bulog kehilangan outlet pelepasan/penyaluran sehingga terjadi kekhawatiran didalam internal Perum Bulog untuk menyerap gabah/beras petani. Kebijakan BPNT membuat Perum Bulog harus bersaing dengan outlet penyedia BPNT lainnya dan dikhawatirkan Perum Bulog tidak dapat bersaing karena adanya perbedaan/aturan pembelian gabah/beras.

3. Pembiayaan Kegiatan Sergap

   Perjanjian kerja sama (PKS) dengan Perum Bulog oleh BRI dan BNI tidak dapat dilaksanakan bersama TNI-AD karena terbentur dengan aturan perbankan. Hal ini menyebabkan kegiatan Sergap menjadi tersendat.

5.1.5. KEBIJAKAN

1. Surat Menteri Pertanian kepada Menteri Keuangan terkait usulan Sergap sebesar 3,7 juta ton beras terdiri dari Rastra (1 juta ton), CBP (1,2 juta ton), dan komersil (1,5 juta ton). Sementara itu, mengingat kondisi musim hujan (panen rendeng) bulan Januari – Juni 2018 dengan kadar air tinggi, maka perlu diberlakukan kebijakan GLK (pembelian gabah di luar kualitas) sebesar 7% dari target atau sebesar 137.000 ton. Sehingga perlu adanya dukungan anggaran untuk menutupi selisih Rp.400,-/Kg dengan total sebesar Rp.54,81 milyar rupiah).
2. Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Ekon) pada tanggal 15 Januari 2018 menyepakati target Sergap hingga bulan Juni 2018 yaitu sebesar 2,2 juta ton.
3. Pada tanggal 5 Februari 2018 telah ditandatangani Nota Kesepahaman Sergap antara Menteri Pertanian, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dirut Perum BULOG, Dirut PT. BRI Tbk., dan KAS-AD perihal (a) penyediaan permodalan; (b) pembelian gabah/beras petani; dan (c) kegiatan pendukung lainnya.
4. Pada tanggal 12 Februari 2018 dilaksanakan Rakortas Kemenko Ekon dengan hasil yaitu pemberlakukan fleksibilitas HPP gabah/beras sebesar 20% hingga akhir April 2018 untuk mencapai target percepatan 1 juta ton.
5. Pada tanggal 13 Februari 2018 telah dibentuk Perjanjian Kerja Sama antara BKP, Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemen PDT, TNI-AD, Perum BULOG, dan PT. BRI Tbk perihal pelaksanaan kegiatan Sergap secara bersama.
6. Surat Menteri Perdagangan kepada Menteri BUMN tanggal 20 Februari 2018 tentang Pengadaan beras oleh BULOG dengan fleksibilitas 20% sebesar 1 juta ton s/d 30 April 2018.
7. Pada tanggal 13 Maret 2018 diselenggarakan Rakortas Kemenko Ekon yang menyepakati bahwa fleksibilitas HPP turun menjadi 10% per tanggal 24 Maret 2018 dan target Sergap 1 juta ton sampai dengan April 2018.
8. Harga Penjualan Beras (HPB) Medium untuk penugasan pemerintah tahun 2018 sebesar Rp. 10.267,-/Kg, berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sebagaimana disampaikan dalam keputusan Direksi Perum Bulog tanggal 15 Maret 2018.
9. HAP gabah/beras dalam negeri mengacu pada fleksibilitas HPP 10% berlaku mulai tanggal 24 Maret 2018 sebagaimana disampaikan dalam faximili Direktur Pengadaan Bulog ke Kadivre se-Indonesia.

Surat telegram KAS-AD ke Aster Pangdam tanggal 23 Maret 2018 bahwa kegiatan Sergap untuk sementara waktu ditunda.

10. Kebijakan disposal stock melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah.
11. Penunjukan Komjen. Pol. (Purn) Budi Waseso sebagai Direktur Utama Perum Bulog.
12. Penunjukan Brigjen (Purn) Bachtiar sebagai Direktur Pengadaan Perum Bulog.

5.1.6. PELAKSANAAN KEGIATAN SERGAP

PRODUKSI, POTENSI, TARGET, DAN REALISASI

Pada tahun 2018 produksi beras nasional mencapai 48.781.330 ton dengan potensi Sergap 3,7 juta ton yang tersebar di 34 provinsi. Sementara itu pada tahun 2018 tergat serapan gabah/ beras Perum Bulog sebesar 2.724.000 ton yang tersebar di 26 Divre (34 provinsi) dengan realisasi akhir sebesar 1.488.581 ton setara beras atau 54,65% dari target. Berikut rincian capaian realisasi pengadaan gabah/beras dalam negeri Perum Bulog tahun 2018:

PRODUKSI, POTENSI, TARGET, DAN REALISASI SERAPAN PER DIVRE (TON SETARA BERAS)

NO.	DIVRE	PRODUKSI	POTENSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Aceh	1.319.811	108.757	40.000	10.834	27,09
2	Sumut	3.242.771	233.882	20.000	9.563	47,82
3	Sumbar	1.660.166	128.670	10.000	10.985	109,85
4	Riau Kepri	320.655	23.701	5.000	2.622	52,44
5	Jambi	555.232	41.677	4.500	926	20,58
6	Sumsel Babel	3.512.620	261.055	80.000	15.608	19,51
7	Bengkulu	497.433	38.291	7.500	2.189	29,19
8	Lampung	2.646.914	193.436	115.000	80.843	70,30
9	DKI Banten	1.260.843	486.860	450.000	14.140	3,14
10	Jabar	6.185.142	471.669	453.500	244.330	53,88
11	Jateng	6.117.357	36.256	50.000	220.469	440,94
12	DIY	474.834	529.098	697.000	41.382	5,94
13	Jatim	6.981.942	95.940	65.000	381.590	587,06
14	Bali	445.437	34.154	2.500	961	38,44
15	NTB	1.265.563	97.752	150.000	110.525	73,68
16	NTT	984.394	74.525	4.500	1.588	35,29
17	Kalbar	1.712.308	126.227	1.500	449	29,93
18	Kalteng	800.828	57.619	6.500	4.165	64,08
19	Kalsel	1.814.216	135.774	22.000	12.095	54,98
20	Kaltim	366.551	26.888	4.500	4.409	97,98
21	Sulut Go	751.934	56.276	8.500	1.027	12,08
22	Sulteng	753.466	57.943	50.000	16.669	33,34
23	Sulselbar	4.202.117	318.354	400.000	249.508	62,38
24	Sultra	565.302	37.622	30.000	17.541	58,47
25	Malukut	207.397	13.040	1.500	627	41,80
26	Papuabar	136.096	14.533	45.000	33.536	74,52
INDONESIA		48.781.330	3.700.000	2.724.000	1.488.581	54,65

Pada tahun 2018, 10 Divre dengan target pengadaan terbesar berturut-turut yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta dan Banten, D.I. Yogyakarta, dan Sulawesi Tengah dengan total sebesar 1.375.064 ton. Sementara persentase realisasi yang dihasilkan ialah sebesar 54,77% dari total jumlah target 2.510.500 ton.

10 DIVRE DENGAN TARGET TERBESAR
(TON SETARA BERAS

NO.	DIVRE	PRODUKSI	POTENSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Jatim	6.981.942	529.098	697.000	381.590	54,75
2	Jateng	6.117.357	471.669	453.500	220.469	48,61
3	Jabar	6.185.142	486.860	450.000	244.330	54,30
4	Sulselbar	4.202.117	318.354	400.000	249.508	62,38
5	NTB	1.265.563	97.752	150.000	110.525	73,68
6	Lampung	2.646.914	193.436	115.000	80.843	70,30
7	Sumsel Babel	3.512.620	261.055	80.000	15.608	19,51
8	DKI Banten	1.260.843	95.940	65.000	14.140	21,75
9	DIY	474.834	36.256	50.000	41.382	82,76
10	Sulteng	753.466	57.943	50.000	16.669	33,34
JUMLAH		33.400.799	2.548.364	2.510.500	1.375.064	54,77

Pada tahun 2018, 10 Divre dengan realisasi pengadaan terbesar berturut-turut yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Lampung, D.I. Yogyakarta, Papua dan Papua Barat, Sulawesi Tenggara, dan dan Sulawesi Tengah dengan total sebesar 1.396.393 ton. Sementara persentase realisasi yang dihasilkan ialah sebesar 57,22% dari total jumlah target 2.440.500 ton.

10 DIVRE DENGAN REALISASI TERBESAR (TON SETARA BERAS)

NO.	DIVRE	PRODUKSI	POTENSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Jatim	6.981.942	529.098	697.000	381.590	54,75
2	Sulselbar	4.202.117	318.354	400.000	249.508	62,38
3	Jabar	6.185.142	486.860	450.000	244.330	54,30
4	Jateng	6.117.357	471.669	453.500	220.469	48,61
5	NTB	1.265.563	97.752	150.000	110.525	73,68
6	Lampung	2.646.914	193.436	115.000	80.843	70,30
7	DIY	474.834	36.256	50.000	41.382	82,76
8	Papuabar	136.096	14.533	45.000	33.536	74,52
9	Sultra	565.302	37.622	30.000	17.541	58,47
10	Sulteng	753.466	57.943	50.000	16.669	33,34
JUMLAH		29.328.734	2.243.524	2.440.500	1.396.393	57,22

Pada tahun 2018, 10 Divre dengan realisasi pencapaian tertinggi berturut-turut yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Timur, D.I. Yogyakarta, Papua dan Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Selatan dengan total sebesar 564.989 ton. Sementara persentase realisasi yang dihasilkan ialah sebesar 67,83% dari total jumlah target 833.500 ton.

10 DIVRE DENGAN PERSENTASE CAPAIAN TERTINGGI

(%)

NO.	DIVRE	PRODUKSI	POTENSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Sumbar	1.660.166	128.670	10.000	10.985	109,85
2	Kaltim	366.551	26.888	4.500	4.409	97,98
3	DIY	474.834	36.256	50.000	41.382	82,76
4	Papuabar	136.096	14.533	45.000	33.536	74,52
5	NTB	1.265.563	97.752	150.000	110.525	73,68
6	Lampung	2.646.914	193.436	115.000	80.843	70,30
7	Kalteng	800.828	57.619	6.500	4.165	64,08
8	Sulselbar	4.202.117	318.354	400.000	249.508	62,38
9	Sultra	565.302	37.622	30.000	17.541	58,47
10	Kalsel	1.814.216	135.774	22.000	12.095	54,98
JUMLAH		13.932.588	1.046.906	833.000	564.989	67,83

Pada tahun 2018, 10 Divre dengan serapan terkecil berturut-turut yaitu Kalimantan Barat, Maluku dan Maluku Utara, Jambi, Bali, Sulawesi Utara dan Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, Riau dan Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur dengan total sebesar 18.963 ton. Sementara persentase realisasi yang dihasilkan ialah sebesar 40,78% dari total jumlah target 46.500 ton.

10 DIVRE DENGAN SERAPAN TERKECIL (TON BERAS)

NO.	DIVRE	PRODUKSI	POTENSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Kalbar	1.712.308	126.227	1.500	449	29,93
2	Malukut	207.397	13.040	1.500	627	41,80
3	Jambi	555.232	41.677	4.500	926	20,58
4	Bali	445.437	34.154	2.500	961	38,44
5	Sulut Go	751.934	56.276	8.500	1.027	12,08
6	NTT	984.394	74.525	4.500	1.588	35,29
7	Bengkulu	497.433	38.291	7.500	2.189	29,19
8	Riau Kepri	320.655	23.701	5.000	2.622	52,44
9	Kalteng	800.828	57.619	6.500	4.165	64,08
10	Kaltim	366.551	26.888	4.500	4.409	97,98
JUMLAH		6.642.169	492.397	46.500	18.963	40,78

Pada tahun 2018, 10 Divre dengan persentase serapan terkecil berturut-turut yaitu Sulawesi Utara dan Gorontalo, Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, DKI Jakarta dan Banten, Aceh, Bengkulu, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah Nusa Tenggara Timur, dan Bali dengan total sebesar 64.391 ton. Sementara persentase realisasi yang dihasilkan ialah sebesar 24,39% dari total jumlah target 264.000 ton.

10 DIVRE DENGAN SERAPAN TERENDAH

(%)

NO.	DIVRE	PRODUKSI	POTENSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Sulut Go	751.934	56.276	8.500	1.027	12,08
2	Sumsel Babel	3.512.620	261.055	80.000	15.608	19,51
3	Jambi	555.232	41.677	4.500	926	20,58
4	DKI Banten	1.260.843	95.940	65.000	14.140	21,75
5	Aceh	1.319.811	108.757	40.000	10.834	27,09
6	Bengkulu	497.433	38.291	7.500	2.189	29,19
7	Kalbar	1.712.308	126.227	1.500	449	29,93
8	Sulteng	753.466	57.943	50.000	16.669	33,34
9	NTT	984.394	74.525	4.500	1.588	35,29
10	Bali	445.437	34.154	2.500	961	38,44
JUMLAH		11.793.478	894.845	264.000	64.391	24,39

Jika dilihat dari realisasi capaian per bulan, pengadaan gabah/beras terbesar berada pada bulan April, Mei, Juli, Maret, dan Juni (sepanjang bulan Maret hingga Juli) dengan total sebesar 1.210.203 ton setara beras. Sedangkan realisasi capaian terendah yaitu pada bulan Januari, Desember, dan November dengan total sebesar 25.417 ton setara beras. Sementara itu, target bulanan hanya dicapai di bulan Juli yaitu realisasi 238.302 ton dari target 136.123 ton.

REALISASI PER BULAN (TON BERAS)

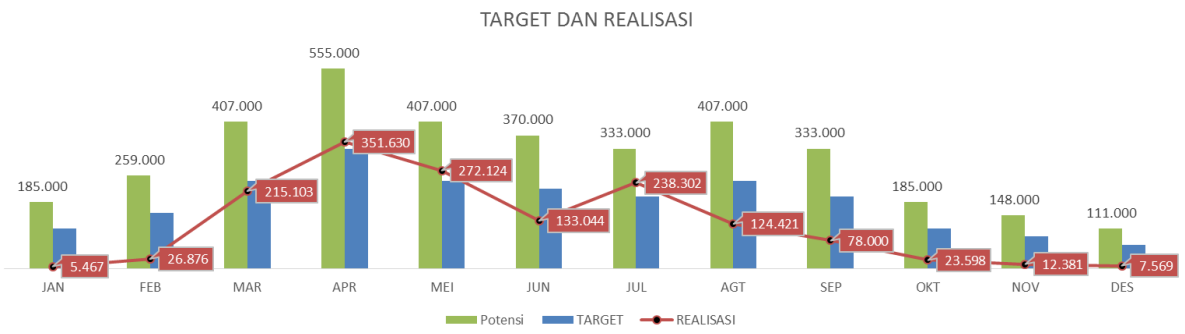

KETERANGAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
POTENSI	185.000	259.000	407.000	555.000	407.000	370.000	333.000	407.000	333.000	185.000	148.000	111.000	3.700.000
TARGET	27.892	54.926	339.480	831.299	542.513	380.567	133.244	136.123	111.166	84.241	54.370	26.577	2.722.398
REALISASI	5.467	26.876	215.103	351.630	272.124	133.044	238.302	124.421	78.000	23.598	12.381	7.569	1.488.515

Pengadaan gabah/beras dalam negeri Perum Bulog tahun 2018 merupakan yang terendah sejak 2014, hanya mencapai 1.488.515 ton setara beras. Begitu pula dengan Capaian semester I sebesar 1004.244 ton dan semester II sebesar 484.271 ton, terendah sejak 2014.

PERBANDINGAN PENGADAAN DALAM NEGERI 2014-2018

Bulan	2014	2015	2016	2017	2018
Jan	4.683	-	641	4.148	5.467
Feb	23.685	-	4.193	48.884	26.876
Mar	212.634	30.964	167.950	425.556	215.103
Apr	591.555	430.559	649.867	424.064	351.630
Mei	557.113	661.741	572.459	218.170	272.124
Jun	317.738	385.726	406.485	155.605	133.044
Jul	205.224	194.344	162.416	277.782	238.302
Agu	165.863	90.231	287.224	202.310	124.421
Sep	198.999	22.985	240.173	196.432	78.000
Okt	62.783	67.359	207.500	122.222	23.598
Nov	9.169	61.328	165.353	65.146	12.381
Des	356	21.266	97.244	20.906	7.569
Jumlah	**2.349.802**	**1.966.503**	**2.961.505**	**2.161.225**	**1.488.515**
Semester I	1.707.408	1.508.990	1.801.595	1.276.427	1.004.244
Semester II	642.394	457.513	1.159.910	884.798	1.695.756

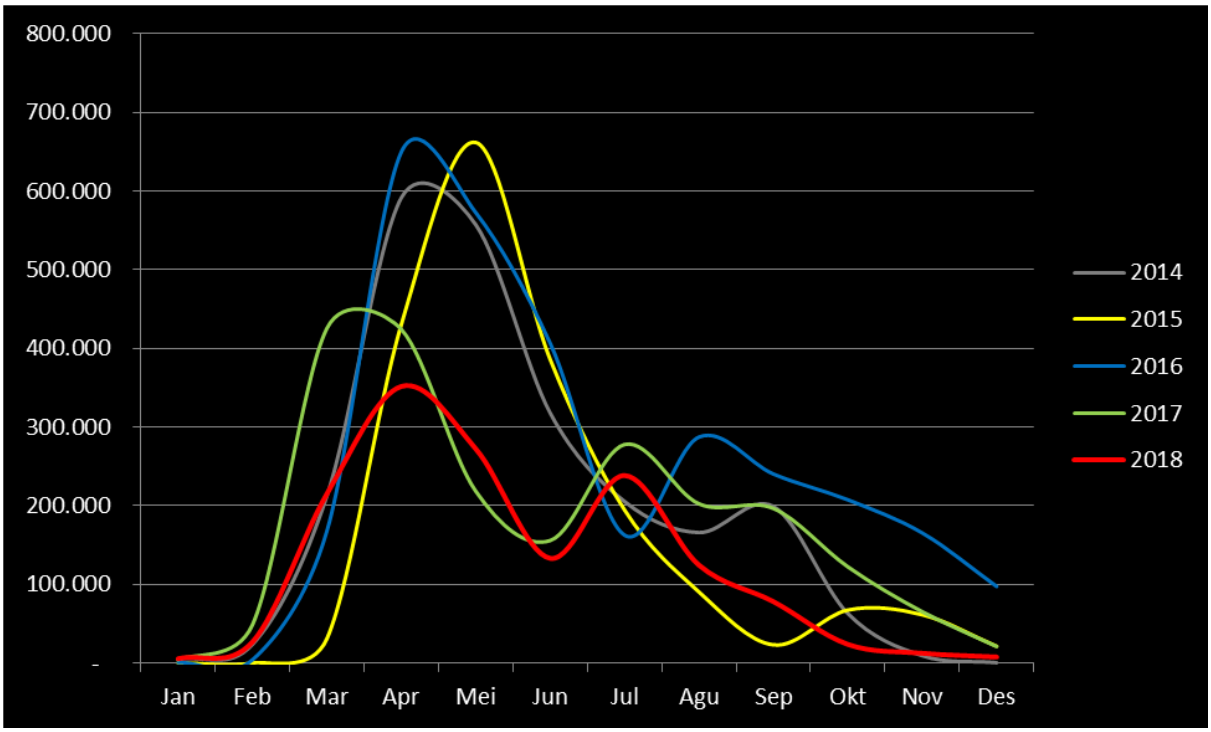

5.1.7. CADANGAN BERAS PEMERINTAH

Pemenuhan kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar masih dipenuhi dari impor, yaitu sebesar 1 juta ton. Pada awal tahun 2018, jumlah CBP sebesar 719.697 ton dan sempat menurun pada bulan Maret 2018 hingga 324.496 ton. Sementara di akhir tahun 2018, jumlah CBP meningkat kembali menjadi 2.049.560 ton. Meskipun perbandingan pengadaan gabah/ beras lebih rendah dari tahun 2017, namun jumlah CBP tahun 2018 masih lebih tinggi. Strategi yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menjaga kondisi CBP stabil di angka 2,1 juta ton sepanjang tahun, baik dalam kegiatan penyaluran maupun pengadaan gabah/beras CBP.

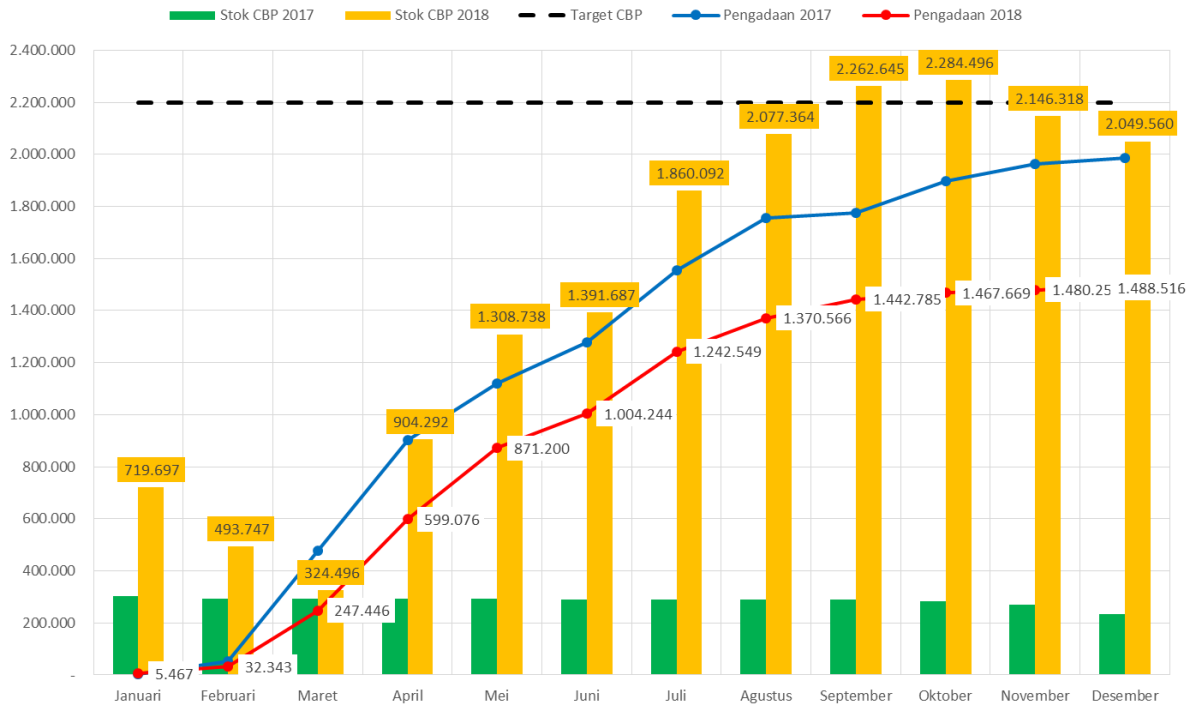

5.1.8. Pembelian Gabah di Luar Kualitas dan Pembelian Gabah/Beras dengan Fleksibilitas Oleh Perum BULOG

a. Pembelian Gabah di Luar Kualitas (GLK)

Pada awal tahun 2017 yang bertepatan dengan musim hujan yang cukup tinggi intensitasnya sebagai dampak kondisi iklim ekstrim, maka banyak gabah petani yang tidak bisa dikeringkan dengan baik sehingga petani mendapatkan harga yang rendah. Petani mengeluhkan kondisi kualitas gabah hasil produksinya yang berdampak pada rendahnya harga jual dan tingkat kesejahteraan petani.

Perkembangan harga gabah selama awal tahun 2017 terlihat bahwa harga gabah pada Januari - Februari 2017 lebih rendah dari dua tahun sebelumnya dan

terus menunjukkan penurunan yang Iebih besar daripada tahun 2015 dan 2016. Perkembangan harga gabah kering panen 2015 - 2017, sebagai berikut:

Tabel 38. Perkembangan Harga GKP Petani dan Laju Penurunan

Periode	2015		2016		2017	
	Ton	% Thd se-Th	Ton	% Thd se-Th	Ton	% Thd se-Th
Jan - Juni	1.508.990	77	1.801.595	61	1.277.525	59
Juli - Des	457.513	23	1.160.027	39	883.696	41
Jumlah	**1.966.502**		**2.961.623**		**2.161.221**	

Sumber : Perum BULOG

Keluhan petani tersebut, direspon Pemerintah/Presiden dengan penerbitan Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 48 tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perum BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. Dengan terbitnya Perpres tersebut maka Menteri Pertanian bervvewenang untuk menetapkan pembelian gabah dan beras dalam negeri dengan kualitas diluar ketentuan pada lnstruksi Presiden nomor 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

Berbasis pada Perpres 20 tahun 2017 tersebut, Menteri Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 3 tahun 2017 tangga| 2 Maret 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Permentan nomor 71 tahun 2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas oleh Pemerintah. Permentan 3 tahun 2017 memerintahkan kepada Perum BULOG untuk membeli gabah di Iuar kualitas dengan kadar air maksimal 30% pada harga yang sama dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sesuai Inpres.

Pengumuman tentang pembelian gabah diluar kualitas pada HPP standar menjadi patokan bagi pasar gabah sehingga harga gabah tidak semakin menurun drastis. Penurunan harga di bulan Maret 2017 yaitu 5.73% Iebih rendah dari dua periode sebelumnya (Maret 2015 turun 8,59% dan Maret 2016 turun 9,75%).

Atas penugasan tersebut, Perum BULOG telah merealiasikan pengadaan gabah diluar kualitas pada awal tahun 2017 sebanyak 496.634 kg yang diserap oleh Perum BULOG sejak Februari sampai dengan Mei 2017. Rendahnya penyerapan gabah diluar kualitas disebabkan oleh semakin membaiknya harga gabah di tingkat petani dan didukung dengan cuaca yang mulai semakin tepat untuk proses pengeringan.

Dampak dari pelaksanaan tersebut adalah adanya selisih biaya yang harus ditanggung oleh Pemerintah terhadap harga gabah di Iuar kualitas yang seharusnya Iebih rendah daripada HPP dengan HPP sesuai lnpres 5 tahun 2015. Sesuai dengan Rakortas tanggal 27 Maret 2017 bahwa rakortas telah menyetujui pengunaan dana Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP) untuk pembelian gabah di Iuar kualitas oleh Perum BULOG. Keputusan tersebut diperkuat dalam surat Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian kepada Menteri Keuangan nomorS-80/M-EKON/04/2017tanggal 12 April 2017 bahwa harga beli gabah dengan kadar air 26 - 30% dan kadar hampa 11 — 15% yang semula Rp.3.300/kg menjadi Rp.3.700/kg sehingga terdapat selisih harga HPP lama dan baru sebesar Rp.400/kg.

Tujuan pembelian gabah di luar kualitas adalah untuk menjaga tingkat harga yang diterima petani sekaligus menjaga tingkat kesejahteraan petani. Sasaran kegiatan adalah:

a. Produksi gabah petani yang di luar kualitas tetap dapat dibeli oleh Pemerintah melalui pembelian gabah oleh Perum BULOG pada harga yang dijamin oleh Pemerintah yaitu HPP sesuai lnpres 5 tahun 2015.
b. Tingkat kesejahteraan petani tetap terjaga.
c. Menjaga semangat menanam padi oleh petani sebagai rangkaian dari proses swasembada padi nasional.

Waktu pembelian gabah di luar kualitas oleh Perum BULOG dilaksanakan selama Februari - Mei 2017. Wilayah pelaksanaan kegiatan adalah di daerah-daerah produsen yaitu wilayah Perum BULOG Divre Jateng, Divre Jogya, Divre Jatim, dan Divre Sumsel.

Pelaksana pembelian gabah di luar kualitas dan pembelian gabah/beras dengan fleksibilitas harga adalah Perum BULOG di setiap wilayah kerja Perum BULOG se Indonesia kecuali di wilayah Perum BULOG Divre Maluku, Divre kalbar, dan Divre Bali.

b. Pembelian Gabah/Beras dengan Fleksibilitas HPP

Meskipun harga gabah dan beras turun di awal tahun, namun tingkat harga gabah dan beras tetap berada di atas HPP dalam lnpres nomor 5 tahun 2015. Kondisi ini menyulitkan bagi Perum BULOG dalam melaksanakan pembelian gabah dan beras untuk penyediaan stok beras Pemerintah. Untuk itu sesuai dengan kewenangan Menteri Pertanian dalam Perpres 20 tahun 2017, maka pada rapat koordinasi tingkat Menteri Bidang Perekonomian tanggal 7 Juli 2017, Menteri Pertanian menginisiasi untuk pembelian gabah/beras dengan fleksilibitas harga 10% di atas HPP lnpres 5 tahun 2015 sampai dengan 31 Desember 2017. Atas perintah ini, Perum BULOG mulai menjalankan pembelian gabah/beras dengan fleksibilitas harga sejak 7 Agustus 2017.

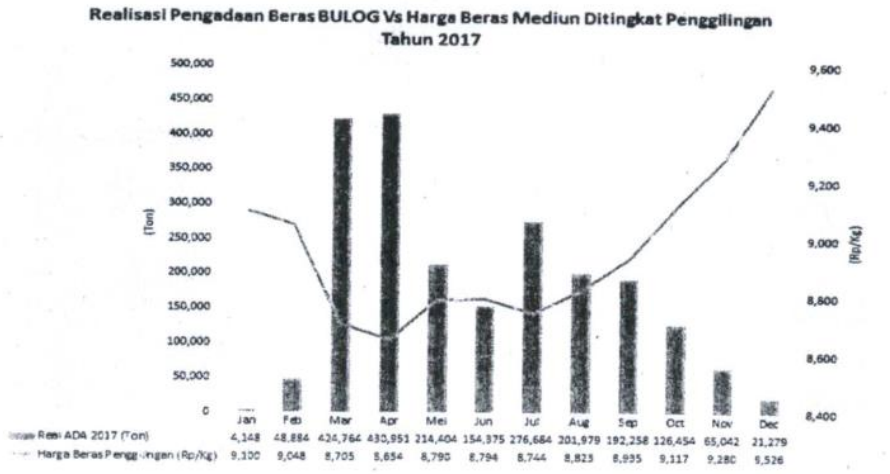

Gambar 27. Realisasi Pengadaan Beras BULOG Vs harga Beras Medium di Tingkat Penggilingan Tahun 2017

Perkembangan harga beras medium tingkat penggilingan pada saat diputuskan bulan Juli 2017 untuk pembelian gabah/beras dengan fleksibilitas menunjukkan kenaikan. Kenaikan harga beras terus terjadi sampai dengan akhir Desember 2017 dan mampu meningkatkan jumlah serapan gabah beras 2017.

Dampak pelaksanaan pembelian gabah di Iuar kualitas dan pembelian gabah.beras dengan fleksibilitas antara Iain :

a. Terhadap petani : mampu menjaga tingkat harga dan kesejahteraan petani, menjaga semangat petani untuk tetap memproduksi padi dalam rangka mendukung swasembada padi nasional.
b. Terhadap stok nasional : mampu menjaga jumlah stok yang cukup yaitu pada akhir tahun 2017, Perum BULOG mampu menjaga stok pada kisaran 1 juta ton
c. Terhadap operasional dan finansial Perum BULOG : terdapat selisih harga yang masih harus ditanggung oleh Perum BULOG atas penugasan tersebut termasuk biaya-biaya penugasan dan kredit pengadaan.

Untuk itu diperlukan pembayaran selisih atas pembelian gabah di Iuar kualitas dan pembelian gabah/beras dengan fleksibilitas oleh Perum BULOG pada tahun 2017 dengan menggunakan dana dari Cadangan Stabilisasi Harga Pangan pada tahun angaran 2018. Sesuai hasil kesepakatan pada Rapat Penyelesaian Pembayaran GLK dan Pembelian dengan Fleksibilitas Harga telah disepakati bahwa pada pembayaran untuk periode 28 Februari sampai dengan 27 Agustus 2018 dilakukan oleh Kementerian Pertanian.

Tujuan pembelian gabah dan beras dengan fleksiblitas harga diberikan untuk penyediaan stok beras nasional yang harus dikelola oleh Perum BULOG. Sasaran dari pembelian gabah dan beras dengan fleksibilitas adalah :

a. Penguatan stok beras yang dikuasai oleh Pemerintah melalui Perum BULOG dari produksi dalam negeri.

b. Menaikkan tingkat harga yang ditawarkan oleh Perum BULOG pada gabah dan beras produksi petani dalam negeri sehingga dapat bersaing dengan pasar.

Pembelian Gabah/Beras dengan Fleksibilitas harga dilakukan dalam kurun waktu sejak 7 Agustus 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, namun Pembayaran yang dilakukan Kementerian Pertanian pada periode 28 Februari – 27 Agustus 2017. Wilayah pelaksanaan di seluruh Indonesia kecuali di wilayah Perum BULOG Divre Maluku, Divre Kalbar, dan Divre Bali.

Realisasi pembelian gabah/beras dengan fleksibilitas harga sampai dengan 31 Desember 2017 adalah 5.408 ton GKG dan 472.755 ton beras dan dilaksanakan di seluruh Indonesia kecuali di Maluku. Dengan kebijakan tersebut, maka jumlah pengadaan setara beras yang dapat diserap oleh Perum BULOG pada semester ll secara jumlah lebih besar daripada tahun 2015, namun secara prosentase terhadap total pengadaan setahun adalah yang terbesar.

Tabel 39. Pengadaan Setara Beras 2015 - 2017

Bulan	2014/2015		2015/2016		2016/2017	
	Rp/Kg	Delta (%)	Rp/Kg	Delta (%)	Rp/Kg	Delta (%)
Okt	4.365		4.905		4.555	
Nov	4.535	3,90%	5.070	3,38%	4.574	0,42%
Des	4.911	8,28%	5.118	0,93%	4.623	1,07%
Jan	5.028	2,39%	5.206	1,72%	4.754	2,83%
Feb	4.923	-2,10%	5.211	0,10%	4.639	-2,42%

Sumber : BPS

5.2. UPAYA KHUSUS PENINGKATAN PRODUKSI PADI, JAGUNG, KEDELAI (UPSUS PAJALE)

Pada tahun 2018, pelaksanaan program UPSUS Padi, Jagung, dan Kedelai di Provinsi Sulawesi Utara mencakup kegiatan Luas Tambah Tanam (LTT) Pajale, pemberian bantuan benih dan alsintan, dan pendirian Posko Percepatan LTT Pajale. Berikut rincian realisasi kegiatan tersebut pada periode semester I 2018.

A. Perkembangan LTT Padi, Jagung dan Kedelai

1. Padi

Pada tahun 2018, pelaksanaan kegiatan LTT Padi di Provinsi Sulawesi Utara dari target luas tanam padi Semester I (Januari - Juni) seluas 157.743 Ha, terealisasi luas tanam 152.395 Ha atau 96,60%. Berikut ini target dan realisasi Luas Tanam Padi Semester I tahun 2018 Provinsi Sulawesi Utara :

Tabel 40. Target dan Realisasi LTT Padi Bulan Januari s.d Juni 2018

Bulan	Target (ha)	Realisasi (ha)	Persentase (%)
Januari	18.930	13.281	70,16
Februari	20.467	19.361	95,00
Maret	50.000	50.754	101,50
April	46.560	40.763	87,55
Mei	11.280	13.685	121,32
Juni	10.506	14.551	138,50
Jumlah	**157.743**	**152.395**	**96,60**

Sumber : BPTP Provinsi Sulut dan Pusdatin Kementan

Jika dibandingkan dengan tahun 2017, pelaksanaan kegiatan LTT Padi di Provinsi Sulawesi Utara dari target luas tanam padi Semester I (Januari - Juni) seluas 94.445 Ha, terealisasi luas tanam 97.095,9 Ha atau 102,8%. Berikut ini target dan realisasi luas tanam padi semester I tahun 2017 Provinsi Sulawesi Utara :

Tabel 41. Target dan Realisasi LTT Padi Bulan Januari s.d Juni 2017

Bulan	Target (ha)	Realisasi (ha)	Persentase (%)
Januari	21.832,0	20.950,0	96,0
Februari	24.784,0	23.682,0	95,6
Maret	15.187,0	17.988,6	118,4
April	13.000,0	12.312,1	94,7
Mei	9.642,0	12.036,7	124,8
Juni	10.000,0	10.126,5	101,3
Jumlah	**94.445,0**	**97.095,9**	**102,8**

Sumber : BPTP Provinsi Sulut dan Pusdatin Kementan

Perkembangan LTT Padi periode semester I (Jan-Juni) tahun 2018 mengalami kenaikan target lebih besar yaitu 157.743 Ha dibandingkan dengan periode Semester I tahun 2017 sebesar 94.445 Ha. Sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar 152.395 Ha lebih besar dari tahun 2017 sebesar 97.095,9 Ha. Tingginya realisasi luas tambah tanam tersebut disebabkan oleh (1) kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan TNI, (2) penambahan luas areal tanam, (3) besarnya potensi luas tambah tanam di wilayah Minahasa Raya dan Bolaang Mongondow Raya, (4) kondisi iklim yang mendukung budidaya, (5) bantuan benih dan alsintan dari pemerintah.

Pada bulan Maret dan April 2018 target LTT bertambah lebih tinggi yaitu 50.000 Ha dan 46.560 Ha, sedangkan pada bulan Maret dan April 2017 hanya sebesar 15.187 Ha dan 13.000 Ha, penambahan target disebabkan karena pada bulan tersebut terdapat pengadaan benih untuk padi gogo seluas 23.620 Ha atau 291.200 Kg.

2. Jagung

Pada tahun 2018, pelaksanaan kegiatan LTT Jagung di Provinsi Sulawesi Utara dari target luas tanam Semester I (Januari - Juni) seluas 218.067 Ha, terealisasi luas tanam 214.054 Ha atau 98,16%. Berikut ini target dan realisasi luas tambah tanam jagung tahun 2018 Provinsi Sulawesi Utara :

Tabel 42. Target dan Realisasi LTT Jagung Bulan Januari s.d Juni 2018

Bulan	Target (ha)	Realisasi (ha)	Persentase
Januari	33.355	43.517	130,183
Februari	30.183	31.065	102,92
Maret	25.584	33.004	129,00
April	61.727	51.967	84,19
Mei	33.388	37.059	110.99
Juni	33.830	17.442	51,56
Jumlah	**218,067**	**214,054**	**98.16**

Sumber : BPTP Provinsi Sulut dan Pusdatin Kementan

Jika dibandingkan tahun 2017, pelaksanaan kegiatan LTT Jagung di Provinsi Sulawesi Utara dari target luas tanam Semester I (Januari - Juni) seluas 384.264 Ha, terealisasi luas tanam 395.440 Ha atau 102,9%. Sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar 214.054 Ha atau 98,16% lebih kecil dari tahun 2017 sebesar 181.386 Ha. Rendahnya realisasi luas tambah tanam tahun 2018 tersebut disebabkan karena (1) penurunan target Luas Tambah Tanam (2) pengadaan benih jagung lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2017, (3) sebagian lahan digunakan untuk menanam padi ladang.

Selain itu, pada bulan April 2017 ada penambahan target yaitu 201.332 ha sehingga realisasi LTT jagung tahun 2017 lebih tinggi. Berikut ini target dan realisasi luas tambah tanam jagung tahun 2017 Provinsi Sulawesi Utara :

Tabel 43. Target dan Realisasi LTT Jagung Bulan Januari s.d Juni 2017

Bulan	Target (ha)	Realisasi (ha)	Persentase
Januari	30.083,0	30.272,0	100,6
Februari	28.002,0	32.368,0	115,6
Maret	31.941,0	63.837,0	199,9
April	201.332,0	164.700,0	81,8
Mei	55.002,0	54.833,0	99,7
Juni	37.904,0	49.430,0	130,4
Jumlah	**384.264,0**	**395.440,0**	**102,9**

Sumber : BPTP Provinsi Sulut dan Pusdatin Kementan

3. Kedelai

Pada tahun 2018, pelaksanaan kegiatan LTT Kedelai di Provinsi Sulawesi Utara dari target luas tanam Semester I (Januari - Juni) seluas 19.451 Ha, terealisasi luas tanam 28.057 Ha atau 144,24%. Berikut ini target dan realisasi luas tambah tanam jagung tahun 2018 Provinsi Sulawesi Utara :

Tabel 44. Target dan Realisasi LTT Kedelai Bulan Januari s.d Juni 2018

Bulan	Target (ha)	Realisasi (ha)	Persentase
Januari	781	4.477	573,24
Februari	4.294	10.203	237,61
Maret	1.567	10.658	680,15
April	2.780	1.944	69,92
Mei	5.084	163	3,20
Juni	4.945	612	12,37
Jumlah	**19.451**	**28.057**	**144,24**

Sumber : BPTP Provinsi Sulut dan Pusdatin Kementan

Jika dibandingkan tahun 2017, pelaksanaan kegiatan LTT Kedelai di Provinsi Sulawesi Utara dari target luas tanam Semester I (Januari - Juni) seluas 10.217 Ha, terealisasi luas tanam 1.363 Ha atau 13,3%. Sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar 28.057 Ha atau 144,24% lebih besar dari tahun 2017 sebesar 26.694 Ha. Tingginya realisasi luas tambah tanam tahun 2018 tersebut disebabkan karena (1) pengadaan benih kedelai (2) penambahan target luas tanam kedelai (3) program percepatan tanam kedelai.

Pada tahun 2018 ada penambahan target menjadi 19.451 ha dibandingkan

tahun 2017 yaitu 10.217 ha, tetapi dilihat dari persentase pada tahun 2018 mengalami kenaikan yaitu 144,24%, selisihnya 130,94% lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 sebesar 13,3%. Berikut ini target dan realisasi luas tambah tanam kedelai tahun 2017 Provinsi Sulawesi Utara :

Tabel 45. Target dan Realisasi LTT Kedelai Bulan Januari s.d Juni 2017

Bulan	Target (ha)	Realisasi (ha)	Persentase
Januari	2.505,0	728,0	29,1
Februari	1.111,0	247,0	22,2
Maret	1.288,0	207,0	16,1
April	1.785,0	37,0	2,1
Mei	1.907,0	95,0	5,0
Juni	1.621,0	49,0	3,0
Jumlah	**10.217,0**	**1.363,0**	**13,3**

Sumber : BPTP Provinsi Sulut dan Pusdatin Kementan

B. Pengadaan Benih Padi, Benih Jagung dan Alsintan

1. Padi

Pada tahun 2018, pelaksanaan kegiatan LTT Padi dan Jagung di Provinsi Sulawesi Utara didukung oleh pemberian bantuan benih padi (padi sawah dan padi ladang) yang terdiri terdiri dari benih padi hibrida, mina padi dan padi khusus, sedangkan benih jagung terdiri dari benih jagung litbang dan komposit. Alokasi pengadaan benih padi hibrida sebesar 4.000 ha, mina padi 20 ha, dan padi khusus 50 ha, sedangkan untuk benih padi ladang seluas 23.620 ha.

Alokasi pengadaan benih padi hibrida seluas 4.000 ha tersebar di 7 kabupaten yaitu : Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur. Penyaluran padi hibrida hampir seluruhnya 100% kecuali Kabupaten Minahasa Utara dan Minahasa Selatan mencapai 95%, penyaluran benih dalam bentuk barang yaitu 25 kg per ha. Secara rinci target dan penyaluran benih padi hibrida dapat dilihat pada tabel 7 berikut :

Tabel 46 : Sasaran dan Penyaluran Benih Padi Hibrida Tahun 2018

No.	Kabupaten/Kota	Padi Hibrida					Keterangan
		Sasaran Revisi (Ha)	Alokasi (Ha)	Keb. Benih (Kg)	Anggaran (Rp)	Penyaluran	
1	Minahasa	750	1,000	25,000	257,500,000	100%	Penyaluran dalam bentuk barang (25 Kg/Ha)
2	Minahasa Selatan	800	985	24,625	253,637,500	95%	
3	Minahasa Utara	750	750	18,750	193,125,000	95%	
4	Minahasa Tenggara	100	100	2,500	25,750,000	100%	
5	Bolmong	900	900	22,500	231,750,000	100%	
6	Bolmong Selatan	165	165	4,125	42,487,500	100%	
7	Bolmong Utara	-	-	-	-	-	
8	Bolmong Timur	100	100	2,500	25,750,000	100%	
9	Kotamobagu	-	-	-	-	-	
10	Manado	-	-	-	-	-	
11	Talaud	-	-	-	-	-	
12	Sangihe	-	-	-	-	-	
13	Tomohon	-	-	-	-	-	
14	Bitung	-	-	-	-	-	
15	Provinsi	435	-	-	-	-	
TOTAL		4,000	4,000	100,000	1,030,000,000		

Ket : Penyaluran benih sampai dengan bulan Juli 2018
Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara

Alokasi pengadaan benih padi ladang seluas 23.620 ha tersebar di seluruh kab/kota Provinsi Sulawesi utara kecuali Kota Tomohon, dan Kota Bitung. Penyaluran padi ladang sampai dengan bulan Juli 2018 seluas 12.568 ha atau sebanyak 291.200 kg. Secara rinci target dan penyaluran benih padi ladang dapat dilihat pada tabel 37 berikut :

Tabel 47 : Sasaran dan Penyaluran Benih Padi Ladang Tahun 2018

No.	Kabupaten/Kota	SP2D		Penyaluran			
		Luas (Ha)	Anggaran (Rp)	Ha	Kg	Varietas	Perusahaan
1	Minahasa	4,014	1,756,125,000	1,125	28,125	Situbagendit	Hidayat
2	Minahasa Selatan	3,470	1,518,125,000	1,365	34,125	Ciherang	Hidayat
3	Minahasa Utara	2,000	875,000,000				
4	Minahasa Tenggara	2,000	875,000,000	2,000	35,000	Ciherang	Hidayat
					15,000		Meldy
5	Bolmong	4,808	2,103,500,000	4,808	120,200	Mekongga	Marolov
6	Bolmong Selatan	1,500	656,250,000	1,500	37,500	Situ/Ciher	Meldy
7	Bolmong Utara	3,378	1,477,875,000	894.5			
8	Bolmong Timur	1,000	437,500,000	625	15,000	Ciherang	Hidayat
9	Kotamobagu	200	87,500,000				Marolov
10	Manado	250	109,375,000	250	6,250	Situ/Ciher	Meldy
11	Talaud	500	218,750,000				
12	Sangihe	500	218,750,000				
13	Tomohon						
14	Bitung						
15	Provinsi						
TOTAL		**23,620**	**10,333,750,000**	12,568	291,200		

Ket : Penyaluran benih sampai dengan bulan Juli 2018
Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara

Alokasi pengadaan benih mina padi seluas 20 ha dan padi khusus 50 ha, sedangkan benih bantuan dari pusat seluas 16.500 ha. tersebar di 7 kabupaten yaitu : Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur. Penyaluran padi hibrida hampir seluruhnya 100% kecuali Kabupaten Minahasa Utara dan Minahasa Selatan mencapai 95%, penyaluran benih dalam bentuk barang yaitu 25 kg per ha. Secara rinci target dan penyaluran benih padi hibrida dapat dilihat pada tabel 9 berikut :

Tabel 48 : Sasaran dan Penyaluran Benih Mina Padi dan Padi Khusus Tahun 2018

No.	Kabupaten/Kota	Eks Cetak Sawah		Keterangan	Mina Padi		Keterangan	Padi/Beras Khusus		Keterangan	Benih Bantuan Pusat (Ha)	Keterangan
		(Ha)	Anggaran (Rp)		(Ha)	Anggaran (Rp)		(Ha)	Anggaran (Rp)			
1	Minahasa	20	11,950,000	Berkas Belum Masuk (CPCL, SPK, SPTJB, SPTJM, RUK, Surat Pernyataan)	-	-		-	-		4,000	
2	Minahasa Selatan	20	11,950,000	Dalam proses Pencairan	-	-		25	21,000,000	Dalam proses Pencairan	2,000	
3	Minahasa Utara	-	-	-	-	-		-	-		-	
4	Minahasa Tenggara	-			10	21,625,000	Dalam proses Pencairan	-	-		1,500	
5	Bolmong	20	11,950,000	Dalam proses Pencairan	-	-		25	21,000,000	Dalam proses Pencairan	7,000	
6	Bolmong Selatan	20	11,950,000	Berkas Belum Masuk (SPK, SPTJB, SPTJM, RUK, Surat Pernyataan)	-	-		-	-		-	**Menunggu Proses dari pusat**
7	Bolmong Utara	20	11,950,000	Berkas Belum Masuk (SPK, SPTJB, SPTJM, RUK, Surat Pernyataan)	-	-		-	-		2,000	
8	Bolmong Timur	-			-	-		-	-		-	
9	Kotamobagu	-			-	-		-	-		-	
10	Manado	-			-	-		-	-		-	
11	Talaud	-			-	-		-	-		-	
12	Sangihe	-			-	-		-	-		-	
13	Tomohon	-			10	21,625,000	Dalam Persiapan Pencairan	-	-		-	
14	Bitung	-			-	-		-	-		-	
15	Provinsi	-			-	-		-	-		-	
TOTAL		**100**	**59,750,000**		**20**	**43,250,000**		**50**	**42,000,000**		**16,500**	

Ket : Penyaluran benih sampai dengan bulan Juli 2018
Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara

2. JAGUNG

Pada tahun 2018 alokasi pengadaan benih jagung seluas 223.445 ha, terdiri dari benih litbang seluas 138.414 ha, Hibrida 2 seluas 75.031 ha dan komposit 10.000 ha. Realisasi penyaluran benih jagung sampai dengan bulan Juni 2018 sebanyak 1.227.285 Kg atau seluas 81.819 ha, terdiri dari Benih Litbang (Hibrida) 3 sebanyak 705.075 Kg atau seluas 47.005 ha dan Benih Hibrida 2 sebanyak 522,210 Kg atau seluas 34.814 ha. Target dan Realisasi penyaluran benih dapat dilihat pada tabel 10 berikut :

Tabel 49 : Sasaran dan Penyaluran Benih Jagung Tahun 2018

NO	KAB/KOTA	ALOKASI/ DIPA	VARIETAS			Kontrak Benih	REALISASI SALUR/TANAM					
			Litbang (65 %)	HU 2 (35 %)	Komposit		HU 3/Litbang		HU 2		JUMLAH HU3+HU2	
		(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	HA	KG	HA	KG	HA	KG
1	MINAHASA	45,440	28,561	15,379	1,500	43,940	13,855	207,825	6,624	99,360	20,479	307,185
2	MINAHASA SELATAN	40,000	24,700	13,300	2,000	25,800	8,983	134,745	5,665	84,975	14,648	219,720
3	MINAHASA UTARA	25,720	16,718	9,002		25,720	1,782	26,730	9,002	135,030	10,784	161,760
4	MINAHASA TENGGARA	16,600	9,815	5,285	1,500	15,100	5,550	83,250	2,400	36,000	7,950	119,250
5	BOLAANG MONGONDOW	34,285	22,285	12,000		30,739	1,676	25,140	-	-	1,676	25,140
6	BOLSEL	12,700	8,255	4,445		12,700	7,800	117,000	3,598	53,970	11,398	170,970
7	BOLTIM	12,400	8,060	4,340		12,400	800	12,000	1,000	15,000	1,800	27,000
8	BOLMUT	8,500	5,525	3,475		3,475	-	-	3,150	47,250	3,150	47,250
9	KOTAMOBAGU	2,000	1,300	700		2,000	667	10,000	700	10,500	1,367	20,500
10	MANADO	1,500	975	525		1,500	975	14,625	525	7,875	1,500	22,500
11	BITUNG	5,500	3,250	1,750		5,000	1,557	23,360	1,750	26,250	3,307	49,610
12	TOMOHON	1,500	975	525		1,500	-	-	400	6,000	400	6,000
13	SANGIHE	10,300	3,445	1,855	5,000	5,300	1,900	28,500	-	-	1,900	28,500
14	TALAUD	7,000	4,550	2,450		7,000	1,460	21,900	-	-	1,460	21,900
	swadaya											
JUMLAH		**223,445**	**138,414**	**75,031**	**10,000**	**192,174**	**47,005**	**705,075**	**34,814**	**522,210**	**81,819**	**1,227,285**

Ket : Penyaluran benih sampai dengan bulan Juli 2018 Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara

C. Pengadaan Alsintan

Dalam mendukung kegiatan percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) Padi, Jagung dan Kedelai, pada tahun 2018 pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) yaitu traktor roda 2 sebanyak 285 unit, Pompa Air 384 unit, *Rice Transplanter* 37 unit, *Hand Sprayer* 429 unit, Alat Tanam Jagung 194 unit serta *Cultivator* 142 unit. Semua unit alsintan sudah tersebar ke kabupaten/kota sesuai dengan pengajuan atau kebutuhan masing-masing daerah.

Tabel 50 : Pengadaan dan Penyaluran Alsintan

No	Kab/Kota	Traktor Roda 2	Pompa Air	Rice Transplanter	Hand Sprayer	Alat Tanam Jagung	Cultivator
		Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit
1	Bolmomg	30	70	5	34	20	10
2	Bolmut	20	40	3	50	20	
3	Boltim	20	20		20		15
4	Bolsel	20	20	5	25		5
5	Minahasa	70	80	10	100	75	32
6	Minsel	25	25	5	30	20	15
7	Minut	20	45	3	40	15	10
8	Mitra	35	37		50	30	15
9	Sangihe	10	10	3	10	4	
10	Talaud	10	10	3	20	5	5
11	Tomohon	10	5		15		20
12	Bitung	5	2		10		5
13	Manado	5	10		15	5	5
14	Kotamobagu	5	10		10		5
	TOTAL	**285**	**384**	**37**	**429**	**194**	**142**

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara

5.3. PROGRAM BEDAH KEMISKINAN SEJAHTERA (BEKERJA)

Program BEKERJA dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 20/PERMENTAN/RC.120/5/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2018. Pelaksanaan bantuan pemerintah untuk Program BEKERJA berbasis pertanian Tahun Anggaran 2018 mencakup 4 tahapan kegiatan yaitu: penetapan penerima bantuan, pengadaan, penyaluran, dan pendampingan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 316/Kpts/OT.050/5 /2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) Kementerian Pertanian tanggal 2Mei 2018, Badan Ketahanan Pangan ditugaskan menjadi penanggungjawab supervisi di Provinsi Banten.

Program BEKERJA didasarkan atas:

1. Peraturan Menteri Pertanian No.20/PERMENTAN/ RC.120/5/2018 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Pertanian No.27/PERMENTAN/ RC.120/5/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2018.
2. Keputusan Menteri Pertanian No. 316/Kpts/OT.050/5/2018 sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 480/Kpts/OT.050/6/2018 tentang

Pembentukan Tim Pelaksana Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) Kementerian Pertanian.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran BantuanPemerintah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Tujuan dari kegiatan BEKERJA, Memberikan bantuan ayam/itik lokal, kandang, bibit tanaman sayur dan buah, serta bibit tanaman perkebunan kepada RTM yang menjadi penerima manfaat di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan melalui kegiatan pertanian yang terintegrasi.

Sasaran kegiatan BEKERJA adalah RTM berdasarkan data dari Keputusan Menteri Sosial Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskinsebanyak 2.254 RTM pada Kecamatan Cipeucang, Koroncong, dan Saketi di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

Lokasi Program BEKERJA berada di 10 provinsi, 21 kabupaten yaitu:

1. Provinsi Jawa Barat: Kabupaten Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya, Garut
2. Provinsi Jawa Tengah: Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Brebes
3. Provinsi Jawa Timur: Kabupaten Bondowoso, Jember, Lumajang
4. Provinsi Sulawesi Selatan: Kabupaten Bone, Tana Toraja, Toraja Utara
5. Provinsi Sumatera Utara: Kabupaten Langkat
6. Provinsi Sumatera Selatan: Kabupaten OKI
7. Provinsi Lampung: Kabupaten Lampung Selatan
8. Provinsi Banten: Kabupaten Pandeglang
9. Provinsi Kalimantan Selatan: Kabupaten Hulu Sungai Utara
10. Provinsi Nusa Tenggara Barat: Kabupaten Lombok Tengah

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 316/Kpts/OT.050/5/2018 sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 480/Kpts/OT.050/6/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan menjadi penanggung jawab/supervisi kegiatan BEKERJA di Provinsi Banten (Kabupaten Pandeglang).

Lokasi Program BEKERJA Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten berada di 3 Kecamatan yaitu Cipeucang, Koroncong dan Saketi.

Rincian penerima manfaat dapat dilihat pada tabel 51 berikut ini.

Tabel 51. Penerima Manfaat Bantuan Program BEKERJA Provinsi Banten

NO.	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	Σ RTM
	Banten	**Pandeglang**	**Cipeucang**		**772**
1				Baturanjang	84
2				Cikadueun	47
3				Curugbarang	85
4				Kadugadung	25
5				Kalanggunung	4
6				Koncang	72
7				Palanyar	2
8				Parumasan	68
9				Pasireurih	274
10				Pasiemae	111
			Saketi		**1.085**
1				Ciandur	43
2				Girijaya	112
3				Kadudampit	53
4				Langensari	88
5				Majau	115
6				Medalsari	67
7				Mekarwangi	72
8				Parigi	175
9				Saketi	7
10				Sindanghayu	35
11				Sodong	36
12				Sukalangu	92
13				Talagasari	103
14				Wanagiri	87
			Koroncong		**397**
1				Awilega	32
2				Gerendong	20
3				Sukajaya	13
4				Koroncong	26

NO.	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	Σ RTM
5				Paniis	50
6				Pakuluran	86
7				Karangsetra	21
8				Setrajaya	51
9				Bangkonol	23
10				Tegalongok	10
11				Pasirjaya	29
12				Pasirkarag	36
	TOTAL KABUPATEN PANDEGLANG				**2.254**

Secara nasional jenis bantuan ayam/itik yang diberikan sebanyak 10 juta ekor kepada 200 ribu RTM penerima manfaat (50 ekor/RTM), termasuk pakan dan obat-obatan. Ayam/itik yang diberikan adalah ayam/itik lokal (berumur minimal 4 minggu) yang telah divaksin atau DOC ayam KUB. Selain itu ada bantuan tanaman sayur dan buah serta tanaman perkebunan termasuk pupuk organik dan NPK.

Untuk di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, bantuan yang diberikan kepada penerima manfaat adalah:

1. Ayam kampung sebanyak 112.700 ekor yang bersumber dari:
   - Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) melalui BIB Lembang: 85.000 ekor ayam untuk 1.700 RTM
   - Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (*BPPSDMP*): 27.700 ekor ayam untuk 554 RTM
2. Kandang dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)
3. Benih sayuran dan buah (kangkung dan pepaya) serta bibit manggis dari Direktorat Jenderal Hortikultura
4. Benih kelapa dalam dari Direktorat Jenderal Perkebunan
5. Bantuan KRPL dari BKP

Setiap RTM mendapatkan bantuan ayam sebanyak 50 ekor, bibit kangkung sebanyak 1.5 kg, bibit pepaya sebanyak 4 batang, bibit manggis sebanyak 5 batang, dan bibit kelapa dalam sebanyak 2-3 batang.

Rincian jenis dan jumlah bantuan dapat dilihat pada tabel 42, sedangkan jumlah bantuan per RTM dapat dilihat pada tabel 43.

Tabel 52. Jenis dan jumlah bantuan Program BEKERJA Provinsi Banten

Jenis Bantuan	Jumlah Bantuan
BKP	
KRPL di lokasi BEKERJA	6 kelompok
Ditjen PSP	
Kandang	2.254
BIB Lembang-Ditjen PKH:	
- Ayam	85.000
- Pakan	510.000
- Obat	1.700
Ditjen Hortikultura:	
- Kangkung (kg) - Pupuk Organik (kg) - NPK (kg)	3.381 11.270 2.254
- Bibit pepaya (15-25 cm) - Pupuk organik (kg) - NPK (kg)	9.016 9.016 2.254
- Manggis (pohon) - Pupuk organik (kg) - NPK (kg)	11.270 6.762 6.762
Ditjen Perkebunan:	
- Kelapa Dalam - Pupuk (Kg)	3000 1500
***BPPSDMP*:**	
- Ayam umur 6-8 minggu, sdh divaksin - Pakan komplit produksi pabrikan	27.700

Tabel 53. Jumlah bantuan Program BEKERJA per RTM di Provinsi Banten

Kecamatan	Desa		Jumlah RTM	Ayam (ekor)	Kangkung (kg)	Pepaya (batang)	Manggis (batang)	Kelapa Dalam (batang)
Saketi	1	Ciandur	43	2150	64.5	172	215	86
	2	Mekarwangi	72	3600	108	288	360	144
	3	Langensari	88	4400	132	352	440	176
	4	Sukalangu	92	4600	138	368	460	184
	5	Girijaya	112	5600	168	448	560	224
	6	Wanagiri	87	4350	130,5	348	435	174
	7	Majau	115	5750	172,5	460	575	230
	8	Sodong	36	1800	54	144	180	72
	9	Medalsari	67	3350	100,5	268	335	134
	10	Sindanghayu	35	1750	52,5	140	175	70
	11	Parigi	175	8750	262,5	700	875	350
	12	Kadudampit	53	2650	79,5	212	265	106
	13	Saketi	7	350	10,5	28	35	14
	14	Talagasari	103	5150	154,5	412	515	206
		Total	**1085**	**54250**	**1627,5**	**4340**	**5425**	**2170**
Koroncong	1	Awilega	32	1600	48	128	160	
	2	Gerendong	20	1000	30	80	100	
	3	Sukajaya	13	650	19.5	52	65	
	4	Koroncong	26	1300	39	104	130	
	5	Paniis	50	2500	75	200	250	
	6	Pakuluran	86	4300	129	344	430	
	7	Karangsetra	21	1050	31.5	84	105	
	8	Setrajaya	51	2550	76.5	204	255	
	9	Bangkonol	23	1150	34.5	92	115	
	10	Tegalongok	10	500	15	40	50	
	11	Pasirjaksa	29	1450	43.5	116	145	
	12	Pasirkarag	36	1800	54	144	180	
		Total	**397**	**19850**	**595.5**	**1588**	**1985**	**830**

Kecamatan	Desa		Jumlah RTM	Ayam (ekor)	Kangkung (kg)	Pepaya (batang)	Manggis (batang)	Kelapa Dalam (batang)
Cipeucang	1	Cikadueun	47	2350	70.5	188	235	-
	2	Kadugadung	25	1250	37.5	100	125	-
	3	Palanyar	2	100	3	8	10	-
	4	Curugbarang	85	4250	127.5	340	425	-
	5	Kalang-gunung	4	200	6	16	20	-
	6	Baturanjang	84	4200	126	336	420	-
	7	Koncang	72	3600	108	288	360	-
	8	Parumasan	68	3400	102	272	340	-
	9	Pasireurih	274	13700	411	1096	1370	-
	10	Pasirmae	111	5550	166.5	444	555	-
		Total	**772**	**38600**	**1158**	**3088**	**3860**	-
		Total Seluruhnya	**2,254**	**112,700**	**3381**	**9016**	**11270**	**3000**

Realisasi penyaluran bantuan kegiatan Bekerja dapat dilihat pada tabel 54.

Tabel 54. Realisasi penyaluran bantuan Program BEKERJA Provinsi Banten

Jenis bantuan	Target	Realisasi		Kekurangan	
		Jumlah	%	Jumlah	%
BKP					
KRPL di lokasi Bekerja	6 kelompok	6	100	0	0
Ditjen PSP:					
Kandang	2.254	2.254	100	0	0
BIB Lembang-Ditjen PKH:					
- Ayam	85.000	85.000	100	0	0
- Pakan	510.000	510.000	100	0	0
- Obat	1.700	1.700	100	0	0
Ditjen Hortikultura:					

Jenis bantuan	Target	Realisasi		Kekurangan	
		Jumlah	%	Jumlah	%
- Kangkung (kg) - Pupuk Organik (kg) - NPK (kg)	3.381 11.270 2.254	3.381 11.270 2.254	100 100 100	0 0 0	0 0 0
- Bibit pepaya (15-25 cm) - Pupuk organik (kg) - NPK (kg)	9.016 9.016 2.254	9.016 9.016 2.254	100 100 100	0 0 0	0 0 0
- Manggis (pohon) - Pupuk organik (kg) - NPK (kg)	11.270 6.762 6.762	11.270 6.762 6.762	100 100 100	0 0 0	0 0 0
Ditjen Perkebunan:					
- Kelapa Dalam - Pupuk (Kg)	3000 1500	3000 1500	100 100	0 0	0 0
***BPPSDMP*:**					
- Ayam umur 6-8 minggu, sdh divaksin - Pakan komplit produksi pabrikan	27.700	27.700	100	0	0

Perkembangan kegiatan sampai dengan akhir Desember 2018 lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 45 dan tabel 46.

Tabel 55. Perkembangan Kegiatan Bekerja berdasarkan pelaporan sampai dengan tanggal 27 Desember 2018

Bulan	Ayam (ekor)		Kangkung (%)	Pepaya (batang)	Manggis (batang)	Kelapa Dalam (batang)	Keterangan
	Hidup	Mati	Mati	Mati	Mati	Mati	
Okt 2018							
Minggu II	78.386	6.614		2.440	0	0	
Minggu III	74.778	3.608		309	0	0	

Bulan	Ayam (ekor)		Kangkung (%)	Pepaya (batang)	Manggis (batang)	Kelapa Dalam (batang)	Keterangan
	Hidup	Mati	Mati	Mati	Mati	Mati	
Minggu IV	67.411	7.367	10 – 20	902	0	0	
Nov 2018							
Minggu I	63.117	4.294	10 – 40	643	0	83	
Minggu II	60.431	2.686	5 – 35	353	0	0	
Minggu III	58.054	2.377	2– 30	179	0	0	
Minggu IV	84.111	1.643	2 – 20	737	20	0	Ada penambahan pengadaan ayam dari BPSDMP 27.700 ekor
Minggu V	81.798	2.313	2 – 50	509	0	0	
Des 2018							
Minggu I	78.967	2.831	10 – 20	113	0	0	
Minggu II	74.969	3.998	2 – 20	454	87	3	
Minggu III	70.922	4.047	2 – 30	64	87	0	
Minggu IV	69.428	1.494	2 - 20	128	88	0	
Total	**69.428 (61,60%)**	**43.273 (38,40%)**		**6.831 (75,77%)**	**282 (2,50%)**	**86 (2,9%)**	

Tabel 56. Hasil Produksi Bantuan Kegiatan Bekerja berdasarkan pelaporan sampai dengan tanggal 27 Desember 2018

Produksi Kangkung	Produksi Telur	Anak Ayam
15.223 Kg	1.296 butir	63 ekor
Rp 76.115.000	Rp 3.888.000	

Keterangan:
- Harga kangkung Rp 5000/kg
- Harga telur Rp 3000/butir

5.4. STABILISASI HARGA DAN PASOKAN MENJELANG HBKN

Pemantauan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Pangan Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.

Dalam rangka mengamankan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2019, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian beserta 8 (delapan) Provinsi yang mayoritas masyarakatnya merayakan HBKN Natal, dan daerah wisata yaitu: Kalimantan Barat, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Maluku melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) pemantauan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) natal dan Tahun Baru 2019. Tujuan dilakukannya Rakor pemantauan adalah: (1) Antisipasi potensi fluktuasi pasokan dan harga pangan menjelang HBKN dari pemerintah pusat dan daerah; (2) Penanganan secara cepat dan strategis atas permasalahan yang ditemukan dilapangan; (3) Menciptakan sinergitas antarlembaga dan *stakeholders* dalam pengamanan pasokan dan harga pangan pokok dan strategis, terutama menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru.

5.4.1 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Rakor pemantauan di Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2018, di Kantor Dinas Pangan Provinsi Kalimantan Barat. Rakor dipimpin oleh Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan BKP dan dihadiri oleh Kepala Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Satgas

Pangan Polda Kalimantan Barat yang diwakili Kasubditreskrimsus, Kepala BULOG Divre Kalimantan Barat, serta perwakilan dari Dinas Perdagangan. Setelah Rakor dilakukan pemantauan ke Pasar Flamboyan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Hasil pemantauan memperlihatkan bahwa kondisi ketersediaan pasokan bahan pangan strategis relatif cukup dengan harga stabil. Secara rinci kondisi harga pangan di Pasar Flamboyan sebagai berikut: (1) Beras jenis premium dijual dengan harga Rp 12.500 – 13.500/kg, beras medium Rp 11.000 – 12.000/kg, beras termurah Rp 9.500 – 10.000/kg. Sesuai ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras di wilayah Kalimantan Barat untuk jenis beras medium Rp. 9.950 dan premium Rp. 13.300/kg; (2) Daging ayam ras dijual dengan harga Rp. 25.000 – 27.000/kg, untuk Harga Acuan Pemerintah (HAP) daging ayam di wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah Rp.34.000/kg; (3) Cabai rawit merah dijual dengan harga Rp 38.000/kg, harga cabai merah keriting sekitar Rp 35.000 – 38.000/kg, sedang cabai besar hijau tercatat Rp 30.000/kg dengan kondisi pasokan stabil; (4) Harga bawang merah dijual dengan harga Rp 25.000 – 27.000/kg, sedangkan HAP bawang merah Rp. 32.000/kg; (5) Bawang putih bonggol stabil dijual dengan harga Rp 16.000/kg; (6) Daging sapi lokal segar harga stabil dikisaran Rp 125.000/kg; (7) Telur ayam ras dijual dengan harga Rp 24.000/kg, sedangkan HAP telur sebesar Rp 23.000/kg; (8) Minyak goreng curah harga stabil dengan harga Rp 9.500/kg; (9) Gula pasir lokal stabil Rp 10.500/kg. Harga minyak goreng curah dan gula pasir lokal jauh lebih rendah dari HAP yaitu masing-masing Rp 11.000/kg dan Rp 12.500/kg. Rendahnya harga kedua komoditas tersebut antara lain dipengaruhi ketersediaan dan pasokan yang cukup baik di gudang Bulog maupun pasar.

Kepala BULOG Divre Kalimantan Barat menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2018 stok di Bulog dan *suplay* ke pasar untuk komoditas gula pasir dan minyak goreng ke Provinsi Kalimantan Barat sangat banyak, sehingga aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Mencermati kondisi harga pangan tersebut, secara umum pasokan dan harga di Kota Pontianak aman dan stabil. Hanya komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras yang terus diantisipasi supaya tidak terjadi gejolak.

Selama masa HBKN Natal dan Tahun Baru 2019, Satgas Pangan berperan aktif melakukan pemantauan pasokan dan harga pangan secara rutin di tingkat produsen maupun konsumen (pasar)

.

5.4.2 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Rakor pemantauan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2018, di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT. Rakor di pimpin oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTT dan dihadiri oleh Kepala Dinas Perdagangan, Dinas Peternakan, Kepala Divre Bulog, Satgas Pangan, perwakilan PD. Pasar NTT, dan perwakilan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian selaku Tim Nasional pengawal HBKN Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT menyatakan bahwa secara umum ketersediaan pasokan dan harga komoditas pangan di Provinsi NTT relatif aman dan terkendali. Berikut beberapa harga komoditas pangan strategis: (1) Beras di kisaran Rp. 9.000,-/Kg – Rp. 11.000,-/Kg; (2) cabai merah keriting Rp. 30.000,-/Kg; (3) cabai merah besar Rp. 30.000,-/Kg; (4) cabai rawit merah Rp. 40.000,-/Kg; (5) bawang merah Rp. 15.000,-/Kg – Rp. 20.000,-/Kg; (6) bawang putih Rp. 22.000,-/Kg; (7) minyak goreng curah Rp. 12.500,-/liter; (8) gula pasir curah Rp. 12.000,-/Kg; dan (9) daging sapi murni Rp. 90.000,-/Kg.

Beberapa komoditas yang sedikit mengalami kenaikan adalah: daging ayam ras dari Rp 26.000,-/Kg menjadi Rp 37.500,-/Kg, dan telur ayam ras berkisar ras Rp 27.000,-/Kg – Rp 33.000,-/Kg.

5.4.3 PROVINSI SULAWESI UTARA

Rakor pemantauan di Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2018, di kantor Gubernur Sulawesi Utara, Rakor dipimpin oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sulawesi Utara. Hadir dari BKP adalah Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Pada kesempatan tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra menyampaikan bahwa ketersediaan sembilan bahan pokok dan harga pangan di Provinsi Sulawesi Utara masih aman dan terkendali. Pemerintah daerah telah mengantisipasi apabila ada kenaikan yang tidak wajar, atau terdapat gejala kekurangan stok, pemerintah akan mengumpulkan para distributor pangan untuk mencari solusinya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan menyampaikan bahwa data ketersediaan pangan pokok secara nasional periode Desember 2018 cukup untuk memenuhi kebutuhan, bahkan surplus. Misalnya beras surplus 3,8 juta ton; minyak goreng surplus 2,17 juta ton; bawang merah surplus 15 ribu ton; cabai merah surplus 8 ribu ton; cabai

rawit 9 ribu ton; daging ayam ras surplus 335 ribu ton; telur ayam ras surplus 77 ribu ton. Ketersedian pangan tersebut, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang HBKN Natal 2018 dan tahun baru 2019.

Untuk mengetahui kondisi riil di lapangan dilakukan pemantauan ketersediaan dan harga pangan di Pasar Bersehati, Manado. pada tanggal 21 Desember 2018.

Hasil pemantauan dipasar, diperoleh hasil bahwa komoditas pangan yang mengalami kenaikan adalah telur ayam ras, daging ayam. Harga terlur ayam ras mencapai Rp. 26.000 – 28.000 per kilogram sementara harga acuan pemerintah sebesar Rp. 23.000 per kilogram. Daging ayam sedikit mengalami kenaikan dari harga Rp. 33.000 menjadi Rp. 35.000 per kilogram. sedangkan harga beras cukup bervariasi tergantung jenis dan mutunya.

Terhadap kenaikan harga beberapa pangan pokok menjelang natal dan tahun baru, masyarakat masih memakluminya akibat adanya peningkatan permintaan, namun demikian pemerintah tetap harus dapat mengendalikan, untuk menghindari terjadinya lonjakan harga yang sangat tinggi. Apabila kenaikan harga sudah melampaui batas toleransi, pemerintah akan segera mengambil melakukan operasi pasar, seperti yang dilakukan di kota lain di Indonesia. Menurut Direktur Utama Pasar Bersehati, kenaikan harga juga dipengaruhi oleh faktor cuaca. Musim hujan berpengaruh terhadap kelancaran distribusi.

5.4.4 PROVINSI JAWA TENGAH

Rakor pemantauan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2018, di Semarang – Jawa Tengah, dipimpin oleh Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan BKP dan dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Bulog Divre Jawa Tengah, dan Asosiasi Peternak dan Petelur Jawa Tengah, serta Dinas Pangan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan menyampaikan bahwa secara nasional, ketersediaan pangan dan pasokan di pasar cukup aman, dan harga terkendali, termasuk di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut, juga ditegaskan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah bahwa kondisi ketersediaan dan harga pangan di wilayah Provinsi Jawa Tengah cenderung stabil. Ketersediaaan pangan di wilayah Jateng untuk hampir semua komoditas pangan strategis dalam kondisi surplus, di antaranya beras, jagung, minyak goreng, bawang merah, cabai, daging sapi, daging ayam, dan telur ayam.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengadaan Bulog Divre, menyampaikan komitmen Bulog dalam menjaga ketersediaan dan stabilisasi kebutuhan pangan pokok di Jawa tengah melalui pengadaan gabah/beras dan pangan pokok lainnya serta melakukan operasi pasar murah.

Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah sentra produksi telur ayam ras terbesar kedua setelah Jawa Timur. Ketua Asosiasi Peternak dan Petelur Jawa Tengah menyampaikan bahwa stok telur di Jawa Tengah dalam kondisi aman. Dengan populasi ayam petelur produktif sebanyak 22,1 juta ekor, produksi telur ayam ras mencapai 1.214 ton per hari di Jawa Tengah, dengan surplus per hari mencapai 260 ton.

Untuk memastikan pasokan dan harga pangan di wilayah Jawa Tengah, BKP bersama instansi terkait melakukan pemantauan ke Pasar Johar Semarang. Secara umum pasokan dan harga stabil namun ada sedikit kenaikan dari waktu sebelumnya untuk komoditas tertentu, seperti telur Rp 24.000 – 24.500/kg, sedikit diatas HAP (Rp 23.000/kg), dan daging ayam Rp. 34.000/kg tapi masih dalam batas HAP (Rp 34.000/kg), dan cabai rawit merah Rp. 34.000 – 35.000/kg. Bawang merah dan cabai jenis lainnya, harganya relatif rendah. Bawang merah Rp 20.000 – 22.000/kg jauh di bawah HAP (Rp. 32.000/kg), cabe merah keriting Rp. 16.000 – 17.000/kg, cabe merah besar Rp.21.000/kg dan bawang putih Rp 20.000/kg.

Pedagang grosir cabai di Pasar Johar mengatakan bahwa cabai rawit merah biasa mengalami kenaikan harga pada akhir tahun, hal ini dikarena adanya peningkatan permintaan. Namun, kenaikan harga cabai rawit merah menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru 2018 masih wajar. Apabila dibandingkan dengan kenaikan harga pada tahun 2017, kenaikan harga yang terjadi pada tahun 2018 masih relatif lebih rendah.

5.5. PERINGATAN HARI PANGAN SEDUNIA (HPS) XXXVIII TAHUN 2018

BKP Kementerian Pertanian berperan aktif pada peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke XXXVIII Tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 18 – 21 Oktober 2018, di Kota Banjarbaru (Kompleks Perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan) dan Kabupaten Barito Kuala (Desa Jejangkit Muara, Kecamatan Jejangkit), Provinsi Kalimantan Selatan. Tema internasional peringatan HPS Tahun 2018 ini adalah "*Our Actions Are Our Future*: A # *Zero Hunger World by 2030 is Possible*". Tema ini dipilih untuk mengingatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan berbagai sumber pangan serta penyediaan pangan yang berkualitas dan berkelanjutan sehingga kemiskinan serta kekurangan pangan dan gizi di dunia dapat terentaskan pada tahun 2030. Sedangkan tema peringatan HPS

XXXVIII di Indonesia adalah “Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Rawa Lebak Dan Pasang Surut Menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045”. Beberapa hal yang mendasari pemilihan tema tersebut adalah : (a) Indonesia adalah bangsa yang mandiri dan merdeka, harusmemiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan berdaulat pangan; (b) Potensi Indonesia di bidang pertanian sangat besar untuk mewujudkan kedaulatan pangan; (c) Dalam upaya mewujudkan ketersediaan pangan yang berkualitas dan berkelanjutan pengembangan potensi sumberdaya lahan rawa (lebak dan pasang surut) sangat memungkinkan, mengingat potensi rawa di Indonesia yang besar dan belum tertangani secara optimal.

Rangkaian Kegiatan HPS XXXVIII Tahun 2018 meliputi: Acara Puncak (Pembukaan dan Penutupan); Gelar Inovasi Teknologi; Pameran Pembangunan; Pemecahan Rekor MURI: “Isi Piringku” oleh 2018 orang Ibu Hamil; Lomba Cipta Menu dan Demo Masakan Berbahan Pangan Lokal; Tour Diplomatik; Panen Raya Padi Rawa; serta Seminar Nasional.

Untuk kegiatan pameran, Kementerian Pertanian ikut serta berpartisipasi menampilkan kegiatan dan program sebanyak 17 booth, dan 3 booth diantaranya digunakan oleh BKP yang digunakan untuk : (1) Menggelar Demo Olahan Pangan Nusantara Ala Chef; (2) Menyajikan mini KRPL di stand BKP; (3) Display aneka pangan olahan nusantara; (4) Membagikan *leaflet*, poster, buku, komik dan materi promosi lainnya seperti tempat minum, dompet, souvenir, pulpen, tempat makan, yang menarik sebagai souvenir pengunjung stand BKP; (5) Menyediakan icip – icip gratis olahan pangan lokal non beras non terigu. Pameran dibuka pada jam 09.00 – 20.00 WITA. Antusias pengunjung pameran sangat tinggi, terlihat dengan banyaknya pengunjung yang datang setiap harinya dan untuk anak – anak sekolah diberikan waktu khusus untuk berkunjung ke pameran untuk melihat hasil-hasil pembangunan pertanian Indonesia.

Peringatan HPS juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan lomba diantaranya: (1) Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman Berbasis Sumber Daya Lokal Tingkat Nasional; (2) Lomba Menggambar untuk anak SMP Kab/Kota Banjarbaru; (3) Lomba Mewarnai Gambar Sayur, Buah, dan Florikultura; dan (4) Lomba Mengukir Buah.

1. Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman Berbasis Sumber Daya Lokal Tingkat Nasional Tahun 2018

   Lomba Cipta Menu dimaksudkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penerapan menu yang beragam, bergizi seimbang dan aman, sehingga menjadi budaya / *lifestyle* masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Lomba diikuti oleh 34 peserta Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)

kabupaten/kota yang berasal dari 34 provinsi. Peserta menyajikan kreasi menu lengkap satu hari berbahan baku pangan lokal non beras dan terigu, yang sesuai dengan prinsip B2SA dan mudah diaplikasikan.

Tahun 2018 untuk lebih meningkatkan promosi produk olahan pangan lokal, peserta lomba dari masing-masing provinsi juga diwajibkan menampilkan 2-3 jenis produk olahan pangan yang menjadi unggulan daerah dan bernilai komersial. Produk tersebut memiliki tampilan dan kemasan menarik, cita rasa enak, dan harga yang bersaing. Aspek ini menjadi salah satu kriteria penilaian untuk kategori khusus, yaitu Kategori Pangan Lokal Olahan Bernilai Komersial.

Tim juri yang terlibat dalam penilaian lomba mewakili unsur-unsur, antara lain: ahli gizi dari IPB, pesohor boga, TP PKK Pusat, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dan Media Massa “Majalah Femina”.

Berdasarkan hasil penilaian, pemenang lomba adalah : Provinsi Jawa Timur (Juara I), Provinsi Jawa Barat (Juara II), dan Provinsi Jawa Tengah (Juara III). Selain itu, juga terdapat penghargaan khusus, meliputi: (a) Penghargaan Pangan Lokal Olahan Bernilai Komersial; (b) Penghargaan Kreasi Menu Aplikatif dan Favorit Tim Juri; (c) Penghargaan Kreasi Menu Beragam dan Berimbang; dan (d) Penghargaan Kreasi Cita Rasa dan Penampilan.

2. Lomba Menggambar

   Tema lomba menggambar adalah “Manfaatkan Pekarangan sebagai Sumber Pangan Keluarga”, diikuti oleh 150 siswa/siswi dari Kabupaten Banjarbaru dan Kota Banjarbaru. Tujuan diadakannya lomba adalah untuk memperkenalkan kepada anak-anak sekolah tentang diversifikasi pangan dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan dan mencintai pangan lokal untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarga. Pemenang lomba mewarnai dipilih 6 (enam) terbaik dari seluruh peserta.

3. Lomba Mewarnai Gambar Sayur, Buah, dan Florikultura

   Lomba Mewarnai Gambar Sayur, Buah, dan Florikultura diikuti oleh anak-anak TK/PAUD Kota Banjarmasin dan Banjarbaru yang tergabung dalam sanggar lukis Saka Manajemen di daerah Banjarbaru. Lomba ini bertujuan untuk mengenalkan aneka ragam sayur, buah, dan florikultura kepada anak usia dini.

4. Lomba Mengukir Buah

   Lomba mengukir buah diikuti oleh 30 orang yang berasal dari peserta pameran dan

masyarakat umum ini dimaksudkan untuk mengasah ketrampilan peserta lomba dalam membuat kreasi indah buah nusantara.

5. Demo Olahan Pangan Nusantara Ala Chef

Dalam rangka mempromosikan olahan pangan lokal nusantara kepada pengunjung pameran dan masyarakat umum selama peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-38 di Kalimantan Selatan, dihadirkan para chef untuk melakukan demo mengolah/memasak pangan nusantara yang bertempat di Stand Pameran Badan Ketahanan Pangan. Kegiatan ini dimaksudkan dapat memperluas perpektif masyarakat akan potensi pangan lokal nusantara yang dapat diolah menjadi aneka ragam menu masakan yang menarik.

Demo masak pada hari pertama oleh Chef Agus (dari Hotel Novotel Riau) melakukan demo aneka olahan mie sagu. Pada hari kedua dan ketiga menghadirkan Chef dari Restoran dan hotel di Banjarmasin (Agus Sasirangan dan Agus) yang mempraktekkan aneka olahan pangan lokal, diantaranya berbahan baku pasta ubi ungu dan labu kuning. Masyarakat khususnya pengunjung pameran sangat antusias untuk mencicipi hasil olahan pangan lokal nusantara tersebut. Melalui demo masak ini diharapkan dapat mendorong berkembangnya beragam jenis pangan lokal Indonesia.

5.6. GELAR PANGAN NUSANTARA (GPN)

Kegiatan GPN dilaksanakan selama tiga hari, yaitu pada Hari Jumat – Minggu, tanggal 27 – 29 Juli 2018 bertempat di Kartika Expo, Balai Kartini, Jakarta.

Secara rinci, ruang lingkup rangkaian kegiatan GPN adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan

Pembukaan acara GPN tahun 2018 dilaksanakan pada Jumat, 27 Juli 2018 pukul 09.00 – 11.00 WIB. Acara dihadiri oleh sekitar 500 undangan yang terdiri dari perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, eselon I lingkup Kementerian Pertanian, eselon II dan III lingkup Badan Ketahanan Pangan, Pokja Dewan Ketahanan Pangan, kepala Dinas/Instansi yang menangani ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota, perwakilan organisasi masyarakat/asosiasi, swasta dan peserta pameran.

Acara dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian mewakili Menteri Pertanian RI, ditandai dengan pengguntingan pita Gunungan Pangan Lokal dan didampingi oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kepala Pusat Penganekaragamaan Konsumsi dan Keamanan Pangan, serta ketua umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI). Gunungan pangan lokal menampilkan aneka ragam snack yang terbuat dari bahan pangan lokal nusantara seperti jagung, talas serta umbi-umbian lainya. Gunungan ini sekaligus mencerminkan kekayaan sumberdaya pangan Indonesia yang berpotensi mendukung

ketahanan pangan nasional.

Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa penganekaragaman pangan dapat mengambil peranan pada sisi produksi, konsumsi maupun pengembangan bisnis. Dari sisi produksi, penganekaragaman pangan dapat mendorong produksi aneka ragam komoditas pangan. Dari sisi konsumsi, penganekaragaman pangan berperan dalam perbaikan kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan dari meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH). Sementara dari sisi pengembangan bisnis, penganekaragaman pangan dapat memberikan insentif bagi pegembangan rantai bisnis pangan yang lebih beragam. Penganekaragaman pangan tidak hanya fokus pada penganekaragaman sumber karbohidrat, tetapi juga sumber protein, vitamin dan mineral. Oleh karena itu penganekaragaman pangan dapat dilakukan secara horizontal melalui pemanfaatan aneka jenis komoditas, maupun secara vertikal melalui variasi pengolahan. Sekretaris Jenderal secara khusus menyampaikan harapan agar GPN 2018 dapat mengungkit pamor pangan nusantara sehingga berdaya saing global dan dapat meningkatkan kerjasama antara petani, dunia usaha dan lembaga penelitian.

Dalam pembukaan juga dilakukan serangkaian acara yaitu : (a) penyampaian *keynote speech* oleh Gubernur Riau yang diwakili oleh Bupati Kepulauan Meranti dan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat – Kementerian Kesehatan yang diwakili oleh Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; (b) penandatanganan Nota Kesepahaman Pengembangan Pangan Lokal antara Kepala Badan Ketahanan Pangan dengan Ketua Forum Komunikasi Kabupaten Penghasil Sagu Seluruh Indonesia (Fokus Kapassindo), Ketua Masyarakat Singkong Indonesia (MSI), Ketua Asosiasi Petani Organik Bumi Pasundan (Asetna Bunda), Ketua umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) dan Ketua umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI); dan (c) Gerakan Cinta Makanan Nusantara dengan menikmati sajian pangan lokal nusantara 34 provinsi.

Pada akhir acara, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian bersama-sama dengan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan undangan lainnya melakukan kunjungan ke stand pameran gelar pangan nusantara.

2. Penandatanganan Nota Kesepahaman Pemanfaatan dan Pengembangan Pangan Lokal

   Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Pemanfaatan dan Pengembangan Pangan Lokal Nusantara dalam mendukung Percepatan Penganekaragaman Pangan, dilakukan antara Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian dengan : (1) Forum Komunikasi Kabupaten Penghasil Sagu Seluruh Indonesia (Fokus Kapassindo); (2) Masyarakat Singkong Indonesia (MSI); (3) Asosiasi Petani Organik Bumi Pasundan (Asetna Bunda); (4) Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI); dan (5) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI). Nota kesepahaman ditandatangani oleh Kepala/Ketua masing-masing Instansi/Asosiasi yang terlibat dengan disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian pada saat acara Pembukaan GPN.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman adalah:
(a) penyediaan pangan lokal;
(b) pengolahan dan pemanfaatan produk pangan lokal; dan
(c) promosi keunggulan pangan lokal.
Nota kesepahaman akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh masing-masing pihak.

3. Gerakan Cinta Makanan Nusantara

Gerakan Cinta Makanan Nusantara dilaksanakan pada Jumat, 27 Juli 2018 di lokasi GPN sebagai bagian dari rangkaian acara pembukaan. Gerakan ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap pangan lokal yang bergizi, khususnya pada generasi muda sehingga dapat meningkatkan kualitas pangan mereka untuk menjadi generasi yang tangguh dan berkualitas di masa depan.
Gerakan Cinta Makanan Nusantara menampilkan ragam jenis olahan pangan lokal dari 34 provinsi di Indonesia, berbahan baku sagu, jelai, tepung mocaf, jagung, talas, singkong, ubi jalar, pisang, dan sebagainya.
Gerakan Cinta Makanan dipimpin oleh Sekretaris Badan Ketahanan Pangan mewakili Kepala Badan Ketahanan Pangan dan diikuti oleh siswa siswi Sekolah Menengah Pertama sebagai perwakilan dari Generasi Muda Indonesia, tamu undangan pembukaan, serta peserta dan pengunjung pameran GPN.
Hasil penting yang diharapkan dari mengonsumsi pangan lokal nusantara selain meningkatkan kualitas konsumsi pangan adalah:

a. Kebutuhan bahan baku seperti singkong, ubi jalar, jagung, pisang, sagu dan lain-lain berasal dari produksi dalam negeri semakin meningkat. Dengan begitu, penghasilan petani akan meningkat yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan petani.
b. Usaha olahan dan kuliner pangan lokal nusantara semakin berkembang, karena mampu memberikan *multiplyer effec*t pada aktivitas ekonomi lainnya seperti penyerapan tenaga kerja sekaligus menggerakkan ekonomi di pedesaan.
c. Menghemat devisa negara melalui substitusi penggunaan tepung-tepungan yang berbahan baku dari impor.

4. Temu Bisnis

Temu Bisnis yang dilaksanakan pada hari Jumat, 27 Juli 2018 pukul 15.00 WIB – selesai dimaksudkan untuk membangun sinergitas diantara sektor hilir (industri pengolahan) dengan sektor hulu (produsen) agar pasokan bahan baku lebih terjamin dan industri pengolah dapat merencanakan produksi dengan kualitas yang lebih baik. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan promosi pangan lokal nusantara, termasuk tergalinya peluang serta membangun jaringan bisnis dalam rangka memperkuat kerja sama antara produsen dan pelaku usaha pengembang pangan lokal nusantara.
Selain itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk : (a) sarana mediasi antara produsen dan

pelaku usaha pangan lokal; (b) sarana untuk mendapatkan informasi ketersediaan bahan baku dan kebutuhan pasar/industri pangan lokal; dan (c) membangun forum kerja sama bisnis pangan lokal antara produsen dan pelaku usaha.

Temu bisnis dilakukan dengan metode dua arah ("*two way*") yang berlangsung dalam "*table top*" antara produsen dengan pelaku usaha pangan lokal. Pihak produsen memperkenalkan dan menawarkan bahan baku pangan lokal, dilanjutkan dengan komunikasi bisnis.

Adapun pelaku temu bisnis dan materi paparan pada saat temu bisnis adalah sebagai berikut :

a. Produsen pangan lokal memaparkan mengenai "Potensi dan Prospek Ubi Kayu sebagai Bahan Baku Aneka Pangan Lokal Berkesinambungan dan Ramah Lingkungan" oleh Suharyo Husen (Ketua Umum Masyarakat Singkong Indonesia);
b. UKM Pangan Lokal memaparkan keberhasilan kegiatan dan usaha yang telah dilakukan oleh Gapoktan Wargi Panggupay, oleh Ulus Pirmawan;
c. Komunitas Singkong Bogor sebagai pelaku usaha pengembang pangan lokal berbahan dasar singkong oleh Abah Gozali;
d. Ikaboga (Ikatan Ahli Boga) yang diwakili oleh Nanda cake yaitu pelaku usaha cake/kue yang memanfaatkan pangan lokal yaitu tepung ganyong, oleh Nanda Kartika Sari;
e. Arum Ayu sebagai pelaku usaha roti/kue mengolah pangan berbasis umbi sejak 2005, olahan menggunakan tepung Nusantara, oleh Hernawan Eddy.

Sebagai pihak pengguna, dihadirkan IWAPI dan GAPMMI untuk melakukan penjajakan peluang kerja sama dengan pelaku bisnis pangan lokal/produsen maupun konsumen pengolah atau pengguna pangan lokal. Selain itu dalam temu bisnis juga telah terjadi pertukaran informasi, promosi serta terjalin kemitraan bisnis dan pasar.

5. Talk Show

Talk show interaktif dengan tema "Memperkuat Daya Saing Pangan Lokal Nusantara" dilaksanakan pada Sabtu, 28 Juli 2018 pukul 10.00 sampai selesai di Balai Kartini. Pembicara dalam talk show adalah : 1) Adhi Siswaya Lukman (Ketua Umum GAPMMI) dengan topik "Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal Nusantara"; 2) F.G. Winarno (Ahli Teknologi Pangan) dengan topik "Teknologi Pengolahan Pangan Lokal dalam Meningkatkan Nilai tambah Produk"; dan 3) Kafi Kurnia (Ahli Pemasaran) dengan topik "Pemasaran Pangan Lokal yang Efektif Menuju Pasar Global". Moderator dalam *talk show* adalah Valerina Daniel. *Talk show* dihadiri oleh sekitar 250 orang yang terdiri dari akademisi, mahasiswa, pengusaha boga, peserta pameran, dan masyarakat umum.

Butir-butir penting hasil informasi dan diskusi dalam talk show adalah sebagai berikut :

a. Di Indonesia sudah banyak terdapat industri makanan jadi, namun bahan bakunya masih tergantung dengan luar negeri. Untuk itu, perlu penyediaan

pangan yang cukup dan secara bersama-sama mensosialisasikan serta mengembangkan teknologi agar pangan lokal bisa dikenal di lingkungan luas.

b. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah : 1) memanfaatkan pangan lokal sebagai pilihan dalam percepatan penganekaragaman pangan; 2) menyusun payung hukum-regulasi; 3) menumbuhkan industri hulu-intermediate sebagai bahan baku hilir; 4) *clustering logistic*; 5) insentif-disinsentif; 6) kolaborasi hulu-hilir, serta 7) komitmen dan pengawasan yang kuat terhadap pemanfaatan lahan.

c. Dalam rangka meningkatkan daya saing antar industri pangan, harus ada sinergi dari pemerintah pusat dan daerah melalui : 1) upaya semi proses di industri yang ada di luar Pulau Jawa dan proses akhir oleh industri di Pulau Jawa, 2) upaya untuk menyebarkan pusat-pusat industri di seluruh Indonesia agar terjadi pemerataan, serta 3) penyusunan strategi dan fokus pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi pangan lokal, serta aktif mempromosikan pangan lokal kepada pengguna/masyarakat luas dari aspek kesehatan dan ekonomi.

d. Melalui pemanfaatan ilmu pangan dan teknologi pangan dapat dikembangkan teknologi yang dapat menciptakan makanan yang relatif enak, dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada disekitar kita, seperti teknologi memanen air, menciptakan tepung Kelor (Moringa) sebagai salah satu *super food* di dunia, menciptakan tepung serangga (ulat sagu, belalang, dll) yang memiliki kandungan gizi yang sangat baik.

e. Intervensi gizi juga sangat penting dikembangkan dengan menggunakan *new idea* dan *new source* agar berkembang. Banyak sumber pangan yang bisa diambil sebagai alternatif untuk mengembangkan pangan lokal.

f. Daya saing industri dan kemampuan SDM-nya perlu ditingkatkan, sehingga dapat menciptakan investasi dan kreatifitas agar bisa bersaing di tingkat global.

g. Kelemahan para industri maupun pelaku usaha kecil-menengah di Indonesia adalah produk-produk yang dihasilkan sering kali tidak sustainable (berkelanjutan), kurang memiliki kepercayaan diri, kurangnya inovatif dan kreatifitas *(everyday innovation, everyday creatif)*, kurangnya pengembangan teknologi kemasan yang lebih menarik. Oleh karena itu perlu dicari terobosan yang baru sehingga mempunyai daya saing pada tataran internasional.

h. Upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendorong pangan lokal agar bisa diakui dunia adalah menerapkan hak paten terhadap produk pangan, menciptakan branding untuk pangan lokal, dan standarisasi produk yang akan diekspor.

6. Pameran dan Bazar

Pameran dan bazar dilaksanakan selama kegiatan berlangsung, yaitu tanggal 27 – 29 Juli 2018 pukul 10.00 – 20.00 WIB. Peserta pameran berjumlah sekitar 79

instansi/perusahaan/UKM yang menempati 90 stand yaitu :

1. Eselon I lingkup Kementerian Pertanian (Sekretariat Jenderal, Badan Ketahanan Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian) yang tergabung dalam Paviliun Kementan;
2. Kementerian / Lembaga terkait Pangan :
   - Kementerian Kelautan dan Perikanan
   - Perum BULOG
3. Dinas yang menangani Pangan/Ketahanan Pangan Provinsi dari 34 Provinsi;
4. Dinas yang menangani Pangan/Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota : Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Kabupaten Melawi, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buru;
5. Perusahaan swasta;
6. UKM;
7. Organisasi profesi (GAPMMI, IWAPI, Dharma Wanita).

Dalam lokasi pameran juga terdapat bazar pangan murah berkualitas dari Toko Tani Indonesia (TTI), yang menjual komoditas pangan strategis. Pada lokasi TTI tersebut juga disediakan pojok konsultasi sebagai wahana untuk berdiskusi antara penyedia barang dan pengguna. Selain itu, dalam pameran juga tersedia 13 stand aneka kuliner.

7. Pojok Icip-icip

Pojok icip-icip merupakan sarana untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang aneka ragam olahan pangan lokal nusantara non beras non terigu, sehingga diharapkan masyarakat mengenal, dan selanjutnya mencintai aneka makanan berbasis pangan lokal. Pengembangan pangan lokal diharapkan mampu mengurangi konsumsi terigu dan meningkatkan citra pangan lokal di masyarakat, karena selama ini pangan lokal khususnya umbi-umbian sebagai makanan kelas dua, sehingga kurang diminati. Padahal umbi-umbian seperti garut, singkong, ganyong, gembili dan ubi jalar, dikenal sebagai pangan fungsional, karena memiliki kandungan *prebiotic* untuk menjaga kesehatan saluran cerna dan meningkatkan sistem imun.

Pojok icip-icip digelar setiap hari selama penyelenggaraan GPN, yaitu pada tanggal 27 – 29 Juli 2018 di lokasi GPN berisi sajian menu khas daerah dalam bentuk snack, minuman, ataupun kudapan. Dalam satu hari, 10 – 11 provinsi mengisi pojok icip-icip dan pengunjung sangat mengapresasi dan antusias dengan adanya pojok icip-icip yang ditunjukkan dengan banyaknya antrian pengunjung yang ingin menyicipi aneka olahan pangan lokal nusantara tersebut serta pertanyaan aktif pengunjung. Selain itu para pengunjung juga menyatakan bahwa olahan pangan lokal citarasanya juga nikmat.

Berikut menu pangan lokal nusantara yang disajikan oleh masing-masing provinsi:

Provinsi	Menu	Bahan Baku
Jumat, 27 Juli 2018		
Sulawesi Tengah	• pia kelor • srikaya jagung • tetu singkong • tart pisang • bola-bola ubi jalar • lapis singkong	ubi kayu, ubi jalar, singkong, jagung, pisang, kelor
Kalimantan Tengah	• nasi Kupu • tempuyak goreng • ikan seluang dan lais goreng • singkong dan ubi ungu rebus • jus ubi ungu • ikan patin goreng	ubi kayu, ubi jalar, ikan patin, ikan seluang
Bali	• brownies mocaf • kue semprit sagu • kue bolu pandan mocaf • ayam betutu	tepung mocaf, tepung sagu, ayam
Maluku	• talam sagu • pisang kenari • kue brundel	sagu, kenari
Lampung	• bakso ikan blue marlin • mie singkong	ubi kayu, ikan blue marlin
Jambi	• brownies kentang • lapis labu	kentang, labu kuning
Aceh	• kue timpan ubi jalar • puding sawo	ubi jalar, sawo
Kalimantan Timur	• bubur kacang jelay • brownies kering mocaf	jelay, tepung mocaf
Bengkulu	• mie cam koe ha	ubi jalar kuning dan ungu
D.I Yogyakarta	• mie goreng singkong	ubi kayu
Kep. Bangka Belitung	• pempek singkong • brownies singkong • pantiaw cassava	ubi kayu, tepung cassava
Sumatera Barat	aneka snack berbahan baku tepung Mocaf	tepung mocaf
Sumatera Selatan	• brownies tiwul • chicken tiwul	tiwul
Nusa Tenggara Timur	• oreo putak • brownies putak • puding kelor • jus siwalan (lontar) dan kelor • jagung bose • daging sei • sambal luat	putak, kelor, jagung
Sabtu, 28 Juli 2018		

Provinsi	Menu	Bahan Baku
Jawa Barat	bolu tape	tape singkong
Riau	lontong sagu + sayur	sagu
Sulawesi Utara	• pisang goroho santan + sambal roa • buah jeruk dan jambu biji	pisang, ikan roa
Gorontalo	• binthe biluhuta • Ilabulo • perkedel nike • jagung pulut rebus + gami • diniyohu	jagung, ikan nike
Kalimantan Utara	• singkong jagung • sayur lawak cempedak • sambal tai minyak kepala ikan teri ambalat • nugget singkong • capit kepiting crispy	ubi kayu, jagung, cempedak
Sulawesi Selatan	• lawa udang • nanre lame (nasi singkong)	ubi kayu, udang
Papua Barat	menu papeda lengkap	
Kalimantan Barat	• kwetiaw sagu labu • bingka mocaf lidah buaya • oi keladi • talam ubi ungu durian • talam ubi rambat	sagu, ubi jalar, lidah buaya
Papua	menu lengkap (papeda, ikan kakap merah kuah kuning, sayur bunga papaya, ikan asar suwir, pepeda bungkus, ikan balado gabus sentani dan sambal)	sagu, ikan gabus, ikan kakap
Maluku Utara	kasbi panggang	ubi jalar
Sulawesi Barat	• jepa • ikan Baupiapi • tumis penja • sokklol lame ayu • bubur Jewawut	ubi kayu, jewawut, ikan
NTB	• urap bebele rumput laut • pelecing ayam • rarit Lombok • sayur lebui • pelecing kangkung • pare isi daging • nasi jagung singkong gobet	jagung ubi kayu, rumput laut, ayam, kangkung
Jawa Tengah	macaroni schootel jagung	tepung jagung
Banten	aneka snack (kue bugis ubi jalar ungu, brownies mocaf, bolu mocaf)	ubi jalar, tepung mocaf
Minggu, 29 Juli 2018		
Sulawesi Tenggara	menu lengkap (kambatu,	ubi kayu

Provinsi	Menu	Bahan Baku
	kasuami, kasuami pepe, kapusunosu, kaholeo)	
Kalimantan Selatan	ubi jalar kandangan	ubi jalar
Jawa Timur	aneka snack mocaf (brownies, bolu, kue pia)	tepung mocaf
DKI Jakarta	• selendang mayang • cendol jalejo	tepung jalejo
Kepulauan Riau	• aneka snack (talam mocaf, bolu mocaf) • otak-otak	tepung mocaf, ikan

8. Wisata Edukasi, *Group Tour*

   Wisata edukasi dan *group tour* dilaksanakan selama pameran, yaitu tanggal 27 – 29 Juli 2018. Wisata edukasi merupakan sarana belajar bagi mahasiswa/pelajar melalui kunjungan ke stand-stand pameran. Wisata edukasi terbagi dalam 6 *batch* dengan peserta sejumlah 304 orang dari 7 sekolah kejuruan di Jakarta, yaitu SMKN 33 Jakarta, Jakarta International Hotels School, SMKN 30, SMK Jayawisata 1, SMK Jakarta Wisata 1, SMKN 57 Jakarta, dan SMKN 28 Jakarta.
   Group *tour* menghadirkan TP PKK Kelurahan Karang Anyar, Jakarta Pusat untuk berkunjung ke pameran. Jumlah peserta *group tour* sebanyak 70 orang yang terbagi dalam dua hari kunjungan, yaitu pada hari kedua dan ketiga pelaksanaan GPN.

9. Aneka lomba, games, doorprize, dan hiburan

   Lomba-lomba yang diselenggarakan selama kegiatan berlangsung adalah:
   a. Lomba Mading 3D tingkat SMU yang diikuti oleh 7 (tujuh) tim dari 4 sekolah, yaitu :
      - 2 Tim dari SMAN 89 Jakarta
      - 2 Tim dari SMK Kebon Jeruk Jakarta
      - 1 Tim dari SMAN 107 Jakarta
      - 2 Tim dari SMAN Cipta Karya Jakarta

      Pemenang Lomba Mading 3D sebagai berikut :
      Juara 1 : SMAN 89 Jakarta
      Juara 2 : SMAN 89 Jakarta
      Juara 3 : SMAN 107 Jakarta
      Masing-masing pemenang pendapatkan hadiah berupa dukungan pembinaan, piagam untuk setiap regu dan *goodybag* untuk setiap peserta.

   b. Lomba Membuat Ketupat dengan peserta dari pengunjung pameran.

   Untuk menarik pengunjung, setiap hari digelar hiburan di panggung acara. Pada hari kedua dimeriahkan oleh penampilan T-Koes Band dari Jakarta. Sedangkan untuk memberi apresiasi kepada pengunjung, setiap hari selama pameran diberikan door prize baik melalui pengundian maupun permainan-permainan.

BAB VI. SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)
BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2018

A. Struktur Organisasi SPI

Badan Ketahanan Pangan Telah membentuk Tim Satlak-PI Badan Ketahanan Pangan.

1. Tim Satlak PI Badan Ketahanan Pangan, terdiri dari Eselon I sebagai Penanggung Jawab, sedangkan Eselon II, III, IV, dan staf senior ditetapkan sesuai dengan kriteria dan kompetensinya. Struktur organisasi Tim Satlak-PI Badan Ketahanan Pangan dapat dilihat pada bagan berikut ini:

2. Tugas Tim Satlak-PI Badan Ketahanan Pangan

Tim Satlak PI Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

a. Menyusun Rencana Kerja Sistem Pengendalian Intern (SPI) setiap awal tahun anggaran;

b. Membimbing, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

c. Menyusun Pedoman Umum, Petunjuk Teknis, Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Badan Ketahanan Pangan;

d. Melakukan Sosialisasi Penerapan Pedoman Umum, Petunjuk Teknis, dan SOP Sistem Pengendalian Intern (SPI) Badan Ketahanan Pangan di Pusat dan Daerah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan;

e. Melakukan *"in house training"* kepada seluruh staf Badan Ketahanan Pangan perihal pemahaman dan cara pandang implementasi SPI di lingkungan Badan Ketahanan Pangan;

f. Melakukan evaluasi, penilaian, reviu, dan melaporkan hasil penilaian Sistem Pengendalian Intern (SPI) lingkup Badan Ketahanan Pangan.

B. Pelaksanaan SPI dilingkup Badan Ketahanan Pangan

1. Mereviis SK Tim Satlak PI Badan Ketahanan Pangan

   Badan Ketahanan Pangan merevisi SK Tim Satlak PI, Hal ini disebabkan karena adanya perubahan organisasi/*nomenklatur* BKP dan keanggotaan Tim Satlak yang memasuki masa purnabakti. Terkahir kali dirubah yaitu SK Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 11/KPTS/OT.050/J/02/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 20/KPTS/OT.050/K/03/2016 Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Lingkup Badan Ketahanan Pangan.

2. Dalam rangka menyusun Rencana Tindak Perbaikan (RTP) kegiatan prioritas BKP:

   a. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);
   b. Pengembangan Pangan Pokok Lokal (P3L);
   c. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM);
   d. Kawasan Mandiri Pangan (KMP); dan
   e. Pengadaan Barang dan Jasa serta Perjalanan Dinas.

3. Badan Ketahanan Pangan mengadakan **Workshop Sistem Pengendaian Intern (SPI) Badan Ketahanan Pangan** pada tanggal 3 - 5 April 2018, di Bogor - Jawa Barat, dibuka oleh Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, dan dihadiri oleh Penangung Jawab Kegiatan Badan Ketahanan dengan menghadirkan narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
   Berdasarkan arahan dari Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan) dan materi dari narasumber serta pendalaman kegiatan prioritas Badan Ketahanan Pangan (BKP) dapat dilaporkan beberapa hal sebagai berikut:

   1) Hasil Validasi Penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas penilaian tingkat maturitas atau kematangan SPI Kementerian Pertanian Tahun 2017 memperoleh nilai sebesar **2,95** atau kategori **"Berkembang"** atau level 2.

   2) Target tahun 2018, tingkat maturitas atau kematangan SPI Kementerian Pertanian dapat memperoleh nilai minimal sebesar 3,0 atau kategori **"Terdefinisi"** atau level 3.

3) Penilaian tingkat maturitas SPIP menggunakan 5 (lima) unsur SPIP yaitu: (a) Lingkungan Pengendalian; (b) Penilaian Risiko; (c) Kegiatan Pengendalian; (d) Informasi dan Komunikasi; (e) Pemantauan Intern sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

4) BPKP dijadwalkan akan melakukan penilaian tingkat kematangan SPIP Kementerian Pertanian pada akhir bulan April 2018.

5) Sebelum BPKP melakukan penilaian, Unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian melakukan penyusunan Rencana Tindak Perbaikan (RTP) kegiatan utama, selanjutnya Itjen Kementan melakukan verifikasi terlebih dahulu dan hasil penilaian tersebut dilakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi.

6) Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai tingkat maturitas atau kematangan SPI Kementerian Pertanian adalah lain:

   a) Diperlukan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam pelaksanaan SPIP;
   b) Penyusunan RTP secara mandiri atas kegiatan utama;
   c) Eselon II di masing-masing unit kerja agar menyusun minimal 1 (satu) RTP kegiatan utama dan untuk Unit Eselon I menentukan satu kegiatan utama yang telah disusun oleh Unit Eselon II.
   d) Dokumentasi kegiatan SPI tersusun dengan baik.

7) Telah disusun RTP untuk kegiatan prioritas BKP: (a) Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); (b) Pengembangan Pangan Pokok Lokal (P3L); (c) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM); (d) Kawasan Mandiri Pangan (KMP). Disamping itu, disusun pula RTP Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa serta Perjalanan Dinas.

8) Diharapkan dokumen pendukung yang sesuai dengan komponen maturitas SPIP secepatnya diselesaikan. Dokumentasi kegiatan strategis antara lain:

   a. Pedoman-pedoman/Juklak/Juknis
   b. SOP
   c. SK
   d. Kebijakan-kebijakan yang dituangkan secara tertulis
   e. SPI Kegiatan-kegiatan strategis
   f. Laporan-laporan kegiatan

4. Analisis Risiko Pada Kegiatan Utama Badan Ketahanan Pangan

Badan Ketahanan Pangan telah menyusun Analisis Risiko Kegiatan Utama Badan Ketahanan Pangan, antara lain: (a) Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); (b) Pengembangan Pangan Pokok Lokal (P3L); (c) Pengembangan Usaha Pangan

Masyarakat (PUPM); (d) Kawasan Mandiri Pangan (KMP). Disamping itu, disusun pula RTP Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa serta Perjalanan Dinas (dapat dilihat pada lampiran).

5. Penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Kementerian Reformasi Birokrasi

Dalam rangka penilaian WBK/WBBM oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat 3 (tiga) tahap penilaian yaitu: ***pertama***, Badan Ketahanan Pangan menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan SPIP di lingkup Badan Ketahanan Pangan. Kedua, melakukan pengisian kuesioner maturitas SPIP secara *online* untuk mengisi formulir wawancara untuk Pimpinan dan Staf. Tujuan pengisian tersebut, untuk mengsinkronkan pelaksanaan SPI antara pimpinan dan staf. Ketiga, wawancara terhadap Pimpinan dan Staf.

6. Penilaian Maturitas SPIP oleh Inpektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan Badan Pengawasan Keungan dan Pembangunan (BPKP)

Dalam rangka dilakukan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2018 lingkup Kementerian Pertanian oleh Tim Inspektorat Jenderal - Kementerian Pertanian beserta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maka Badan Ketahanan Pangan mempersiapkan eviden terkait penilaian.

7. Berkoordinasi dengan Satuan Kerja (Satker) Daerah

Dalam rangka meningkatkan dan memantapkan SPIP Badan Ketahanan Pangan baik di Pusat maupun daerah, Badan Ketahanan Pangan menghadiri Workshop SPIP Lingkup Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 12 - 13 September 2018, di Ruang Pertemuan UPTD Balai Pelatihan dan Pendidikan Koperasi Jalan S. Parman No. 211 Ulak Karang Padang, Sumatera Barat. Workshop dibuka oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat dan dihadiri oleh Dinas/Unit Kerja Ketahanan Pangan seluruh kabupaten se-Provinsi Sumatera Barat. Adapun materi workshop antara lain; (a) Gambaran Umum SPIP oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat; (b) Gambaran Pelaksanaan SPIP Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian oleh Perwakilan Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan (BKP); dan (c) gambaran Maturitas SPIP

Provinsi di Sumatera Barat oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat (Bawasda).

BKP menyampaikan gambaran pelaksanaan SPIP dilingkup BKP antara lain:

a. Pelaksanaan SPIP di lingkup BKP mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum SPIP Lingkup Kementerian Pertanian dan SK Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tim Satuan Pelaksana Pengendali Intern BKP.

b. Pelaksanaan organisasi dan kegiatan BKP menggunakan 5 unsur SPIP yaitu: Lingkungan Pengendalian, Pengendalian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan kegiatan pengendalian.

c. BKP telah menyusun penilaian risiko terhadap kegiatan Bantuan Pemerintah (Banper) antara lain kegiatan: (1) Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); (2) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM); (3) Kawasan Mandiri Pangan; dan (4) Pengembangan Pangan Pokok Lokal.

d. Maturitas SPIP adalah tingkat kematangan atau kesempurnaan atas penyelenggaraan SPIP sebagaiama diatur dalam PP Nomo 60 Tahun 2008. Penilaian skor maturitas SPIP Kementerian Pertanian adalah 2,95 atau dengan karakterikstik berkembang dan BKP memperoleh skor maturitas SPIP sebesar 3,07 atau dengan karakteristik Terdefinisi yang artinya BKP telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun, evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Untuk meningkatkan maturitas SPIP BKP kedepan adalah evaluasi formal, berkala dan terdokumentasi. Upaya peningkatan Maturitas SPIP BKP dari kategori “Terdefinisi” menjadi “Terkelola dan Terukur” :

    1) Menyusun Rencana Tindak Pelaksanaan (RTP) secara mandiri kegiatan Utama BKP.

    2) Menyusun rancang kendali risiko (Register Risiko) Banper kegiatan Prioritas BKP.

    3) Melengkapi dokumen pelaksanaan kegiatan dan dokumen evaluasi atas pengendalian intern.

4) Dukungan Dinas/Unit Kerja Ketahanan Pangan seluruh provinsi untuk melaksanakan SPIP (SK Tim Satlak PI, SOP Kegiatan, Menyusun Penilaian Risiko dan menyusun RTP dan Register Risiko Kegiatan Banper)

e. Beberapa pertanyaan dan masukan yang disampaikan oleh peserta workshop sebagai berikut:

1) Perlunya pendalaman terhadap penyusunan penilaian risiko pada kegiatan Banper kegiatan KRPL mulai dari tahap: definisi kegiatan, register risiko, analisis risiko, peta risiko sampai dengan rancang kendali.

2) Aplikasi krisna menguraikan pemberian bantuan dana DAK untuk kegiatan prioritas nasional, karena bersifat kegiatan prioritas nasional diharapkan daerah tidak perlu lagi mengisi aplikasi krisna dan mengikuti verfikasi administrasi untuk memperoleh bantuan dana DAK.

3) Peserta workshop memberikan apresiasi pada pendalaman materi penyusunan penilaian risiko pada kegiatan Banper kegiatan KRPL, peserta memperoleh gambaran bagaimana penyusunan Rencana Tindak Pelaksanaan (RTP) kegiatan di daerah dan pelaksanaan kegiatan di daerah.

4) Terdapat permasalahan terhadap kegiatan KMP bahwa Juknis kegiatan KMP terlambat sampai kepada kelompok, sehingga RUK kelompok tidak sesuai dengan Juknis. Daerah mengharapkan usaha kelompok didasarkan pada potensi daerah masing-masing. Ini merupakan bahan masukan kepada pusat agar kedepan penyusunan Juknis KMP agar ditetapkan tepat waktu dan usaha kelompok dapat disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing.

8. Pertemuan WBK WBBM lingkup Badan Ketahanan Pangan

Dalam rangka membangun WBK / WBBM serta peningkatan motivasi kinerja pegawai Badan Ketahanan Pangan (BKP) sesuai PermenPAN-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Zona Integritas, BKP melaksanakan Forum WBK/WBBM pada tanggal 2 - 3 Desember 2018, di Novotel Hotels dan Resorts Bogor – Jawa Barat. Forum WBK/WBBM dibuka oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan dihadiri oleh Pejabat Eselon II, III, IV, Pejabat Pembuat Komitmen dan seluruh staf Badan Ketahanan Pangan. Materi WBK/WBBM antara lain: (1) “Membangun WBK/WBBM di Lingkungan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian” disampaikan oleh

Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Heni Nugraha); (2) “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Badan Ketahanan Pangan” oleh Sekretaris Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian; (3) “Protani: Membangun Integritas Program dan Layanan Pertanian Menuju Industrialisasi 4.0” oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Justan Riduan Siahaan, Ak., M.Acc., CA., QIA); (4) “Membangun motivasi kinerja pegawai Badan Ketahanan Pangan” oleh Motivator (Legisan Samtafsir, M.Ag).

Pada kesempatan tersebut, Kepala BKP memberikan arahan dan melakukan Pencanangan Zona Integritas di lingkungan BKP yang ditandai dengan penyematan Pin WBK/WBBM kepada Anggota Tim Zona Integritas BKP. Hal ini sebagai bukti dan komitmen Pimpinan BKP untuk menerapkan Zona Integritas di lingkungan BKP.

Beberapa hal penting yang dihasilkan dari Forum WBK/WBBM sebagai berikut:

a. Dalam rangka menindaklanjuti PermenPAN-RB Nomor 52 Tahun 2014, BKP berkomitmen melaksanakan pencanangan Zona Integritas di lingkungan BKP, maka Kepala Badan Ketahanan Pangan menetapkan SK Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 10/KPTS/OT.050/J/02/2018 tentang Tim Penetapan Pelaksana Pembangunan Zona Integritas.

   Tim Zona Integritas BKP, terdiri dari: (1) Penanggung Jawab: Kepala Badan Ketahanan Pangan; (2) Ketua: Sekretaris Badan Ketahanan Pangan; (3) Sekretaris: Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan; (4) Anggota: Kepala Pusat lingkup BKP; (5) Kepala Bagian lingkup Sekretariat Badan; (6) Kepala Subbagian lingkup Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

   Tim Zona Integritas memiliki tugas: (1) Memberikan dukungan pada unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan (2) Membangun koordinasi, penyiapan dokumen fasilitas monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan Ketahanan Pangan.

b. Hasil penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2017, BKP memperoleh skor penilaian **WBK/WBBM** sebesar **75,53** atau **peringkat ke-8**, sedangkan hasil evaluasi atas implementasi **SAKIP** memperoleh nilai **89,40** dengan kategori “**A**” atau predikat **Memuaskan** dan merupakan nilai tertinggi di lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk penilaian sementara Maturitas SPIP

BKP tahun 2018 sebesar **3,90** dan WBK/WBBM BKP Tahun 2018 sebesar **78,52**.

c. Diharapkan kedepan, seluruh Unit Kerja Eselon II Lingkup BKP dapat terus berkomitmen, menumbuhkan suasana kompetisi, meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik baik secara langsung maupun melalui website, serta terus-menerus melakukan inovasi, sehingga dapat meningkatkan penerapan dan pelaksanaan WBK/WBBM di lingkup BKP sebagai upaya mewujudkan komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan BKP guna mendukung dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kementerian Pertanian sehingga berdampak terhadap peningkatan tunjungan kinerja (TUKIN) Kementerian Pertanian.

d. Kementerian PAN dan RB telah melakukan penilaian 11 (sembelas) Unit Kerja Kementerian Pertanian untuk memperoleh predikat WBK/WBBM Nasional dan penganugerahkan WBK secara nasional akan diumumkan pada Peringatan Hari Anti Korupsi pada tanggal 9 Desember 2018.

9. Forum Nasional SPIP Lingkup Kementerian Pertanian

Badan Ketahanan Pangan menghadiri Pertemuan Forum Nasional Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Pertanian Tahun 2018 bertemakan *"Harmoni Bersama SPI Wujudkan Kesejahteraan Petani"* yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada tanggal 4 – 6 Desember 2018, di The Margo Hotel, Depok – Jawa Barat. Forum Nasional dibuka oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, dan dihadiri oleh Eselon I Kementerian Pertanian dan perwakilan dari Unit Kerja/UPT/Satker lingkup Kementerian Pertanian seluruh Indonesia. Materi Forum antara lain: (1) Maturitas SPIP oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian; (2) Strategi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Kementerian Pertanian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); (3) SPI Pengadaan Barang dan Jasa oleh Ketua ULP Kementerian Pertanian; (4) Hasil Penilaian Maturitas Maturitas SPI Lingkup Kementerian Pertanian oleh Inspektur Investigasi; (5) *Sharing Experience* Pengawalan/Pembinaan SPI oleh Inspektur IV; (6) Pemaparan SPI pada kegiatan UPSUS Lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Badan Litbang Pertanian (7) Pemaparan SPI kegiatan UPSUS Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) dan Badan SDM Pertanian.

Beberapa hal penting yang diperoleh dari pertemuan forum nasional sebagai berikut:

a. Semua Eselon I Kementerian Pertanian sepakat dan telah menadatangani Pakta Protani yaitu sepakat untuk menyelenggarakan atau melakukan SPI dan Inspektur IV konsisten untuk melaksanakan SPI. Perlu disampaikan bahwa SPI membutuhkan komitmen yang tinggi, baik pada tingat pimpinan maupun pada tingkat staf.

b. Arahan Presiden RI bahwa penilaianj tingkat maturitas SPIP kementerian/lembaga (K/L) tahun 2018 harus mencapai level 3 atau terdefinisi.

c. Hasil penilaian tingkat maturitas SPI di lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2017 secara umum seluruh Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian memperoleh skor 3 yang artinya adalah terdefinisi. Secara keseluruhan skor penilaian maturitas SPIP Kementerian Pertanian adalah 2,95. Diharapkan tahun 2018, Kementerian Pertanian dapat meningkatan Penilaian Maturitas SPIP Kementerian Pertanian menjadi level 3.

d. Hasil Penilaian Maturitas SPIP tahun 2018 yang dilakukan oleh Investigasi Kementerian Pertanian, untuk skor tertinggi diperoleh oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang) dengan skor 4,46. Sedangkan skor terendah adalah Direktorat Jenderal Hortikultura dengan skor 3,66. Untuk penilaian maturitas SPIP Badan Ketahanan Pangan adalah 3,930 atau termasuk dalam kategori terdefinisi.

e. Kementerian PAN RB telah melakukan penilaian WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Pertanian, terdapat 5 (lima) Unit Kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM Nasional dan akan diumumkan pada peringatan Hari Anti Korupsui pada tanggal 9 Desember 2018.

f. Gambaran umum pelaksanaan SPI pada kegiatan UPSUS Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Litbang) Kementerian Pertanian :

   1) Lingkungan Pengendalian;

   2) Penilaian Risiko menguraikan: 1) definisi kegiatan UPSUS; 2) Membuat proses bisnis; 3) Membuat Peta Risiko UPSUS; 4) Peta Risiko;

   3) Kegiatan Pengendalian, salah satunya adalah menindaklanjuti

Rapim A dengan melaksanakan Rapim B untuk monitoring, evaluasi dan *reviu* hal-hal yang dibahas dalam Rapim A dan kegiatan lainnya.

4) Informasi dan Komunikasi dalam bentuk: pencatatan menggunakan *e-monev* dan pelaporan menggunakan *sms center*.

5) Pemantauan terdiri dari pemantauan berkelanjutan dan pemantauan terpisah. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan-kegiatan ytang dipantau oleh Menteri Pertanian seperti: kegiatan UPSUS dan kegiatan yang dipantau oleh Kepala Badan.

g. Pada sesi diskusi kelompok, BKP termasuk ke dalam kelas C bersama Unit Kerja/UPT/Satker lingkup Kementerian Pertanian lainnya. Pada kesempatan ini membahas pelaksanaan SPIP, khususnya penilaian risiko kegiatan di Unit Kerja/UPT/Satker Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari yang meliputi : (1) Definisi kegiatan; (2) Membuat Proses Bisnis; (3) Register Risiko; (4) Peta Risiko; dan (5) membuat penanganan risiko.

10. MATURITAS SPIP DAN WILAYAH BEBAS DAR KORUPSI (WBK) / WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) LINGKUP BADAN KETAHANAN PANGAN

A. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM)

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya 3 (tiga) sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan public

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dilingkungan Instansi Pemerintah. Permenpan RB dapat digunakan sebagai pedoman pembangunan zona integritas bagi unit-unit kerja pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di lingkup Kementerian Pertanian untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja/satuan kerja yang berpotensi sebagai unit kerja/satuan kerja berpredikat menuju WBK/menuju WBBM.

Berdasarkan Surat Tugas dari Inspektorat Investigasi - Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor : B.261/PW.180/G.6/09/2017 tanggal 22 September 2017 perihal Penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) - Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2017 Lingkup Eselon I Kementan, BKP mengumpulkan dan melengkapi data dan dokumen pendukung yang diperlukan untuk penilaian tersebut.

Dari hasil penilian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) - Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) diperoleh beberapa upaya yang harus dilakukan untuk mencapai WBK-WBBM antara lain:

1) Melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik
2) Mekukan sosialisasi dan pembinaan terhadap unit kerja dan individu pegawai secara kontinyu (berkelanjutan);

3) Melakukan pengawasan secara konsisten dan obyektif;

4) Memberikan reward dan punishment secara adil. Kunci keberhasilan : Ciptakan Pribadi Bebas dari Korupsi (PBK).

B. Indikator proses penilaian WBK/WBBM

NO	UNSUR/KOMPONEN INDIKATOR PROSES	BOBOT (%)
1	Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas	5
2	Pemenuhan Kewajiban LHKPN	6
3	Pemenuhan Akuntabilitas Kinerja	6
4	Pemenuhan Kewajiban Laporan Keuangan	5
5	Penerapan Kebijakan Disiplin PNS*)	5
6	Penerapan Kode Etik Khusus	4
7	Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik*)	6
8	Penerapan Whistleblower System Tindak Pidana Korupsi	6
9	Pengendalian Gratifikasi	6
10	Penanganan Benturan Kepentingan (Conflicts of Interest)	6
11	Kegiatan Pendidikan/Pembinaan dan Promosi Anti Korupsi	6
12	Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK/KPK/APIP	5
13	Penerapan Kebijakan Pembinaan Purna Tugas*)	4
14	Penerapan Kebijakan Pelaporan Transaksi Keuangan yang Tidak Sesuai dengan Profil oleh PPATK	6
15	Promosi Jabatan Secara Terbuka*)	3
16	Rekrutmen Secara Terbuka	3
17	Mekanisme Pengaduan Masyarakat	6
18	E-Procurement	6
19	Pengukuran Kinerja Individu *)	3
20	Keterbukaan Informasi Publik	3

C. Indikator hasil penilaian WBK/WBBM

		NILAI		
		WBK	***WBBM***	
1	Nilai indeks integritas*)	≥7,0	≥7,5	Skala 0-10 Berdasarkan instrumen KPK
2	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	≥550	≥750	Permenpan Nomor 38 Tahun 2012
3	Persentase kerugian negara (KN) yang belum diselesaikan (%)	0%	0%	Dalam 2 tahun terakhir. Berdasarkan penilaian APIP, BPK atau Keputusan Aparat Penegak Hukum (APH)
4	Persentase maksimum temuan in-efektif (% anggaran)	3%	2%	Dalam 2 tahun terakhir Berdasarkan penilaian APIP dan BPK
5	Persentase maksimum temuan in-efisien (% anggaran)	5%	3%	Dalam 2 tahun terakhir. Berdasarkan penilaian APIP dan BPK
6	Persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin karena penyalahgunaan keuangan	1%	0%	Dalam 2 tahun terakhir 0% jika jumlah pegawai <100 orang; ≤1% jika jumlah pegawai ≥100 orang (utk WBK)
7	Persentase pengaduan masyarakat yang belum ditindaklanjuti **)	5%	0%	Pengaduan yang telah >60 hari
8 *)	Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman karena tindak pidana korupsi Penerapannya menunggu persetujuan KPK;	0%	0%	Dalam 2 tahun terakhir berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

D. Penilaian WBK/WBBM Lingkup Badan Ketahanan Pangan

Hasil Penilaian WBK/WBBM Tahun 2018 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas penetapan Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM sesuai dengan Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014, Badan Ketahanan Pangan memperoleh skor sebesar sebesar 78,52 dengan perincian penilaian sebagai berikut:

NAMA INSTANSI :Badan Ketahanan Pangan							
NO		KOMPONEN/SUB KOMPONEN	SKOR	PILIHAN JAWABAN	JAWABAN	NILAI	%
A		B	C	D	E	F	G
INDIKATOR PROSES			60				
I		MANAJEMEN PERUBAHAN	5,0				
	1	Tim Kerja (1)	1,0			0,75	
	2	Dokumen Rencana Pembangunan ZI (1)	1,0			1,00	
	3	Pemantauan dan Evaluasi pembangunan WBK/WBBK (2)	2,0			0,83	
II		PENATAAN TATALAKSANA (5)	5,0				
	1	Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5)	1,5			1,25	
	2	E- Office (2)	2,0			1,75	
3		Keterbukaan informasi Publik (1.5)	1,5			1,50	
III		PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)	15,0				
	1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan	2,0			2,00	
	3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3)	3,0			3,00	
	4	Penetapan Kinerja Individu (4)	4,0			4,00	
	5	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (3)	3,0			2,25	
	6	Sistem Informasi kepegawaian (1)	1,0			1,00	

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	SKOR	PILIHAN JAWABAN	JAWABAN	NILAI	%
A	B	C	D	E	F	G
IV	PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)	10,0				
1	Keterlibatan Pimpinan (5)	5,0			5,00	
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)	5,0			4,84	
V	PENGUATAN PENGAWASAN (15)	15,0				
1	Pengendalian Gratifikasi (3)	3,0			2,25	
2	Penerapan SPIP (3)	3,0			2,25	
3	Pengaduan Masyarakat (3)	3,0			2,25	
4	Whistle Blowing System (3)	3,0			2,50	
5	Penanganan Benturan Kepentingan (3)	3,0			0,00	
VI	PENINGKATAN KUALITAS PELAY ANAN PUBLIK (10)	10,0				
1	Standar Pelayanan (3)	3,0			1,88	
2	Budaya Pelayanan Prima	3,0			2,25	
3	Penilaian Kepuasan Pelayanan (4)	4,0			2,67	
					47,22	

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	SKOR	PILIHAN JAWABAN	JAWABAN	NILAI	%
A	B	C	D	E	F	G
B. INDIKATOR HASIL		**40**				
I	PEMERINTAHAN YANG BERSIH D AN BEBAS KKN	20,0				
1	Nilai survey Persepsi Korupsi (survei Eksternal) (15)	15	4	2,96	11,10	
2	Persentase Temuan hasil pemeriksa an (internal dan Eksternal yang ditin daklanjuti (5)	5	100	100	5	
II	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)	20,0				
1	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (S urvei Eksternal) (20)	20	4	3,04	15,2	
	Nilai Prosesntase				31,30	
	NILAI TOTAL				**78,52**	

E. Penilaian Maturitas SPIP Badan Ketahanan Pangan

Untuk penilaian sementara Maturitas SPIP BKP tahun 2018 sebesar 3,90 termasuk dalam kategori terdefinisi dan WBK/WBBM BKP Tahun 2018 sebesar 78,52.

F. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas temuan Sistyem Pengendalian Intern

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) adalah kegiatan yang dilakukan pejabat yang diperiksa atas rekomendasi yang diberikan BPK hasil dari pemeriksaan. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan bahwa setiap pejabat yang diperiksa dan/atau bertanggung jawab wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP BPK, dan menjadi salah satu dasar penilaian kinerja instansi, meskipun dalam pelaksanaannya TLHP ini belum diterapkan secara optimal.

Rekomendasi yang diberikan oleh BPK biasanya dikarenakan laporan keuangan yang belum andal dan berkualitas, diantaranya Sitem Pengendalian Intern (SPI) yang masih lemah.

Dalam Undang-undang No. 15 tahun 2004 pasal 20 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menjabarkan sebagai berikut:

1. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
2. Pejabat wajib memberi jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
3. Jawaban atau penjelasan atas rekomendasi disampaikan selambat – lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
4. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang kepegawaian.

G. PRESTASI SPI BADAN KETAHANAN PANGAN

BKP telah melaksanakan kegiatan SPI sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan Kementerian Pertanian, dan dibentuknya Tim Satlak PI BKP. Berikut ini penghargaan yang dicapaik oleh Tim Satlak PI BKP :

1. Tahun 2010, SPI BKP memperoleh Penghargaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian kategori **"Sangat Handal"** lingkup Kementerian Pertanian.
2. Tahun 2011, SPI BKP memperoleh Penghargaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian kategori "**Handal Peringkat ke-2"** lingkup Kementerian Pertanian.
3. Tahun 2013, SPI BKP memperoleh penghargaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian kategori **"Handal Peringkat ke-2"** lingkup Kementerian Pertanian.
4. Tahun 2016, maturitas SPIP dilingkup BKP memperoleh penilaian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan **skor 3,07** yaitu kategori **"Teridentifikasi"** artinya telah melaksanakan praktik pengendalian intern dengan baik.
5. Tahun 2017, BKP memperoleh penghargaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian kategori Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) **"Peringkat ke-8"** lingkup Kementerian Pertanian.

BAB VII
PERMASALAHAN, KENDALA, UPAYA DAN TINDAK LANJUT

1. Permasalahan

Dalam rangka mewujudkan diversifikasi pangan terkait erat dengan perilaku masyarakat/manusia. Secara umum hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan diversifikasi pangan adalah: (1) pendapatan masyarakat masih rendah dibandingkan harga kebutuhan pangan secara umum, sehingga menurunnya daya beli masyarakat disebabkan oleh kenaikan harga pangan daripada masalah ketersediaan; (2) konsumsi beras per kapita cenderung turun tetapi konsumsi gandum (terigu) cenderung meningkat; (3) terbatasnya teknologi pengolahan pangan lokal; (4) kampanye dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan masih kurang; (5) kualitas konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi seimbang dan aman; (6) terdapatnya persepsi “belum makan kalau belum makan nasi” yang salah dalam masyarakat; (7) produksi dan pemanfaatan sumber pangan lokal seperti: aneka umbi, jagung, dan sagu masih rendah; dan (8) bencana alam dan perubahan iklim global yang mempengaruhi produksi pangan.

Berdasarkan aspek ketahanan pangan, permasalahan dalam capaian kinerja program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat adalah :

1.1 Aspek Ketersediaan Pangan

a. Produksi dan ketersediaan pangan nasional belum dapat mengimbangi kebutuhan.
b. Jumlah permintaan pangan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, dan berkembangnya penggunaan pangan seiring maraknya perkembangan pariwisata, hotel, dan restoran.
c. Adanya persaingan penggunaan bahan pangan untuk bio energi dan pakan ternak.
d. Kerawanan pangan disebabkan karena kemiskinan, terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar pedesaan, rentannya kesehatan masyarakat dan sering terjadinya bencana alam.

1.2 Aspek Keterjangkauan Pangan

a. Sifat produksi yang musiman, berpengaruh terhadap harga pangan.
b. Melonjaknya harga pangan dunia karena ketergantungan terhadap ekspor pangan tertentu.
c. Terbatasnya dan/atau kurang memadainya sarana dan prasarana transportasi, kondisi iklim yang tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan.
d. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berdampak terhadap melonjaknya ongkos angkut, mengakibatkan aksesibilitas konsumen secara ekonomi menurun.
e. Walaupun pemerintah telah menjamin kecukupan stok beras, namun kecukupan stok pangan tersebut tidak dapat menjamin stok pangan di pasar.

1.3 Aspek Konsumsi Pangan

a. Keterbatasan kemampuan ekonomi atau daya beli masyarakat;
b. Keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi, serta teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra, dan daya terima;
c. Adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, karena pengaruh globalisasi industri pangan siap saji, dan berkurangnya produksi sumber pangan lokal;
d. Adanya pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
e. Berbagai kasus gangguan kesehatan manusia akibat mengkonsumsi pangan yang tidak aman;
f. Belum efektifnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan karena sistem yang dikembangkan, Sumber Daya Manusia (SDM), serta penerapan saksi yang tegas;
g. Koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal;
h. Kurangnya kesadaran pihak pengusaha/pengelola pangan untuk menerapkan peraturan/standar yang telah ada.

1.4 Dukungan Kelembagaan dan Manajemen Ketahanan Pangan.

a. Perubahan arah kebijakan yang berdampak pada *refokusing* kegiatan, sasaran dan anggaran.
b. Rotasi pimpinan dan staf Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pegawai sering.
c. Komitmen dan langkah nyata pemerintah daerah masih rendah untuk membangun ketahanan pangan berkelanjutan.
d. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan program ketahanan pangan kurang optimal. baik secara *online* dan manual.
e. Hasil analisis ketahanan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program.
f. Belum optimalnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga fungsional koordinator dalam penanganan ketahanan pangan di daerahnya;

2. **Hambatan dan kendala** yang dihadapi adalah :

a. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan POK baik di pusat maupun daerah.
b. Terlambatnya penerbitan SK Pengelola Keuangan (Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran.
c. Mutasi pegawai atau pejabat pengelola keuangan, pegawai pindahan kurang memahami mekanisme pencairan anggaran dan adanya kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran.
d. Mutasi dan serah terima jabatan tidak disertai dengan serah terima berkas/dokumen pelaksanaan kegiatan.
e. Keterlambatan proses adminsitrasi di kabupaten/kota yang masuk dana Dekonsentrasi.
f. Satuan harga yang diterapkan sering tidak sesuai kebutuhan riil.
g. Sasaran tidak sesuai dengan Pedoman.
h. Infrastruktur dan kondisi alam.
i. Kurang optimalnya partisipasi aparat provinsi dan kabupaten/kota dalam

pembinaan dan pemenuhan kebutuhan peralatan yang diperlukan kelompok unit usaha kecil untuk pengembangan tepung-tepungan sebagai bahan baku olahan pangan lokal di lokasi penerima manfaat.

3. **Upaya dan Tindak Lanjut**

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan upaya dan tindak lanjut sebagai berikut:

a. Badan Ketahanan Pangan Pusat telah menghimbau kepada Badan/Dinas/Instansi/Unit Kerja Ketahanan Pangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
b. Badan Ketahanan Pangan berupaya memberikan informasi dan sosialisasi tentang perubahan *nomenklatur* di daerah.
c. Pendampingan dan pembinaan dalam rangka mengawal pelaksanaan kegiatan dan proses administrasi dengan membentuk Tim Pembinaan dalam rangka Percepatan Kegiatan dan Anggaran Ketahanan Pangan.
d. Fasilitasi kepada kelompok penerima manfaat untuk pengembangan bisnis pangan lokal dan makanan tradisional.
e. Mendorong peran aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal.
f. Peningkatan kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan institusi yang menangani Ketahanan Pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan (*stakeholders)* lainnya.
g. Sinkronisasi kebijakan baik antar kementerian/lembaga maupun dengan pihak swasta yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing.
h. Mengembangkan dan menyempurnakan kegiatan prioritas seperti: KRPL diperkuat dengan OPAL, Kawasan Mandiri Pangan ditingkatkan menjadi Pengembangan Korporasi Usaha, Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia (TTI) menumbuhkan lebih banyak TTIC di daerah strategis dan mengaktifkan lumbung pangan masyarakat.

i. Mengembangkan industri pangan nusantara untuk diversifikasi pangan, dimaksudkan untuk menyediakan berbagai tepung selain gandum yang dapat dijadikan bahan dasar pangan oleh masyarakat umum dan umkm pangan
j. Mendorong upaya kampanye, promosi, sosialisasi, gerakan secara terstruktur dan komprehensif guna mempercepat terjadinya diversifikasi pangan.
k. Meningkatkan peran swasta dalam memanfaatkan keragaman sumberdaya lokal.
l. Mengembangkan bisnis dan industri pangan lokal, melalui: fasilitasi UMKM untuk pengembangan bisnis pangan lokal, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumberdaya lokal dan advokasi, sosialisasi dan penerapan standar keamanan dan mutu pangan bagi pelaku usaha pangan terutama usaha rumah tangga dan UMKM.
m. Meningkatkan investasi agroindustri pangan berbasis pangan lokal dilakukan melalui pengembangan bisnis pangan lokal bagi UKM, pengembangan kemitraan dengan dunia usaha, pengembangan gerai atau *outlet* pangan lokal, pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal (bekerja sama dengan Balitbang dan Perguruan Tinggi) dan memastikan peningkatan keanekaragaman pangan sesuai karakteristik daerah.